



BPMP
PROVINSI
KALIMANTAN UTARA



BPMP KALTARA

LAKIN 2024

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan
Dasar, dan Pendidikan Menengah
Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara

Disusun oleh: Tim LAKIN BPMP Prov. Kalimantan Utara

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2024 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Utara tahun 2024.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024. Selain itu, tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan, yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja kedepannya.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih

Tanjung Selor, 20 Januari 2025

Kepala

BPMP Provinsi Kalimantan Utara

BALAI PENJAMINAN
MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI
KALIMANTAN UTARA

Andrianus Hendro Triatmoko, S.T., M.T

NIP 198004182903121004

Daftar Isi

i Halaman Sampul

Lakin BPMP Kaltara 2024

ii Kata Pengantar

oleh Andrianus Hendro Triatmoko, S.T., M.T.

iii Daftar Isi

Lakin BPMP Kaltara 2024

iv Ikhtisar Eksekutif

Lakin BPMP Kaltara 2024

Bab I Pendahuluan

1

Gambaran Umum | Dasar Hukum Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Isu-isu Strategis dan Pemasalahan

Bab II Perencanaan

10 Kinerja

Visi dan Misi BPMP Provinsi Kalimantan Utara | Tujuan Strategis

Bab III Akuntabilitas

15 Kinerja

Capaian Kinerja | Realisasi Anggaran

221 Bab IV Penutup

Kesimpulan



Ikhtisar Eksekutif



Piagam Penghargaan Sekjen
KemendikbudRistek
Anugrah keterbukaan informasi publik
Thundengan kategori cukup informatif
Tahun 2022



Piagam Penghargaan Sekjen Kemdikbud Ristek
Anugrah keterbukaan informasi publik
Thundengan kategori Menuju informatif Tahun
2023



Piagam Penghargaan Dirjen PAUD Dikdasmen
Atas keberhasilan membangun ZI WKB tahun
2022 dengan capaian nilai 78,11



Piagam Penghargaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
sebagai Terbaik 1 atas Nilai Kinerja Keuangan pada
Kategori UPT dengan raihan Skor 99,67 Tahun 2019



Piagam Penghargaan dari Sekjen Kemdikbud
sebagai UPT dengan ULT Daerah dengan
Predikat Cukup Tahun 2020



Piagam Penghargaan dari Disdikbud Kab. Bulungan
kepada Kepala BPMP Prov. Kaltara Dr. Jarwoko M.Pd.
atas kerjasamanya dalam bidang pendidikan
Tahun 2020



Piagam Penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Tanjung Selor Sebagai Peraih Nilai IKPA terbaik Tahun 2020



Piagam Penghargaan dari INOVASI atas kerjasama dalam peningkatan pendidikan Tahun 2020

HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2024		
A. INFORMATIF		
NO	NAMA SATUAN KERJA / PPID	NILAI
1	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII	97,43
2	Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	97,07
3	Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian	96,75
4	Politeknik Negeri Madura	96,47
5	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII	96,45
6	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV	96,15
7	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	95,96
8	Politeknik Negeri Banjarmasin	95,31
9	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	94,97
10	Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat	94,41
11	Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bisnis dan Pariwisata	93,89
12	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII	93,16
13	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X	92,79
14	Kantor Bahasa Provinsi Maluku	92,62
15	Politeknik Negeri Malang	92,58
16	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	92,53
17	Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat	91,55
18	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	91,26
19	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Banten	91,25
20	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX	90,88
21	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	90,63
22	Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya	90,60
23	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	90,24
24	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat	90,24
25	Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	90,16

Keputusan Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Hasil pemantauan dan evaluasi layanan informasi publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kategori informatif Tahun 2024 dengan nilai 91,26

Laporan kinerja BPMP Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 ini merupakan laporan kinerja kelima dari pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2020-2024. Laporan ini menyajikan tingkat pencapaian dua sasaran kegiatan (SK) dengan 4 indikator kinerja kegiatan (IKK) sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024. Uraian tingkat ketercapaian indikator lebih detail diuraikan pada BAB III. Secara umum capaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	3,92	8,44	215,31%
	[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	100	100	100%
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	A (84,40)	A (85,60)	101,42%
	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	96,36	97,94	101,64%
RATA-RATA CAPAIAN				129,59%

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa seluruh capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPMP Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 berada diatas 100%. Kemudian dari segi penyerapan anggaran, berhasil terserap Rp 18.698.699.639,- dari total Rp 19.195.778.000,- dengan persentase 97,41%. Serapan anggaran menurun dari tahun lalu, dikarenakan adanya blokir untuk anggaran belanja barang sebesar Rp 467.894.000,-.

Jika dilihat dari perjenis belanja, maka serapan BPMP Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

Realisasi Per Jenis Belanja							
No	Jenis Belanja	Pagu	Blokir	Realisasi SPM		Realisasi SP2D	
1	BELANJA PEGAWAI	2.546.996.000	0	2.544.644.105	99,91	2.544.644.105	99,91
2	BELANJA BARANG	11.829.805.000	467.894.000	11.335.767.235	95,82	11.335.767.235	95,82
3	BELANJA MODAL	4.818.977.000	0	4.818.288.299	99,99	4.818.288.299	99,99
TOTAL		19.195.778.000	467.894.000	18.698.699.639	97,41	18.698.699.639	97,41

Sumber : <https://molik.kemdikbud.go.id/2024>

A. Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Sekolah Penggerak belum membudayakan diri untuk melakukan pengimbasan.
2. Keterlambatan pelaporan penggunaan dana BOSP.
3. Penerima chromebook tidak memiliki akses internet dan listrik. Sebagian penerima chromebook berada di remote area sehingga pemanfaatan chromebook untuk pembelajaran masih rendah.
4. Belum memahami 8 Aksi Transformasi Satuan Pendidikan Sekolah Yang Kita Cita-Citakan (SYKCC)
5. Pemda belum melakukan Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan sesuai dengan Indikator Prioritas pada Rapor Pendidikan Daerah.
6. Satuan pendidikan jenjang PAUD belum 100% membentuk TPPK.
7. Masih terdapat banyak miskonsepsi yang terjadi di “lapangan” sehingga banyak terjadi kesalahpahaman terhadap Gerakan Transisi PAUD-SD.
8. Masih sedikit guru yang menyelesaikan aksi nyata di pendidikan berjenjang pendidikan inklusif tingkat dasar di PMM dan masih banyak Kepsek dan Guru yang belum mengetahui tentang Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif melalui PMM sehingga Capaian Aksesnya masih sangat kurang

B. Upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan/kendala yang muncul antara lain:

1. Selalu melakukan advokasi ke sekolah pengimbas untuk berbagi ke sekolah lain
2. Mengadakan kegiatan Pemantauan Pemerintah Daerah Dan Satuan Pendidikan Terkait Pelaporan BOSP Melalui ARKAS Tahap 1 TA 2024 untuk memastikan Satuan Pendidikan melakukan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana BOSP disusun berdasarkan hasil pelaksanaan penatausahaan Dana BOSP dan melaporkan penggunaan dananya melalui ARKAS tepat waktu.
3. Berkoordinasi ke PEMDA untuk dapat memfasilitasi sekolah terkait ketersediaan internet dan listrik. Serta melakukan advokasi kepada pemda melalui konsultan untuk bisa memberikan afirmasi kepada penerima chromebook di remote area.
4. Sosialisasi 8 Aksi Transformasi Satuan Pendidikan melalui Sekolah Yang Kita Cita-Citakan (SYKCC).
5. Melakukan Pendampingan secara lebih Intensif kepada OPD Daerah Bidang Pendidikan yaitu BPKAD/BKAD, BAPPEDA dan Dinas Pendidikan untuk menyusun SPM Bidang Pendidikan sesuai Indikator Prioritas pada Rapor Pendidikan Daerah sesuai dengan Rekomendasi pada Dasbor Evaluasi SPM Pendidikan RAPBD 2025.
6. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mendorong satuan PAUD yang belum membentuk TPPK, serta menghubungi dan mendampingi Satuan Pendidikan yang belum membentuk TPPK secara personal melalui telepon/wa
7. Mengedukasi satuan pendidikan terkait dengan Gerakan Transisi PAUD-SD, alur penguatan perubahan pembelajaran.

8. Berkoordinasi ke pemda untuk mendorong guru-guru mengikuti dan menyelesaikan topik pendidikan berjenjang pendidikan inklusif tingkat dasar di PMM





BAB I Pendahuluan

A. Gambaran Umum

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara bertugas untuk penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara. untuk wilayah kerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara ada 5 (lima) kabupaten/kota, meliputi Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan.



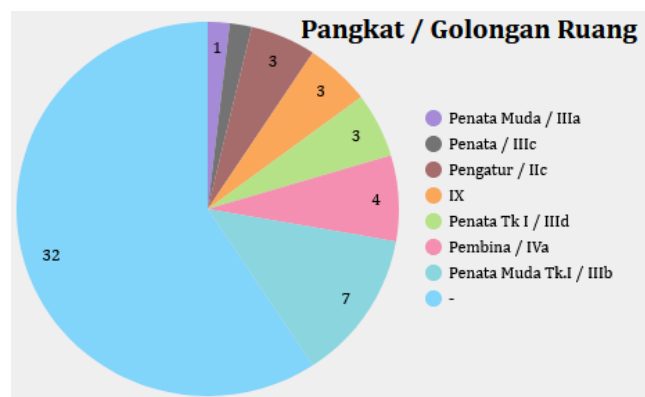
Pada tahun 2022, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) bertransformasi menjadi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022. Sehingga periode pembangunan 2022-2024, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara akan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan mengacu pada Permendikbudristek Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara dari segi jumlah, kualifikasi pendidikan, kompetensi dan ketersediaan sumber daya pendidikan pegawai di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara dinilai belum cukup memadai untuk mendukung terlaksananya tugas dan fungsi hingga Desember 2024, jumlah pegawai di BPMP Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 54 pegawai yang terdiri dari ASN 22 orang dan PPNPN 32 orang. Adapun rekapitulasi jumlah pegawai di BPMP Provinsi Kalimantan Utara per Desember 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

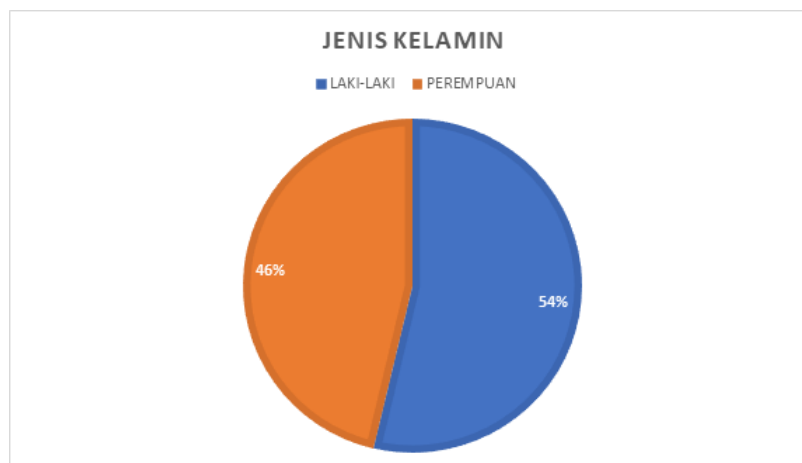
Rekapitulasi Jumlah Pegawai BPMP Provinsi Kalimantan Utara

No	Jabatan	Jumlah
1.	ASN : a. Kepala b. Kasubbag Umum c. Jabatan Fungsional d. Jabatan Pelaksana e. PPPK	1 1 1 16 3
2.	PPNPN	32

Data Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan



Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin






Gambar: Kantor BPMP Provinsi Kalimantan Utara

Adapun sejarah singkat sebelum terbentuknya BPMP Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2016 BPMP Provinsi Kalimantan Utara masih bernama Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Utara didirikan atas permintaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang kemudian disetujui pendiriannya oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi di tanggal 15 November 2016 dan ditetapkan dalam Peraturan Perundangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 13 Februari 2017 dan termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 tahun 2017. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia periode 2016-2019 Prof. Dr. H. Muhadjir Effendy berkunjung ke Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara Tanjung Selor dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan gedung LPMP Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pada Agustus 2017 LPMP Kalimantan Utara pertama kali dibentuk tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2017. Meskipun LPMP Kalimantan Utara belum memiliki gedung kantor sendiri, tapi LPMP Kalimantan Utara telah resmi beroperasi pada tanggal 28 Agustus 2017 dan berkantor di Kalimantan Utara. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMP Kalimantan Utara, LPMP Kalimantan Utara termasuk dalam kategori Eselon III dengan satu sub bagian umum dan dua seksi, yaitu:
 - a. Kepala instansi;
 - b. Sub Bagian Umum;
 - c. Seksi Sistem Informasi dan Pemetaan Mutu; dan
 - d. Seksi Supervisi dan Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan.

Pada September 2017 awal pendiriannya selama 3 bulan pertama LPMP Kalimantan Utara beroperasi di Jalan Sengkawit Pasar Induk Gedung II dengan Peta Kepegawaian per Agustus 2017 LPMP Kalimantan Utara terdiri atas 4 PNS yaitu Kepala, Kepala Sub bagian Umum dan 2 Orang Kepala Seksi, dan dibantu oleh 4 Non PNS (tenaga Honorer) yaitu Satpam dan 3 orang staf administrasi. Untuk



operasional keuangan sendiri LPMP Kalimantan Utara masih berinduk pada LPMP Kalimantan Timur.


3. Pada Januari 2018 LPMP Kalimantan Utara merekrut 25 orang Tenaga Honorer yang terdiri dari 5 Tenaga Keamanan dan 2 Tenaga Kebersihan serta 18 orang tenaga administrasi yang diterima secara bertahap. Pada bulan April 2018 LPMP Kalimantan Utara berpindah lokasi ke Jalan Mangga II No 065 RT 090, Tanjung Selor, Bulungan 77212 dengan jumlah pegawai per April 2018 jumlah pegawai LPMP Kalimantan Utara sebanyak 10 orang PNS dan 25 Non PNS.
4. Pada Tahun 2019 dilakukan rekrutmen Non PNS sejumlah 30 orang dengan rincian 5 Tenaga Keamanan, 2 Tenaga Kebersihan dan 28 tenaga Administrasi. Seiring dengan semakin bertambahnya jumlah pegawai di LPMP Kalimantan Utara, maka pada bulan Februari 2019 LPMP Kalimantan Utara berpindah lokasi ke gedung yang lebih luas di Jalan Kolonel Soetardji (Ex- Ruko Fajar Baru) No 76 Tanjung Selor Hilir, Tanjung Selor Bulungan 77212. Pada bulan Mei 2019 terdapat penambahan jumlah pegawai sebanyak 7 orang CPNS hasil rekrutmen PNS 2018 yang mulai bekerja di LPMP Kalimantan Utara. Dan diakhir Agustus 2019 total pegawai LPMP Kalimantan Utara sejumlah 47 orang dengan 17 orang PNS dan 30 orang PPNNP dengan 1 orang PNS Perbantuan.
5. Pada Tahun 2020 Kemendikbud menerbitkan peraturan terkait OTK terbaru yaitu Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terjadi perubahan struktur organisasi di LPMP Kalimantan Utara sebagai berikut:
 - a. Kepala Instansi;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan OTK tersebut, LPMP Kalimantan Utara telah melaksanakan 2 kali upacara pelantikan yaitu pada tanggal 22 Juli 2020 dilaksanakan Upacara Pelantikan 3 Pejabat Struktural ke Jabatan Fungsional secara daring dan pada tanggal 13 Agustus 2020 dilaksanakan Upacara Pelantikan Pejabat Kemendikbud (Kepala dan Kasubbag Tata Usaha) secara daring. Hingga Agustus 2020, jumlah pegawai di LPMP Kalimantan Utara sebanyak 46 pegawai yang terdiri atas 18 orang PNS dan 28 orang PPNNP.

6. Pada Tahun 2021 struktur organisasi di LPMP Kalimantan Utara sebagai berikut:
 - a. Kepala Instansi;
 - a. Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Hingga Desember 2021, jumlah pegawai di BPMP Kalimantan Utara sebanyak 48 pegawai yang terdiri atas 20 orang PNS dan 28 orang PPNNP.

7. Pada Tahun 2022 Kemendikbudristek menerbitkan peraturan terkait OTK terbaru yaitu Permendikbudristek Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan,



sehinggal LPMP Kalimantan Utara menjadi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Utara yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terjadi perubahan struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala instansi;
- b. Subbagian Umum; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan OTK tersebut, pada tanggal 20 Juni 2022 dilaksanakan Upacara Pelantikan Pejabat Kemendikbud (Kasubbag Umum) di Gedung Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Hingga Desember 2022, jumlah pegawai di BPMP Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 48 pegawai yang terdiri atas 20 orang PNS dan 28 orang PPNP.

8. Pada tahun 2023 BPMP Provinsi Kalimantan Utara masih bertempat di Jalan Kolonel Soetardji No 76 Tanjung Selor Hilir, Tanjung Selor Bulungan 77212 dengan pegawai berjumlah 18 orang PNS dan 26 orang PPNP.
9. Dan pada tanggal 19 Februari 2024 BPMP Provinsi Kalimantan Utara telah resmi pindah Operasional ke Jl. Poros Tanjung Selor-Tanah Kuning KM.9, Tanjung Selor, Bulungan dengan status kepemilikan sendiri. Pada bulan Maret Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara mutasi ke BPMP Provinsi Kalimantan Timur, sehingga ditunjuklah Kasubbag Umum menjadi Plt. Kepala. Tidak selang lama pada bulan Juli 2024 dilaksanakan upacara pelantikan pejabat Kemendikbudristek, Bapak Andrianus Hendro Triatmoko, S.T., M.T. dilantik menjadi Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara. Hingga bulan Desember pegawai berjumlah 22 orang ASN dan 32 orang PPNP.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. PemenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
4. Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek;
6. Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.



C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi

1. Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 tahun 2022, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Utara mempunyai tugas yakni *“Melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di provinsi Kalimantan Utara”*.

Adapun fungsi BPMP Provinsi Kalimantan Utara mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
- b. Pengembangan model penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
- c. Pelaksanaan supervisi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
- d. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
- e. Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
- f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat; dan
- g. Pelaksanaan urusan administrasi.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, maka struktur organisasi BPMP Provinsi Kalimantan Utara dapat ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar: Struktur Organisasi BPMP Provinsi Kalimantan Utara

3. Isu Strategis dan Peran Strategis


a. Isu Strategis

- 1) Implementasi Kurikulum Merdeka yang berkaitan dengan optimalisasi PMM, Komunitas Belajar, dan Penerapan P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila);
- 2) Kompetensi Literasi dan Numerasi di provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Profil Pendidikan belum optimal;
- 3) Peran Pemerintah Daerah terhadap Implementasi Program Sekolah Penggerak dan Perencanaan Berbasis Data;
- 4) Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di Satuan Pendidikan yang belum optimal;
- 5) Guru Penggerak (GP) menjadi Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah (KP/PS) Sekolah untuk penyebarannya tidak merata dan Pemda belum memahami sistem/aplikasi pengangkatan KS/PS.

b. Peran Strategis

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) tingkat eselon III, BPMP Provinsi Kalimantan Utara mempunyai peran strategis baik dalam bidang Pendidikan maupun dalam tata kelola kelembagaan. Peran strategis BPMP Provinsi Kalimantan Utara diantaranya:

- 1) Mitra penting bagi sekolah dan pemerintah daerah dalam membantu Implementasi Kurikulum Merdeka, pelaksana Program Sekolah Penggerak, Perencanaan Berbasis Data, pembentukan TPPK, pengangkatan GP menjadi KS/PS dan peningkatan kompetensi Literasi Numerasi;

- 
- 2) Mitra penting bagi pemerintah daerah dalam peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan di wilayahnya;
 - 3) Mengawal pelaksanaan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Provinsi Kalimantan Utara agar berjalan sukses;
 - 4) Melakukan advokasi kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di daerah; dan
 - 5) Membangun kerja sama dengan instansi terkait untuk meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara.



BAB II

Perencanaan Kinerja



A. Visi dan Misi BPMP Provinsi Kalimantan Utara

BPMP Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan UPT di lingkungan Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD, Dikdas dan Dikmen) Kemendikbudristek, mendukung visi Presiden untuk mewujudkan:

1. Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.
2. Visi di atas akan dicapai Kemendikbudristek dengan melaksanakan dukungan misi Presiden terkait peningkatan kualitas manusia Indonesia, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya dalam bentuk dukungan sebagai berikut:
3. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi;
4. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra;
5. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

B. Rencana Kinerja Jangka Menengah 2022-2024

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara menetapkan sasaran, indikator dan target selama lima tahun yang dituangkan kedalam Renstra BPMP Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024, namun pada tahun 2022 terjadi perubahan terhadap IKK BPMP Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Atas dasar peraturan tersebut, maka dilakukan revisi Renstra BPMP Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2022 dan menetapkan indikator kinerja kegiatan (IKK) dan targetnya sebagai berikut:



Sasaran/ Indikator	Sasaran Kegiatan (SK)	Satuan	Target		
			2022	2023	2024
SK 1	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen				
IKK 1.1	Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	%	0,98	1,96	3,92
IKK 1.2	Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	%	25	30	35
SK 2	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen BPMP Provinsi Kalimantan Utara				
IKK 2.1	Predikat SAKIP BPMP Provinsi Kalimantan Utara	Nilai	A	A	A
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA/KL	Nilai	83	84	85

1. Tujuan Strategis

BPMP Provinsi Kalimantan Utara menetapkan 2 (dua) tujuan strategis mengacu pada tujuan strategis pada renstra BPMP Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020-2024, yaitu:

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja Tujuan	Target 2024
1	Peningkatan mutu satuan pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara.	Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	35
2	Peningkatan tata kelola serta pelibatan publik yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan.	Predikat SAKIP Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	A

Dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan strategis, BPMP Provinsi Kalimantan Utara merancang perjanjian kinerja kelembagaan yang diusulkan pada tahun 2024, sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja BPMP Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut:

a. Perjanjian Kinerja Awal

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	[SK 1] Meningkatkan mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	3,92



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
		[IKK 1.1] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	100
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	96,36

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi (Rp)
1	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	10.666.961.000
2	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	7.648.635.000
TOTAL			18.315.596.000

b. Perjanjian Kinerja Akhir

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	3,92
		[IKK 1.1] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	100
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	96,36

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi (Rp)
1	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	11.243.623.000
2	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	7.952.155.000
TOTAL			19.195.778.000

2. Program Prioritas

Pada tahun 2024 BPMP Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan sebuah program prioritas dan merupakan salah satu program prioritas nasional. Untuk mendukung pencapaian program prioritas nasional terkait **Program Kualitas Pengajaran dan**

Pembelajaran, maka BPMP Provinsi Kalimantan Utara melalui unit utama menetapkan satu KRO (Klasifikasi Rincian Output) yakni **Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga** yang didukung oleh dua RO (Rincian Output) yakni **Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya** dan **Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya** dengan target dan alokasi anggaran yang diuraikan berikut ini:

Kode	Uraian	Satuan	Target	Alokasi (Rp)
6397.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Lembaga	1382	7.952.155.000
6397.QDB.750	Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	751	7.826.895.000
6397.QDB.850	Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	631	125.260.000

Output prioritas yang disasar tersebut mengerucut pada enam program yang akan dikawal yakni:

- Pelaksanaan Pembinaan Kurikulum Merdeka;
- Pelaksanaan Pembinaan Asesmen Nasional;
- Pelaksanaan Pembinaan Transfer Daerah;
- Pelaksanaan Pembinaan Sekolah Penggerak;
- Pelaksanaan Pembinaan Perencanaan Berbasis Data; dan
- Pelaksanaan Pembinaan Kemitraan.



BAB III

Akuntabilitas

Kinerja



A. Capaian Kinerja

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2024, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Utara menetapkan 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja, dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	3,92	8,44	215,30%
	[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	100	100	100,00%
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	A (84,40)	A (85,60)	101,42%
	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	96,36	97,94	101,63%
RATA-RATA CAPAIAN				129,59%





1. Sasaran Kegiatan (SK) 1: Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen

Peningkatan mutu pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah merupakan sasaran kegiatan prioritas yang telah diperjanjikan oleh kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara dengan unit eselon 1 (satu), sasaran kegiatan ini adalah sasaran kegiatan untuk satuan kerja BB/BPMP yang dituangkan kedalam perjanjian kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Sasaran kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1.1: Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya

Indikator kinerja kegiatan ini menggambarkan kondisi mutu pembelajaran satuan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat kondisi tahun berjalan dengan tahun sebelumnya yang sumber atau basis pengukurannya itu berdasarkan hasil pelaksanaan asesmen nasional. Indikator kinerja kegiatan ini dihitung berdasarkan persentase dari satuan paud dan dikmas di wilayah masing masing yang memiliki mutu pembelajaran lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya berdasarkan hasil rapor pendidikan atau survey lingkungan belajar dengan formula sebagai berikut:


$$\frac{\text{Jumlah Satuan PAUD dan Dikmas yang Akreditasinya Meningkat}}{\text{Jumlah Satuan PAUD dan Dikmas pada Provinsi atau Kab atau Kota yang bersangkutan}} \times 100\%$$

Untuk mengukur peningkatan mutu pembelajaran jenjang PAUD, maka dibutuhkan hasil Asesmen Nasional dalam tahun 2023 dan 2024. Dikarenakan rapor pendidikan tahun 2024 belum terbit sampai dengan Januari 2025. Oleh karena itu, untuk indikator 1.1 tentang persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya ini dihitung berdasarkan data akreditasi 2023 dan 2024 yang bersumber dari BAN PAUD dan PSKP BSKAP. Adapun tidak memakai pembobotan namun menggunakan persentase kenaikan Akreditasi dari tahun 2023 ke 2024 sebesar 3,92 sesuai target pada Renstra Kemendikbudristek RI.

Berikut ini data akreditasi berdasarkan cut off Dapodik Semester Ganjil (Desember) tahun 2022 dan 2023 di provinsi Kalimantan Utara:

No	Status Akreditasi	Jumlah Sekolah		Jumlah Kenaikan
		2023	2024	
1	A	16	16	0
2	B	192	194	2
3	Belum Terakreditasi	1	1	0
4	C	341	391	50
5	Terakreditasi	0	0	0





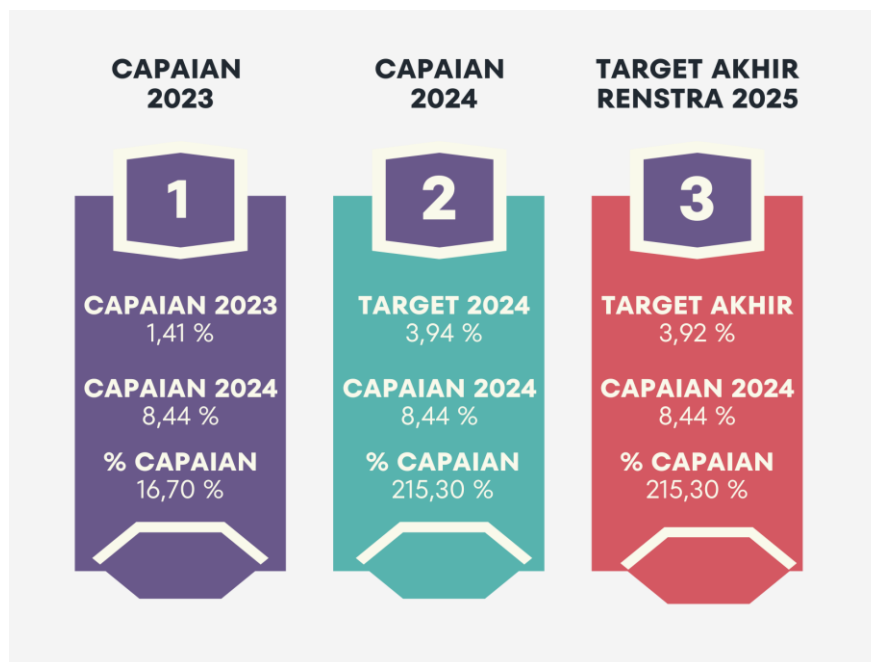
6	Tidak diisi	55	55	0
7	Tidak Terakreditasi	1	1	0
Jumlah Sekolah		616	668	52

Berdasarkan data akreditasi tersebut, maka IKK 1.1 dapat dihitung dengan menggunakan metode/formula perhitungan diatas sebagai berikut:

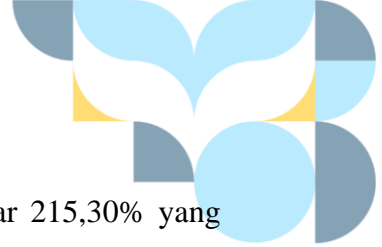
$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Kenaikan Akreditasi \%} &= \frac{52}{616} \times 100\% \\
 &= 0,084 \times 100\% \\
 &= 8,44 \%
 \end{aligned}$$

Sehingga didapatkan hasil bahwa Akreditasi mengalami kenaikan senilai 8,44 % yang mana ini sesuai dengan target Renstra (Rencana Strategis) yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek.

Berikut ini juga kami tampilkan Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan Indikator Kinerja, perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, dan perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target akhir renstra (Rencana Strategis).



Tabel diatas menggambarkan capaian kinerja untuk IKK 1.1 terkait persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya. Dapat diketahui bahwa BPMP Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 ini telah mampu mencapai bahkan melebihi target yang telah diperjanjikan. Adapun target IKK 1.1 tahun 2024 adalah sebesar 3,94% satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya



sedangkan capaiannya sebesar 8,44% dengan persentase capaian sebesar 215,30% yang berarti telah melebihi dari target yang diperjanjikan.

Tabel diatas juga menggambarkan perbandingan capaian tahun 2023 dengan capaian tahun berkenaan, dimana terjadi peningkatan capaian dari 1,41% di tahun 2023 menjadi 8,44% di tahun 2024. Selanjutnya perbandingan capaian 2024 dengan target akhir renstra, terlihat capaian di tahun 2024 ini telah mencapai bahkan melebihi dari target akhir renstra. Hasil yang diperoleh ini telah sepenuhnya menggambarkan capaian IKK 1.1 terkait Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya yaitu melalui data kenaikan akreditasi dari tahun 2023 ke tahun 2024, yang mana basis data yang digunakan untuk menghitung capaian tersebut telah sesuai dengan definisi operasional yang telah ditetapkan dalam Renstra BPMP Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020-2024.

b. Program dan Kegiatan Pendukung IKK 1.1

Dalam upaya mencapai target IKK 1.1 terkait Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya BPMP Kaltara didukung oleh beberapa program prioritas, dimana program tersebut diistilahkan dengan PDM singkatan dari Paud, Dikdas dan Dikmen yang terdiri dari 11 PDM dan 5 diantaranya mengintervensi IKK 1.1. Berikut ini disajikan capaian dari masing-masing PDM di BPMP Kaltara:

1) PDM-01 Program Sekolah Penggerak

Pada tahun 2024, Program Sekolah Penggerak memiliki beberapa fokus yang diharapkan bisa dicapai oleh seluruh wilayah yang terdapat sekolah penggerak. Fokus pertama adalah untuk Sekolah Penggerak Angkatan 1 melakukan program pengimbasan yang petunjuk pelaksanaan sampai dengan anggarannya sudah ditentukan oleh Kemendikbudristek. Fokus kedua, untuk angkatan 2 dan 3 diharapkan mengalami peningkatan delta rapor pendidikan untuk indikator-indikator tertentu yang sudah ditentukan. Hal ini penting karena hasil dari delta rapor pendidikan itu untuk menggambarkan efektivitas pendampingan yang didapatkan sekolah penggerak terhadap delta rapor pendidikannya. Fokus ketiga, untuk Sekolah Penggerak Angkatan 2 dan 3 sudah mulai rutin melakukan pengimbasan baik itu secara daring maupun secara luring, pengimbasan secara daring bisa dilakukan dengan cara mengunggah/*upload* praktik baik yang dilakukan sekolah di Platform Merdeka Mengajar (PMM), Youtube atau melakukan pengimbasan menggunakan aplikasi *video conferencing* seperti Zoom atau Google Meet. Cara luring bisa dilakukan dengan pertemuan langsung, baik itu kunjungan ke sekolah, menerima kunjungan sekolah lain, atau mengimbasikan di forum-forum pertemuan seperti MKKS. Fokus yang terakhir, yaitu berhubungan dengan pemerintah daerah pelaksana Program Sekolah Penggerak. objektif yang disasar adalah bagaimana level adopsi yang sudah dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan Program Sekolah Penggerak. dari fokus-fokus tadi, maka diturunkanlah target-target yang perlu dicapai UPT di daerah mengenai Program Sekolah Penggerak. objektif-objektif yang dimaksud adalah sebagai berikut:

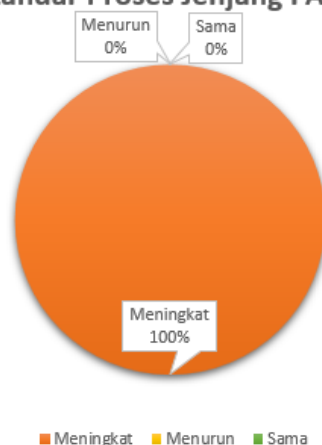
No	Objektif UPT	Target UPT
1.	100% satuan pendidikan pelaksana PSP angkatan 1, 2, dan 3 mengalami peningkatan kualitas transformasi satdik dilihat dari hasil AN	100%
2.	100% satdik PSP angkatan 2 dan 3 mengalami peningkatan hasil AN	100%
3.	100% satdik PSP angkatan 1 menjadi penggerak transformasi satuan pendidikan di daerahnya	100%
4.	50% Pemda pelaksana PSP berada pada level komitmen adopsi dalam mendukung PSP.	50%

a) Capaian

- **100% satuan pendidikan pelaksana PSP angkatan 1, 2, dan 3 mengalami peningkatan kualitas transformasi satdik dilihat dari hasil AN**

Untuk mendapatkan hasil dari objektif ini, dapat dilihat melalui rapor pendidikan dengan melihat salah satu indikator proses (Standar Isi/Standar Proses/Standar Penilaian/Standar Pengelolaan) yang bisa dilihat dari Dimensi D Mutu dan relevansi pembelajaran dan Dimensi E Pengelolaan satuan pendidikan yang antisipatif, transparan dan akuntabel. berikut. Sedangkan sekolah yang dilihat delta peningkatan standar proses ini untuk jenjang PAUD, terdapat 9 sekolah penggerak yang terdapat di Provinsi Kalimantan Utara. maka hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut:

Standar Proses Jenjang PAUD



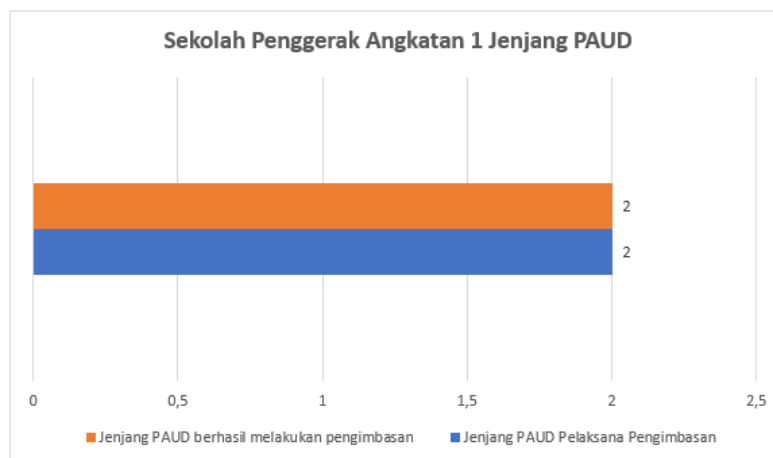
Setelah melihat hasil yang ada dari 9 sekolah penggerak jenjang PAUD di Provinsi Kalimantan Utara, seluruh sekolah terdapat minimal satu indikator dalam



standar proses yang mengalami kenaikan. Sehingga capaian untuk jenjang PAUD yaitu 100% dan **mencapai target** dari objektif yang diberikan untuk UPT.

- **100% satdik PSP angkatan 1 menjadi penggerak transformasi satuan pendidikan di daerahnya.**

Untuk objektif ini, hasil capaian bisa dilihat dengan melihat jumlah sekolah penggerak angkatan 1 yang terpilih melakukan pengimbasan berhasil melakukan tugas yang diberikan untuk melakukan pengimbasan ke sekolah imbas yang sudah ditentukan/dipilih oleh Kemendikbudristek. Untuk jenjang PAUD, terdapat dua (2) sekolah yang terpilih untuk melakukan pengimbasan. Hasil dari objektif ini adalah sebagai berikut:

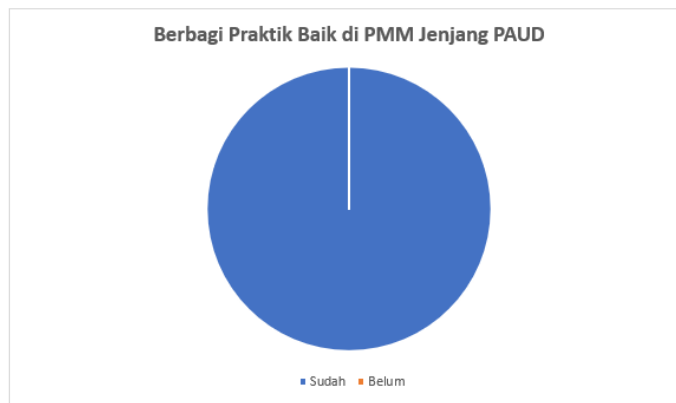


Dari tabel di atas, hasil yang didapat dari sekolah penggerak angkatan 1 jenjang PAUD adalah dua sekolah dan kedua-duanya berhasil melaksanakan program pengimbasan sampai selesai. Oleh sebab itu capaian dari objektif ini adalah 100% atau **mencapai target**.

- **50% satdik PSP angkatan 2 menjadi penggerak transformasi satuan pendidikan di daerahnya.**

Untuk objektif ini, metode untuk mengukur ketercapaiannya yaitu dengan aktivitas berbagi praktik baik yang dilakukan oleh sekolah penggerak angkatan 2 jenjang PAUD yang berjumlah 3 sekolah di Platform Merdeka Mengajar (PMM). Jika salah satu warga sekolah di sekolah tersebut baik itu Kepala Sekolah maupun Guru sudah ada yang mengunggah/*upload* praktik baik sekolah di PMM, maka objektif ini sudah tercapai.





Dari 3 sekolah penggerak angkatan 2 jenjang PAUD, semuanya sudah berbagi praktik baik di Platform Merdeka Mengajar (PMM) sehingga objektif ini **tercapai dengan capaian 100%**.

- **50% Pemda pelaksana PSP berada pada level komitmen adopsi dalam mendukung PSP**

Objektif terakhir dari PDM-01 Program Sekolah Penggerak, adalah seberapa besar komitmen pemerintah daerah pelaksana sekolah penggerak dalam mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan Program Sekolah Penggerak di wilayahnya. Alat ukur untuk melihat komitmen tersebut yaitu dengan menggunakan instrumen *web-based* bernama Dasbor UPT yang perlu diisi setiap semester. Dalam Dasbor UPT, terdapat butir-butir instrumen pengukuran komitmen pemerintah daerah yang pada proses pengisiannya membutuhkan bukti dukung. Hasil dari pengisian inilah yang akhirnya akan diolah menjadi tingkatan komitmen pemerintah daerah. Untuk level tingkatan komitmen pemda yang terendah sampai tertinggi adalah sebagai berikut:

Fase	Level Komitmen	Keterangan
Terinformasikan	Terhubung	Level Komitmen Rendah
	Peduli	
	Paham	
Terbina	Persepsi Positif	
	Adopsi	Target Level yang diberikan UPT
Berkomitmen	Tertanam	
	Melebaga	Level komitmen tertinggi

Berdasarkan data hasil Dasbor UPT, didapatkan bahwa empat pemerintah daerah berhasil mencapai target level komitmen yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan, maka capaian UPT **mencapai 66.67% atau mencapai target**. Detail untuk setiap level komitmen daerah bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Pemerintah Daerah	Level Komitmen
Provinsi Kalimantan Utara	Tertanam
Kabupaten Bulungan	Tertanam

Kabupaten Nunukan	Tertanam
Kabupaten Malinau	Paham
Kota Tarakan	Tertanam
Kabupaten Tana Tidung	Persepsi Positif

• Kegiatan yang Telah Dilakukan

PDM-01 Program Sekolah Penggerak memiliki turunan 13 kegiatan yang perlu dilaksanakan oleh UPT, kegiatan-kegiatan itu yaitu

- ❖ Koordinasi Percepatan Transformasi Satuan Pendidikan Sekolah Pelaksana PSP dengan PMO Daerah;
- ❖ Koordinasi dengan BBGP/BGP terkait Optimalisasi pengawas sekolah sebagai pendamping satuan pendidikan;
- ❖ Pemantauan dan Percepatan Tingkat Transformasi Satpen;
- ❖ Pemetaan Sekolah Pelaksana PSP dan Sekolah Imbas;
- ❖ Pendampingan dan Monitoring Pengimbasan dan Kontributor Praktik Baik di PMM;
- ❖ Visitasi terkait Pengimbasan PMM dan Non PMM UPT;
- ❖ Workshop Pengimbasan oleh PSP Angkatan 1;
- ❖ Pelaksanaan Forum Pemangku Kepentingan;
- ❖ Advokasi Pemberdayaan Sekolah PSP menjadi Penggerak Komunitas Belajar PSP – UPT;
- ❖ Visitasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak oleh Pemda;
- ❖ Refleksi Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak oleh Pemerintah Daerah;
- ❖ Kunjungan Lapangan dan Wawancara Observasi terkait BOSP Kinerja, Adaptasi Kurikulum dan Pendampingan Daerah dalam Fasilitasi Kombel;
- ❖ Koordinasi PMO dengan Pemda.

Dokumentasi



Koordinasi Percepatan Transformasi Satuan Pendidikan Sekolah Pelaksana PSP dengan PMO Daerah



Pelaksanaan Forum Pemangku Kepentingan



Visitasi terkait Pengimbasan PMM dan Non PMM UPT



Kunjungan Lapangan dan Wawancara Observasi terkait BOSP Kinerja, Adaptasi Kurikulum dan Pendampingan Daerah dalam Fasilitas Kumpul



Pendampingan dan Monitoring Pengimbasan dan Kontributor Praktik Baik di PMM

2) PDM-02 Implementasi Kurikulum Merdeka

Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) merupakan salah satu program prioritas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. IKM dirancang untuk menjadi transformasi pendidikan yang melengkapi kekurangan kurikulum sebelumnya. Untuk mendukung IKM, PDM 02 dibentuk dalam rangka pendampingan dan mengadvokasi Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk turut serta mengawal implementasi Kurikulum Merdeka ditingkat satuan pendidikan.

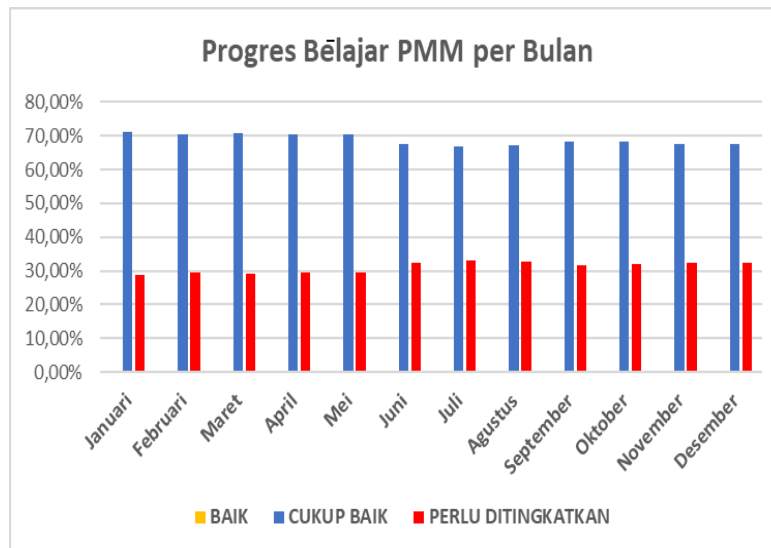
a) Objektif dan Target PDM

No.	Objektif UPT	Target UPT
1.a.	75% Satuan Pendidikan Pelaksana IKM menunjukkan peningkatan kualitas pemanfaatan PMM dilihat dari progres belajar	809 satpen IKM meningkat kualitas progres belajar di PMM
1.b.	75% Satuan Pendidikan Pelaksana IKM menunjukkan peningkatan kualitas pemanfaatan PMM dilihat dari pemanfaatan perangkat ajar	809 satpen IKM meningkat kualitas pemanfaatan perangkat ajar di PMM
2.	75% Satuan Pendidikan Pelaksana IKM mengikuti pendampingan, yang materinya didasarkan pada hasil refleksi pelaksanaan IKM tahun ajaran 2023/2024	809 satpen IKM Mandiri mengikuti pelatihan IKM
3.	75% Satuan Pendidikan Pelaksana IKM memiliki komunitas belajar dalam sekolah dengan aktivitas yang didasarkan pada permasalahan peserta didik	809 satpen dg peningkatan aktivitas komba dalam sekolah
4.	50% Satuan Pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka yang berada pada level 1 dan 2 pada AN 2023 menunjukan peningkatan kualitas hasil pada AN 2024 untuk capaian literasi, Numerasi, Karakter, dan Indeks pembelajaran	148 satpen IKM meningkat capaian literasi, numerasi, karakter, dan indeks pembelajaran
5.a.	75% Pemerintah Daerah memiliki persepsi positif terhadap IKM	5 Pemda dengan persepsi positif
5.b.	75% Pendidik (Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah) memiliki persepsi positif	9.285 Pendidik (Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah) dengan

No.	Objektif UPT	Target UPT
	terhadap IKM	persepsi positif
5.c.	75% orang tua memiliki persepsi positif terhadap IKM	92.668 orang tua dengan persepsi positif

b) Capaian PDM-02 Implementasi Kurikulum Merdeka

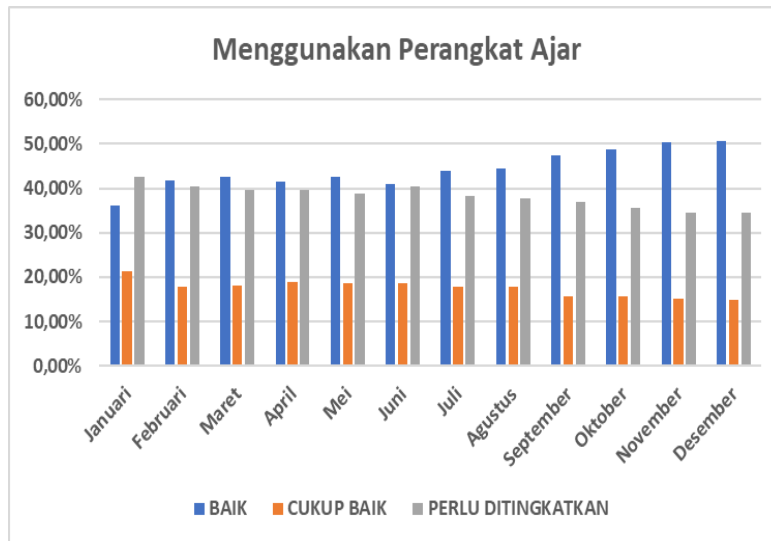
- **75% Satuan Pendidikan Pelaksana IKM menunjukkan peningkatan kualitas pemanfaatan PMM dilihat dari progres belajar**



Sumber: Rekap PMM <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z8Dq5bv-XF6N-HJu52CraLY4lvqu4LPL/edit?gid=524293304#gid=524293304>

Grafik di atas menunjukkan persentase capaian pemanfaatan PMM dilihat dari progres belajar dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Dimana mengalami peningkatan pada setiap bulan, yaitu pada Januari kategori cukup baik 71,24%, perlu ditingkatkan 28,76%, sedangkan pada Desember kategori baik 0,08%, cukup baik 67,44%, dan perlu ditingkatkan 32,48%.

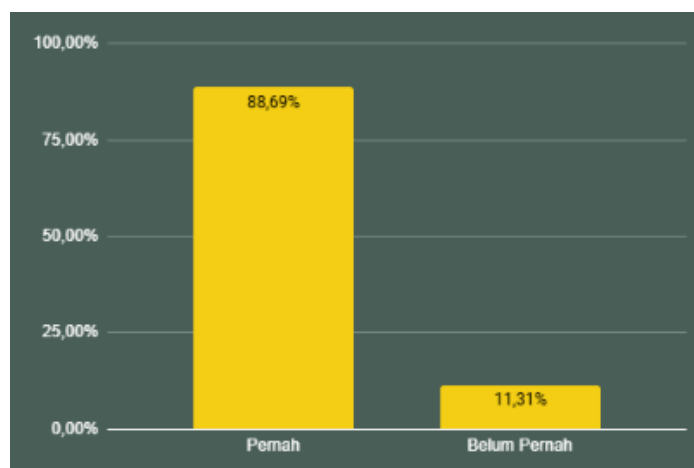
- **75% Satuan Pendidikan Pelaksana IKM menunjukkan peningkatan kualitas pemanfaatan PMM dilihat dari pemanfaatan perangkat ajar**



Sumber: Rekap PMM <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z8Dq5by-XF6N-HJu52CraLY4lvqu4LPL/edit?gid=524293304#gid=524293304>

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat pemanfaatan PMM dilihat dari progres menggunakan perangkat ajar dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember mengalami peningkatan persentase, dimana pada bulan Januari kategori baik 36,11%, cukup baik 21,24%, perlu ditingkatkan 42,65%, sedangkan pada bulan Desember kategori baik 50,58%, cukup baik 14,96%, dan perlu ditingkatkan 34,96%.

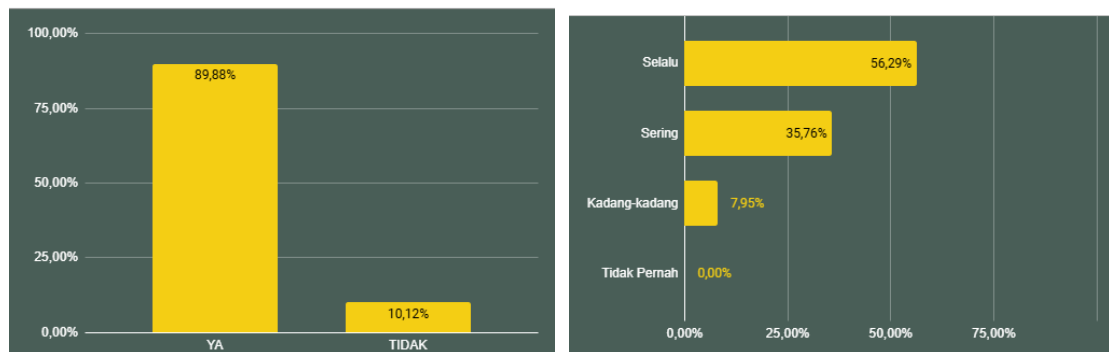
- **75% Satuan Pendidikan Pelaksana IKM mengikuti pendampingan, yang materinya didasarkan pada hasil refleksi pelaksanaan IKM tahun ajaran 2023/2024**



Sumber: Hasil Survei Persepsi KM Pendidik
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/113WnZKpPjGXdsBeruY5NQ3AFt4bXBgOXBHGMV3cmei0/edit?usp=sharing>

Data berdasarkan hasil survei yang dilakukan berdasarkan aspek adanya pelatihan/pendampingan yang diikuti. Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa sebanyak 88,69% satuan pendidikan Pelaksana IKM mengikuti pendampingan, yang materinya didasarkan pada hasil refleksi pelaksanaan IKM tahun ajaran 2023/2024.

- **75% Satuan Pendidikan Pelaksana IKM memiliki komunitas belajar dalam sekolah dengan aktivitas yang didasarkan pada permasalahan peserta didik.**



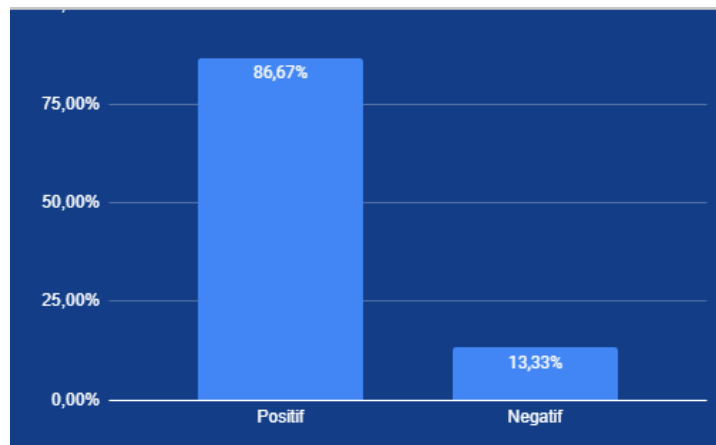
Sumber: Hasil Survei Persepsi KM Pendidik

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/113WnZKpPiGXdsBeruY5NQ3AFt4bXBgOXBHGMV3cmei0/edit?usp=sharing>

Data ini diperoleh berdasarkan hasil survei yang dilakukan berdasarkan aspek adanya komunitas belajar, aktivitas komunitas belajar pembahasan komunitas belajar terkait peningkatan hasil belajar siswa dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat sebanyak 89,88% satuan pendidikan telah memiliki komunitas belajar dalam sekolah serta 56,29% komunitas belajar dalam sekolah tersebut pembahasan selalu berfokus pada peningkatan kualitas permasalahan peserta didik.

- **50% Satuan Pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka yang berada pada level 1 dan 2 pada AN 2023 menunjukkan peningkatan kualitas hasil pada AN 2024 untuk capaian literasi, Numerasi, Karakter, dan Indeks pembelajaran**
Untuk capaian objektif belum ada hasilnya karena hasilnya baru terlihat pada tahun 2025.

- **75% Pemerintah Daerah memiliki persepsi positif terhadap IKM**

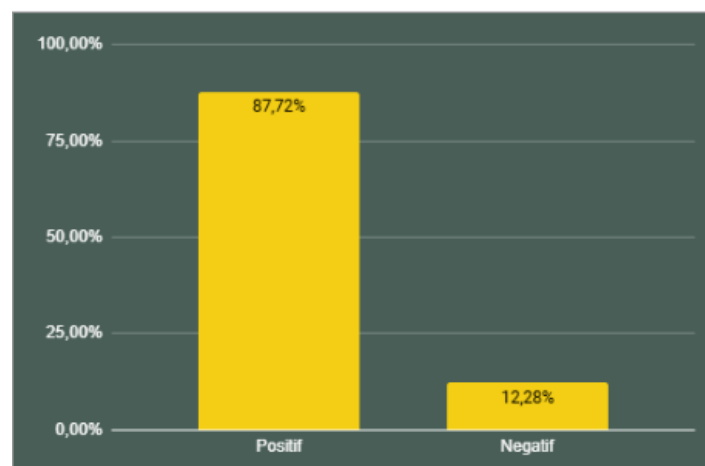


Sumber: Hasil Survei Persepsi KM Dinas Pendidikan

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1drQPpCO271sHue5K8ahdTGU8HorGtYQFRkgLqmGZQ7o/edit?usp=sharing>

Data diperoleh berdasarkan hasil survei dimana aspek yang dilihat terkait dengan informasi Kurikulum Merdeka, Festival Kurikulum Merdeka, Pelatihan/Pendampingan Kurikulum Merdeka dan Dukungan Dinas Pendidikan. Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat 86,6% Dinas Pendidikan memiliki persepsi positif terhadap Kurikulum Merdeka.

- **75% Pendidik (Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah) memiliki persepsi positif terhadap IKM**

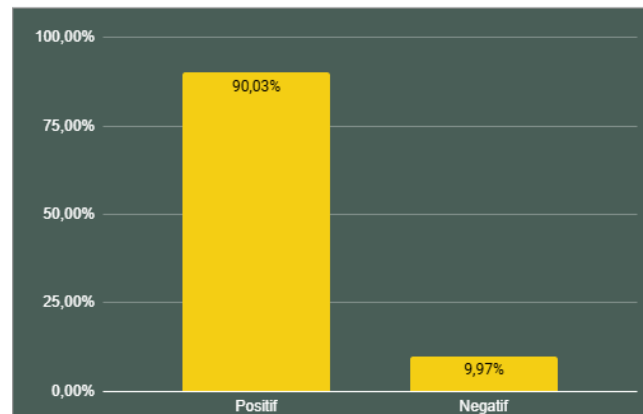


Sumber: Hasil Survei Persepsi KM Pendidik

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/113WnZKpPjGXdsBeruY5NQ3AFt4bXBgOXBHGMV3cmei0/edit?usp=sharing>

Data ini diperoleh berdasarkan hasil survei yang dilakukan berdasarkan aspek informasi Kurikulum Merdeka, Festival Kurikulum Merdeka, pelatihan/pendampingan Kurikulum Merdeka, dukungan dinas pendidikan, dukungan satuan pendidikan dan komunitas belajar. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 87,72% pendidik menunjukkan persepsi positif terhadap Kurikulum Merdeka

- **75% orang tua memiliki persepsi positif terhadap IKM**



Survei: Hasil Survei Persepsi KM Orang Tua

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qdBENQVjZeaNkMxs29T0ZEcDtEpzW3R8iiMgGy2594M/edit?usp=sharing>

Data ini diperoleh berdasarkan hasil survei yang dilakukan berdasarkan aspek informasi Kurikulum Merdeka, Festival Kurikulum Merdeka dan pelibatan orang tua. Berdasarkan grafik di atas, sebanyak 90,03% orang tua peserta didik dari jenjang Dikdas dan Dikmen menunjukkan persepsi positif terhadap Kurikulum Merdeka.

- **Kegiatan yang Telah Dilakukan beserta Dokumentasi**

- ❖ **Advokasi dan Koordinasi Kebijakan Merdeka Belajar ke Pemerintah Daerah**

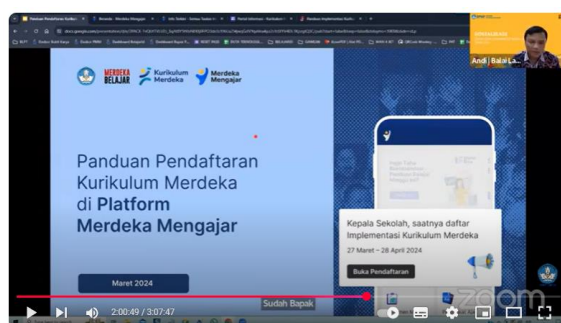
Kebijakan Merdeka Belajar dilaksanakan untuk percepatan pencapaian tujuan rasional Pendidikan, yaitu meningkatnya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang mempunyai keunggulan dan daya saing dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Kegiatan ini melibatkan unsur dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan se Provinsi Kalimantan Utara, Kabid Pembinaan SMA, Kabid PMPK, Kabid Pembinaan GTK, Kabid Pembinaan Dikdas, Kabid Pembinaan GTK, Kabid Pembinaan PAUD, Kepala Cabang Dinas Pendidikan se Provinsi Kalimantan Utara, Kepala BGP Provinsi Kalimantan Utara, Koordinator Pengawas, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), PIC PDM BPMP dan staf BPMP Provinsi Kalimantan Utara.

Adapun tujuan dari kegiatan ini, yaitu: Memberikan pemahaman mendalam tentang Kebijakan Merdeka Belajar (KMB) kepada pemerintah daerah; Mendiskusikan peran penting pemerintah daerah dalam memberikan dukungan berupa regulasi, program dan anggaran yang mendukung Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar (KMB); dan Menyampaikan Program Kerja UPT dalam mendukung Kebijakan Merdeka Belajar (KMB) di daerah.



❖ Sosialisasi IKM

Tujuan sosialisasi Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) adalah untuk memperkenalkan dan memberikan informasi yang lebih detail tentang IKM kepada stakeholder pendidikan



Sosialisasi Pendaftaran Implementasi Kurikulum Merdeka Tahun 2024



Sosialisasi Pendaftaran Implementasi Kurikulum Merdeka Tahun 2024

❖ Festival Kurikulum Merdeka

Dalam rangka memperkuat dukungan ekosistem positif dari berbagai stakeholder dalam implementasi Kurikulum Merdeka BPMP Provinsi Kalimantan Utara sebagai salah satu UPT Kemendikbudristek di daerah menyelenggarakan Festival Kurikulum Merdeka yang bertujuan untuk mengamplifikasi cerita praktik baik implementasi dan memperkuat keberlanjutan kurikulum merdeka serta upaya mengoptimalkan promosi kesehatan di satuan pendidikan. Kegiatan ini menampilkan pameran karya, festival budaya, talkshow serta berbagai lomba dengan melibatkan pendidik, orang tua dan siswa.



❖ Refleksi IKM Tahap 1

Pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan belum dapat berjalan secara maksimal sesuai dengan harapan. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu upaya untuk menggali informasi tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Kurikulum Merdeka melalui kegiatan refleksi kepada Dinas Pendidikan, Pengawas, kepala sekolah, guru dari satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka. Untuk itu kegiatan Refleksi Implementasi Kurikulum Merdeka Tahap I bertujuan untuk: Mendapatkan informasi tentang apa saja yang telah dilakukan dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka terkait perencanaan, pembelajaran, asesmen, dan refleksi; Mendapatkan informasi tentang kesulitan atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka terkait perencanaan, pembelajaran, asesmen, refleksi; dan, Solusi yang sudah dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Hal yang masih dibutuhkan untuk perbaikan kedepan dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka.



❖ Menyosialisasikan berbagai media komunikasi untuk membangun persepsi positif orang tua terhadap Kurikulum Merdeka

Keterlibatan orang tua khususnya, menjadi salah satu faktor penentu kesuksesan penerapan Kurikulum Merdeka. Orang tua diharapkan dapat mengubah paradigma berpikir mereka bahwa sekolah bukan hanya tempat penitipan anak, kemudian menerima proses pembelajaran. Melalui poin beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, anak-anak diajarkan beribadah, belajar adab. Selaku orang tua, ia juga ikut bergotong royong untuk melatih kemandirian anak dengan melatih life skill dan mengajarkan mereka bertanggung jawab dengan properti sendiri. Tugas orang tua di rumah adalah memperbanyak komunikasi dengan anak. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini tujuannya yaitu: Memberikan informasi melalui berbagai media komunikasi untuk membangun persepsi positif orang tua terhadap Kurikulum Merdeka; Sebagai sarana kalobarasi sekolah dan orang tua untuk membangun persepsi positif terhadap Kurikulum Merdeka melalui berbagai media komunikasi.



❖ Visitasi IKM

Kebijakan Merdeka Belajar merupakan langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Indonesia yang memiliki Profil Pelajar Pancasila. Kurikulum Merdeka merupakan upaya pemerintah demi mewujudkan transformasi pendidikan di Indonesia ke arah yang lebih baik. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam dimana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu mengidentifikasi permasalahan dan kendala dalam implementasi

Kurikulum Merdeka dan mengukur keberhasilan Sekolah Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka.



❖ *Melakukan Advokasi IKM bagi mitra pembangunan IKM*

Menggandeng Mitra Pembangunan mewujudkan pembelajaran berkualitas melalui IKM (utamanya IKM secara mandiri oleh satuan pendidikan) faktanya juga menjadi salah satu dari 6 strategi Kemendikbudristek mensukseskan IKM secara mandiri di sekolah. Bagi pemerintah daerah, Mitra Pembangunan hadir ke mereka untuk berbagi sumberdaya, mengadvokasi dan mendampingi mereka mengawal kebijakan dan program Merdeka Belajar di wilayah kerjanya masing-masing. Sedangkan bagi satuan pendidikan (sekolah), hadirnya Mitra Pembangunan untuk membantu memfasilitasi penguatan berbagai program pembelajaran, karakter, sarana dan prasarana pendidikan serta lingkungan satuan pendidikan.

Mitra Pembangunan juga bisa berkolaborasi dengan komunitas belajar (pendidikan) melalui bantuanfasilitasi penyediaan narasumber dan pembentukan serta aktivasi berbagai program komunitas belajar (pendidikan) dalam mendukung kebijakan dan program Merdeka Belajar. Tujuan dari kegiatan ini yaitu melakukan koordinasi dengan Mitra Pembangunan dalam peran terkait Perkembangan IKM, membangun kerjasama dengan calon mitra pembangunan potensial mendukung program implementasi Kurikulum Merdeka dan melakukan refleksi terkait yang telah dilakukan oleh Mitra Pembangunan dalam perkembangan IKM. Kegiatan ini melibatkan Mitra Pembangunan serta komunitas belajar dari satuan pendidikan.




❖ **Pemantauan dan Evaluasi Peran Mitra Pembangunan IKM**

UPT Kemendikbudristek di daerah berperan melakukan koordinasi dengan Mitra Pembangunan PDM dalam melakukan pendampingan kepada sasaran kebijakan dan program PDM Kemendikbudristek, melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan terkait dengan dukungan Mitra Pembangunan PDM dalam implementasi kebijakan dan program PDM Kemendikbudristek serta membantu memberikan inspirasi praktik baik implementasi kebijakan dan program PDM Kemendikbudristek kepada sasaran Mitra Pembangunan PDM. Adapun tujuan kegiatan ini yaitu: Untuk mengetahui peran dan aktivitas Mitra Pembangunan dalam mendukung program Implementasi Kurikulum Merdeka khususnya di satuan pendidikan dan pemerintah daerah; Untuk memperoleh informasi dan data peran dalam mendukung program Implementasi Kurikulum Merdeka sebagai sumber dalam menganalisis dan evaluasi dampak terhadap kualitas pendidikan.



❖ **Melaksanakan Pendampingan IKM bagi Sekolah Pelaksana Kurikulum Merdeka yang Materinya Didasarkan pada Hasl Refleksi Pelaksanaan IKM tahun ajaran 2023/2024**

Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Impelementasi Kurikulum Merdeka khusunya di wilayah Kalimantan Utara sudah berjalan dari Tahun ajaran 2022/2023 sampai dengan saat ini, Sehingga perlu dilakukan Refleksi IKM untuk mengetahui apakah Pelaksanaan IKM ini sudah berjalan dengan baik atau belum. Refleksi ini dilaksanakan dengan menggunakan cara berpikir tumbuh (*growth mindset*). Kegiatan melaksanakan pendampingan IKM bagi sekolah pelaksana Kurikulum Merdeka yang materinya didasarkan pada hasil refleksi



pelaksanaan IKM tahun ajaran 2023/2024 melibatkan pegawai BPMP Provinsi Kalimantan Utara untuk melakukan kunjungan ke Satuan Pendidikan yang sudah ditetapkan

Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu: Mengidentifikasi permasalahan dan kendala dalam Implementasi Kurikulum Merdeka yang didasarkan dari hasil refleksi pelaksanaan IKM Tahun ajaran 2023/2024; Mengukur keberhasilan Sekolah Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka yang didasarkan dari hasil refleksi pelaksanaan IKM Tahun ajaran 2023/2024. Berikut Dokumentasinya:



❖ **Melaksanakan Survey Persepsi Orang Tua Terhadap Kurikulum Merdeka**

Keterlibatan orang tua khususnya menjadi salah satu faktor penentu kesuksesan penerapan Kurikulum Merdeka. Orang tua diharapkan dapat mengubah paradigma berpikir mereka bahwa sekolah bukan hanya tempat penitipan anak, kemudian menerima proses pembelajaran. Selaku orang tua, kita juga ikut bergotong royong untuk melatih kemandirian anak dengan melatih life skill dan mengajarkan mereka bertanggung jawab dengan properti mereka sendiri. Peran orang tua sangat penting bagi anak, terutama saat anak kita kesulitan. Orang tua sangat diharapkan dapat terlibat aktif, mendukung semua kegiatan anak-anak mereka dengan baik, supaya tujuan pemerintah untuk menghadirkan generasi Indonesia yang mengamalkan Profil Pelajar Pancasila dapat tercapai. Adapun tujuan kegiatan Melaksanakan Survei Persepsi Orang Tua Terhadap Kurikulum Merdeka sebagai berikut: Mengetahui sejauhmana persepsi orang tua terhadap Kurikulum Merdeka; Sebagai sarana kolaborasi sekolah dan orang tua untuk membangun persepsi orang tua terhadap Kurikulum Merdeka.



❖ Refleksi IKM Tahap 2

Kurikulum Merdeka bertujuan untuk menciptakan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan peserta didik dan memberikan kebebasan bagi guru untuk mengembangkan materi pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna. Dalam implementasinya, kurikulum Merdeka memerlukan peran aktif dari para guru dalam menyusun, merancang, dan mengimplementasikan kurikulum tersebut saat proses pembelajaran di kelas.

Oleh karena itu, kesiapan perencanaan guru sangat penting dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Tujuan dari kegiatan ini yaitu merefleksi hasil Implementasi Kurikulum Merdeka yang sudah terlaksana.



3) PDM-03A Tranformasi Digital untuk Sumber Daya Sekolah

Tranformasi Digital adalah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan adalah upaya mendukung terciptanya transformasi pembelajaran. Kepala Sekolah, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan perlu menciptakan ekosistem transformasi pembelajaran termasuk pada bagian teknologi, agar tercipta transformasi pembelajaran yang nyata di Satuan Pendidikan. Pemanfaatan platform Sumber Daya Sekolah (SDS) berupa ARKAS dan SIPLah untuk memudahkan satuan pendidikan dalam pengelolaan dana BOSP dan dana lainnya.

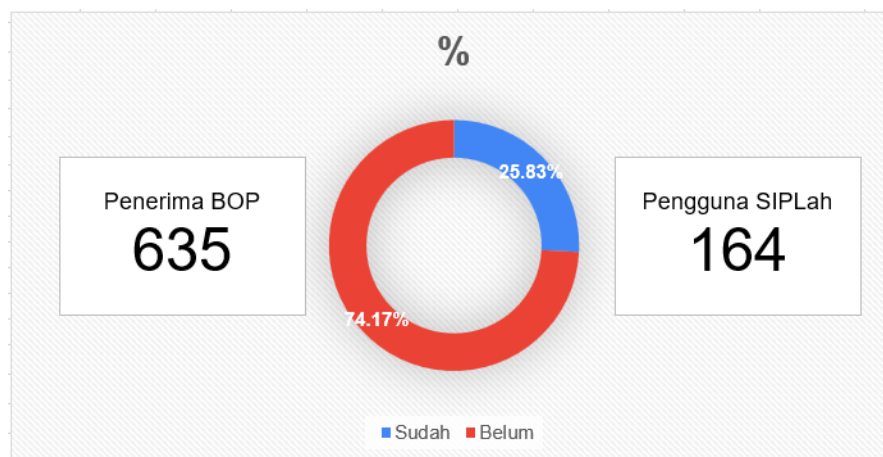
a) Objektif dan Target UPT

No	Objektif UPT	Target UPT
1.	90% satuan pendidikan penerima BOS dan 50% satuan pendidikan BOP	90% satuan pendidikan penerima BOS dan 50% satuan pendidikan

	menggunakan SIPLah	BOP menggunakan SIPLah
2.	80% dinas pendidikan memanfaatkan modul integrasi MARKAS-SIPD untuk perencanaan dan Pelaporan	80% dinas pendidikan memanfaatkan modul integrasi MARKAS-SIPD untuk perencanaan dan Pelaporan
3.	90% satuan pendidikan penerima BOSP melaporkan penggunaan dananya melalui ARKAS	90% satuan pendidikan penerima BOSP melaporkan penggunaan dananya melalui ARKAS
4	100% satuan pendidikan penerima BOS dan 50% satuan pendidikan penerima BOP melakukan perencanaan pada T-1	100% satuan pendidikan penerima BOS dan 50% satuan pendidikan penerima BOP melakukan perencanaan pada T-1

b) Capaian

- **50% satuan pendidikan penerima BOP menggunakan SIPLah**



Data di atas menunjukkan bahwa satuan pendidikan penerima BOP baik jenjang PAUD maupun jenjang Kesetaraan yang menggunakan SIPLah sebanyak 164 sekolah dari total 635 satuan pendidikan dengan persentase sebesar 25,83%

Jenjang	Penerima BOP	Pengguna Siplah	Persentase
TK/PAUD	589	152	25.81%
Kesetaraan	46	12	26.09%
TOTAL	635	164	25.83%

- **80% Dinas Pendidikan memanfaatkan modul integrasi MARKAS-SIPD untuk perencanaan dan pelaporan.**

Belum ada data tentang pemanfaatan modul integrasi MARKAS-SIPD dikarenakan pengintegrasian ini akan direncanakan mulai tahun 2025

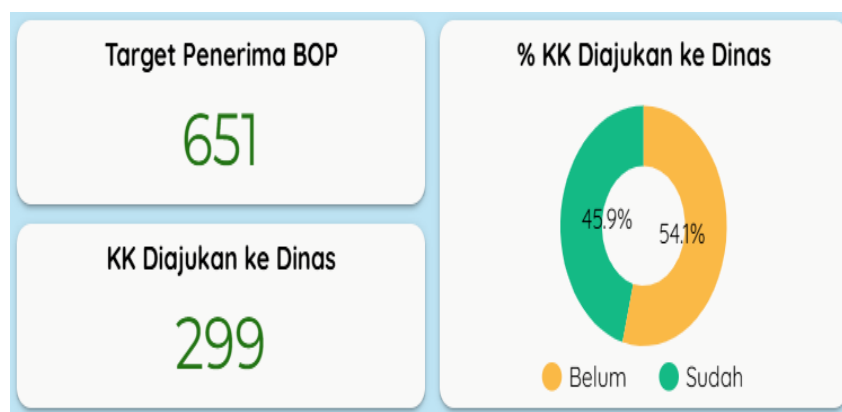
- **90% satuan pendidikan penerima BOP melaporkan penggunaan dananya melalui ARKAS**

Progres pelaporan penggunaan Dana BOP oleh satuan pendidikan pada tiap bulannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Jenjang	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
TK/PAUD	64.49%	64.82%	64.82%	64.82%	64.82%
Kesetaraan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Jenjang	Jun	Jul	Agu	Sep	
TK/PAUD	63.65%	36.68%	33.00%	24.29%	
Kesetaraan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Jenjang	Okt	Nov	Des		
TK/PAUD	21.27%	6.03%	0.00%		
Kesetaraan	0.00%	0.00%	0.00%		

esetaraan pelaporan penggunaan Dana BOP masih 0%, karena belum ada dashboar untuk monitoring pelaporan Dana BOP

- **50% satuan pendidikan penerima BOP melakukan perencanaan pada T-1**



Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Jenjang	Penerima BOSP	Membuat Perencanaan T-1	Persentase
TK/PAUD	601	273	45.42%
KESETARAAN	50	26	52.00%
TOTAL	651	299	45.93%

4) PDM-03B Optimalisasi Chromebook & Belajar ID

PDM-03B adalah PDM yang membidangi terkait pemanfaatan Google Workspace for Education (GWE), akun belajar.id, optimalisasi pemanfaatan TIK [Chromebook] dalam pembelajaran untuk satuan pendidikan penerima bantuan TIK, serta terkait peningkatan jumlah dan sebaran daerah champion dari seluruh pemda di Indonesia, khususnya pemda wilayah provinsi Kalimantan Utara.

a) Objektif dan Target UPT

No	Objektif UPT	Target UPT
1.	Meningkatkan jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan Google Workspace for Education dari 83,53% menjadi 100% satuan pendidikan [minimal 25% guru per satuan pendidikan memanfaatkan GWE]	100%
2.	Meningkatkan pemanfaatan Chromebook dalam proses pembelajaran pada 100% satuan pendidikan penerima bantuan TIK melalui Bantuan Pusat	100%
3.	Meningkatkan pemanfaatan Chromebook dalam proses pembelajaran pada 100% satuan pendidikan penerima bantuan TIK melalui Bantuan DAK TIK	100%
4.	Meningkatkan jumlah dan sebaran daerah champion dari 80 Pemda menjadi 200 Pemda	1 Pemda

b) Capaian PDM-03B Optimalisasi Chromebook & Belajar ID

No	Objektif UPT	Target UPT	Satuan	Capaian	Satuan
1	Meningkatkan jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan Google Workspace for Education dari 83,53% menjadi 100% satuan pendidikan [minimal 25% guru per satuan pendidikan memanfaatkan GWE]	100	%	60,65	%
2	Meningkatkan pemanfaatan Chromebook dalam proses pembelajaran pada 100% satuan pendidikan penerima bantuan TIK melalui Bantuan Pusat	100	%	99,3	%
3	Meningkatkan pemanfaatan Chromebook dalam proses pembelajaran pada 100% satuan pendidikan penerima bantuan TIK melalui Bantuan DAK TIK	100	%	99,3	%
4	Meningkatkan jumlah dan sebaran daerah champion dari 80 Pemda menjadi 200	1	Pemda	0	Pemda

No	Objektif UPT	Target UPT	Satuan	Capaian	Satuan
	Pemda				

c) Kegiatan yang telah Dilakukan

- Pelaksanaan pelatihan/bimtek Optimalisasi Chromebook dan belajar.id pada Pemerintah daerah dan Satpen



- Supervisi Program Transformasi Digital di Pemerintah Daerah



- Advokasi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan untuk Optimalisasi Chromebook

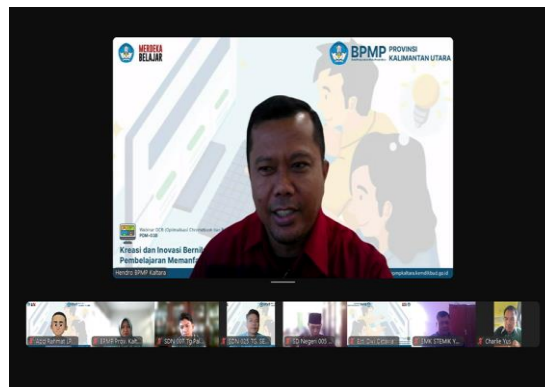


- Webinar OCB (Kreasi dan Inovasi bernilai kearifan lokal dalam Pembelajaran memanfaatkan TIK) series 1, 2, 3, dan 4

❖ Webinar Series 1



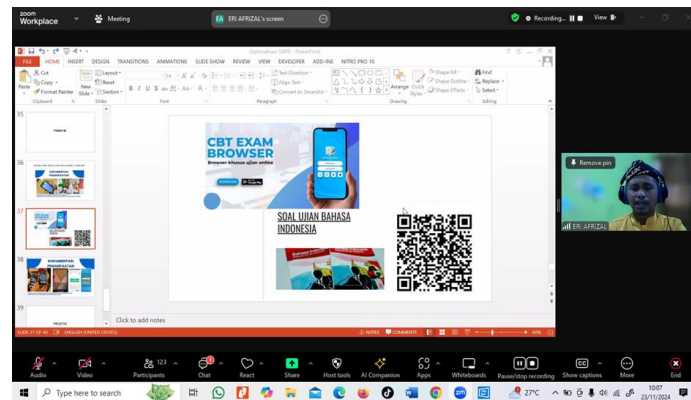
❖ Webinar Series 2



❖ Webinar Series 3



❖ Webinar Series 4



- Bimtek Peningkatan Kapasitas Kombel Belajar Id dalam pemanfaatan TIK untuk Pembelajaran



5) PDM-04A Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan Rapor Pendidikan untuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam agenda Sosialisasi Rapor Pendidikan 2024 di Plasa Insan Berprestasi, Kompleks Kemendikbudristek, Selasa (5/3). Peluncuran tersebut sekaligus menyosialisasikan pembaruan data Rapor Pendidikan untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Rapor Pendidikan Daerah. Tiap tahunnya, Kemendikbudristek terus melakukan pembaruan data Rapor Pendidikan secara berkala, sebagai referensi untuk menentukan prioritas pembenahan pendidikan.

Rapor Pendidikan PAUD sendiri merupakan hasil dari Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar) PAUD yang dapat dimanfaatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintahan daerah, satuan pendidikan hingga orang tua dalam mendukung satuan pendidikan melakukan pembenahan. Hadirnya Rapor Pendidikan untuk satuan PAUD sekaligus upaya menunjukkan kuatnya komitmen Kemendikbudristek terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan sebagai proses yang berkelanjutan.

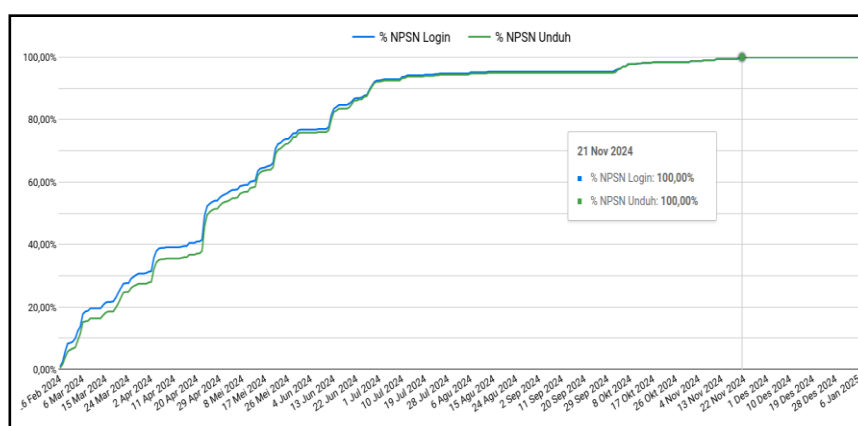
a) Objektif dan Target UPT

No	Objektif UPT	Target UPT
1.	Berjalannya transformasi satuan pendidikan dengan capaian dan memiliki delta positif)	95% Satuan PAUD telah melakukan Login
2.		95% Satuan PAUD telah melakukan Eksplorasi & Unduh
3.		100% Satuan SKB telah melakukan Login
dst		90% Satuan SKB telah melakukan Eksplorasi dan Unduh
		80% Satuan PKBM telah melakukan Login
		70% Satuan PKBM telah melakukan Eksplorasi dan Unduh

b) Capaian

Progres Login dan Unduh Rapor Pendidikan Jenjang PAUD dari waktu ke waktu sejak dirilis tanggal 05 Maret 2024 hingga 21 November 2024 :

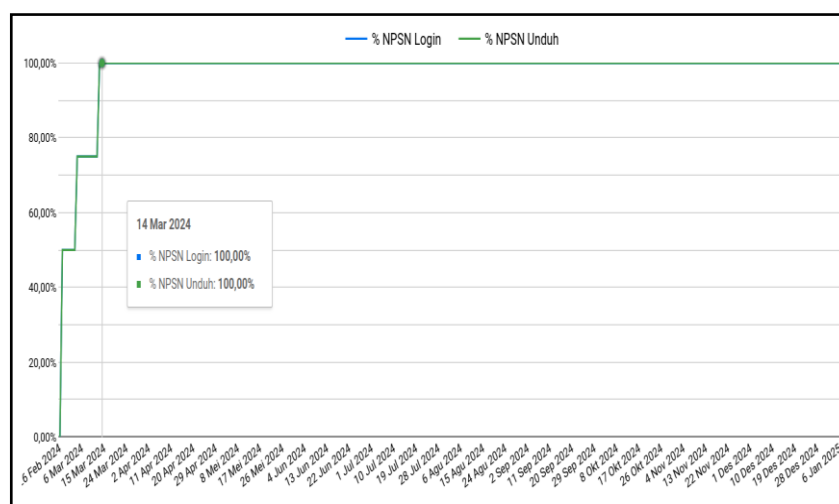
No	Jumlah Satuan PAUD	Target	Capaian
1.	464	95% atau sebanyak 440 Layanan Satuan PAUD Melakukan Login Rapor Pendidikan	100% atau sebanyak 464 Layanan Satuan PAUD telah melakukan Login Rapor Pendidikan
2.	464	95% atau sebanyak 440 Layanan Satuan PAUD Melakukan Eksplorasi dan Unduh Rapor Pendidikan	100% atau sebanyak 464 Layanan Satuan PAUD telah melakukan Eksplorasi dan Unduh Rapor Pendidikan



Capaian Progres Login dan Unduh Rapor Pendidikan Jenjang PAUD Se-Kalimantan Utara Tahun 2024

Dari grafik di atas, Rapor Pendidikan jenjang PAUD Sejak diluncurkan tanggal 05 Maret 2024 secara bertahap dan simultan telah diakses oleh Satuan PAUD. Puncaknya adalah hingga 21 November 2024, Seluruh Satuan PAUD di Provinsi Kalimantan Utara telah mencapai 100% Login dan Unduh. Progres Login dan Unduh Rapor Pendidikan SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) dari waktu ke waktu sejak dirilis tanggal 05 Maret 2024 hingga 14 Maret 2024 :

No.	Jumlah Satuan SKB	Target	Capaian
1	11	100% atau sebanyak 11 Layanan Satuan SKB Melakukan Login Rapor Pendidikan	100% atau sebanyak 11 Layanan Satuan SKB telah melakukan Login Rapor Pendidikan
2	11	100% atau sebanyak 11 Layanan Satuan SKB Melakukan Eksplorasi dan Unduh Rapor Pendidikan	100% atau sebanyak 11 Layanan Satuan SKB telah melakukan Eksplorasi dan Unduh Rapor Pendidikan

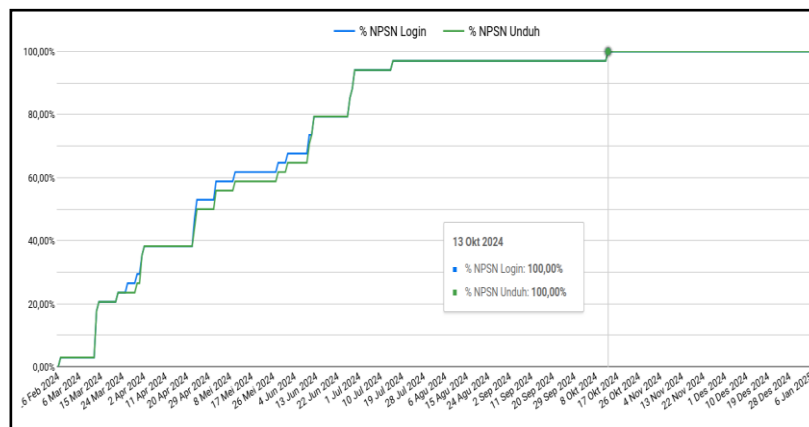


Capaian Progres Login dan Unduh Rapor Pendidikan SKB Se-Kalimantan Utara Tahun 2024

Sejak dirilis tanggal 05 Maret 2024 hingga 14 Maret 2024, Satuan SKB di Provinsi Kalimantan Utara seluruhnya telah 100% melakukan Login dan Unduh Rapor Pendidikan. Di Tingkat Nasional, Satuan PKBM Provinsi Kalimantan Utara adalah satuan pendidikan yang tercepat penyelesaian Login dan Unduh Rapor Pendidikan. Progres Login dan Unduh Rapor Pendidikan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dari waktu ke waktu sejak dirilis tanggal 05 Maret 2024 hingga 13 Oktober 2024 :

No.	Jumlah Satuan PKBM	Target	Capaian
1	75	80% atau sebanyak 60 Layanan Satuan PKBM Melakukan Login Rapor Pendidikan	100% atau sebanyak 11 Satuan SKB telah melakukan Login Rapor Pendidikan

No.	Jumlah Satuan PKBM	Target	Capaian
2	75	70% atau sebanyak 53 Layanan Satuan SKB Melakukan Eksplorasi dan Unduh Rapor Pendidikan	100% atau sebanyak 11 Satuan SKB telah melakukan Eksplorasi dan Unduh Rapor Pendidikan



Capaian Progres Login dan Unduh Rapor Pendidikan PKBM Se-Kalimantan Utara Tahun 2024

Berdasarkan rentang waktu pada grafik di atas, terhitung sejak perilisasi Rapor Pendidikan tanggal 05 Maret 2024 sudah mulai melakukan login dan unduh. Puncaknya adalah pada tanggal 13 Oktober 2024, Seluruh Satuan PKBM di Kalimantan Utara telah melakukan 100% login dan unduh Rapor Pendidikan.

Tabel Rekapitulasi Login dan Unduh Rapor Pendidikan Satuan PAUD Se-Indonesia Per 31 Desember 2024

Nama Provinsi	Jumlah Satuan PAUD	Jumlah Sekolah Unduh	% Unduh	Sisa Unduh
Prov. Kalimantan Utara	492	492	100.00%	0

Sumber : Dashboard Adopsi Rapor Pendidikan Nasional – Direktorat Jenderal PDM Kemdikbudristek

Pada tabel di halaman sebelumnya, Provinsi Kalimantan Utara adalah satu-satunya Provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Seluruh Satuan PAUD-nya telah 100% melakukan Login dan Unduh Rapor Pendidikan. Merupakan sebuah prestasi dan kebanggaan tersendiri dan perlu diapresiasi, karena ini merupakan hasil dari kolaborasi BPMP Provinsi Kalimantan Utara melalui pendekatan konsultatif dan asimetris dengan Pemerintah Daerah melalui Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Provinsi dan Kab/Kota se-Kalimantan Utara dalam mengimplementasikan dan mengawal Kebijakan Merdeka Belajar ke-19 Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data.



Tabel Rekapitulasi Login dan Unduh Rapor Pendidikan Satuan SKB Se-Indonesia Per 31 Desember 2024

Nama Provinsi	Jumlah Satuan SKB	Jumlah Sekolah Unduh	% Unduh	Sisa Unduh
Prov. Kalimantan Utara	11	11	100.00%	0

Sumber : Dashboard Adopsi Rapor Pendidikan Nasional – Direktorat Jenderal PDM
Kemdikbudristek

Pada tabel dapat kita lihat, Provinsi Kalimantan Utara adalah salah satu Provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Seluruh Satuan SKB-nya telah 100% melakukan Login dan Unduh Rapor Pendidikan. Hal ini juga Merupakan sebuah prestasi dan kebanggaan tersendiri dan perlu diapresiasi, karena ini merupakan hasil dari kolaborasi BPMP Provinsi Kalimantan Utara melalui pendekatan konsultatif dan asimetris dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi dan Kab/Kota se-Kalimantan Utara dalam mengimplementasikan dan mengawal Kebijakan Merdeka Belajar ke-19 Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data.

Tabel Rekapitulasi Login dan Unduh Rapor Pendidikan Satuan PKBM Se-Indonesia Per 31 Desember 2024

Nama Provinsi	Jumlah Satuan PKBM	Jumlah Sekolah Unduh	% Unduh	Sisa Unduh
Prov. Kalimantan Utara	75	75	100.00%	0

Sumber : Dashboard Adopsi Rapor Pendidikan Nasional – Direktorat Jenderal PDM
Kemdikbudristek

Dapat dilihat pada tabel di atas, Provinsi Kalimantan Utara adalah salah satu Provinsi yang Login dan Unduh Rapor Pendidikannya telah mencapai 100%. Dan merupakan Provinsi yang tercepat dalam Adoption Rate Rapor Pendidikan Satuan PKBM.

c) Kegiatan yang telah dilakukan

Sepanjang Tahun 2024, PDM-04A banyak melaksanakan Program dan Kegiatan. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan PDM-04A BPMP Provinsi Kalimantan Utara untuk mencapai Objektif : Berjalannya Transformasi Satuan Pendidikan dengan Capaian dan memiliki Delta Positif, antara lain :

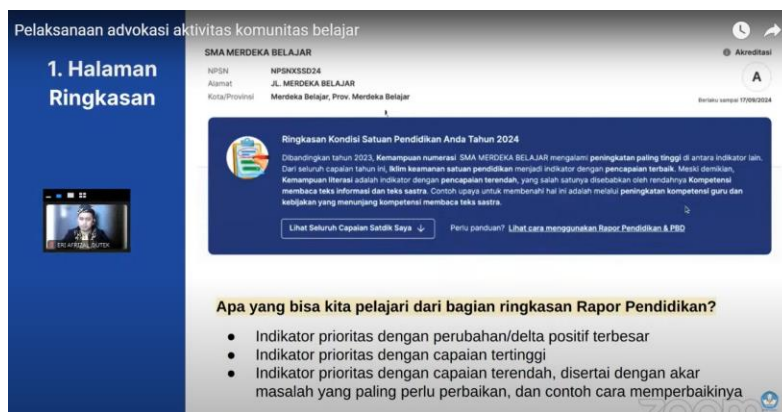
- **Gap Analysis terkait Pemanfaatan Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan.** Kegiatan ini dilaksanakan secara Tatap Muka pada tanggal 22 s.d. 24 April.





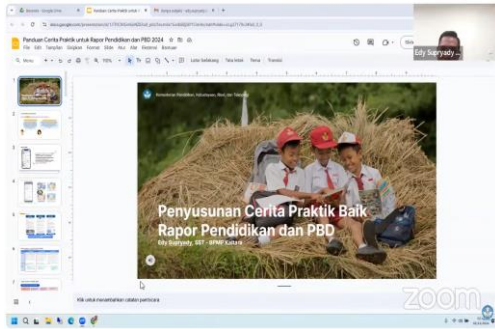
- **Pelaksanaan Kegiatan Advokasi Aktivitas Komunitas Belajar dalam rangka Transformasi Satuan Pendidikan oleh UPT.**

Kegiatan ini dilaksanakan secara Daring, mengundang seluruh Komunitas Belajar yang telah terdaftar di Platform Merdeka Mengajar (PMM). Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Juni Tahun 2024.



- **Penyusunan Cerita Praktik Baik Satuan Pendidikan mengimplementasikan Perencanaan Berbasis Data dalam rangka Transformasi Satuan Pendidikan.**

Kegiatan ini dilaksanakan secara Daring pada awal Bulan Desember 2024 secara Daring. Diikuti oleh Perwakilan Sekolah yang Rapor Pendidikannya mengalami Peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya serta Perwakilan Sekolah Penggerak di Prpvinsi Kalimantan Utara



- **Pelaksanaan Advokasi Pemanfaatan Rapor Pendidikan dalam rangka Transformasi Satuan Pendidikan kepada Pemerintah Daerah.**

Advokasi Pemanfaatan Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung dilaksanakan secara Tatap Muka mulai tanggal 09 s.d. 13 September 2024 di Hotel Galaxy Tarakan, kegiatan dihadiri oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Tidung.



- **Pelaksanaan Pendampingan Satuan Pendidikan yang belum mengakses Rapor Pendidikan oleh UPT.**

PDM-04A BPMP Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan Pendampingan Satuan Pendidikan yang belum mengakses Rapor Pendidikan sepanjang Tahun 2024. Baik secara daring maupun secara luring.



- **Pemantauan hasil pelaksanaan Advokasi Pemanfaatan Rapor Pendidikan dalam rangka Transformasi Pendidikan kepada Pemerintah Daerah terhadap objective PDM-04A.**

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10 s.d. 12 Mei 2024. Bentuk kegiatan ini adalah Petugas BPMP Provinsi Kalimantan Utara turun lapangan ke Satuan Pendidikan dan Ke dinas Pendidikan.



Dokumentasi PIC PDM-04A melakukan Pemantauan Hasil Advokasi Pemanfaatan Rapor Pendidikan di salah satu Sekolah.



Dokumentasi Petugas BPMP Provinsi Kalimantan Utara melakukan Pemantauan Hasil Advokasi di salah satu Sekolah

- **Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Transformasi Satuan Pendidikan oleh UPT di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota**

Monitoring dan Evaluasi Implementasi Transformasi Satuan Pendidikan dilaksanakan pada tanggal 08 s.d. 10 Agustus 2024, Tim PDM-04A turun ke satuan pendidikan untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi secara langsung.



- **Pelaksanaan Refleksi dan Analisis Data Implementasi Transformasi Satuan Pendidikan oleh UPT (Prov/Kab/Kota)**

Kegiatan Refleksi Implementasi Transformasi Satuan Pendidikan oleh UPT dilaksanakan secara Tatap Muka Langsung dalam bentuk kegiatan Forum Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan di Hotel Diamond Tarakan pada tanggal 18 s.d. 20 November 2024. Mengundang Seluruh Pejabat dan Staf Dinas Pendidikan, Pengawas Sekolah serta Perwakilan Sekolah.





6) PDM-04B Perencanaan Berbasis Data dan Rapor Pendidikan Pemda

Arah Kebijakan Bidang Pendidikan kita ialah meningkatkan angka partisipasi siswa dan meningkatkan kualitas pendidikan yang merata di semua jenjang Pendidikan yang pada akhirnya akan mewujudkan Masyarakat Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dicapai salah satunya melalui perbaikan pembelanjaan anggaran yang efektif dan akuntabel. Kemendikbudristek mendorong penerapan arah kebijakan tersebut pada daerah, melalui pemenuhan **Standar Pelayanan Minimal (SPM)** di bidang Pendidikan. UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menetapkan fokus penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat. Pasal 298 (1) mengutamakan belanja daerah untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dengan Standar Pelayanan Minimal. Dalam konteks pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan Merdeka Belajar episode ke 19: Rapor Pendidikan Indonesia, berisi profil pendidikan yang digunakan sebagai dasar analisis, perencanaan, dan monitoring peningkatan kualitas Pendidikan. Kemendikbudristek dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan delapan indikator prioritas untuk provinsi dan kabupaten/kota pada Rapor Pendidikan sebagai dasar pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan. Sebagai dasar hukum Kemdikbudristek menerbitkan Permendikbud No 32 tahun 2022 dan Kemdagri menerbitkan Permendagri no 059 tahun 2021 terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan. Indikator ini mencakup aspek seperti Angka Partisipasi Sekolah, Kompetensi Literasi, Kompetensi Numerasi, hingga Iklim Keamanan dan Inklusivitas.

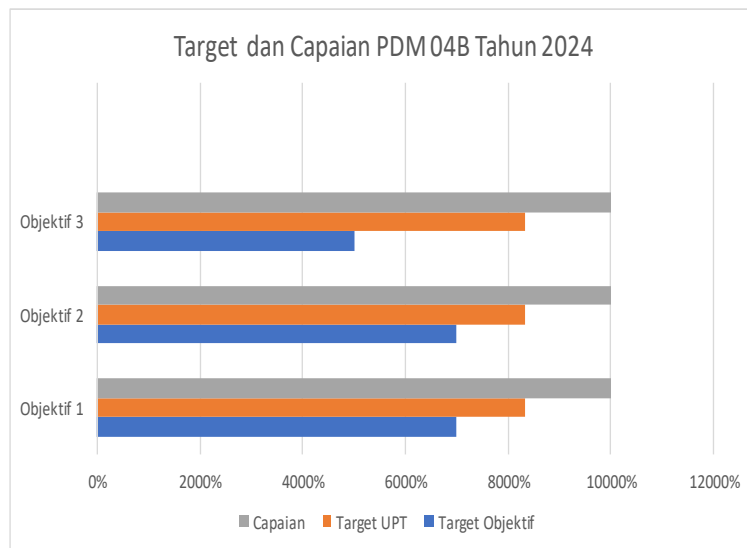
a) Objektif dan Target PDM

- 70% Pemda melaksanakan Perencanaan Berbasis Data melalui Indikator Prioritas SPM Pendidikan. Target UPT 83,33% Pemda melaksanakan Perencanaan Berbasis Data melalui Indikator Prioritas SPM Pendidikan.
- 70% Pemda melaksanakan Perencanaan Berbasis Data melalui sub kegiatan minimal prioritas SPM Pendidikan. Target UPT 83,33% Pemda melaksanakan Perencanaan Berbasis Data melalui sub kegiatan minimal prioritas SPM Pendidikan.
- 50% Pemda merealisasikan SPM Pendidikan sesuai dengan perencanaannya. Target UPT 83,33% Pemda merealisasikan SPM Pendidikan sesuai dengan perencanaannya

b) Capaian

- 100% Pemda melaksanakan Perencanaan Berbasis Data melalui Indikator Prioritas SPM Pendidikan..
- 100% Pemda melaksanakan Perencanaan Berbasis Data melalui sub kegiatan minimal prioritas SPM Pendidikan.
- 100% Pemda merealisasikan SPM Pendidikan sesuai dengan perencanaannya.





c) Kegiatan yang telah dilakukan



Pendampingan Rakortek Kabupaten / Kota BAPPEDA Provinsi Oleh UPT



Pendampingan Perencanaan Pemda Terkait SPM Pendidikan Oleh UPT



Pendampingan Realisasi SPM Pendidikan Semester I oleh UPT



Pendampingan Penganggaran SPM Pendidikan oleh UP

7) PDM-05 Kemitraan Daerah

Kebijakan Merdeka Belajar merupakan kebijakan yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI kabinet Indonesia Maju, Nadiem Anwar Makarim. Sampai dengan bulan Desember 2023 sudah ada 26 episode kebijakan Merdeka belajar yang telah diluncurkan. BPMP Provinsi Kalimantan Utara sebagai salah satu UPT Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi merupakan kepanjangan tangan pusat dalam meneruskan kebijakan kepada Pemerintah Daerah. Dalam menjalankan tugas tersebut, BPMP Provinsi Kalimantan Utara menjalin kemitraan dengan beberapa stakeholder di daerah diantaranya yang paling utama yakni dengan Dinas Pendidikan baik Provinsi, Kabupaten maupun Kota. Di wilayah Provinsi Kalimantan Utara terdapat satu Dinas Pendidikan Provinsi, 4 Dinas Pendidikan Kabupaten dan satu Dinas Pendidikan Kota. Untuk mengawal tersampainya kebijakan pusat terkait Pendidikan, maka BPMP provinsi Kalimantan Utara perlu melakukan advokasi ke Daerah. Advokasi ini menjadi salah satu peran dari PDM 05 – Kemitraan Daerah untuk mengawal tersampainya dan terlaksananya program pemerintah di daerah.

a) Objektif dan Target UPT

No.	Objektif UPT	Target UPT
1.	<p>Jangka Pendek : Pada akhir Februari 2024, 100% Kebutuhan KS dan PS di daerah GP Oversupply dan Equal diisi oleh GPMS.</p> <p>Jangka Menengah : Pada akhir Mei 2024, 50%; Pada akhir Agustus, 75%; dan pada akhir November, 100%; Kebutuhan KS dan PS di daerah Undersupply GP diisi oleh GPMS.</p>	<p>Jangka Pendek : Pada akhir Februari 2024, 100% Kebutuhan KS dan PS di daerah GP Oversupply dan Equal diisi oleh GPMS.</p> <p>Jangka Menengah : Pada akhir Mei 2024, 50%; Pada akhir Agustus, 75%; dan pada akhir November, 100%; Kebutuhan KS dan PS di daerah Undersupply GP diisi oleh GPMS.</p>
2.	90% Pemda melaksanakan PPDB sesuai dengan prinsip objective, transparan dan akuntabel ditahun 2024.	90% Pemda melaksanakan PPDB sesuai dengan prinsip objective, transparan dan akuntabel ditahun 2024.
3.	<p>100% Pemda dan 100% Satpen mempunyai satgas PPKSP.</p> <p>a. Untuk PAUD pada bulan Agustus 2024.</p> <p>b. Untuk SD, SMP, SMA pada bulan Februari 2024.</p>	<p>100% Pemda dan 100% Satpen mempunyai satgas PPKSP.</p> <p>a. Untuk PAUD pada bulan Agustus 2024.</p> <p>b. Untuk SD, SMP, SMA pada bulan Februari 2024.</p>

b) Capaian

- **Jangka Pendek** : Pada akhir Februari 2024, 100% Kebutuhan KS dan PS di daerah GP Oversupply dan Equal diisi oleh GPMS, **Jangka Menengah** : Pada akhir Mei 2024, 50%; Pada akhir Agustus, 75%; dan pada akhir November, 100%; Kebutuhan KS dan PS di daerah Undersupply GP diisi oleh GPMS. Guru Penggerak adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru yang bersifat transformasi, diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mulai tahun 2020 yang kemudian diampu oleh Balai Guru Penggerak mulai tahun 2022. Setelah guru lolos Pendidikan Guru Penggerak (PGP), maka selanjutnya tugas BPMP untuk mendorong pemerintah daerah agar segera mengangkat Guru Penggerak yang memenuhi syarat untuk menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah. Pengangkatan kepala sekolah dan pengawas

sekolah ini dilakukan melalui Sistem Pengangkatan Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah.

Berdasarkan target di atas, berikut capaian pengangkatan guru penggerak menjadi kepala sekolah/pengawas sekolah di daerah oversupply.

No	Wilayah	Ketersediaan KSPS	Kebutuhan KS	Kebutuhan PS	GP jadi KS	GP jadi PS	% GP jadi KS	%GP jadi PS
1	Provinsi	119	2	0	12	0	85,71%	0%
2	Tarakan	58	4	0	9	0	69,23%	0%
3	Bulungan	49	16	23	9	0	36%	0%
4	Tana Tidung	22	3	0	3	0	50%	0%
5	Nunukan	15	6	23	3	0	33,33%	0%
6	Malinau	7	2	19	1	0	33,33%	0%
Total							51,27%	0%

Sumber: Dashboard Pengangkatan GP KS dan Sistem Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah.

Informasi Data:

- Kolom Ketersediaan KS adalah Total GP MSKS
- Kolom Kebutuhan KS adalah Total Plt KS + Total Sekolah Tanpa KS
- Kolom Kebutuhan PS adalah Total Kebutuhan PS yang direkomendasikan
- Kolom %GP Jadi KS adalah Kolom (GP Jadi KS) dibagi Kolom Kebutuhan KS+GP Jadi KS

Tabel di atas adalah capaian pengangkatan kepala sekolah/pengawas sekolah di daerah oversupply. Untuk wilayah provinsi Kalimantan Utara sudah tidak ada daerah undersupply sehingga capaian pengangkatan GP di daerah undersupply adalah 100%.

• 90% Pemda melaksanakan PPDB sesuai dengan prinsip objective, transparan dan akuntabel ditahun 2024.

Berdasarkan target di atas, berikut capaian Pemda dalam melaksanakan PPDB sesuai dengan prinsip objective, transparan dan akuntabel ditahun 2024.

PRINSIP	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SUMBER DATA
Objektif	Dokumen kebijakan PPDB tersedia dan mengacu pada regulasi nasional	100% Pemda	Juknis PPDB
	Proses seleksi PPDB berbasis zonasi, prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua	100% Pemda (kecuali daerah 3T)	Juknis PPDB
	Tingkat keberhasilan mengurangi kecurangan dalam penerimaan siswa	100% bebas kecurangan	Laporan PPDB
	Persentase sekolah yang melaksanakan sistem zonasi	100% sekolah	Juknis PPDB

Transparan	Ketersediaan informasi PPDB secara daring dan luring	100% Pemda	Juknis PPDB
	Sosialisasi PPDB di seluruh wilayah kabupaten/kota	100% wilayah	Dasbor Pemantauan PPDB
	Penggunaan sistem daring untuk pendaftaran dan pengumuman hasil PPDB	90% Pemda	Juknis PPDB
	Jumlah laporan keluhan masyarakat terkait transparansi PPDB	< 5% dari total	Laporan PPDB
Akuntabel	Jumlah laporan pelaksanaan PPDB yang diterbitkan Pemda.	100% Pemda	Laporan PPDB
	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dalam waktu tertentu	100% pengaduan	Laporan PPDB
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan PPDB	80% wilayah	Laporan PPDB

- **100% Pemda dan 100% Satpen mempunyai satgas PPKSP**

- ❖ Untuk PAUD pada bulan Agustus 2024
- ❖ Untuk SD, SMP, SMA pada bulan Februari 2024

PPKSP adalah kepanjangan dari Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) merespons kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbudristek PPKSP). Regulasi tersebut merupakan komitmen Kemendikbudristek untuk memberikan jaminan langkah pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan yang diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada peserta didik, guru, tenaga kependidikan, dan warga sekolah lainnya yang beraktivitas di dalam satuan pendidikan. Mengawali komitmen bersama untuk pencegahan kekerasan, maka pemda dan satuan pendidikan seluruh jenjang diharapkan telah membentuk satuan tugas dan tim PPKSP.

Berdasarkan target di atas, pembentukan satgas PPKSP untuk Pemda sudah mencapai 100% dan sudah diunggah ke Dasbor PPKSP. Rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Jumlah Satuan Tugas tiap PROV. KALIMANTAN UTARA				
Show 10 entries		Search: <input type="text"/>		
No	Nama Kota/Kabupaten	Satgas Kota/Kab	Satgas Kota/Kab Valid	Jumlah Anggota Satgas Kota/Kab
1	Kab. Malinau	✓	●	15
2	Kab. Bulungan	✓	●	5
3	Kab. Tana Tidung	✓	●	7
4	Kab. Nunukan	✓	●	9
5	Kota Tarakan	✓	●	7
TOTAL SEMUA		5	3	43
Showing 1 to 5 of 5 entries		Previous 1 Next		

Sumber: Dasbor PPKSP: (<https://referensi.data.kemdikbud.go.id/tppk/tppk/wilayah/340000/1>)



Pembentukan TPPK jenjang PAUD dan Dikmas di bulan Agustus 2024, dan TPPK jenjang SD, SMP, SMA, SMK, SLB pada bulan Februari 2024 seharusnya sudah terbentuk 100%, namun karena beberapa kendala dan hambatan seperti munculnya satuan pendidikan baru pasca PPDB, banyaknya satuan pendidikan di wilayah remote area, dan lain sebagainya sehingga pembentukan TPPK tidak 100% di semua jenjang. Berikut capaiannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Wilayah	TPPKSP 31 Desember 2024						
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	Dikmas
		%	%	%	%	%	%	%
1	Malinau	28,33	100	100	100	100	100	62,50
2	Bulungan	91,23	100	100	100	100	100	88,89
3	Tana Tidung	97,83	100	100	80	100	100	100
4	Nunukan	79,19	100	100	94,12	100	100	56,25
5	Tarakan	96,40	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dasbor PPKSP (<https://referensi.data.kemdikbud.go.id/tppk/tppk/wilayah/340000/1>).

c) Kegiatan yang telah dilakukan

Untuk mencapai target yang telah ditentukan di atas, BPMP Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya:

- **Rapat Koordinasi UPT terkait Pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah.**

Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 13 Februari 2024 dengan mengundang BGP Provinsi Kalimantan Utara, bertujuan untuk melakukan komunikasi dan koordinasi yang intensif sesama UPT Kemendikbudristek di daerah, harapannya dapat terwujud kekompakan serta kolaborasi yang baik antar UPT Kemendikbudristek dalam mengawal program pengangkatan GP menjadi KS/PS.

Selanjutnya PDM 05 melaksanakan lagi kegiatan yang sama dengan mengundang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan, dan BGP Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 19 Maret Tahun 2024. Tujuan kegiatan ini yaitu :

- ❖ Melakukan koordinasi terkait pengangkatan GP menjadi KS/PS;
- ❖ Menyamakan persepsi data kebutuhan KS/PS;
- ❖ Melakukan koordinasi dalam mencari solusi dan perbaikan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh daerah dalam pengangkatan Guru Penggerak menjadi KS/PS di daerah
- ❖ Koordinasi Optimalisasi penggunaan Sistem Pengangkatan KS/PS oleh Dinas Pendidikan.



• FGD Tindak Lanjut Kebijakan Program Guru Penggerak

Program Guru Penggerak merupakan salah satu program penting di dalam Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Peran Guru Penggerak untuk mentransformasi budaya sekolah kepada pembelajaran yang berfokus kepada siswa tidak akan tergantikan. Berkaitan dengan Program Guru Penggerak, BPMP memiliki tugas untuk mendorong pemerintah daerah agar segera mengangkat Guru Penggerak yang memenuhi syarat untuk menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, dan mendukung transformasi pembelajaran, maka BPMP Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan FGD Tindak Lanjut Kebijakan Program Guru Penggerak yang dilaksanakan pada 21 s.d 23 Mei 2024. Sasaran kegiatan tersebut antara lain : Kabid GTK, Kasi GTK, Operator Sistem KS/PS di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan, Dinas Pendidikan Kota Tarakan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Tidung, Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, serta BGP Provinsi Kalimantan Utara.



- **Evaluasi Kinerja Project PDM Triwulan 1 -3**

BPMP Provinsi Kalimantan Utara mempunyai fungsi melaksanakan penjaminan mutu pendidikan anak usia dini, dasar dan pendidikan menengah. Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu. Untuk mewujudkan hal tersebut, BPMP Provinsi Kalimantan Utara mempunyai rencana strategis atau project yang disusun untuk meningkatkan mutu pendidikan. Untuk melihat kendala dan hasil dari program-program yang telah dijalankan, maka BPMP Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan kegiatan Evaluasi Kinerja Project PDM Triwulan 1 - 3 agar seluruh pegawai dapat memahami tindak lanjut yang akan dilakukan setelah evaluasi tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2024, 09 Juli 2024 dan 30 November 2024.



- **Pendampingan PPDB Daerah**

PPDB adalah salah satu tahapan krusial dalam sistem pendidikan yang membutuhkan pengelolaan yang objektif, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara, PPDB menjadi fokus utama untuk memastikan akses pendidikan yang merata serta memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon peserta didik. Sejalan dengan semangat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah, diperlukan upaya konkret dalam memastikan pelaksanaan PPDB berjalan lancar, adil dan sesuai dengan pedoman PPDB yakni Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dan SK Sesjen Nomor 47/M/2023, maka BPMP Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan Pendampingan PPDB Daerah ke Dinas Pendidikan.

Pendampingan PPDB ke Dinas Pendidikan ini dilaksanakan pada tanggal 02 s.d. 04 Juni 2024 untuk Kabupaten Malinau dan tanggal 03 s.d 05 Juni 2024 untuk Provinsi, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan



• **Pemantauan Pelaksanaan PPDB**

Untuk mencapai prinsip PPDB yang objektif, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan PPDB perlu dilakukan pemantauan. Pemantauan PPDB dilakukan untuk memastikan bahwa proses PPDB berjalan dengan baik, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan mencapai tujuan yang diharapkan. Pemantauan PPDB dilaksanakan di rentang tanggal 19 Juni s.d. 05 Juli 2024.



• **Pengolahan Hasil Pemantauan**

Pemantauan PPDB yang dilaksanakan rentang tanggal 19 Juni s.d. 05 Juli 2024 selanjutnya dilakukan pengolahan hasil pemantauan oleh tim PDM 05. Pengolahan



hasil pemantauan nantinya akan dijadikan bahan rekomendasi ke Dinas Pendidikan. Pengolahan hasil pemantauan dilaksanakan pada tanggal 20 September 2024.



- **Refleksi dan Penyusunan Rekomendasi Pelaksanaan PPDB & Refleksi dan Evaluasi Kebijakan PPDB**

Setelah PPDB terlaksana dan dipantau kemudian diolah hasil pemantauan pelaksanaan PPDBnya, selanjutnya dilakukan refleksi dan penyusunan rekomendasi pelaksanaan PPDB & refleksi dan evaluasi kebijakan PPDB. Untuk kegiatan ini, karena tidak dianggarkan oleh tim perencana sedangkan desain dari pusat adalah kegiatan luring dengan Dinas Pendidikan, maka kegiatan digabung dengan PDM 01 yang berjudul Refleksi Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak Oleh Pemerintah Daerah. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober s.d 2 November 2024.



- **Advokasi dan Koordinasi Kebijakan Merdeka Belajar Ke Pemda**

Kebijakan Merdeka Belajar dilaksanakan untuk percepatan pencapaian tujuan nasional pendidikan, yaitu meningkatnya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang mempunyai keunggulan dan daya saing dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Oleh karena itu Merdeka Belajar memberikan otoritas dan fleksibilitas pengelolaan pendidikan di level sekolah, otoritas dan fleksibilitas tidak akan berkontribusi positif untuk mencapai tujuan pendidikan jika tidak ada kreativitas dan inovasi. Agar menjadi kreatif dan inovatif, maka harus melakukan perubahan/hijrah/change demi peningkatan kualitas hasil belajar siswa (karakter, literasi dan numerasi). Dengan demikian, dipandang perlu melakukan Advokasi dan Koordinasi Kebijakan Merdeka Belajar ke Pemda agar kebijakan merdeka belajar dapat menyentuh seluruh daerah dan diteruskan ke satuan pendidikan. Advokasi

dan Koordinasi Kebijakan Merdeka Belajar Ke Pemda ini dilakukan secara luring hotel pada tanggal 29 s.d 31 Januari 2024 dan luring perjadin ke Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau tanggal 19 s.d 21 Februari 2024, Dinas Pendidikan Kota Tarakan tanggal 14 s.d 16 Maret 2024, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Tidung tanggal 18 s.d 20 April 2024.



Advokasi dan Koordinasi Kebijakan Merdeka Belajar Luring Hotel.



Advokasi dan Koordinasi Kebijakan Merdeka Belajar Luring Perjadin (Malinau).



Advokasi dan Koordinasi Kebijakan Merdeka Belajar Luring Perjadin (Tarakan)



Advokasi dan Koordinasi Kebijakan Merdeka Belajar Luring Perjadin (Tana Tidung).

• Tim Agen Penggerak

Untuk membantu advokasi dan sosialisasi ke Satuan Pendidikan agar lebih melekat dan menjangkau seluruh lapisan, khususnya untuk daerah di wilayah 3T. Maka BPMP Provinsi Kalimantan Utara membentuk Tim Agen Penggerak Transformasi Pendidikan (AFTP). Tim ini terdiri dari unsur PIC PDM BPMP Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Pendidikan, Duta Teknologi, Kepala Sekolah dan Guru yang aktif dalam kontribusi pendidikan di Kalimantan Utara. AFTP ini memiliki tugas yaitu : Melakukan koordinasi terhadap sasaran Kebijakan Merdeka Belajar; Membantu BPMP Provinsi Kalimantan Utara dalam menyebarkan informasi terkait Kebijakan Merdeka Belajar; dan Sebagai perpanjangan tangan BPMP Provinsi Kalimantan Utara ke pemerintah daerah. Tim ini dibentuk dan dibuatkan SK penetapan pada bulan Januari 2024 dengan masa berlaku mulai bulan Februari s.d November 2024, selanjutnya dibuatkan grup Whatsapp sebagai sarana koordinasi.



Surat Keputusan AFTP dan Grup Whatsapp AFTP untuk Koordinasi dan Diskusi.

Selain grup whatsapp, anggota Tim AFTP juga harus membuat rencana dan laporan pengimbasan setiap bulan yang diunggah pada link <https://bit.ly/RTLAgenPenggerak> sebagai bentuk pertanggungjawaban atas honor yang diterima.



• Bimtek PPKSP

Kekerasan di satuan pendidikan merupakan isu yang memprihatinkan dan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, serta keseluruhan proses belajar mengajar. Kekerasan dapat memicu trauma, mengganggu kesehatan mental, menghambat prestasi belajar, dan bahkan berakibat fatal. Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) merespons kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbudristek PPKSP). Regulasi tersebut merupakan komitmen Kemendikbudristek untuk memberikan jaminan langkah pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan yang diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada peserta didik, guru, tenaga kependidikan, dan warga sekolah lainnya yang beraktivitas di dalam satuan pendidikan.

Peran BPMP Provinsi Kalimantan Utara dalam mengadvokasi Pemda salah satunya adalah dengan melakukan peningkatan kapasitas Satgas yang telah terbentuk di daerah agar pencegahan dan penanganan kekerasan dilakukan dengan tepat melalui Bimtek PPKSP. Bimtek PPKSP ini dilaksanakan pada tanggal 25 s.d 27 Juli 2024 dengan mengundang perwakilan Satgas PPKSP dari unsur Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Organisasi Profesi lain yang berkaitan dengan anak di seluruh Wilayah Kab/Kota dan Provinsi Kalimantan Utara.



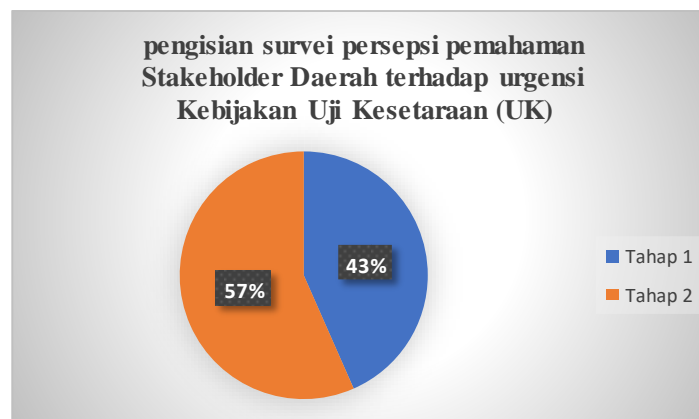
8) PDM-06 Asesmen Nasional

a) Capaian PDM 06 – Asesmen Nasional

- Jenjang PAUD dan Dikmas

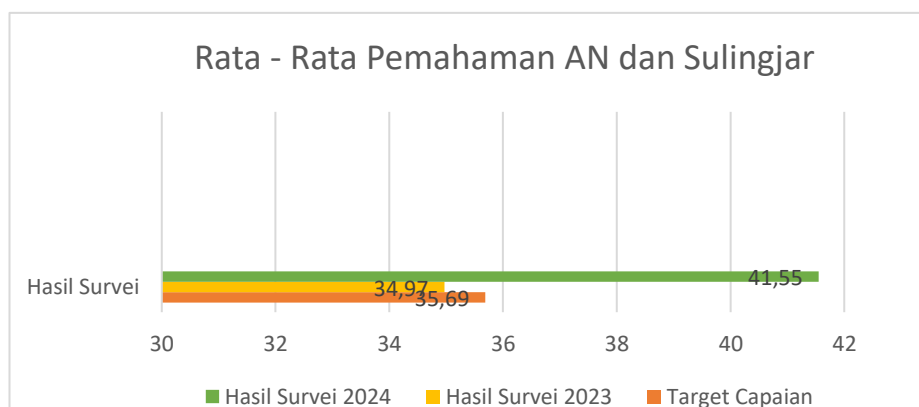
❖ Target: Meningkatkan Pemahaman Stakeholder Daerah terhadap urgensi Kebijakan Uji Kesetaraan (UK) sebesar 30%

Capaian: Berdasarkan hasil pengisian survei persepsi pemahaman Stakeholder Daerah terhadap urgensi Kebijakan Uji Kesetaraan (UK) terjadi peningkatan dari tahap 1 ke tahap 2. Pada tahap 1 tingkat pemahaman kebijakan UK sebesar 34,85 dan pada tahap 2 sebesar 45,45. Jadi untuk peningkatan pemahaman stakeholder daerah terjadi peningkatan sebesar 10,6 atau lebih dari 30%.



❖ Target: Meningkatkan pemahaman Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terhadap kebijakan AN dan Sulingjar sebesar 50% dari 23,79%

Capaian: Berdasarkan hasil pengisian survei pemahaman kebijakan AN rata – rata pemahaman AN untuk Provinsi Kalimantan Utara mengalami peningkatan. Pada Tahun 2023 rata – rata pemahaman AN sebesar 34,97 dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 6,58 menjadi 41,55. Jika dilihat berdasarkan target UPT untuk peningkatan pemahaman Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terhadap kebijakan AN dan Sulingjar sebesar 50% dari 23,79% atau capaian pemahaman meningkat sebesar 35,69%, maka untuk peningkatan pemahaman AN di Provinsi Kalimantan Utara sudah mengalami peningkatan sesuai target dari tahun sebelumnya dari 34,97 ke 41,55.



❖ Target: Menurunkan Partisipasi Satuan Pendidikan yang belum memadai dan belum mengikuti AN dan Sulingjar Tahun 2023 sebesar 50%.

Capaian: Berdasarkan data rekapitulasi AN pada tahun 2023, terdapat 15 satuan pendidikan yang mengikuti AN namun hasilnya belum memadai dan 25 satuan pendidikan yang belum mengikuti AN dari total keseluruhan 838 satuan pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara. Serta data rekapitulasi AN pada tahun 2024 terdapat 7 satuan pendidikan yang mengikuti AN namun hasilnya belum memadai dan 24 satuan pendidikan yang tidak mengikuti AN dari total 849 satuan pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara. Jika dilihat berdasarkan jumlah partisipasi AN, terjadi peningkatan jumlah satuan pendidikan yang mengikuti AN dan hasilnya memadai dari tahun 2023 ke tahun 2024. Namun, untuk target menurunkan partisipasi satuan pendidikan yang belum memadai dan belum mengikuti AN sebesar 50% belum dapat tercapai karena terdapat satuan pendidikan yang partisipasinya masih dibawah 85%. Tidak memadainya hasil AN disebabkan oleh beberapa faktor seperti, peserta didik tidak hadir dan atau peserta didik tidak menyelesaikan AN dan satuan pendidikan yang tingkat partisipasinya dibawah 85% tidak melakukan penjadwalan ulang untuk meningkatkan partisipasi di satuan pendidikannya. Sedangkan untuk satuan pendidikan yang tidak mengikuti AN disebabkan karena, terdapat satuan pendidikan baru yang belum memiliki kelas tengah (kelas 5, 8, dan 11), dan satuan pendidikan yang tidak memiliki kelas tengah (kelas 5, 8, dan 11).

Hasil pengisian Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar), pada tahun 2023 sebanyak 76 satuan pendidikan yang mengisi Sulingjar namun hasilnya belum memadai dan sebanyak 103 satuan pendidikan yang tidak mengisi Sulingjar dari total 1466 satuan pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian pada tahun 2024, sebanyak 94 satuan pendidikan yang mengisi Sulingjar namun hasilnya belum memadai dan sebanyak 43 satuan pendidikan belum mengisi Sulingjar dari total 1480 satuan pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara. Jika dilihat berdasarkan jumlah partisipasi satuan pendidikan yang mengisi Sulingjar, terdapat penurunan jumlah satuan pendidikan yang belum mengikuti sulingjar dari tahun 2023 ke tahun 2024 sebanyak 60 satuan pendidikan atau lebih dari 50%. Sedangkan untuk jumlah satuan pendidikan yang mengikuti Sulingjar namun hasilnya belum memadai, terjadi peningkatan sebanyak 18 satuan pendidikan dari 2023 ke 2024. Jika dilihat capaiannya, untuk target menurunkan partisipasi satuan pendidikan belum mengikuti Sulingjar sebesar

50% sudah tercapai, namun untuk menurunkan partisipasi satuan pendidikan yang belum memadai sebesar 50% belum dapat tercapai. Beberapa faktor belum tercapainya target ini adalah, adanya satuan pendidikan baru pada tahun ajaran 2024/2025, terdapat beberapa sekolah yang masih aktif secara dapodik namun tidak ada aktivitas di satuan pendidikan, dan terdapat beberapa satuan pendidikan yang berada di wilayah blank spot sehingga tidak bisa mengakses Sulingjar.

Asesmen Nasional	2023				2024			
	Jumlah Satuan	Jumlah yang memadai dan mengikuti AN	Jumlah yang belum memadai	Jumlah yang belum mengikuti AN	Jumlah Satuan	Jumlah yang memadai dan mengikuti AN	Jumlah yang belum memadai	Jumlah yang belum mengikuti AN
Provinsi	111	102	2	7	114	107	1	6
Bulungan	213	207	0	6	215	209	2	4
Tarakan	106	105	1	0	106	103	1	2
Nunukan	209	199	5	5	215	205	2	8
Malinau	157	144	6	7	157	152	1	4
Tana Tidung	42	41	1	0	42	42	0	0
Jumlah	838	799	15	25	849	818	7	24

Sulingjar	2023				2024			
	Jumlah Satuan	Jumlah yang memadai dan mengikuti Sulingjar	Jumlah yang belum memadai	Jumlah yang belum mengikuti Sulingjar	Jumlah Satuan	Jumlah yang memadai dan mengikuti Sulingjar	Jumlah yang belum memadai	Jumlah yang belum mengikuti Sulingjar
Provinsi	111	107	2	2	114	108	1	5
Bulungan	383	338	19	26	387	352	23	12
Tarakan	215	211	2	2	217	206	10	1
Nunukan	387	371	13	3	390	362	22	6
Malinau	281	174	38	69	284	227	38	19
Tana Tidung	89	86	2	1	88	88	0	0
Jumlah	1466	1287	76	103	1480	1343	94	43

b) Kegiatan yang telah Dilakukan

• Workshop Kebijakan Uji Kesetaraan (UK)

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 29 April s.d. 1 Mei 2024 dengan melibatkan peserta dari Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Satuan Pendidikan pelaksana Uji Kesetaraan. Kegiatan ini bertujuan untuk

- ❖ Meningkatkan pemahaman Dinas Pendidikan dan Pelaksana Uji Kesetaraan terhadap Kebijakan Uji Kesetaraan (UK);
- ❖ Melakukan koordinasi terkait persiapan dan pelaksanaan Uji Kesetaraan (UK) tahun 2024;

- ❖ Menyosialisasikan Pedoman Penyelenggaraan Uji Kestaraan Tahun 2024 kepada Dinas Pendidikan dan Pelaksana Uji Kestaraan;
- ❖ Mengidentifikasi jenis permasalahan dan kendala dalam persiapan dan pelaksanaan Uji Kestaraan (UK).



Workshop Kebijakan Uji Kestaraan

• **Monitoring Pelaksanaan Uji Kestaraan**

Kegiatan monitoring pelaksanaan Uji Kestaraan bertujuan untuk :

- ❖ Mengumpulkan informasi tentang tahapan pelaksanaan UK, dan kesesuaiannya dengan POS Penyelenggaraan UK;
- ❖ Memastikan pelaksanaan UK di satuan pendidikan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan POS Penyelenggaraan UK yang telah ditentukan;
- ❖ Mengumpulkan data riil peserta dan sekolah penyelenggara yang mengikuti UK; dan
- ❖ Memetakan isu – isu terkini terkait pelaksanaan UK di daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan secara 2 tahap. Tahap 1 pada tanggal 17 s.d 21 Mei 2024, (Uji Kestaraan Paket C) dan tahap 2 pada 24 s.d 27 Mei 2024 (Uji Kestaraan Paket B dan A). Pada kegiatan ini, sasarannya adalah satuan pendidikan yang melaksanakan Uji Kestaraan (SKB dan PKBM) di Provinsi Kalimantan Utara.



Monitong Uji Kestaraan

- Kegiatan Workshop Kebijakan AN dan Sulingjar

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 s.d. 9 Juli 2024 dengan mengundang Narasumber dari Pusdatin dan melibatkan peserta dari Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, MKKS, dan KKKS. Kegiatan ini bertujuan :

- ❖ Meningkatkan pemahaman Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan terhadap kebijakan Asesmen Nasional dan Sulingjar;
- ❖ Memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan kebijakan Asesmen Nasional dan Sulingjar;
- ❖ Memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap tugas dan tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan Asesmen Nasional yang dituangkan dalam bentuk rencana tindak lanjut;
- ❖ Mengidentifikasi jenis permasalahan dan kendala dalam persiapan dan pelaksanaan Asesmen Nasional dan Sulingjar.



Workshop AN & Sulingjar

- Penguatan dan Advokasi bagi Tim Posko/Helpdesk AN dan Sulingjar 2024

Kegiatan Penguatan dan Advokasi bagi Tim Posko/Helpdesk AN dan Sulingjar 2024 dilaksanakan pada 29 s.d. 31 Juli 2024 dengan mengundang narasumber dari Pusdatin secara daring dengan membawakan materi terkait mekanisme Pendataan Asesmen Nasional. Kegiatan ini melibatkan peserta dari Tim Teknis Dinas Pendidikan dan Operator Satuan Pendidikan di setiap Jenjang. Tujuan kegiatan ini adalah :

- ❖ Meningkatkan pemahaman Tim Posko/Helpdesk AN terhadap kebijakan Asesmen Nasional dan Sulingjar;
- ❖ Meningkatkan kapasitas terhadap dan kompetensi Tim Posko/Helpdesk AN terhadap pelaksanaan AN dan Sulingjar;
- ❖ Meningkatkan kolaborasi dan sinergi sehingga terciptanya kerja sama yang baik dan harmonis diantara semua pihak yang terlibat dan responsif terhadap masalah yang muncul; dan
- ❖ Mendorong komitmen terhadap pelaksanaan AN dan Sulingjar dalam upaya meningkatkan partisipasi satuan pendidikan pelaksanaan AN dan Sulingjar.



- Kegiatan Monitoring dan Advokasi Persiapan Pelaksanaan Asesmen Nasional Tahun 2024

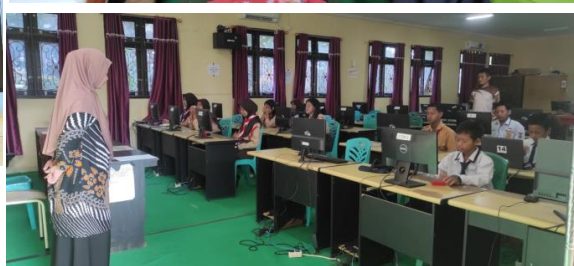
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keikutsertaan semua satuan pendidikan dalam pelaksanaan Asesmen Nasional dan Sulingjar tahun 2024 serta memastikan kesiapan sarana dan prasarana satuan pendidikan dalam melaksanakan Asesmen Nasional dan Sulingjar. Kegiatan Monitoring dan Advokasi Persiapan Pelaksanaan Asesmen Nasional Tahun 2024 dilaksanakan secara 3 tahap, sesuai dengan jadwal pelaksanaan simulasi AN. Tahap 1 dilaksanakan untuk jenjang SMA, SMK Sederajat pada tanggal 6 s.d. 8 Agustus 2024, tahap 2 dilaksanakan untuk jenjang SMP Sederajat pada tanggal 12 s.d. 14 Agustus 2024 dan tahap 3 dilaksanakan untuk jenjang SD Sederajat pada tanggal 23 s.d. 25 September 2024. Sasaran kegiatan ini adalah Dinas Pendidikan serta satuan pendidikan yang pada tahun sebelumnya tidak melaksanakan AN dan/atau hasil AN-nya tidak memadai.



- Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan/Monitoring Pelaksanaan AN/Sulingjar Tahun 2024

Kegiatan ini dilaksanakan secara 3 Tahap. Tahap 1 pada tanggal 18 s.d. 21 Agustus 2024 untuk jenjang SMA, SMK Sederajat, tahap 2 pada tanggal 8 s.d. 11 September 2024 untuk jenjang SMP Sederajat, Tahap 3 untuk jenjang SD Sederajat dilaksanakan 2 gelombang, gelombang 1 pada tanggal 27 s.d. 30 Oktober 2024 dan gelombang 2 pada tanggal 3 s.d. 6 November 2024. Sasaran dari kegiatan ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan dengan kriteria baru pertama kali melaksanakan AN dan/atau hasil AN tahun sebelumnya tidak memadai. Kegiatan ini bertujuan untuk :

- ❖ Memastikan kesesuaian pelaksanaan Asesmen Nasional dan Sulingjar sesuai dengan pedoman pelaksanaan;
- ❖ Memastikan keikutsertaan semua satuan pendidikan dalam pelaksanaan Asesmen Nasional dan Sulingjar tahun 2024;
- ❖ Memastikan satuan pendidikan melaksanakan Asesmen Nasional dan Sulingjar dengan jujur.



9) PDM-08 Regulasi dan Tata Kelola

Regulasi adalah PDM yang melaksanakan Upaya penyelesaian masalah ketercapaian target renstra tahun 2024 prgram paud dan wajar 12 tahun melalui Konsolidasi K/L terkait dalam rangka ketercapaian target dan Memastikan pemda memiliki regulasi daerah dan anggaran yang mendukung pelaksanaan program paud dan wajar 12 tahun. Tata Kelola penyusun kajian naskah transformasi tata Kelola satuan Pendidikan, strategi pemenuhan akses Pendidikan jenjang PDM, Kesiapan pomda terhadap kebijakan wajar 13 tahun, strategi pencapaian AKS,APS,APK tahun 2024

a) Objektif dan Target UPT

No	Objektif UPT	Target UPT
1.	65% Kab/Kota dengan AKS PAUD >75%	AKS PAUD>75% 65%
2.	80% Kab/Kota dengan APS 7-12 tahun>99%	APS 7-12 tahun >99% 80%
3.	70% Kab/Kota dengan APS 13-15 tahun>95%	APS 13-15 tahun>95% 70%
4.	30% Prov dengan APK SMA/SMK/SMLB/MA/Sederajat >95%	APK SM/Sederajat>95% 30%

b)Capaian

Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

Tampilkan 10

Cari:

No	Kabupaten / Kota	Jumlah BPB	Jumlah DO*															
			Kel.A	Kel.B	KB	TPA	SPS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Kab. Malinau	1.085	0	0	0	0	0	9	10	26	30	36	21	47	68	21	75	
2	Kab. Bulungan	1.295	0	0	0	0	0	31	30	48	47	53	32	65	128	73	165	
3	Kab. Tana Tidung	198	0	0	0	0	0	5	4	6	7	16	5	3	12	2	13	
4	Kab. Nunukan	3.582	0	0	0	0	0	34	50	58	75	109	45	111	235	107	152	
5	Kota Tarakan	2.020	0	0	0	0	0	32	73	76	96	153	45	104	142	43	187	
-	Residu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jumlah		8.180	0	0	0	0	0	111	167	214	255	367	148	330	585	246	592	

Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

Tampilkan 10 Cari:

No	Kabupaten / Kota	Jenjang Pendidikan				Total
		PAUD	Dasar (SD)	Menengah (SMP)	Atas (SMA/SMK)	
1	Kab. Malinau	0	132	136	174	442
2	Kab. Bulungan	0	241	266	333	840
3	Kab. Tana Tidung	0	43	17	47	107
4	Kab. Nunukan	0	371	453	437	1.261
5	Kota Tarakan	0	475	289	375	1.139
-	Residu	0	0	0	0	0
Jumlah		0	1.262	1.161	1.366	3.789

Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

Tampilkan 10 Cari:

No	Kabupaten / Kota	Jenjang Pendidikan		Total
		Dasar (SD)	Menengah (SMP)	
1	Kab. Malinau	132	146	278
2	Kab. Bulungan	356	333	689
3	Kab. Tana Tidung	34	49	83
4	Kab. Nunukan	651	556	1.207
5	Kota Tarakan	312	383	695
-	Residu	0	0	0
Jumlah		1.485	1.467	2.952

Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

Tampilkan 10 Cari:

No	Kabupaten / Kota	Usia				Total
		< 7	7 - 12	13 - 15	> 15	
1	Kab. Malinau	0	397	290	398	1.085
2	Kab. Bulungan	0	394	319	582	1.295
3	Kab. Tana Tidung	0	54	66	78	198
4	Kab. Nunukan	0	1.021	1.051	1.510	3.582
5	Kota Tarakan	0	529	548	943	2.020
-	Residu	0	0	0	0	0
Jumlah		0	2.395	2.274	3.511	8.180



c) Kegiatan yang telah dilakukan

- ToT Fasilitator Bimtek pada Pemda dalam Rangka Ketercapaian Program PAUD dan Wajar 12 Tahun Region Provinsi.



- Pelaksanaan survey dalam rangka kesiapan pemda terhadap kebijakan Wajar 13 tahun.



10) PDM-09 Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan

Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan digagas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Gerakan ini bertujuan untuk :

- Menghilangkan tes calistung dari proses penerimaan peserta didik baru di SD;
- Menerapkan masa pengenalan bagi peserta didik baru selama dua minggu pertama
- Menerapkan pembelajaran yang membangun enam kemampuan fondasi anak.



Transisi PAUD-SD adalah proses perpindahan anak dari peserta didik PAUD ke SD dan penyesuaian diri dengan lingkungan belajar baru. Transisi ini penting untuk :

- Memastikan anak mendapatkan hak pendidikannya.
- Memastikan anak memiliki kemampuan fondasi yang selaras dengan Profil Pelajar Pancasila
- Memastikan tidak ada patahan pembelajaran dari jenjang PAUD ke SD
- Membantu peserta didik mudah beradaptasi di SD

a) Objektif dan Target UPT

No	Objektif UPT	Target UPT
1.	50% guru SD Kelas 1 dan 2 memahami strategi pembelajaran yang tidak mensyaratkan kemampuan calistung peserta didik	94 sampel Guru SD yang ditentukan memahami strategi pembelajaran yang tidak mensyaratkan kemampuan calistung
2.	50% satuan PAUD dan 50% SD Kelas 1 dan 2 melakukan penguatan pembelajaran untuk pencapaian kemampuan fondasi	55 jumlah sampel satdik PAUD dan SD melakukan penguatan pembelajaran untuk pencapaian kemampuan fondasi
3.	100% SD Negeri dan 25% SD Swasta tidak melakukan tes calistung saat PPDB	437 SD Negeri dan 89 sampel SD Negeri tidak melakukan tes calistung 48 SD Swasta dan 7 sampel SD Swasta tidak melakukan tes calistung
4.	50% satuan PAUD dan 70% SD Kelas 1 dan 2 melakukan penguatan pembelajaran pada masa MPLS	Monev kualitatif dilakukan langsung oleh Pusat

b) Capaian

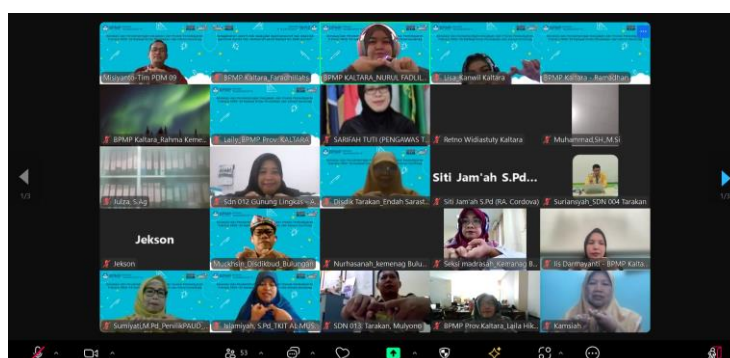
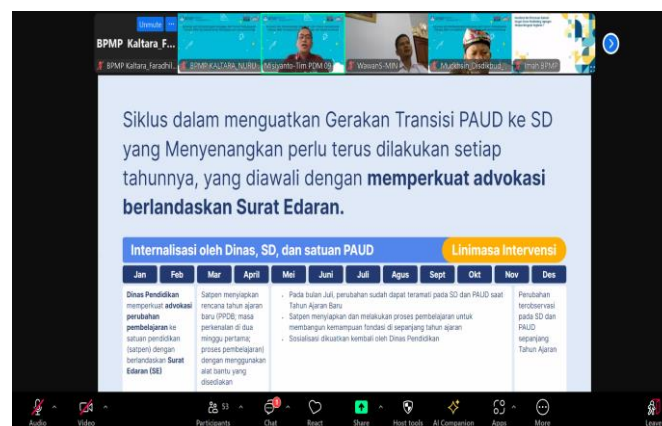
No	Target Capaian	Keterangan Capaian	Target UPT
1.	50% guru SD Kelas 1 dan 2 memahami strategi pembelajaran yang tidak mensyaratkan kemampuan calistung peserta didik	Sebanyak 94 dari 94 sampel guru SD memahami strategi pembelajaran yang tidak mensyaratkan kemampuan calistung	59,57%
2.	50% satuan PAUD dan 50% SD Kelas 1 dan 2 melakukan penguatan pembelajaran untuk pencapaian kemampuan fondasi	Sebanyak 55 dari 55 sampel satuan Pendidikan PAUD dan SD melakukan penguatan pembelajaran untuk pencapaian kemampuan fondasi	54,50%
3.	100% SD Negeri dan 25% SD Swasta tidak melakukan tes calistung	Sebanyak 89 dari 89 sampel SD Negeri tidak melakukan tes calistung	100%

	saat PPDB	Sebanyak 6 dari 7 sampel SD Swasta tidak melakukan tes calistung	85,7%
4.	50% satuan PAUD dan 70% SD Kelas 1 dan 2 melakukan penguatan pembelajaran pada masa MPLS	<p>Monev kualitatif dilakukan langsung oleh pusat dan mendapatkan hasil :</p> <p>PAUD melaksanakan pengenalan lingkungan sekolah dan asesmen awal</p> <p>Melaksanakan pengenalan lingkungan sekolah dan asesmen awal</p>	<p>60,7%</p> <p>1,1%</p>

c) Kegiatan yang Telah Dilakukan

• Advokasi dan Pendampingan Kebijakan dan Produk Pembelajaran Transisi PAUD-SD Kepada Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag.

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring pada hari Selasa s.d. Rabu tanggal 28 s.d. 29 Mei 2024 yang bertujuan untuk memperkuat peran Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag dalam mensosialisasikan kebijakan dan produk pembelajaran Transisi PAUD ke SD serta memperkuat peras Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag terkait peningkatan kapasitas satuan Pendidikan dalam penerapan perubahan pembelajaran.



- **Sosialisasi dan Advokasi ke Dinas Pendidikan dan Mitra tentang Kebijakan MPLS, Perubahan Pembelajaran, dan Aktivitas Forkom PAUD-SD**

Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 14 s.d. 16 Agustus 2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka di masing-masing Dinas Pendidikan yang tersebar di 4 (empat) kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung dengan sasaran peserta yaitu Penilik PAUD, Pengawas SD, Guru SD Kelas 1, Guru SD Kelas 2, serta Pokja Bunda PAUD. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap perubahan pembelajaran dari PAUD ke SD kelas awal untuk penguatan pengembangan kemampuan fondasi.



- **Supervisi Pelaksanaan MP LS ke Satuan Pendidikan**

Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 15 s.d. 17 Juli 2024 bertempat di 5 (lima) kabupaten/kota dengan sasaran yang berasal dari satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar. Dalam pelaksanaan kegiatan akan dilakukan pemantauan dan diskusi berdasarkan instrument untuk pelaksanaan MPLS di satuan Pendidikan apakah telah sesuai dengan rambu yang ada pada Gerakan Transisi PAUD-SD Yang Menyenangkan.



- **Tindak Lanjut RTL Bimtek UPT BPMP/BBPMP Untuk Penguatan Perubahan Pembelajaran**

Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 11 s.d. 13 November 2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka di Kota Tarakan, dengan sasaran peserta yaitu Penilik PAUD, Pengawas SD, Guru SD Kelas 1, Guru SD Kelas 2, serta Pokja Bunda PAUD. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi penguatan kepada pendidik kelas awal terkait pembelajaran yang efektif dalam mengembangkan kemampuan fondasi dan mendapat umpan balik dari satuan pendidikan yang telah melaksanakan pembelajaran yang memfasilitasi pembinaan kemampuan fondasi dengan efektif



11) PDM-Pemulihan Pembelajaran

PDM 10 merupakan program Pemulihan dan Transformasi Pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan sebagai Upaya meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya pada kompetensi dasar literasi numerasi di tingkat satuan pendidikan dan daerah. Program ini dikoordinasikan oleh PDM-10 Pemulihan Pembelajaran, Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Dalam rangka menjalankan program Pemulihan Pembelajaran BPMP Provinsi Kalimantan Utara sebagai UPT Kemendikbudristek berupaya mendorong Peningkatan literasi di Wilayah Kalimantan Utara dengan berbagai intervensi diantaranya Program Kampus Mengajar, Buku Bacaan Bermutu, Pendampingan penguatan literasi dan numerasi, Pengimbasan

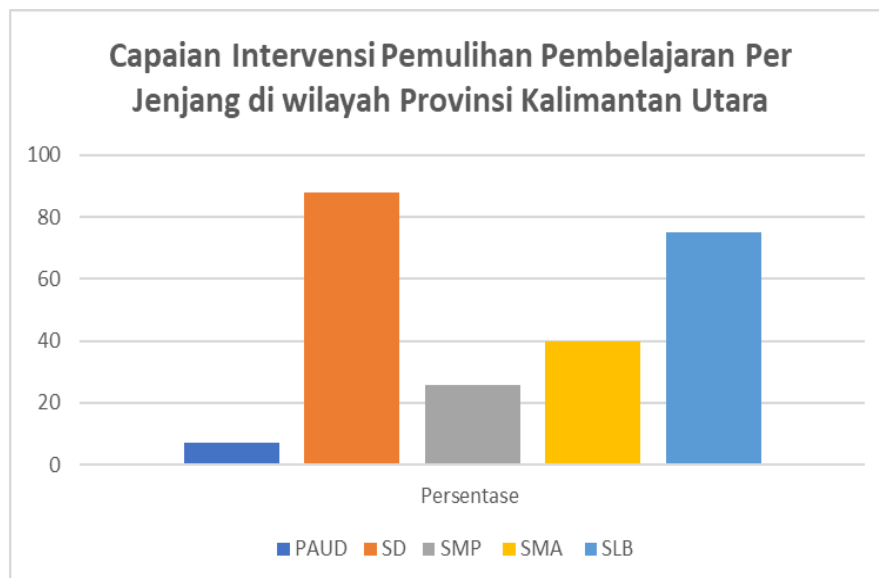
literasi dan numerasi dan Dukungan Mitra Pembangunan untuk pemulihan pembelajaran.

a) Objektif dan Target UPT

No	Objektif UPT	Target UPT
1.	100% PAUD, SD, SMP, SMA, dan SKB/PKBM dalam ruang lingkup sasaran intervensi mendapatkan dukungan program pemulihan pembelajaran	100% PAUD, SD, SMP, SMA, dan SKB/PKBM dalam ruang lingkup sasaran intervensi mendapatkan dukungan program pemulihan pembelajaran
2.	50% dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota melakukan aksi nyata program benahi literasi dan/atau numerasi	50% dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota melakukan aksi nyata program benahi literasi dan/atau numerasi
3.	Penambahan minimal 5 mitra pembangunan Kemendikbudristek untuk peningkatan literasi dan/atau numerasi.	Penambahan minimal 5 mitra pembangunan Kemendikbudristek untuk peningkatan literasi dan/atau numerasi.

b) Capaian

Upaya dalam mencapai target capaian, PDM 10 telah melakukan intervensi kepada satuan Pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB dengan presentase capaian sebagai berikut:



Berdasarkan tabel diatas persentase Capaian PDM 10 tertinggi adalah jenjang SD dan yang terendah adalah jenjang PAUD, Intervensi yang dilakukan untuk capaian baik melalui Program Kampus Mengajar, bantuan buku bacaan bermutu, mitra pembangunan, pendampingan dan pengimbasan literasi dan numerasi

Aksi Nyata program benahi literasi dan/atau numerasi di Kabupaten/kota Kalimantan Utara				
Bulungan	Nunukan	Tarakan	Malinau	Tana Tidung
Pengadaan Buku Nonteks bagi satuan Pendidikan jenjang SD melalui BOSDA	Pengimbasan literasi dan numerasi	Workshop Penulisan Buku bagi Guru – Guru kelas awal	Bantuan Buku Bacaan Bermutu	Bantuan Buku Nonteks

Berdasarkan tabel diatas 100% Pemerintah daerah di Wilayah Kalimantan Utara telah melakukan aksi nyata benahi literasi dan numerasi melalui pengadaan buku, Workshop Penulisan, dan pengimbasan.

Daftar Mitra Pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara
INOVASI
LITARA Foundation
Tanoto Foundation

c) Kegiatan yang telah Dilakukan

• Pendampingan Penguatan intervensi pemulihan pembelajaran oleh UPT Tahap 1 dan Tahap 2

Kegiatan ini merupakan Pelepasan Mahasiswa Kampus Mengajar Angkatan 7 yang dihadiri oleh Mahasiswa, DPL, Perwakilan Dinas Pendidikan, dan Satuan Pendidikan yang menjadi sasaran Program Kampus mengajar angkatan 7. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah penyamaan persepsi terkait tujuan utama program Kampus Mengajar, Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara tim Kampus Mengajar, Ditjen PAUDDikdasmen, UPT, dan dinas pendidikan, menyampaikan terkait dukungan yang dibutuhkan program Kampus Mengajar dari UPT dan dinas pendidikan dan menginformasikan Program Kampus Mengajar dan melepaskan mahasiswa peserta program kampus mengajar ke sekolah penugasan



- **Koordinasi, Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Fasilitator daerah dan Intervensi pemulihan pembelajaran**

Kegiatan ini merupakan Pendampingan dan penguatan terhadap Fasilitator daerah yang dihadiri dari berbagai unsur seperti Dinas Pendidikan, Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru jenjang SD, SMP, dan SMA. Kegiatan ini bertujuan melakukan pendampingan dalam peningkatan literasi dan numerasi yang dapat menunjang pemulihan pembelajaran, dengan adanya pelatihan ini diharapkan Peserta kegiatan dapat menjadi Fasilitator pada satuan pendidikan dalam mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan



- **Supervisi program pemulihan pembelajaran tahap I dan 2 oleh UPT**

Kegiatan ini merupakan supervisi ke satuan pendidikan yang menjadi sasaran Program Kampus Mengajar angkatan 7 yang tersebar di Kabupaten/Kota yang ada di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara, kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan Program Kampus Mengajar diantaranya mengetahui pencapaian keterampilan Mahasiswa dalam kepemimpinan, empati sosial, berfikir analitis saat merancang Program bersama Kelompok dan pihak sekolah, mengetahui kemampuan kerjasama dan manajemen Mahasiswa, dan menyampaikan Program Pemulihan Pembelajaran di UPT dalam mendukung kebijakan merdeka belajar di daerah.



- **Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pengimbasan peningkatan literasi dan numerasi oleh UPT**

Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam pemulihan pembelajaran melalui penguatan literasi dan numerasi dan meningkatkan kapasitas peserta dalam pemahaman mendasar mengenai literasi dan numerasi. Dalam kegiatan ini peserta diberi penguatan terkait numerasi yang dihadiri oleh peserta kegiatan dari berbagai unsur Dinas Pendidikan, Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru jenjang SD, SMP, dan SMA.



- **Penguatan Komunitas Belajar Antar Sekolah sebagai strategi penguatan program peningkatan literasi dan numerasi oleh UPT**

Kegiatan ini merupakan penguatan komunitas belajar dan yang menjadi sasaran adalah penanggungjawab Komunitas belajar antar sekolah, satuan pendidikan yang literasi dan numerasinya berada dikategori 1 dan 2 jenjang PAUD,SD,SMP,SMA dan SLB perwakilan dari kab/kota yang berada di Kalimantan Utara. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemodelan satu siklus komunitas belajar antar sekolah untuk penguatan literasi, mampu memberikan penguatan kombel dalam penguatan literasi dan numerasi, dan mampu merancang tindaklanjut untuk siklus kegiatan kombel.



- **Sosialisasi Program Mitra Pembangunan Daerah**

Dalam rangka pelaksanaan membangun kerjasama dengan calon mitra pembangunan untuk mendukung program pemulihan pembelajaran, kegiatan ini dilaksanakan secara daring dengan mengundang mitra pembangunan potensial baik dari NGO, Perusahaan Swasta, Komunitas Pendidikan, Dinas Perpustakaan Kab/kota, dan

satuan pendidikan. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kerjasama dengan calon mitra pembangunan potensial untuk mendukung program pemulihan pembelajaran terkait penyediaan buku bacaan bermutu dan pelatihan bacaan bermutu untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pada kompetensi dasar literasi dan numerasi.



12) PDM-11 Gerakan Sekolah Sehat

Gerakan Sekolah Sehat merupakan upaya untuk merevitalisasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Kondisi ini didasari hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan Tahun 2018, kondisi kesehatan pada usia anak sekolah dan remaja sangat mengkhawatirkan, khususnya terkait konsumsi makanan berisiko setiap hari, status gizi, kebersihan diri, dan aktivitas fisik.

Revitalisasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) berfokus pada pemenuhan gizi, olahraga (gerak badan), dan imunisasi lengkap sehingga peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan optimal, seiring dimulainya kembali pembelajaran tatap muka. Untuk itu, Gerakan Sekolah Sehat Tahun 2025 berfokus pada 5 S yakni Sehat Bergizi, Sehat Fisik, Sehat Imunisasi, Sehat Jiwa, dan Sehat Lingkungan yang dapat mendukung revitalisasi UKS.

a) Objektif dan Target UPT

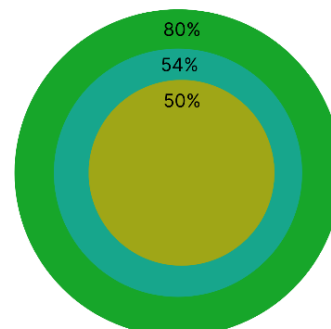
No	Objektif UPT	Target UPT
1.	80% satuan pendidikan di Indonesia mengetahui Gerakan Sekolah Sehat	80%
2.	90% satuan pendidikan mengimplementasikan secara berkelanjutan Gerakan Sekolah Sehat (Sehat Gizi, Sehat Fisik, Sehat Imunisasi, Sehat Jiwa, dan Sehat Lingkungan)	90%
3.	95% satuan pendidikan binaan mengimplementasikan sehat bergizi,	95%

No	Objektif UPT	Target UPT
	sehat fisik, sehat imunisasi, sehat jiwa, dan sehat lingkungan	

b)Capaian

- **80% satuan pendidikan di Indonesia mengetahui Gerakan Sekolah Sehat**, capaian akhir untuk Provinsi Kalimantan Utara sebesar 50%. Capaian ini turun sebesar 4% dibandingkan dengan pengukuran (asesmen) awal yang mencapai 54%.

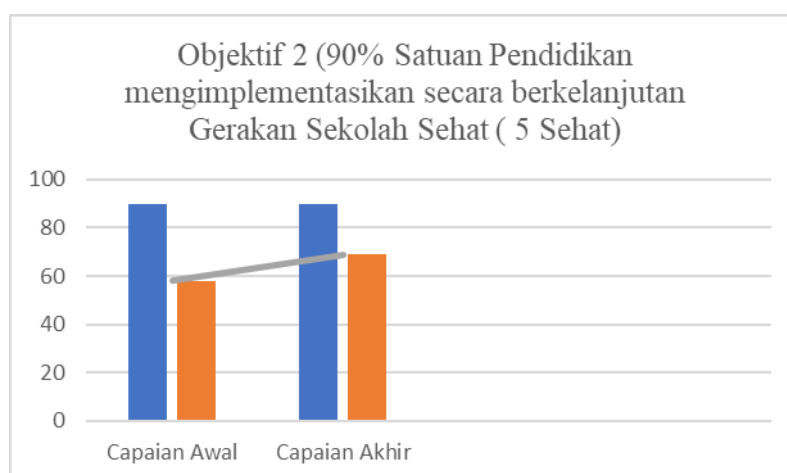
Objektif 1 (80% Satuan Pendidikan Mengetahui Gerakan Sekolah Sehat)



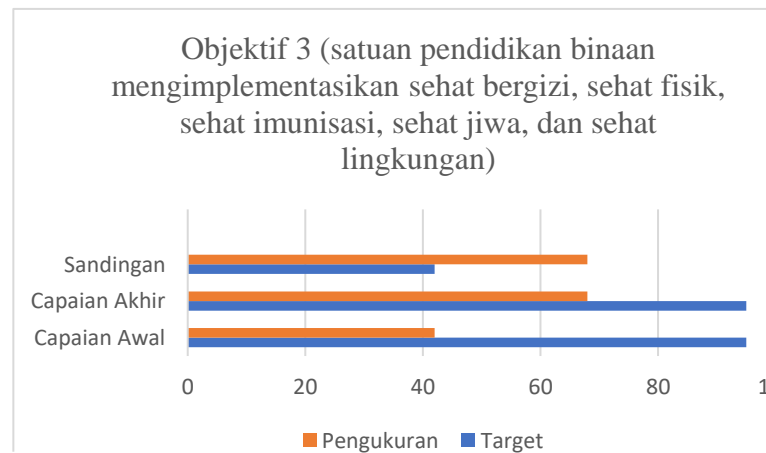
Keterangan:

- Target
- Capaian Awal
- Capaian Akhir

- **90% satuan pendidikan mengimplementasikan secara berkelanjutan Gerakan Sekolah Sehat (Sehat Gizi, Sehat Fisik, Sehat Imunisasi, Sehat Jiwa, dan Sehat Lingkungan).** Capaian akhir (*endline*) untuk Provinsi Kalimantan Utara sebesar 69%. Terdapat kenaikan untuk capaian ini yakni sebesar 11% dari hasil pengukuran (asesmen) awal sebesar 58%.



- **95% satuan pendidikan binaan mengimplementasikan sehat bergizi, sehat fisik, sehat imunisasi, sehat jiwa, dan sehat lingkungan.** Capaian akhir (*endline*) untuk Provinsi Kalimantan Utara sebesar 68%, capaian ini meningkat cukup tinggi yakni 26% dibandingkan capaian awal sebesar 42%.



c) Kegiatan yang Telah Dilakukan

- Sosialisasi dan advokasi penguatan Gerakan Sekolah Sehat dari UPT ke Dinas Pendidikan, Pengawas, dan TP UKS. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 29 s.d. 31 Januari 2024 di Tarakan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada Dinas Pendidikan, Pengawas Sekolah, TP UKS sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan terselenggaranya program di kemudian hari.
- Semarak Gerakan Sekolah Sehat dan Gelar Wicara Sekolah Sehat. Kedua kegiatan ini dilaksanakan disatu waktu yakni di kegiatan Festival Kurikulum dan Semarak Gerakan Sekolah Sehat yang dilaksanakan pada 6 s.d 7 Mei 2024 bertempat di Kantor BPMP Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan Semarak Sekolah Sehat merupakan sala satu kegiatan promosi Gerakan Sekolah Sehat untuk masyarakat pada umumnya dan satuan pendidikan pada khususnya. Semarak Gerakan Sekolah Sehat diisi dengan berbagai kegiatan diantaranya senam Gerakan Sekolah Sehat, gosok gigi bersama, Praktek cuci tangan yang benar, dan gelar wicara Sekolah sehat dengan menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan dan Perwakilan Sekolah Binaan Tahun 2023 (SD Negeri 2 Malinau Barat)

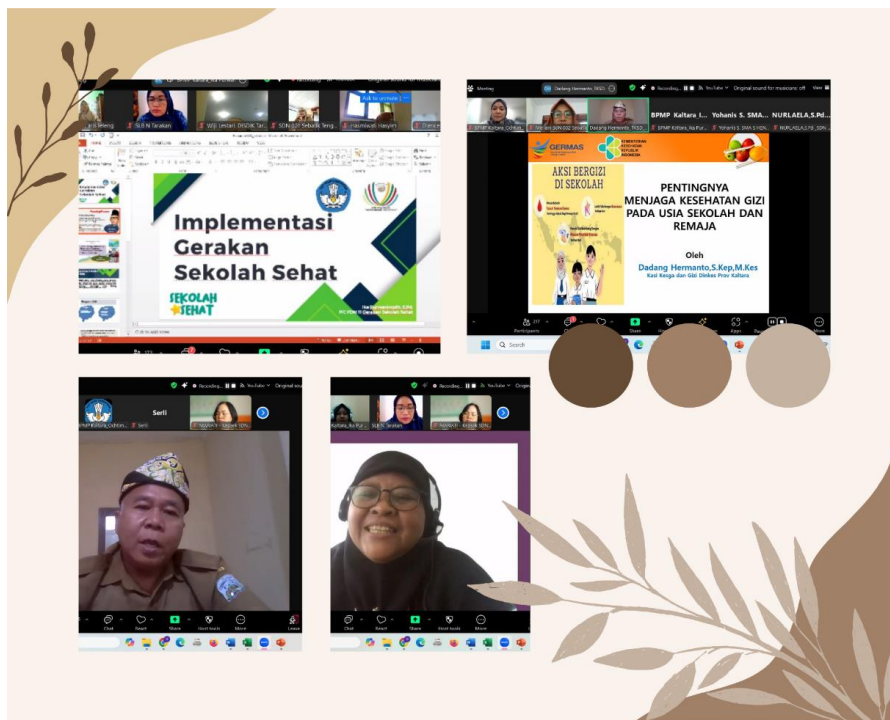


- **Refleksi dan Evaluasi Implementasi Gerakan Sekolah Sehat di Satuan Pendidikan Binaan**

Kegiatan ini dilaksanakan secara daring pada 13 November 2024 dengan peserta satuan pendidikan binaan tahun 2024. Refleksi dan evaluasi ditujukan untuk mengetahui sejauh mana Gerakan Sekolah Sehat diimplementasikan di satuan pendidikan binaan.

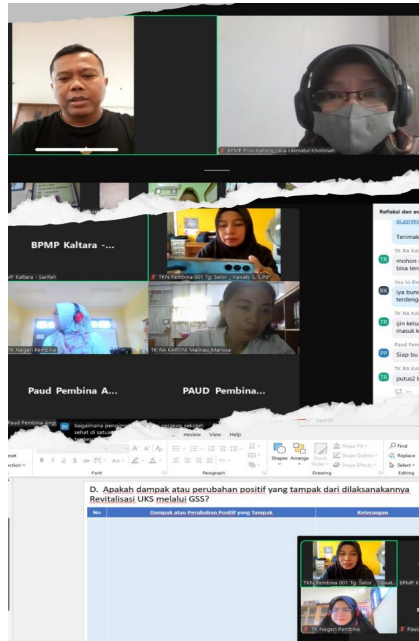
- **Webinar Sekolah Sehat**

Webinar dilaksanakan secara daring pada 18 November 2024 dengan mengundang seluruh satuan pendidikan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Webinar diisi dengan pemaparan materi terkait Sekolah sehat Oleh PDM 11 BPMP Provinsi Kalimantan Utara, dilanjutkan materi dari Dinas Kesehatan terkait Sehat Gizi, dan materi terakhir disampaikan oleh Ketua HIMPSI (Himpunan Psikologi Indonesia) Kalimantan Utara terkait Sehat Jiwa.



- **Pendampingan/Supervisi/Visitasi ke Satuan Pendidikan Binaan Tahun 2024 dan 2023**

Kegiatan dilaksanakan secara luring di 27 satuan pendidikan binaan tahun 2024 dan 2023 pada tanggal 24 s.d.26 November 2024. Adapun tujuan kegiatan Pendampingan/Supervisi/Visitasi ke Satuan Pendidikan Binaan Gerakan Sekolah Sehat adalah menggali informasi sejauh mana Gerakan Sekolah Sehat diimplementasikan dan mengidentifikasi kendala apa yang dialami sekolah binaan dalam mengimplementasikan Gerakan Sekolah Sehat, serta pemberian penguatan terkait implementasi Gerakan Sekolah Sehat



13) PDM-12 Pendidikan Inklusif


Pendidikan Inklusif mencakup semua peserta didik, dan menyambut serta mendukung mereka untuk belajar, siapa pun mereka dan apa pun kemampuan atau persyaratan mereka.

Ini berarti memastikan bahwa pengajaran dan kurikulum, gedung sekolah, ruang kelas, area bermain, transportasi, dan toilet sesuai untuk semua anak di semua tingkatan. Pendidikan inklusif berarti semua peserta didik belajar bersama di sekolah dan kelas yang sama. (UNICEF 2017).

Unsur dalam Pendidikan Inklusif diantaranya, Mengakomodasi semua anak, Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, Menghargai keragaman, Sistem (kurikulum, cara, media, lingkungan) diadaptasikan terhadap peserta didik, Aksesibilitas fisik dan non fisik, Guru bekerja dalam tim, dan Keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan/pembelajaran.

a) Objektif dan Target UPT

No	Objektif UPT	Target UPT
1.	100% Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang mengalami peningkatan kapasitas dalam menjalankan pendidikan inklusif.	100% dari 168 Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang mengalami peningkatan kapasitas dalam menjalankan pendidikan inklusif.
2.	a. 100.000 pendidik mengikuti pendidikan berjenjang bidang pendidikan inklusi (tingkat dasar) b. 10.000 pendidik mengikuti pendidikan berjenjang bidang pendidikan inklusi (tingkat lanjutan) c. 5000 pendidik mengikuti	a. 504 pendidik mengikuti pendidikan berjenjang bidang pendidikan inklusi (tingkat dasar) b. 50 pendidik mengikuti pendidikan berjenjang bidang pendidikan inklusi (tingkat lanjutan) c. 27 pendidik mengikuti



No	Objektif UPT	Target UPT
	pendidikan berjenjang bidang pendidikan inklusi (tingkat mahir)	pendidikan berjenjang bidang pendidikan inklusi (tingkat mahir)
3.	Pemerintah Daerah memiliki ULD yang aktif 38 Provinsi dan 257 Kab/Kota	Pemerintah Daerah memiliki ULD yang aktif 1 Provinsi dan 5 Kab/Kota

b) Capaian

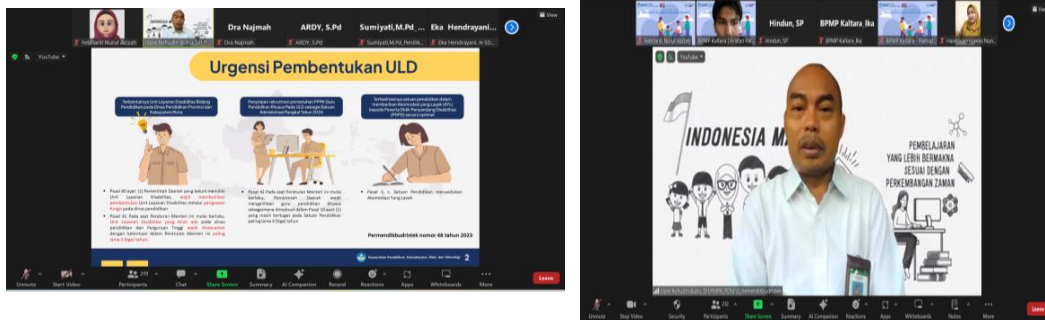
No	Target Capaian	Keterangan Capaian	Hasil Capaian
1.	100% Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang mengalami peningkatan kapasitas dalam menjalankan pendidikan inklusif.	Sebanyak 144 dari 168 Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang mengalami peningkatan kapasitas dalam menjalankan pendidikan inklusif.	85%
2.	a. 504 pendidik mengikuti pendidikan berjenjang bidang pendidikan inklusi (tingkat dasar) b. 50 pendidik mengikuti pendidikan berjenjang bidang pendidikan inklusi (tingkat lanjutan) c. 27 pendidik mengikuti pendidikan berjenjang bidang pendidikan inklusi (tingkat mahir)	a. Sebanyak 805 guru memulai materi, 411 memulai post test, 239 lulus post test, 112 unggah aksi nyata, 31 ketuntasan topik (data 21 Desember 2024) b. Sejumlah 9 guru mengikuti pelatihan berjenjang bidang pendidikan inklusif tingkat lanjutan c. Belum terlaksana pendidikan berjenjang bidang pendidikan inklusif tingkat mahir	a. 100% b. 18% c. 0%
3.	Pemerintah Daerah memiliki ULD yang aktif 1 Provinsi dan 5 Kab/Kota	Pemerintah Daerah memiliki ULD yang aktif 1 Provinsi dan 3 Kabupaten/Kota	66,67%

c) Kegiatan yang telah dilakukan

- Pendampingan implementasi kebijakan pendidikan khusus dan pendidikan inklusif kepada pemda oleh UPT : Advokasi kebijakan layanan Pendidikan inklusif kepada pemerintah daerah
- Pendampingan pelaksanaan pendidikan berjenjang bidang pendidikan inklusif di satuan Pendidikan : Pelaksanaan Advokasi pemanfaatan Pendidikan berjenjang Pendidikan inklusif di satuan pendidikan
- Sosialisasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas di daerah: : Sosialisasi Kebijakan Pembentukan Unit Layanan Disabilitas di Daerah

Keseluruhan kegiatan tersebut dilaksanakan menjadi 1 (satu) kegiatan dengan judul Advokasi Kebijakan Pendidikan Inklusif kepada Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2024 secara dalam jaringan (daring). Narasumber pada kegiatan tersebut diantaranya PDM-12 Pendidikan

Inklusif Ditjen PAUD, PDM-12 Pendidikan Inklusif Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Ketua Rumah Pendampingan Anak (RPA) Tanjung Selor dan Guru Pendamping Khusus dari SDN 041 Tarakan. Materi yang disampaikan pada kegiatan tersebut antara lain Sosialisasi Peraturan Mendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023, Percepatan Pembentukan Unit Layanan Disabilitas, Data Kondisi Pendidikan Inklusi di Kalimantan Utara dan Pelatihan Berjenjang Pendidikan Inklusif, Berbagi Praktik Baik pengembangan dan pelaksanaan Unit Layanan Disabilitas, dan Pelatihan Berjenjang Pendidikan Inklusif melalui PMM.



Advokasi Kebijakan Pendidikan Inklusif kepada Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan

14) PDM-14 Analisis Data Pendidikan

PDM 14 adalah PDM yang menganalisa Data Pendidikan yang berdasarkan Indeks Kualitas Dapodik perjenjang baik mulai dari Satuan Pendidikan, Tingkat Kabupaten / Kota hingga Tingkat Provinsi sehingga peningkatan Indeks Kualitas Dapodik dapat terukur setiap saat (Real Time).

a) Objektif dan Target UPT

No	Objektif UPT	Target UPT
1.	Rata-rata Capaian Objektif semua PDM yang Mengintervensi Satuan Pendidikan Jenjang PAUD dan Dikmas sebesar 80%	100% Pemda memiliki peningkatan indeks kualitas Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
2.	Rata-rata Capaian Objektif semua PDM yang Mengintervensi Satuan Pendidikan Jenjang Dikdas dan Dikmen sebesar 80%	100% Pemda memiliki peningkatan indeks kualitas Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

b) Capaian

Berikut adalah capaian PDM 14 Jenjang PAUD Dikmas

- IKD Kabupaten Tana Tidung Meningkat 0.05 dari 86.04 menjadi 86.09

- IKD Kota Tarakan Meningkat 0.28 dari 84.81 menjadi 85.09
- IKD Kabupaten Bulungan Meningkat 1.01 dari 84.05 menjadi 85.06
- IKD Kabupaten Malinau Meningkat 0.46 dari 81.46 menjadi 81.92
- IKD Kabupaten Nunukan Menurun 0.29 dari 84.17 menjadi 83.88

Berikut adalah capaian PDM 14 Jenjang Dikdas dan Dikmen

- IKD Kabupaten Bulungan Meningkat 0.14 dari 85.90 menjadi 86.04
- IKD Kota Tarakan Meningkat 0.32 dari 85.63 menjadi 85.95
- IKD Kabupaten Tana Tidung Menurun 0.71 dari 87.88 menjadi 87.17
- IKD Kabupaten Malinau Menurun 0.41 dari 85.21 menjadi 84.80
- IKD Kabupaten Nunukan Menurun 0.88 dari 85.62 menjadi 84.74

c) Kegiatan yang telah Dilakukan

- Uji Petik Anomali Data yang dilaksanakan tanggal 25 – 28 Agustus 2024 dengan Sasaran 28 Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan Provinsi Kaltara, Dinas Pendidikan Bulungan, Dinas Pendidikan Tana Tidung, Dinas Pendidikan Malinau dan Dinas Pendidikan Kota Tarakan.
- Uji Petik Anomali Data Tahap 2 yang dilaksanakan tanggal 13 – 23 Oktober 2024 dengan sasaran 161 Satuan Pendidikan di provinsi Kalimantan Utara untuk semua Jenjang.
- Rapat Koordinasi Indek Data Pokok Pendidikan yang dilaksanakan pada tanggal 7 – 9 November 2024 yang melibatkan perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kaltara, Dinas Pendidikan Bulungan, Dinas Pendidikan Tana Tidung, Dinas Pendidikan Malinau, Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan dan Dinas Pendidikan Kota Tarakan serta perwakilan Kepala Sekolah dan Operator yang berprestasi untuk berbagi praktik baik.



Uji Petik Peningkatan Kualitas Dapodik Tahun 2024



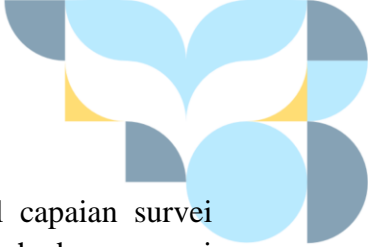
Rapat Koordinasi Indeks Data Pokok Pendidikan Tahun 2024

c. Kendala/Permasalahan

- 1) Keberlanjutan Program Sekolah Penggerak oleh pemerintah daerah
- 2) Satuan Pendidikan Belum melakukan Refleksi Pelaksanaan IKM Tahun Ajaran 2023/2024
- 3) Sasaran peserta Operator penerima BOP yang masih baru
- 4) Kegiatan tidak terlaksana karena perubahan kebijakan anggaran
- 5) Satuan Pendidikan belum memahami 8 Aksi Transformasi Satuan Pendidikan
- 6) Pemda belum melakukan Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan sesuai dengan Indikator Prioritas pada Rapor Pendidikan Daerah
- 7) Masih Banyaknya wilayah yang remote area
- 8) Menentukan sasaran untuk kegiatan pelaksanaan monitoring pelaksanaan AN jenjang SD karena untuk jenjang SD akan dilaksanakan secara 2 gelombang sehingga perlu menyesuaikan dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan Lembaga
- 9) Tidak semua memberikan informasi terkait bahan publikasi/materi konten dari masing-masing PDMnya kepada tim Publikasi
- 10) Masih terdapat banyak miskonsepsi yang terjadi di “lapangan” sehingga banyak terjadi kesalahpahaman terhadap Gerakan Transisi PAUD-SD
- 11) Masih banyak Kepsek dan Guru yang belum mengetahui tentang Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif melalui PMM sehingga Capaian Aksesnya masih sangat kurang

d. Langkah Antisipatif

- 1) Menggerakkan komunitas belajar dalam sekolah yang sudah terbentuk dalam meningkatkan pemahaman terkait pemanfaatan PMM;
- 2) Koordinasi ke pemerintah daerah terkait Pemanfaatan PMM oleh sekolah pelaksana IKM melalui PMO level pemerintah daerah;
- 3) Mengomunitas belajar dalam sekolah sangat penting karena komunitas belajar menjadi wadah untuk merealisasikan terjadinya kolaborasi antar pendidik;
- 4) Menghimbau pemerintah daerah untuk mendorong UMKM menjadi mitra pada aplikasi SIPLah;

- 
- 5) Melakukan koordinasi dengan Tim PDM 06 Pusat tentang hasil capaian survei persepsi positif Stakeholder Daerah dan Satuan Pendidikan terhadap urgensi Kebijakan Pelaksanaan AN dan Sulingjar;
 - 6) Melakukan koordinasi lebih lanjut bersama Dinas dan mitra pendidikan (IGTKI Provinsi dan Pokja Bunda PAUD) dalam proses mengawal Gerakan Transisi PAUD SD;
 - 7) Komunikasi secara intens dengan sekolah binaan melalui WAG dan komunikasi secara pribadi dengan sekolah binaan; dan
 - 8) Berkonsultasi dan berkoordinasi dengan PDM 11 Pusat untuk langkah-langkah dan kegiatan yang akan dilaksanakan

e. Strategi/Tindak Lanjut

- 1) Advokasi secara kontinu kepada pemda untuk melanjutkan Program Sekolah Penggerak Advokasi ke sekolah untuk berbagi ke sekolah lain
- 2) Melakukan kegiatan bimtek kepada operator BOSP yang bersedia mengimbaskan dan membuat group operator untuk berkoordinasi lebih lanjut
- 3) Membuat grup pemantik bersama daerah berkoordinasi dengan PPK Perubahan bentuk kegiatan
- 4) Memberikan Pemahaman kepada Satuan Pendidikan terkait 8 Aksi Transformasi Satuan Pendidikan
- 5) Melakukan Pendampingan secara lebih Intensif kepada OPD Daerah Bidang Pendidikan yaitu BAPPEDA dan Dinas Pendidikan
- 6) Perlunya intens koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Pendidikan terkait Program PDM-05 (GP Menjadi KSPS, PPDB, dan PPKSP)
- 7) Berkordinasi dengan petugas pelaksana MonAd dan Monev untuk dapat menyelesaikan pengiputan instrumen secara online
- 8) Mencari materi konten / bahan publikasi melalui WA Grup PIC PDM 07 dan Sosial media Setdijen Paud Dasmen
- 9) Secara intens dengan Dinas Terkait Memberikan pertanyaan pemantik pada saat pelaksanaan kegiatan guna mendapatkan feedback kegiatan
- 10) Memetakan sekolah yang diintervensi bisa dijangkau Bekerjasama dengan Agen Penggerak Transformasi Pendidikan
- 11) Berkoordinasi ke pemda untuk mendorong guru-guru mengikuti dan menyelesaikan topik pendidikan berjenjang pendidikan inklusif tingkat dasar di PMM
- 12) Membuat Target lebih Spesifik dan disesuaikan dengan karakteristik daerah dan bukan disamakan untuk seluruh kabupaten kota

f. Indikator Kinerja Kegiatan IKK. 1.2: Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)

Indikator kinerja kegiatan ini menggambarkan kondisi mutu pendidikan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun berjalan dengan tahun sebelumnya yang sumber atau basis pengukurannya itu berdasarkan hasil

pelaksanaan asesmen nasional. Adapun definisi operasional Indikator kinerja kegiatan ini adalah persentase dari provinsi/kabupaten/kota di wilayah masing masing yang memiliki rapor pendidikan lebih tinggi dibandingkan rapor pendidikan tahun sebelumnya dan dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Satuan Dikdas dan Dikmen yang rapor pendidikannya meningkat}}{\text{Jumlah Satuan Dikdas dan Dikmen pada provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan}} \times 100\%$$

Untuk mengukur capaian IKK 1.2 ini dibutuhkan rapor pendidikan hasil AN tahun 2023 dan tahun 2024, dikarenakan rapor pendidikan tahun 2024 belum terbit sampai dengan Januari 2024, maka untuk indikator 1.2 tentang persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen) ini dihitung berdasarkan data rapor pendidikan hasil AN tahun 2023 dan tahun 2024 yang bersumber PSKP BSKAP. Berikut ini adalah data indeks SPM yang bersumber dari hasil Asesmen Nasional satuan Dikdas dan Dikmen yang telah diolah oleh PSKAP – BSKAP di Provinsi Kalimantan Utara:

Wilayah	Kewenangan	Indeks SPM		Kenaikan	Ket
		2023	2024		
Provinsi Kalimantan Utara	SMA, SMK, Diksus	55,56	71,36	15,8	Naik
Kab. Bulungan	PAUD, SD, SMP	60,01	68,14	8,13	Naik
Kab. Malinau	PAUD, SD, SMP	53,76	60,09	6,33	Naik
Kab. Nunukan	PAUD, SD, SMP	54,8	62,83	8,03	Naik
Kab. Tana tidung	PAUD, SD, SMP	63,11	69,64	6,53	Naik
Kota Tarakan	PAUD, SD, SMP	67,2	74,6	7,4	Naik

Terdapat sedikit perbedaan metode perhitungan yang digunakan oleh PSKAP dalam menentukan capaian IKK 1.2 ini. Capaian IKK 1.2 dari PSKAP dihitung dengan formula:

$$\text{IKK 1.2} = \frac{\text{Jumlah daerah yang Indeks SPM-nya meningkat}}{\text{Jumlah daerah yang bersangkutan}} \times 100$$

Walaupun indeks SPM tersebut diperoleh dari pengolahan data hasil AN satuan pendidikan di masing-masing daerah. Oleh karena itu dengan menggunakan metode perhitungan tersebut dapat diperoleh nilai capaian IKK 1.2 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{IKK 1.2} &= 6 / 6 \times 100 \\ &= 100 \end{aligned}$$

Setelah melalui proses perhitungan menggunakan formula diatas, maka ditemukan capaian IKK 1.2 tahun 2024 berdasarkan indeks SPM dari rapor

pendidikan yakni sebesar 100%. Berikut ini juga kami tampilkan Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan Indikator Kinerja, perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, dan perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target akhir renstra.



Bagan diatas menggambarkan capaian kinerja untuk IKK 1.2. terkait persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen). Dapat diketahui bahwa BPMP Provinsi Kalimantan Utara dapat mencapai target bahkan melebihi target yang telah diperjanjikan. Adapun target IKK 1.2. pada tahun 2024 adalah sebesar 100% Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen) dan capaiannya adalah sebesar 100%, hal ini menggambarkan bahwa persentase capaian IKK 1.2 ini tercapai sebesar 100% sesuai target yang ditetapkan

Tabel diatas juga menyajikan perbandingan capaian tahun sebelumnya dengan capaian tahun berjalan dimana BPMP Provinsi Kalimantan Utara berhasil mempertahankan capaiannya yakni 100% di tahun 2023 dan juga 100% di tahun 2024. Selanjutnya perbandingan capaian tahun berjalan dengan target akhir renstra yakni 100% sedangkan capaian tahun 2024 sebesar 100% sehingga dapat diketahui bahwa capaian tahun berjalan sudah jauh diatas target akhir renstra.

g. Program dan Kegiatan Pendukung IKK 1.2

Senada dengan IKK 1.1 dalam upaya mencapai target IKK 1.2 terkait Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen) BPMP Kaltara juga didukung oleh beberapa program prioritas, dimana program tersebut diistilahkan dengan PDM singkatan dari Paud, Dikdas dan Dikmen

yang terdiri dari 15 PDM dan semuanya mengintervensi IKK 1.2. Berikut ini disajikan capaian dari masing-masing PDM di BPMP Kaltara:

1) PDM-01 Program Sekolah Penggerak

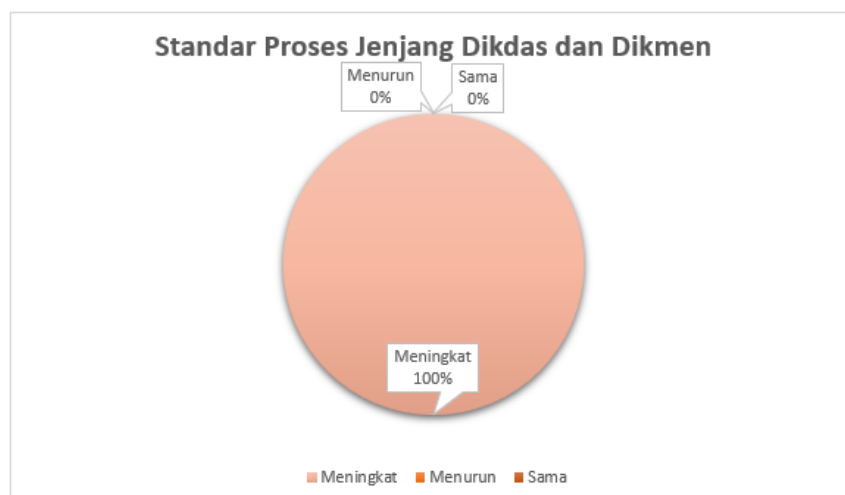
a) Objektif dan Target PDM

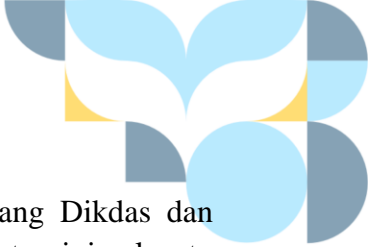
Objektif	Target UPT
100% satuan pendidikan pelaksana PSP angkatan 1, 2, dan 3 mengalami peningkatan kualitas transformasi satdik dilihat dari hasil AN	100%
100% satdik PSP angkatan 2 dan 3 mengalami peningkatan hasil AN.	100%
100% satdik PSP angkatan 1 menjadi penggerak transformasi satuan pendidikan di daerahnya	100%
50% Pemda pelaksana PSP berada pada level komitmen adopsi dalam mendukung PSP.	50%

b) Capaian

- **100% satuan pendidikan pelaksana PSP angkatan 1, 2, dan 3 mengalami peningkatan kualitas transformasi satdik dilihat dari hasil AN**

Untuk mendapatkan hasil dari objektif ini, dapat dilihat melalui rapor pendidikan dengan melihat salah satu indikator proses (Standar Isi/Standar Proses/Standar Penilaian/Standar Pengelolaan) yang bisa dilihat dari Dimensi D Mutu dan relevansi pembelajaran dan Dimensi E Pengelolaan satuan pendidikan yang antisipatif, transparan dan akuntabel. berikut. Sedangkan sekolah yang dilihat delta peningkatan standar proses ini untuk jenjang Dikdas dan Dikmen, terdapat 51 sekolah penggerak yang terdapat di Provinsi Kalimantan Utara. maka hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut:

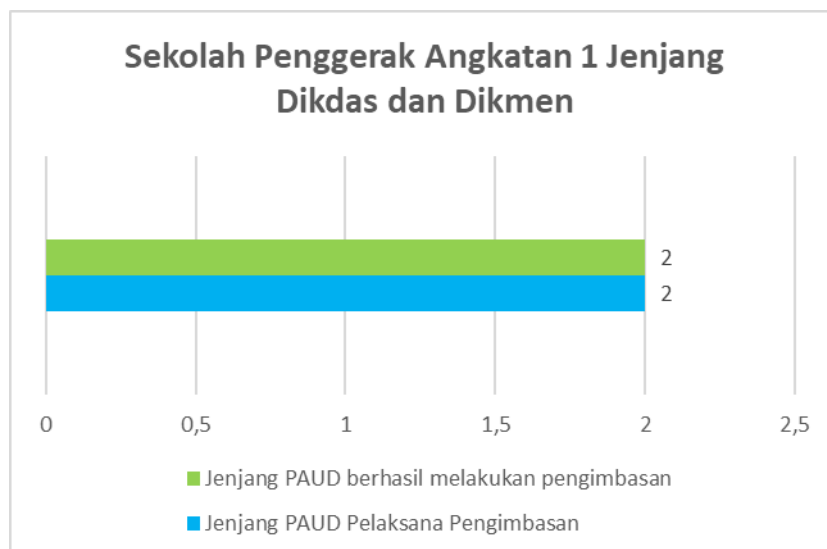




Setelah melihat hasil yang ada dari 51 sekolah penggerak jenjang Dikdas dan Dikmen di Provinsi Kalimantan Utara, seluruh sekolah terdapat minimal satu indikator dalam standar proses yang mengalami kenaikan. Sehingga capaian untuk jenjang PAUD yaitu 100% dan **mencapai target** dari objektif yang diberikan untuk UPT.

- **100% satdik PSP angkatan 1 menjadi penggerak transformasi satuan pendidikan di daerahnya.**

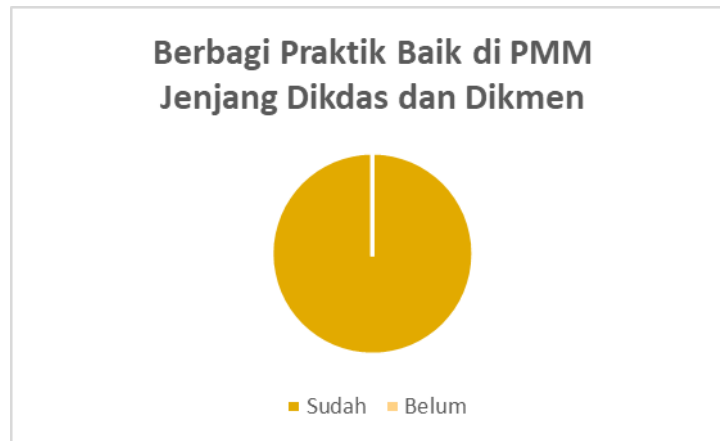
Untuk objektif ini, hasil capaian bisa dilihat dengan melihat jumlah sekolah penggerak angkatan 1 yang terpilih melakukan pengimbasan berhasil melakukan tugas yang diberikan untuk melakukan pengimbasan ke sekolah imbas yang sudah ditentukan/dipilih oleh Kemendikbudristek. Untuk jenjang Dikdas dan Dikmen, terdapat dua 10 sekolah yang terpilih untuk melakukan pengimbasan. Hasil dari objektif ini adalah sebagai berikut



Dari tabel di atas, hasil yang didapat dari sekolah penggerak angkatan 1 jenjang Dikdas dan Dikmen adalah 10 sekolah dan kedua-duanya berhasil melaksanakan program pengimbasan sampai selesai. Oleh sebab itu itu capaian dari objektif ini adalah 100% atau **mencapai target**.

- **50% satdik PSP angkatan 2 menjadi penggerak transformasi satuan pendidikan di daerahnya.**

Untuk objektif ini, metode untuk mengukur ketercapaiannya yaitu dengan aktivitas berbagi praktik baik yang dilakukan oleh sekolah penggerak angkatan 2 jenjang Dikdas dan Dikmen yang berjumlah 23 sekolah di Platform Merdeka Mengajar (PMM). Jika salah satu warga sekolah di sekolah tersebut baik itu Kepala Sekolah maupun Guru sudah ada yang mengunggah/*upload* praktik baik sekolah di PMM, maka objektif ini sudah tercapai.



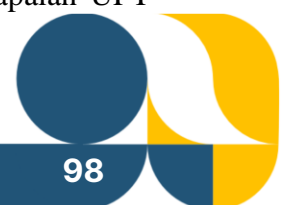
Dari 3 sekolah penggerak angkatan 23 jenjang Dikdas dan Dikmen, semuanya sudah berbagi praktik baik di Platform Merdeka Mengajar (PMM) sehingga objektif ini **tercapai dengan capaian 100%**.

- **50% Pemda pelaksana PSP berada pada level komitmen adopsi dalam mendukung PSP.**

Objektif terakhir dari PDM-01 Program Sekolah Penggerak, adalah seberapa besar komitmen pemerintah daerah pelaksana sekolah penggerak dalam mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan Program Sekolah Penggerak di wilayahnya. Alat ukur untuk melihat komitmen tersebut yaitu dengan menggunakan instrumen *web-based* bernama Dasbor UPT yang perlu diisi setiap semester. Dalam Dasbor UPT, terdapat butir-butir instrumen pengukuran komitmen pemerintah daerah yang pada proses pengisiannya membutuhkan bukti dukung. Hasil dari pengisian inilah yang akhirnya akan diolah menjadi tingkatan komitmen pemerintah daerah. Untuk level tingkatan komitmen pemda yang terendah sampai tertinggi adalah sebagai berikut:

Fase	Level Komitmen	Keterangan
Terinformasikan	Terhubung	Level komitmen terendah
	Peduli	
	Paham	
Terbina	Persepsi Positif	
	Adopsi	Target Level yang diberikan UPT
Berkomitmen	Tertanam	
	Melembaga	Level komitmen tertinggi

Berdasarkan data hasil Dasbor UPT, didapatkan bahwa empat pemerintah daerah berhasil mencapai target level komitmen yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan, maka capaian UPT



mencapai 66.67% atau mencapai target. Detail untuk setiap level komitmen daerah bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Pemerintah Daerah	Level Komitmen
Provinsi Kalimantan Utara	Tertanam
Kabupaten Bulungan	Tertanam
Kabupaten Nunukan	Tertanam
Kabupaten Malinau	Paham
Kota Tarakan	Tertanam
Kabupaten Tana Tidung	Persepsi Positif

No	Objektif UPT	Target UPT
1.	100% satuan pendidikan pelaksana PSP angkatan 1, 2, dan 3 mengalami peningkatan kualitas transformasi satdik dilihat dari hasil AN	100%
2.a	100% satdik PSP angkatan 2 dan 3 mengalami peningkatan hasil AN.	100%
2.b	100% satdik PSP angkatan 1 menjadi penggerak transformasi satuan pendidikan di daerahnya	100%
3.	50% Pemda pelaksana PSP berada pada level komitmen adopsi dalam mendukung PSP.	50%

c) Kegiatan yang Dilakukan

PDM-01 Program Sekolah Penggerak memiliki turunan 13 kegiatan yang perlu dilaksanakan oleh UPT, kegiatan-kegiatan itu yaitu:

- ❖ Koordinasi Percepatan Transformasi Satuan Pendidikan Sekolah Pelaksana PSP dengan PMO Daerah;
- ❖ Koordinasi dengan BBGP/BGP terkait Optimalisasi pengawas sekolah sebagai pendamping satuan pendidikan;
- ❖ Pemantauan dan Percepatan Tingkat Transformasi Satpen;
- ❖ Pemetaan Sekolah Pelaksana PSP dan Sekolah Imbas;
- ❖ Pendampingan dan Monitoring Pengimbasan dan Kontributor Praktik Baik di PMM;
- ❖ Visitasi terkait Pengimbasan PMM dan Non PMM UPT;
- ❖ Workshop Pengimbasan oleh PSP Angkatan 1;
- ❖ Pelaksanaan Forum Pemangku Kepentingan;
- ❖ Advokasi Pemberdayaan Sekolah PSP menjadi Penggerak Komunitas Belajar PSP – UPT;
- ❖ Visitasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak oleh Pemda;
- ❖ Refleksi Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak oleh Pemerintah Daerah;

- ❖ Kunjungan Lapangan dan Wawancara Observasi terkait BOSP Kinerja, Adaptasi Kurikulum dan Pendampingan Daerah dalam Fasilitasi Kombel; Koordinasi PMO dengan Pemda



Koordinasi Percepatan Transformasi Satuan Pendidikan Sekolah Pelaksana PSP dengan PMO Daerah



Pelaksanaan Forum Pemangku Kepentingan



Visitasi terkait Pengimbasan PMM dan Non PMM UPT



Kunjungan Lapangan dan Wawancara Observasi terkait BOSP Kinerja, Adaptasi Kurikulum dan Pendampingan Daerah dalam Fasilitasi Kombel

2) PDM-02 Implementasi Kurikulum Merdeka

Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) merupakan salah satu program prioritas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. IKM dirancang untuk menjadi transformasi pendidikan yang melengkapi kekurangan kurikulum sebelumnya. Untuk mendukung



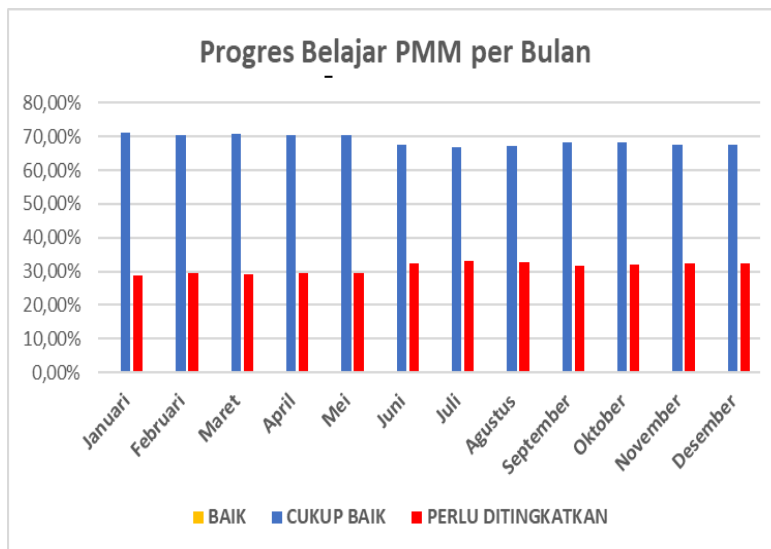
IKM, PDM 02 dibentuk dalam rangka pendampingan dan mengadvokasi Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk turut serta mengawal implementasi Kurikulum Merdeka ditingkat satuan pendidikan.

a) Objektif dan Target PDM

No.	Objektif UPT	Target UPT
1.a.	75% Satuan Pendidikan Pelaksana IKM menunjukkan peningkatan kualitas pemanfaatan PMM dilihat dari progres belajar	809 satpen IKM meningkat kualitas progres belajar di PMM
1.b.	75% Satuan Pendidikan Pelaksana IKM menunjukkan peningkatan kualitas pemanfaatan PMM dilihat dari pemanfaatan perangkat ajar	809 satpen IKM meningkat kualitas pemanfaatan perangkat ajar di PMM
2.	75% Satuan Pendidikan Pelaksana IKM mengikuti pendampingan, yang materinya didasarkan pada hasil refleksi pelaksanaan IKM tahun ajaran 2023/2024	809 satpen IKM Mandiri mengikuti pelatihan IKM
3.	75% Satuan Pendidikan Pelaksana IKM memiliki komunitas belajar dalam sekolah dengan aktivitas yang didasarkan pada permasalahan peserta didik	809 satpen dg peningkatan aktivitas kumpul dalam sekolah
4.	50% Satuan Pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka yang berada pada level 1 dan 2 pada AN 2023 menunjukan peningkatan kualitas hasil pada AN 2024 untuk capaian literasi, Numerasi, Karakter, dan Indeks pembelajaran	148 satpen IKM meningkat capaian literasi, numerasi, karakter, dan indeks pembelajaran
5.a.	75% Pemerintah Daerah memiliki persepsi positif terhadap IKM	5 Pemda dengan persepsi positif
5.b.	75% Pendidik (Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah) memiliki persepsi positif terhadap IKM	9.285 Pendidik (Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah) dengan persepsi positif
5.c.	75% orang tua memiliki persepsi positif terhadap IKM	92.668 orang tua dengan persepsi positif

b) Capaian PDM-02 Implementasi Kurikulum Merdeka

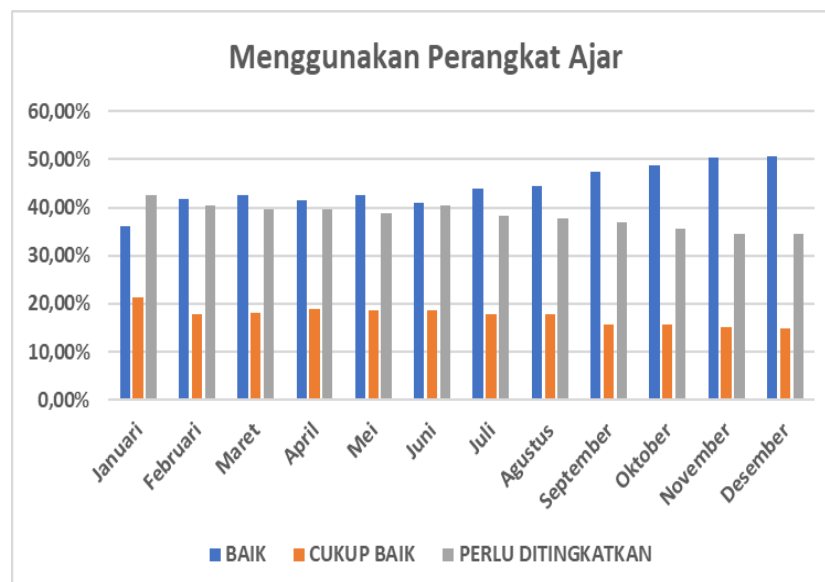
- **75% Satuan Pendidikan Pelaksana IKM menunjukkan peningkatan kualitas pemanfaatan PMM dilihat dari progres belajar**



Sumber: Rekap PMM <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z8Dq5bv-XF6N-HJu52CraLY4lvqu4LPL/edit?gid=524293304#gid=524293304>

Grafik di atas menunjukkan persentase capaian pemanfaatan PMM dilihat dari progres belajar dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Dimana mengalami peningkatan pada setiap bulan, yaitu pada Januari kategori cukup baik 71,24%, perlu ditingkatkan 28,76%, sedangkan pada Desember kategori baik 0,08%, cukup baik 67,44%, dan perlu ditingkatkan 32,48%.

- **75% Satuan Pendidikan Pelaksana IKM menunjukkan peningkatan kualitas pemanfaatan PMM dilihat dari pemanfaatan perangkat ajar**

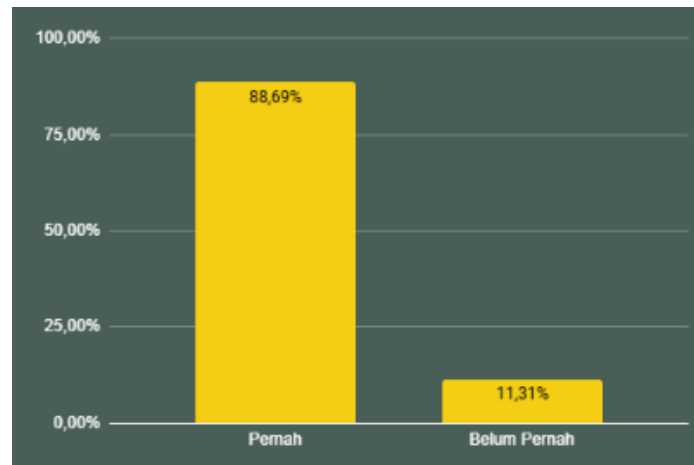


Sumber: Rekap PMM <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z8Dq5bv-XF6N-HJu52CraLY4lvqu4LPL/edit?gid=524293304#gid=524293304>

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat pemanfaatan PMM dilihat dari progres menggunakan perangkat ajar dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember mengalami peningkatan persentase, dimana pada bulan Januari kategori baik

36,11%, cukup baik 21,24%, perlu ditingkatkan 42,65%, sedangkan pada bulan Februari kategori baik 50,58%, cukup baik 14,96%, dan perlu ditingkatkan 34,96%.

- **75% Satuan Pendidikan Pelaksana IKM mengikuti pendampingan, yang materinya didasarkan pada hasil refleksi pelaksanaan IKM tahun ajaran 2023/2024**

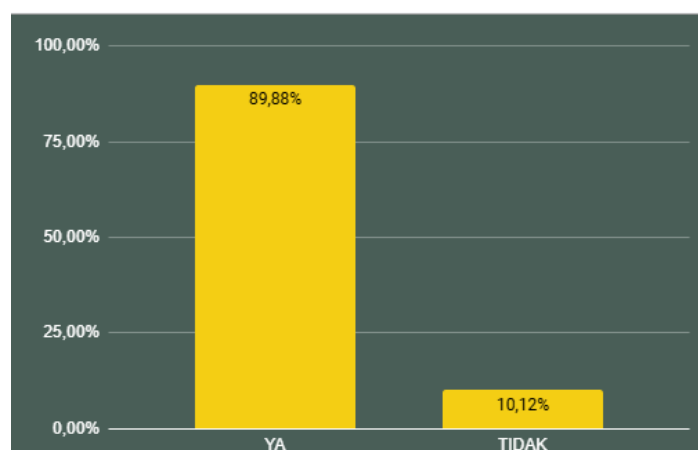


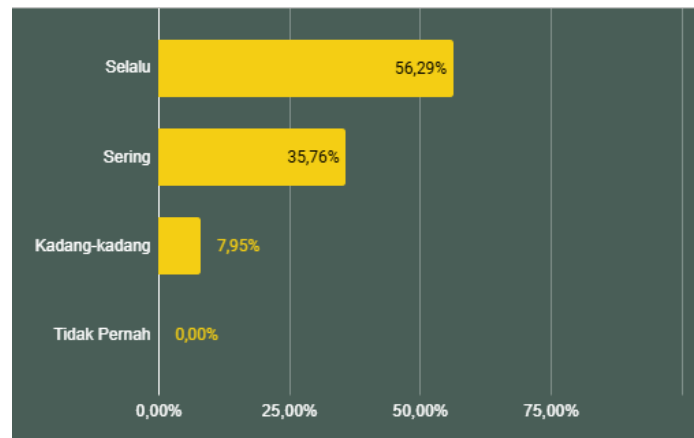
Sumber: Hasil Survei Persepsi KM Pendidik

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/113WnZKpPjGXdsBeruY5NQ3AFt4bXBgOXBHGMV3cmei0/edit?usp=sharing>

Data berdasarkan hasil survei yang dilakukan berdasarkan aspek adanya pelatihan/pendampingan yang diikuti. Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa sebanyak 88,69% satuan pendidikan Pelaksana IKM mengikuti pendampingan, yang materinya didasarkan pada hasil refleksi pelaksanaan IKM tahun ajaran 2023/2024.

- **75% Satuan Pendidikan Pelaksana IKM memiliki komunitas belajar dalam sekolah dengan aktivitas yang didasarkan pada permasalahan peserta didik.**

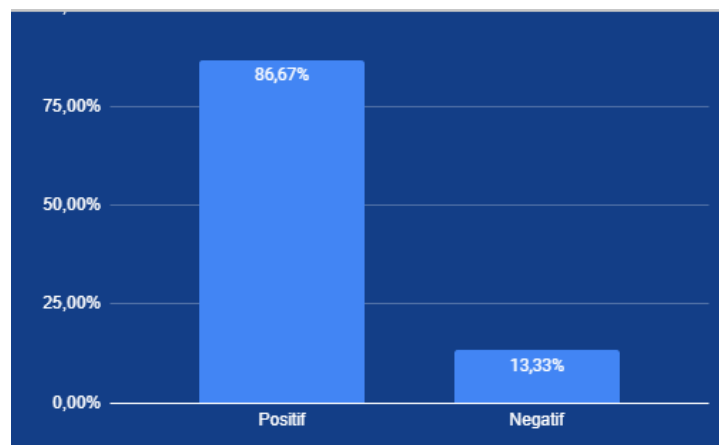




Sumber: Hasil Survei Persepsi KM Pendidik
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/113WnZKpPjGXdsBeruY5NQ3AFt4bXBgOXBHGMV3cmei0/edit?usp=sharing>

Data ini diperoleh berdasarkan hasil survei yang dilakukan berdasarkan aspek adanya komunitas belajar, aktivitas komunitas belajar pembahasan komunitas belajar terkait peningkatan hasil belajar siswa dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat sebanyak 89,88% satuan pendidikan telah memiliki komunitas belajar dalam sekolah serta 56,29% komunitas belajar dalam sekolah tersebut pembahasan selalu berfokus pada peningkatan kualitas permasalahan peserta didik.

- **50% Satuan Pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka yang berada pada level 1 dan 2 pada AN 2023 menunjukkan peningkatan kualitas hasil pada AN 2024 untuk capaian literasi, Numerasi, Karakter, dan Indeks pembelajaran**
 Untuk capaian objektif belum ada hasilnya karena hasilnya baru terlihat pada tahun 2025.
- **75% Pemerintah Daerah memiliki persepsi positif terhadap IKM**

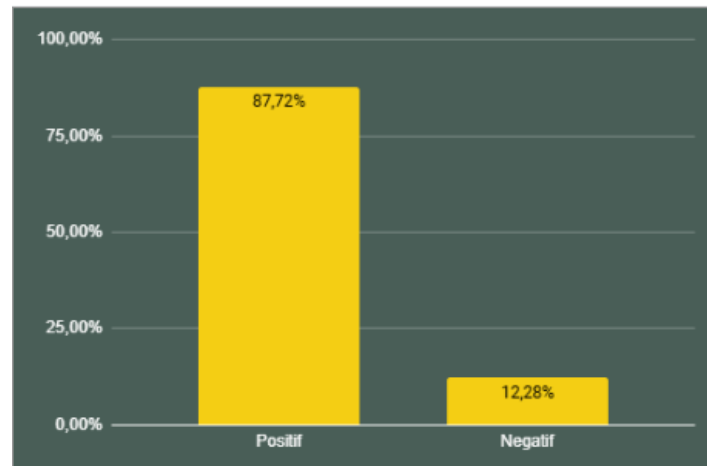


Sumber: Hasil Survei Persepsi KM Dinas Pendidikan
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1drQPpCO271sHue5K8ahdTGU8HorGtYQFRkgLqmGZQ7o/edit?usp=sharing>

Data diperoleh berdasarkan hasil survei dimana aspek yang dilihat terkait dengan informasi Kurikulum Merdeka, Festival Kurikulum Merdeka, Pelatihan/Pendampingan Kurikulum Merdeka dan Dukungan Dinas Pendidikan.

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat 86,6% Dinas Pendidikan memiliki persepsi positif terhadap Kurikulum Merdeka.

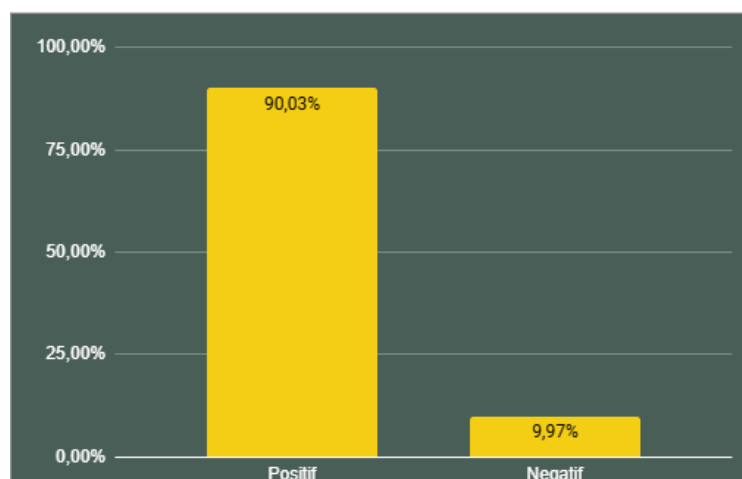
- **75% Pendidik (Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah) memiliki persepsi positif terhadap IKM**



Sumber: Hasil Survei Persepsi KM Pendidik
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/113WnZKpPjGXdsBeruY5NQ3AFt4bXBgOXBHGMV3cmei0/edit?usp=sharing>

Data ini diperoleh berdasarkan hasil survei yang dilakukan berdasarkan aspek informasi Kurikulum Merdeka, Festival Kurikulum Merdeka, pelatihan/pendampingan Kurikulum Merdeka, dukungan dinas pendidikan, dukungan satuan pendidikan dan komunitas belajar. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 87,72% pendidik menunjukkan persepsi positif terhadap Kurikulum Merdeka

- **75% orang tua memiliki persepsi positif terhadap IKM**



Survei: Hasil Survei Persepsi KM Orang Tua
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qdBENQVjZeaNkMxs29T0ZEcDtEpzW3R8iiMgGy2594M/edit?usp=sharing>

Data ini diperoleh berdasarkan hasil survei yang dilakukan berdasarkan aspek informasi Kurikulum Merdeka, Festival Kurikulum Merdeka dan pelibatan orang tua. Berdasarkan grafik di atas, sebanyak 90,03% orang tua peserta didik dari jenjang Dikdas dan Dikmen menunjukkan persepsi positif terhadap Kurikulum Merdeka.

- **Kegiatan yang Telah Dilakukan beserta Dokumentasi**

- ❖ ***Advokasi dan Koordinasi Kebijakan Merdeka Belajar ke Pemerintah Daerah***

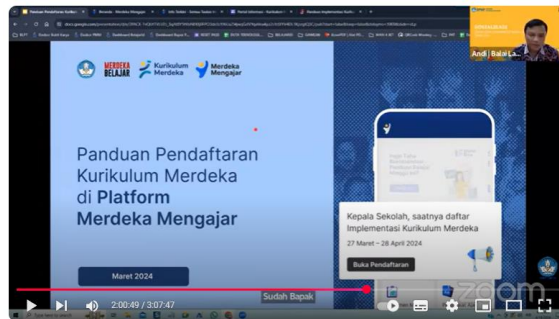
Kebijakan Merdeka Belajar dilaksanakan untuk percepatan pencapaian tujuan rasional Pendidikan, yaitu meningkatnya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang mempunyai keunggulan dan daya saing dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Kegiatan ini melibatkan unsur dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan se Provinsi Kalimantan Utara, Kabid Pembinaan SMA, Kabid PMPK, Kabid Pembinaan GTK, Kabid Pembinaan Dikdas, Kabid Pembinaan GTK, Kabid Pembinaan PAUD, Kepala Cabang Dinas Pendidikan se Provinsi Kalimantan Utara, Kepala BGP Provinsi Kalimantan Utara, Koordinator Pengawas, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), PIC PDM BPMP dan staf BPMP Provinsi Kalimantan Utara.

Adapun tujuan dari kegiatan ini, yaitu: Memberikan pemahaman mendalam tentang Kebijakan Merdeka Belajar (KMB) kepada pemerintah daerah; Mendiskusikan peran penting pemerintah daerah dalam memberikan dukungan berupa regulasi, program dan anggaran yang mendukung Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar (KMB); dan Menyampaikan Program Kerja UPT dalam mendukung Kebijakan Merdeka Belajar (KMB) di daerah.



❖ *Sosialisasi IKM*

Tujuan sosialisasi Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) adalah untuk memperkenalkan dan memberikan informasi yang lebih detail tentang IKM kepada stakeholder pendidikan



Sosialisasi Pendaftaran Implementasi Kurikulum Merdeka Tahun 2024



Sosialisasi Pendaftaran Implementasi Kurikulum Merdeka Tahun 2024

❖ *Festival Kurikulum Merdeka*

Dalam rangka memperkuat dukungan ekosistem positif dari berbagai stakeholder dalam implementasi Kurikulum Merdeka BPMP Provinsi Kalimantan Utara sebagai salah satu UPT Kemendikbudristek di daerah menyelenggarakan Festival Kurikulum Merdeka yang bertujuan untuk mengamplifikasi cerita praktik baik implementasi dan memperkuat keberlanjutan kurikulum merdeka serta upaya mengoptimalkan promosi kesehatan di satuan pendidikan. Kegiatan ini menampilkan pameran karya, festival budaya, talkshow serta berbagai lomba dengan melibatkan pendidik, orang tua dan siswa.



❖ Refleksi IKM Tahap 1

Pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan belum dapat berjalan secara maksimal sesuai dengan harapan. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu upaya untuk menggali informasi tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Kurikulum Merdeka melalui kegiatan refleksi kepada Dinas Pendidikan, Pengawas, kepala sekolah, guru dari satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka. Untuk itu kegiatan Refleksi Implementasi Kurikulum Merdeka Tahap I bertujuan untuk: Mendapatkan informasi tentang apa saja yang telah dilakukan dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka terkait perencanaan, pembelajaran, asesmen, dan refleksi; Mendapatkan informasi tentang kesulitan atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka terkait perencanaan, pembelajaran, asesmen, refleksi; dan, Solusi yang sudah dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Hal yang masih dibutuhkan untuk perbaikan kedepan dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka.



❖ Menyosialisasikan berbagai media komunikasi untuk membangun persepsi positif orang tua terhadap Kurikulum Merdeka

Keterlibatan orang tua khususnya, menjadi salah satu faktor penentu kesuksesan penerapan Kurikulum Merdeka. Orang tua diharapkan dapat mengubah paradigma berpikir mereka bahwa sekolah bukan hanya tempat penitipan anak, kemudian menerima proses pembelajaran. Melalui poin beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, anak-anak diajarkan beribadah, belajar adab. Selaku orang tua, ia juga ikut bergotong royong untuk melatih kemandirian anak dengan melatih life skill dan mengajarkan mereka bertanggung jawab dengan propertinya sendiri. Tugas orang tua di rumah adalah memperbanyak komunikasi dengan anak. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini tujuannya yaitu: Memberikan informasi melalui berbagai media komunikasi untuk membangun persepsi positif orang tua terhadap Kurikulum Merdeka; Sebagai sarana kalobarasi sekolah dan orang tua untuk membangun persepsi positif terhadap Kurikulum Merdeka melalui berbagai media komunikasi.



❖ **Visitasi IKM**

Kebijakan Merdeka Belajar merupakan langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Indonesia yang memiliki Profil Pelajar Pancasila. Kurikulum Merdeka merupakan upaya pemerintah demi mewujudkan transformasi pendidikan di Indonesia ke arah yang lebih baik. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam dimana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu mengidentifikasi permasalahan dan kendala dalam implementasi Kurikulum Merdeka dan mengukur keberhasilan Sekolah Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka.





❖ **Melakukan Advokasi IKM bagi mitra pembangunan IKM**

Menggandeng Mitra Pembangunan mewujudkan pembelajaran berkualitas melalui IKM (utamanya IKM secara mandiri oleh satuan pendidikan) faktanya juga menjadi salah satu dari 6 strategi Kemendikbudristek mensukseskan IKM secara mandiri di sekolah. Bagi pemerintah daerah, Mitra Pembangunan hadir ke mereka untuk berbagi sumberdaya, mengadvokasi dan mendampingi mereka mengawal kebijakan dan program Merdeka Belajar di wilayah kerjanya masing-masing. Sedangkan bagi satuan pendidikan (sekolah), hadirnya Mitra Pembangunan untuk membantu memfasilitasi penguatan berbagai program pembelajaran, karakter, sarana dan prasarana pendidikan serta lingkungan satuan pendidikan.

Mitra Pembangunan juga bisa berkolaborasi dengan komunitas belajar (pendidikan) melalui bantuan fasilitasi penyediaan narasumber dan pembentukan serta aktivasi berbagai program komunitas belajar (pendidikan) dalam mendukung kebijakan dan program Merdeka Belajar. Tujuan dari kegiatan ini yaitu melakukan koordinasi dengan Mitra Pembangunan dalam peran terkait Perkembangan IKM, membangun kerjasama dengan calon mitra pembangunan potensial mendukung program implementasi Kurikulum Merdeka dan melakukan refleksi terkait yang telah dilakukan oleh Mitra Pembangunan dalam perkembangan IKM. Kegiatan ini melibatkan Mitra Pembangunan serta komunitas belajar dari satuan pendidikan.



❖ **Pemantauan dan Evaluasi Peran Mitra Pembangunan IKM**

UPT Kemendikbudristek di daerah berperan melakukan koordinasi dengan Mitra Pembangunan PDM dalam melakukan pendampingan kepada sasaran kebijakan dan program PDM Kemendikbudristek, melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan terkait dengan dukungan Mitra Pembangunan PDM dalam implementasi kebijakan dan program PDM Kemendikbudristek serta membantu memberikan inspirasi praktik baik implementasi kebijakan dan program PDM Kemendikbudristek kepada sasaran Mitra Pembangunan PDM. Adapun tujuan kegiatan ini yaitu: Untuk mengetahui peran dan aktivitas Mitra Pembangunan dalam mendukung program Implementasi Kurikulum Merdeka khususnya di satuan pendidikan dan pemerintah daerah; Untuk memperoleh informasi dan data peran



dalam mendukung program Implementasi Kurikulum Merdeka sebagai sumber dalam menganalisis dan evaluasi dampak terhadap kualitas pendidikan.



❖ Melaksanakan Pendampingan IKM bagi Sekolah Pelaksana Kurikulum Merdeka yang Materinya Didasarkan pada Hasl Refleksi Pelaksanaan IKM tahun ajaran 2023/2024

Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Impelementasi Kurikulum Merdeka khususnya di wilayah Kalimantan Utara sudah berjalan dari Tahun ajaran 2022/2023 sampai dengan saat ini, Sehingga perlu dilakukan Refleksi IKM untuk mengetahui apakah Pelaksanaan IKM ini sudah berjalan dengan baik atau belum. Refleksi ini dilaksanakan dengan menggunakan cara berpikir tumbuh (*growth mindset*). Kegiatan melaksanakan pendampingan IKM bagi sekolah pelaksana Kurikulum Merdeka yang materinya didasarkan pada hasil refleksi pelaksanaan IKM tahun ajaran 2023/2024 melibatkan pegawai BPMP Provinsi Kalimantan Utara untuk melakukan kunjungan ke Satuan Pendidikan yang sudah ditetapkan

Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu: Mengidentifikasi permasalahan dan kendala dalam Implementasi Kurikulum Merdeka yang didasarkan dari hasil refleksi pelaksanaan IKM Tahun ajaran 2023/2024; Mengukur keberhasilan Sekolah Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka yang didasarkan dari hasil refleksi pelaksanaan IKM Tahun ajaran 2023/2024.



❖ Melaksanakan Survey Persepsi Orang Tua Terhadap Kurikulum Merdeka

Keterlibatan orang tua khususnya menjadi salah satu faktor penentu kesuksesan penerapan Kurikulum Merdeka. Orang tua diharapkan dapat mengubah paradigma berpikir mereka bahwa sekolah bukan hanya tempat penitipan anak, kemudian menerima proses pembelajaran. Selaku orang tua, kita juga ikut bergotong royong untuk melatih kemandirian anak dengan melatih life skill dan mengajarkan mereka bertanggung jawab dengan propertinya sendiri. Peran orang tua sangat penting bagi anak, terutama saat anak kita kesulitan. Orang tua sangat diharapkan dapat terlibat aktif, mendukung semua kegiatan anak-anak mereka dengan baik, supaya tujuan pemerintah untuk menghadirkan generasi Indonrsia yang mengamalkan Profil Pelajar Pancasila dapat tercipta. Adapun tujuan kegiatan Melaksanakan Survei Persepsi Orang Tua Terhadap Kurikulum Merdeka sebagai berikut: Mengetahui sejauhmana persepsi orang tua terhadap Kurikulum Merdeka; Sebagai sarana kolaborasi sekolah dan orang tua untuk membangun persepsi orang tua terhadap Kurikulum Merdeka.



❖ Refleksi IKM Tahap 2

Kurikulum Merdeka bertujuan untuk menciptakan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan peserta didik dan memberikan kebebasan bagi guru untuk mengembangkan materi pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna. Dalam implementasinya, kurikulum Merdeka memerlukan peran aktif dari para guru dalam menyusun, merancang, dan mengimplementasikan kurikulum tersebut saat proses pembelajaran di kelas.

Oleh karena itu, kesiapan perencanaan guru sangat penting dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Tujuan dari kegiatan ini yaitu merefleksi hasil Implementasi Kurikulum Merdea yang sudah terlaksana.



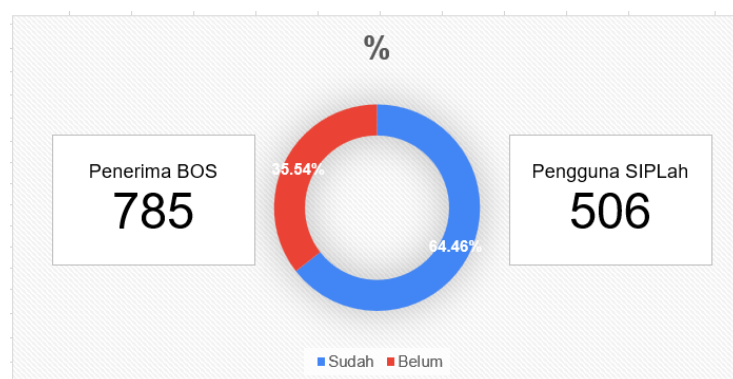
3) PDM 03A Tranformasi Digital untuk Sumber Daya Sekolah

a) Objektif dan Target PDM O3A SDS

No	Objektif UPT	Target UPT
1.	90% satuan pendidikan penerima BOS dan 50% satuan pendidikan BOP menggunakan SIPLah	90% satuan pendidikan penerima BOS dan 50% satuan pendidikan BOP menggunakan SIPLah
2.	80% dinas pendidikan memanfaatkan modul integrasi MARKAS-SIPD untuk perencanaan dan Pelaporan	80% dinas pendidikan memanfaatkan modul integrasi MARKAS-SIPD untuk perencanaan dan Pelaporan
3.	90% satuan pendidikan penerima BOSP melaporkan penggunaan dananya melalui ARKAS	90% satuan pendidikan penerima BOSP melaporkan penggunaan dananya melalui ARKAS
4	100% satuan pendidikan penerima BOS dan 50% satuan pendidikan penerima BOP melakukan perencanaan pada T-1	100% satuan pendidikan penerima BOS dan 50% satuan pendidikan penerima BOP melakukan perencanaan pada T-1

c) Capaian PDM O3A SDS Jenjang Dikdas dan Dikmen

- 90% satuan pendidikan penerima BOS menggunakan SIPLah



- Terdapat 506 satuan pendidikan penerima BOS yang telah menggunakan SIPLah atau sebesar 64,46%. Rincian data pengguna SIPLah tiap jenjang dapat dilihat pada tabel berikut:

Jenjang	Penerima BOS	Pengguna Siplah	Persentase
SD	484	305	63.02%
SMP	194	136	70.10%
SMA	68	41	60.29%
SMK	32	19	59.38%
SLB	7	5	71.43%
TOTAL	785	506	64.46%

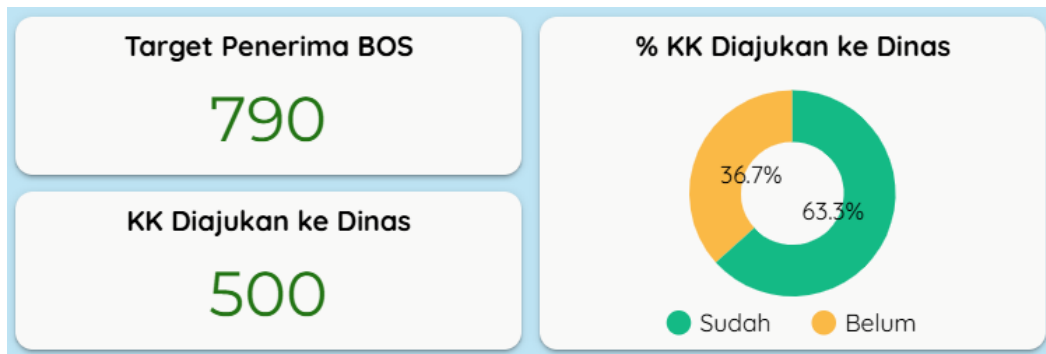
- 80% dinas pendidikan memanfaatkan modul integrasi MARKAS-SIPD . Untuk perencanaan dan Pelaporan Belum ada data tentang pemanfaatan modul integrasi MARKAS-SIPD dikarenakan pengintegrasian ini akan direncanakan mulai tahun 2025
- 90% satuan pendidikan penerima BOS melaporkan penggunaan dananya melalui ARKAS

Progres pelaporan penggunaan Dana BOS oleh satuan pendidikan pada tiap bulannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Jenjang	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
SD	61.78%	61.78%	61.78%	61.78%	61.57%	61.16%
SLB	28.57%	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%
SMA	50.72%	50.72%	49.28%	49.28%	49.28%	49.28%
SMK	46.88%	46.88%	46.88%	46.88%	46.88%	43.75%
SMP	61.34%	61.86%	61.86%	61.86%	61.86%	61.86%

Jenjang	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
SD	51.65%	49.59%	38.43%	32.64%	0.83%	0.00%
SLB	14.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMA	37.68%	20.29%	17.39%	11.59%	0.00%	0.00%
SMK	40.63%	9.38%	6.25%	3.13%	0.00%	0.00%
SMP	47.94%	46.91%	38.14%	27.84%	0.52%	0.00%

- 100% satuan pendidikan penerima melakukan perencanaan pada T-1



Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Jenjang	Penerima BOSP	Membuat Perencanaan T-1	Persentase
SD	485	265	54.64%
SMP	197	127	64.47%
SMA	68	68	100.00%
SMK	33	33	100.00%
SLB	7	7	100.00%
TOTAL	790	500	63.29%

d) Kegiatan yang telah Dilakukan

- Pemantauan Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terkait penggunaan ARKAS 4.0 BOP



- Bimtek Satuan Pendidikan terkait fitur rencana belanja integrasi ARKAS – SIPLah





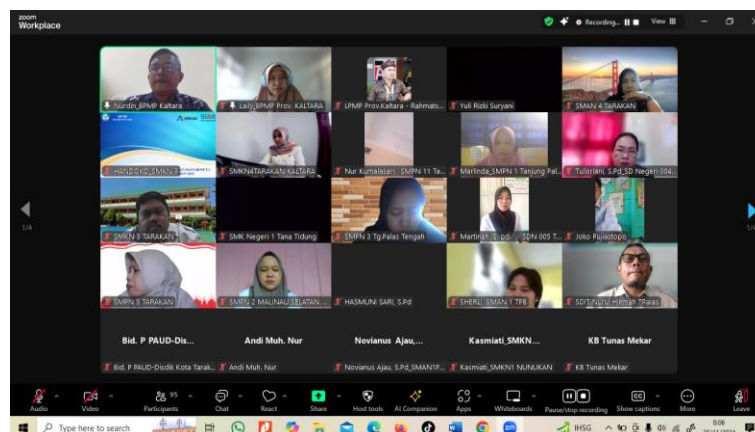
- Pendampingan Kepada Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan yang memiliki komunitas SIAR



- Pemantauan Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terkait pelaporan BOSP melalui ARKAS tahap 1 dan 2 TA 2024



- Sosialisasi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terkait perencanaan penggunaan BOSP pada T-1



- Advokasi dan pemantauan Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terkait perencanaan penggunaan BOSP pada T-1



4) PDM-03B Optimalisasi Chromebook & Belajar ID

a) Objektif dan Target PDM

No	Objektif UPT	Target UPT
1.	Meningkatkan aktifasi akun belajar.id dari 72,96% menjadi 100% diluar akun peserta didik PAUD dan kesetaraan	100%
2.	Meningkatkan jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan Google Workspace for Education dari 83,53% menjadi 100% satuan pendidikan [minimal 25% guru per satuan pendidikan memanfaatkan GWE]	100%
3.	Meningkatkan pemanfaatan Chromebook dalam proses pembelajaran pada 100% satuan pendidikan penerima bantuan TIK melalui Bantuan Pusat	100%
4.	Meningkatkan pemanfaatan Chromebook dalam proses pembelajaran pada 100% satuan pendidikan penerima bantuan TIK melalui Bantuan DAK TIK	100%
5.	Meningkatkan jumlah dan sebaran daerah champion dari 80 Pemda menjadi 200 Pemda	1 Pemda

b) Capaian

No	Objektif UPT	Target UPT	Satuan	Capaian	Satuan
1	Meningkatkan aktifasi akun belajar.id dari 72,96% menjadi 100% diluar akun peserta didik PAUD dan kesetaraan	100	%	76,43	%
2	Meningkatkan jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan Google Workspace for Education dari 83,53% menjadi 100% satuan pendidikan [minimal 25% guru per satuan pendidikan memanfaatkan GWE]	100	%	93,40	%
3	Meningkatkan pemanfaatan Chromebook dalam proses pembelajaran pada 100% satuan pendidikan penerima bantuan TIK melalui Bantuan Pusat	100	%	99,3	%
4	Meningkatkan pemanfaatan Chromebook dalam proses pembelajaran pada 100% satuan pendidikan penerima bantuan TIK melalui Bantuan DAK TIK	100	%	99,3	%
5	Meningkatkan jumlah dan sebaran daerah champion dari 80 Pemda menjadi 200 Pemda	1	Pemda	0	Pemda



c) Kegiatan yang telah Dilakukan

- Pelaksanaan pelatihan/bimtek Optimalisasi Chromebook dan belajar.id pada Pemerintah daerah dan Satpen



- Supervisi Program Transformasi Digital di Pemerintah Daerah



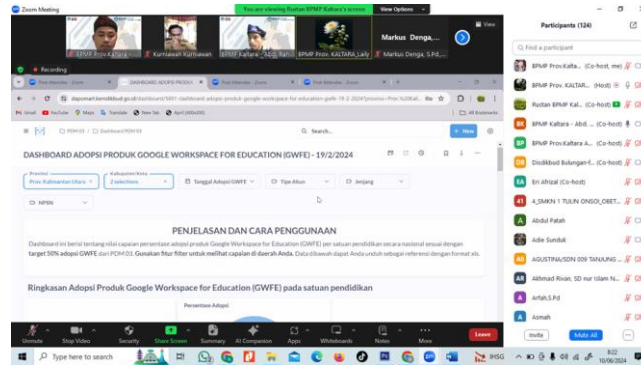
- Advokasi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan untuk Optimalisasi Chromebook



- Webinar OCB (Kreasi dan Inovasi bernilai kearifan lokal dalam Pembelajaran memanfaatkan TIK) series 1, 2, 3, dan 4



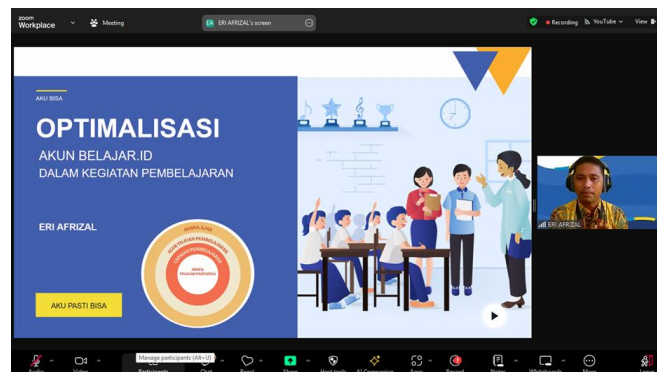
❖ Webinar Series 1



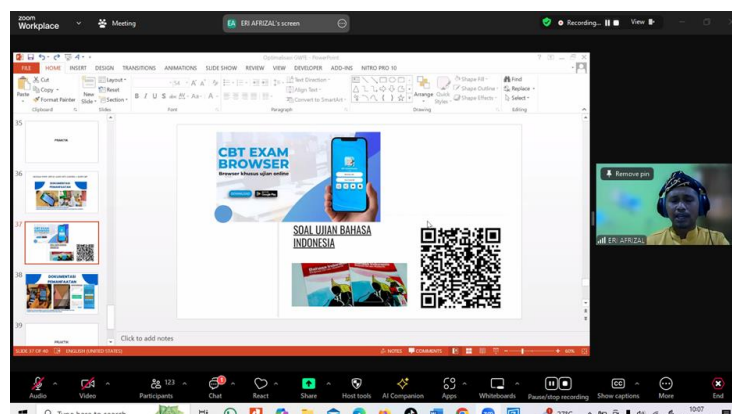
❖ Webinar Series 2



❖ Webinar Series 3



❖ Webinar Series 4





- Bimtek Peningkatan Kapasitas Kombel Belajar Id dalam pemanfaatan TIK untuk Pembelajaran



5) PDM-04A Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data

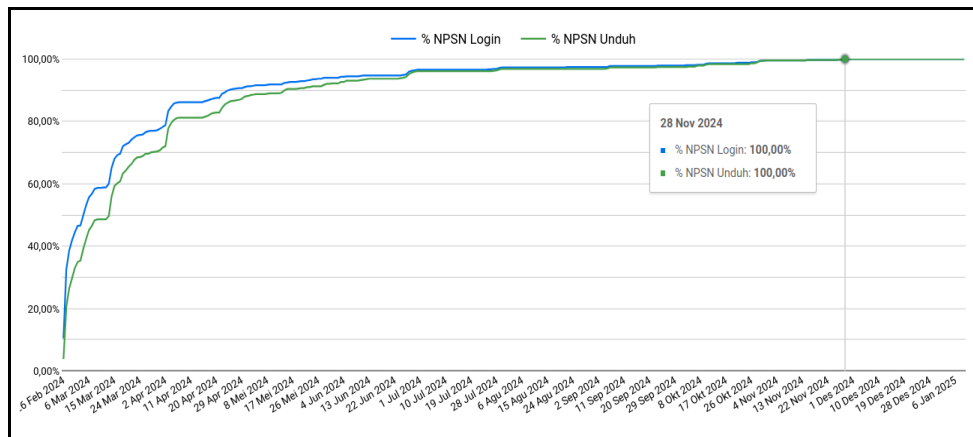
a) Objektif dan Target UPT

No	Objektif UPT	Target UPT
1.	Berjalannya transformasi satuan pendidikan dengan capaian dan memiliki delta positif)	a. 99% Satuan Dikdas (SD dan SMP) telah melakukan Login
		b. 99% Satuan Dikdas (SD dan SMP) telah melakukan Eksplorasi & Unduh
		c. 99% Satuan Dikmen (SMA dan SMK) telah melakukan Login
		d. 99% Satuan Dikmen (SMA dan SMK) telah melakukan Eksplorasi & Unduh
		e. 99% Satuan Diksus (SLB) telah melakukan Login
		f. 99% Satuan Diksus (SLB) telah melakukan Eksplorasi dan Unduh

b) Capaian

Progres Login dan Unduh Rapor Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar (SD dan SMP) dari waktu ke waktu sejak dirilis tanggal 05 Maret 2024 hingga 28 November 2024 :

Jumlah Satuan Dikdas	Target	Capaian
665	99% atau sebanyak 658 Satuan Pendidikan Dasar (SD dan SMP) Melakukan Login Rapor Pendidikan	100% atau sebanyak 665 Satuan Pendidikan Dasar (SD dan SMP) telah melakukan Login Rapor Pendidikan
665	99% atau sebanyak 658 Satuan Pendidikan Dasar (SD dan SMP) Melakukan Eksplorasi dan Unduh Rapor Pendidikan	100% atau sebanyak 665 Satuan Pendidikan Dasar (SD dan SMP) telah melakukan Eksplorasi dan Unduh Rapor Pendidikan



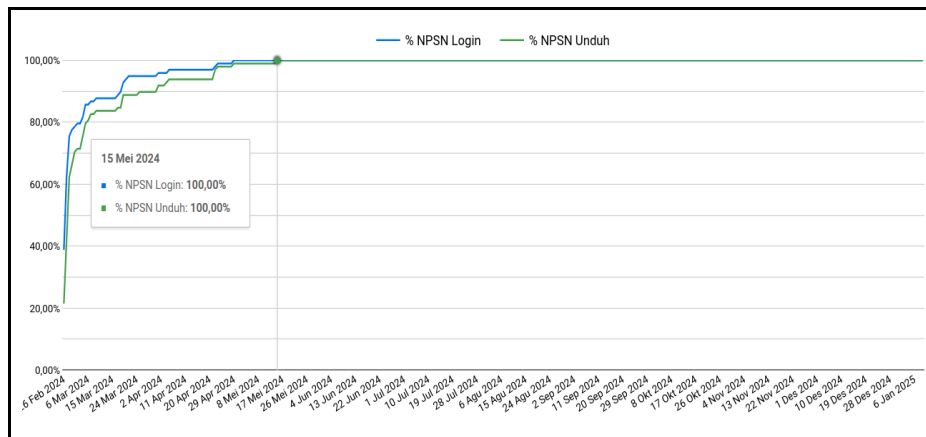
Capaian Progres Login dan Unduh Rapor Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar (SD dan SMP) Se-Kalimantan Utara Tahun 2024

Dari grafik di atas, Rapor Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar (SD dan SMP) Sejak diluncurkan tanggal 05 Maret 2024 secara bertahap dan simultan telah diakses oleh Satuan Pendidikan Dasar (SD dan SMP). Puncaknya adalah hingga 28 November 2024, Seluruh Satuan Pendidikan Dasar (SD dan SMP) di Provinsi Kalimantan Utara telah mencapai 100% Login dan Unduh.

• Capaian Jenjang Pendidikan Menengah (SMA dan SMK)

Progres Login dan Unduh Rapor Pendidikan Jenjang Pendidikan Menengah (SMA dan SMK) dari waktu ke waktu sejak dirilis tanggal 05 Maret 2024 hingga 15 Mei 2024:

Jumlah Satuan Dikmen	Target	Capaian
98	99% atau sebanyak 97 Satuan Pendidikan Menengah (SMA dan SMK) Melakukan Login Rapor Pendidikan	100% atau sebanyak 98 Satuan Pendidikan Menengah (SMA dan SMK) telah melakukan Login Rapor Pendidikan
98	99% atau sebanyak 97 Satuan Pendidikan Menengah (SMA dan SMK) Melakukan Eksplorasi dan Unduh Rapor Pendidikan	100% atau sebanyak 98 Satuan Pendidikan Menengah (SMA dan SMK) telah melakukan Eksplorasi dan Unduh Rapor Pendidikan

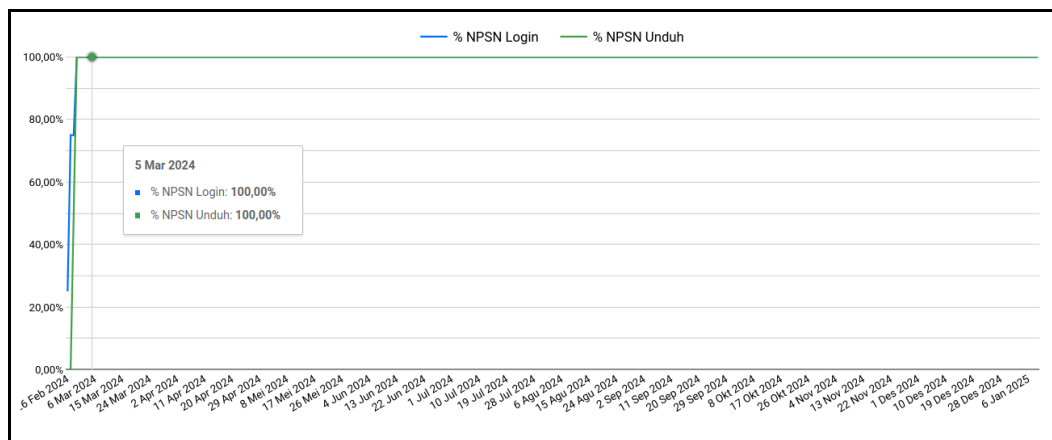


Dari grafik di atas, Rapor Pendidikan jenjang Pendidikan Menengah (SMA dan SMK) Sejak diluncurkan tanggal 05 Maret 2024 secara bertahap dan simultan telah diakses oleh Satuan Pendidikan Menengah (SMA dan SMK). Puncaknya adalah hingga 15 Mei 2024. Seluruh Satuan Pendidikan Menengah (SMA dan SMK) di Provinsi Kalimantan Utara telah mencapai 100% Login dan Unduh.

• Capaian Jenjang Pendidikan Khusus (SLB)

Progres Login dan Unduh Rapor Pendidikan Jenjang Pendidikan Khusus (SLB) dari waktu ke waktu sejak dirilis tanggal 05 Maret 2024 hingga 05 Maret 2024 :

No.	Jumlah Satuan Diksus	Target	Capaian
1.	4	99% atau sebanyak 3 Satuan Pendidikan Khusus (SLB) Melakukan Login Rapor Pendidikan	100% atau sebanyak 4 Satuan Pendidikan Khusus (SLB) telah melakukan Login Rapor Pendidikan
2.	4	99% atau sebanyak 3 Satuan Pendidikan Khusus (SLB) Melakukan Eksplorasi dan Unduh Rapor Pendidikan	100% atau sebanyak 4 Satuan Pendidikan Khusus (SLB) telah melakukan Eksplorasi dan Unduh Rapor Pendidikan



Dari grafik di atas, Rapor Pendidikan jenjang Pendidikan Khusus (SLB) Sejak diluncurkan tanggal 05 Maret 2024 secara bertahap dan simultan telah diakses oleh Satuan Pendidikan Menengah (SMA dan SMK). Puncaknya adalah hingga 05 Maret



2024. Seluruh Satuan Pendidikan Khusus (SLB) di Provinsi Kalimantan Utara telah mencapai 100% Login dan Unduh.

• **Tabel Rekapitulasi Login dan Unduh Rapor Pendidikan Jenjang SD Se-Indonesia Per 31 Desember 2024**

Nama Provinsi	Jumlah Satuan SD	Jumlah Sekolah Unduh	% Unduh	Sisa Unduh
Prov. Kalimantan Utara	473	473	100.00%	0

• **Tabel Rekapitulasi Login dan Unduh Rapor Pendidikan Jenjang SMP Se-Indonesia Per 31 Desember 2024**

Nama Provinsi	Jumlah Satuan SMP	Jumlah Sekolah Unduh	% Unduh	Sisa Unduh
Prov. Kalimantan Utara	192	192	100.00%	0

Sumber : Dashboard Adopsi Rapor Pendidikan Nasional – Direktorat Jenderal PDM
Kemdikbudristek

Berdasarkan tabel di atas, Provinsi Kalimantan Utara adalah salah satu Provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Seluruh Satuan SMP-nya telah 100% melakukan Login dan Unduh Rapor Pendidikan.

• **Tabel Rekapitulasi Login dan Unduh Rapor Pendidikan Jenjang SMA Se-Indonesia Per 31 Desember 2024**

Nama Provinsi	Jumlah Satuan SMA	Jumlah Sekolah Unduh	% Unduh	Sisa Unduh
Prov. Kalimantan Utara	67	67	100.00%	0

Sumber : Dashboard Adopsi Rapor Pendidikan Nasional – Direktorat Jenderal PDM
Kemdikbudristek

Berdasarkan tabel di atas, Provinsi Kalimantan Utara adalah salah satu Provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Seluruh Satuan SMA-nya telah 100% melakukan Login dan Unduh Rapor Pendidikan.

• **Tabel Rekapitulasi Login dan Unduh Rapor Pendidikan Jenjang SMK Se-Indonesia Per 31 Desember 2024**

Nama Provinsi	Jumlah Satuan SMK	Jumlah Sekolah Unduh	% Unduh	Sisa Unduh
Prov. Kalimantan Utara	31	31	100.00%	0

Sumber : Dashboard Adopsi Rapor Pendidikan Nasional – Direktorat Jenderal PDM
Kemdikbudristek

Berdasarkan tabel di atas, Provinsi Kalimantan Utara adalah salah satu Provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Seluruh Satuan SMK-nya telah 100% melakukan Login dan Unduh Rapor Pendidikan.

• **Tabel Rekapitulasi Login dan Unduh Rapor Pendidikan Jenjang SLB Se-Indonesia Per 31 Desember 2024**

Nama Provinsi	Jumlah Satuan SMK	Jumlah Sekolah Unduh	% Unduh	Sisa Unduh
Prov. Kalimantan Utara	11	11	100.00%	0

Sumber : Dashboard Adopsi Rapor Pendidikan Nasional – Direktorat Jenderal PDM
Kemdikbudristek

Berdasarkan tabel di atas, Provinsi Kalimantan Utara adalah salah satu Provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Seluruh Satuan SLB-nya telah 100% melakukan Login dan Unduh Rapor Pendidikan.

• **Tabel Rekapitulasi Login dan Unduh Rapor Pendidikan Seluruh Jenjang Se-Indonesia Per 31 Desember 2024**

No	Nama Provinsi	Jumlah Satuan SMK	Jumlah Sekolah Unduh	% Unduh	Sisa Unduh
1	Prov. Kalimantan Utara	1356	1356	100.00%	0

Sumber : Dashboard Adopsi Rapor Pendidikan Nasional – Direktorat Jenderal PDM
Kemdikbudristek

Berdasarkan tabel Rekapitulasi Login dan Unduh Rapor Pendidikan Nasional Tahun 2024 di atas, Provinsi Kalimantan Utara adalah satu-satunya Provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Seluruh Satuan Pendidikan dan Jenjangnya telah 100% melakukan Login dan Unduh Rapor Pendidikan. Hal ini merupakan hasil Kolaborasi dan kerjasama yang baik antara UPT dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan stakeholder lain.

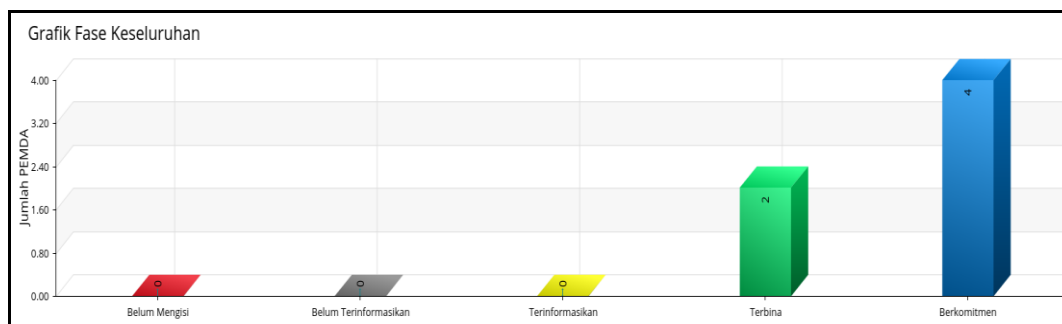
Dengan demikian Provinsi Kalimantan Utara telah sukses menjalankan dan mengimplementasikan salah satu indikator Transformasi Satuan Pendidikan yang memiliki Capaian dan Delta Positif.

• **Komitmen Pemerintah Daerah**

Dalam hal pengukuran Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Kebijakan Merdeka Belajar ke-19 Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data yang dilakukan sepanjang Tahun 2024 hasilnya adalah sebagai berikut :

No.	Pemerintah Daerah	Fase Komitmen
1.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	Berkomitmen
2.	Pemerintah Kabupaten Bulungan	Berkomitmen
3.	Pemerintah Kota Tarakan	Berkomitmen

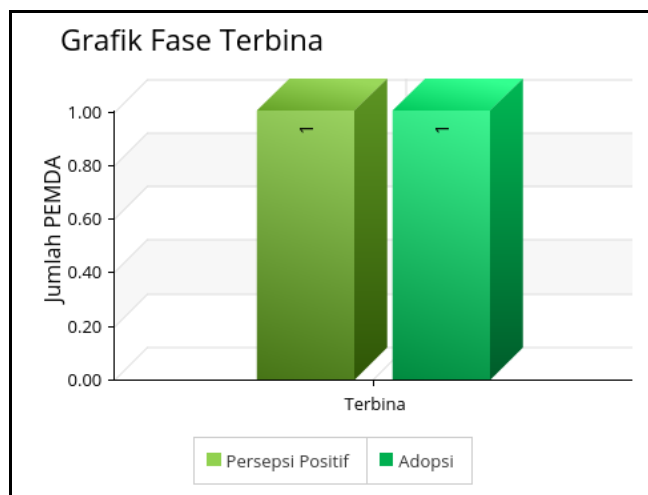
4.	Pemerintah Kabupaten Nunukan	Terbina
5.	Pemerintah Kabupaten Malinau	Terbina
6.	Pemerintah Kabupaten Tana Tidung	Berkomitmen



Level Komitmen Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan grafik secara keseluruhan, Hasil Pengukuran Komitmen dari 6 Pemerintah Daerah yang diintervensi oleh PDM-04A BPMP Provinsi Kalimantan Utara, sebanyak 2 (dua) Pemerintah Daerah masuk pada Fase Terbina. Dan sebanyak 4 (empat) Pemerintah Daerah masuk dalam Fase Berkomitmen.

Fase Terbina : Bagi Pemerintah Daerah yang masuk pada Fase Terbina, dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu Kategori Persepsi Positif dan Kategori Adopsi. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik dan Tabel di bawah ini :



Grafik Fase Terbina

Tabel Komitmen Fase Terbina

No	Pemerintah Daerah	Fase Terbina
1.	Pemerintah Kabupaten Nunukan	Persepsi Positif
2.	Pemerintah Kabupaten Malinau	Adopsi

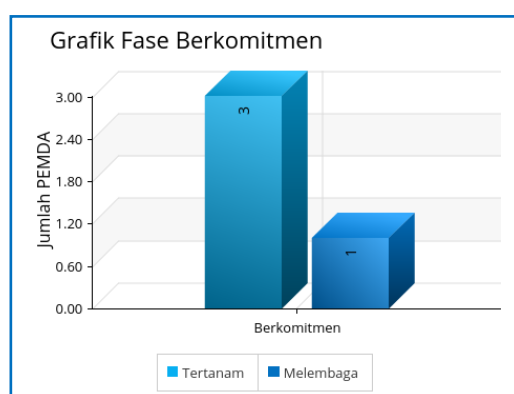
Fase Terbina - Persepsi Positif artinya : Individu di Dinas Pendidikan mengerti akan dampak perubahan dan manfaat bagi mereka terkait Kebijakan Merdeka Belajar ke-

19 dan Program Prioritas Nasional Kemdikbudristek yaitu Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data.

Fase Terbina - Adopsi artinya : Individu di Dinas Pendidikan bersedia bekerjasama dan melaksanakan perubahan terkait Kebijakan Merdeka Belajar ke-19 dan Program Prioritas Nasional Kemdikbudristek yaitu Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data.

Fase Berkomitmen

Bagi Pemerintah Daerah yang masuk pada Fase Berkomitmen, juga dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu Kategori Tertanam dan Kategori Melembaga. Selengkapnya dapat dilihat pada Grafik dan tabel dibawah ini :



Tabel Komitmen – Fase Berkomitmen

No	Pemerintah Daerah	Fase Berkomitmen
1.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	Tertanam
2.	Pemerintah Kota Tarakan	Tertanam
3.	Pemerintah Kabupaten Malinau	Tertanam
4.	Pemerintah Kabupaten Bulungan	Melembaga

Fase Berkomitmen – Tertanam artinya : Perubahan menjadi kebiasaan baru status quo baru ditataran Dinas Pendidikan terhadap Kebijakan Merdeka Belajar ke-19 Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data.

Fase Berkomitmen – Melembaga artinya : Individu melakukan perubahan mandiri dan berinovasi dalam pelaksanaan dan perbaikan terhadap Kebijakan Merdeka Belajar ke-19 Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data. Di Fase ini Pemerintah Daerah telah berhasil mengimplementasikan Transformasi Satuan Pendidikan yang memiliki capaian dan Delta Positif.

Merujuk pada Grafik dan Tabel di atas, Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan mencapai level komitmen melembaga, dimana level komitmen melembagai tersebut adalah level komitmen tertinggi dalam pengukuran level Komitmen Pemerintah Daerah yang dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sepanjang Tahun 2024.



Sedangkan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kota Tarakan dan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, hasil pengukuran level komitmen pada masing-masing Pemerintah Daerah adalah Fase Berkomitmen Tertanama.

Dan untuk Pemerintah Kabupaten Nunukan dan Pemerintah Kabupaten Malinau, hasil pengukuran level komitmen masing-masing adalah Fase Terbina.

- **Delta Positif Rapor Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024**

Delta Positif Rapor Pendidikan adalah objektif dari PDM-04A BPMP Provinsi Kalimantan Utara, Delta Positif yang diekspos pada laporan ini adalah Delta Positif Indikator Prioritas Rapor Pendidikan Tahun 2024 Agregat Provinsi Kalimantan Utara.

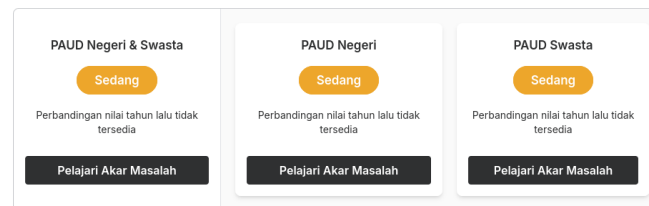
- ❖ **Satuan PAUD**

Untuk Satuan PAUD pada Tahun sebelumnya (Tahun 2023) belum memiliki Rapor Pendidikan. Sehingga belum ada perbandingan data capaian tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.

- **Proses Belajar yang sesuai bagi Anak Usia Dini**

Proses Belajar yang Sesuai bagi Anak Usia Dini

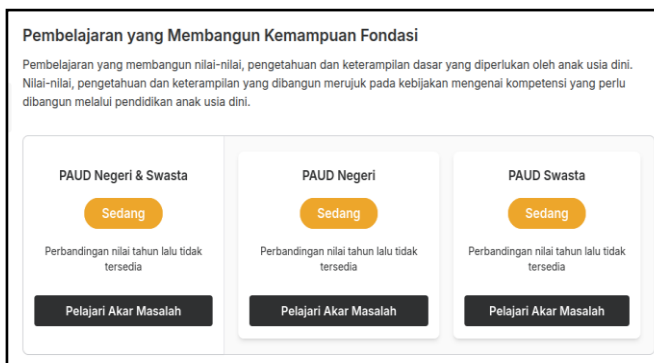
Upaya untuk mengelola suasana belajar yang nyaman, memberikan dukungan afektif melalui pemberian motivasi atas usaha yang dihasilkan anak serta penerapan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak usia dini.



Berdasarkan

Pengisian Survei Lingkungan Belajar Jenjang PAUD Se-Kalimantan Utara, Label Capaian Indikator Proses Belajar yang Sesuai bagi Anak Usia Dini, baik di PAUD Negeri maupun Swasta tergolong Sedang (Belum Baik).

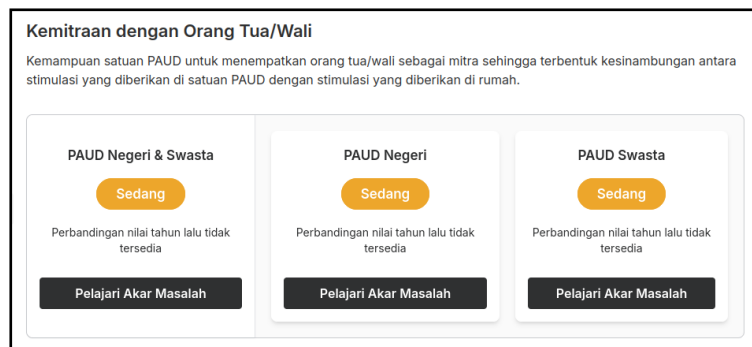
- **Pembelajaran yang Membangun Fondasi**



Berdasarkan Pengisian Survei Lingkungan Belajar Jenjang PAUD Se-Kalimantan Utara, Label Capaian Indikator Pembelajaran yang Membangun Fondasi, baik di PAUD Negeri maupun Swasta tergolong Sedang (Belum Baik).

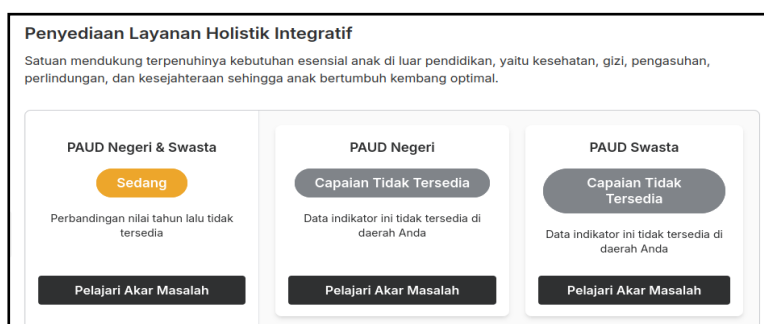


➤ **Kemitraan dengan Orang Tua / Wali**



Berdasarkan Pengisian Survei Lingkungan Belajar Jenjang PAUD Se-Kalimantan Utara, Label Capaian Indikator Kemitraan Orang Tua/Wali, baik di PAUD Negeri maupun Swasta tergolong Sedang (Belum Baik).

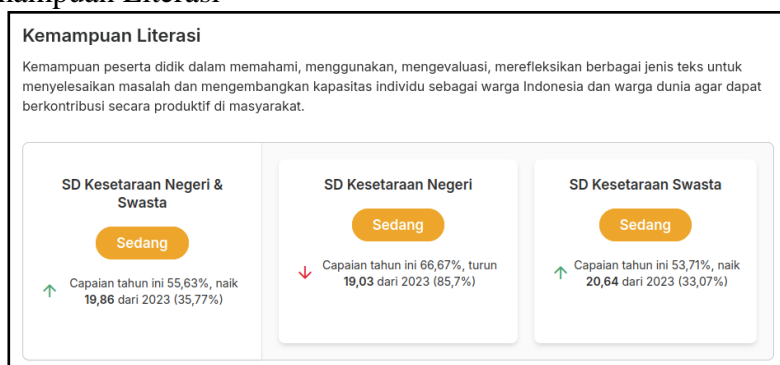
➤ **Penyediaan Layanan Holistik Integratif**



Berdasarkan Pengisian Survei Lingkungan Belajar Jenjang PAUD Se-Kalimantan Utara, Label Capaian Indikator Penyediaan Layanan Holistik Integratif, baik di PAUD Negeri maupun Swasta tergolong Sedang (Belum Baik).

❖ **Satuan SKB dan PKBM**

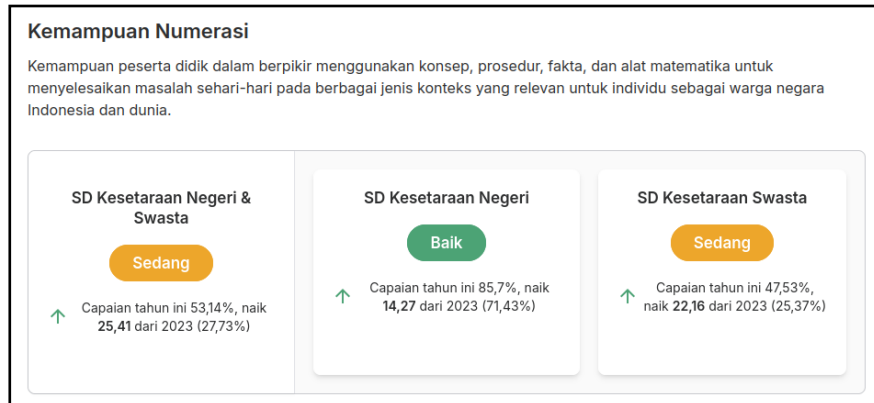
➤ **Kemampuan Literasi**



Dari Informasi diatas diatas dapat kita amati bahwa Label Capaian Kemampuan Literasi Satuan Pendidikan Kesetaraan se-Kalimantan Utara tercatat baik negeri maupun swasta adalah Sedang (Belum Baik). Secara rata-rata terdapat peningkatan

Skor Kemampuan Literasi pada Satuan Pendidikan Kesetaraan Negeri dan Swasta sebesar 19,86 poin. Tetapi jika kita telisik lebih dalam, terjadi penurunan Skor Kemampuan Literasi pada Satuan Pendidikan Kesetaraan Negeri sebesar 19,03 poin. Sedangkan Skor Kemampuan Literasi pada Satuan Pendidikan Kesetaraan Swasta naik sebesar 20,64 poin.

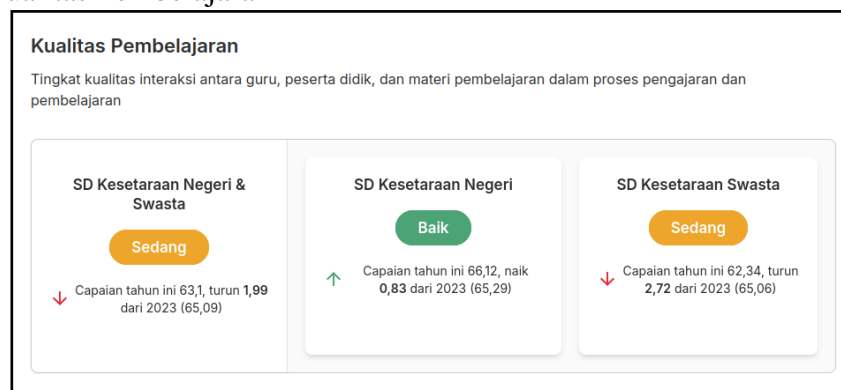
➤ Kemampuan Numerasi



Dari data kemampuan numerasi pada Satuan Pendidikan Kesetaraan se-Kalimantan Utara di atas, Capaian Kemampuan Numerasi pada Satuan Pendidikan Kesetaraan Negeri adalah Baik, sedangkan Capaian Kemampuan Numerasi pada Satuan Pendidikan adalah Sedang (belum baik). Pada Satuan Pendidikan Kesetaraan Negeri Terjadi peningkatan Skor capaian dari tahun sebelumnya sebanyak 14,27 poin. Sedangkan pada Pendidikan Kesetaraan Swastas juga mengalami Peningkatan sebanya 22,16 Poin.

Secara rata-rata terjadi peningkatan Skor Kemampuan Numerasi pada Satuan Pendidikan Kesetaraan Negeri dan Swasta.

➤ Kualitas Pembelajaran

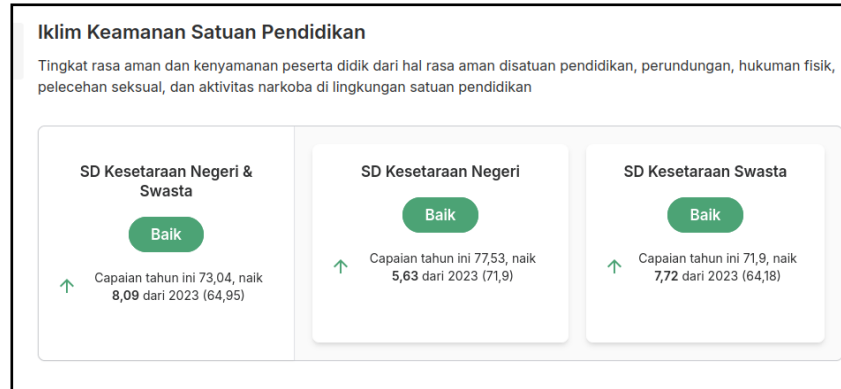


Untuk Label Capaian Indikator Kualitas Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Kesetaraan Negeri sudah Baik tetapi Label Capaian Indikator Kualitas Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Swasta masih Sedang (Belum Baik).

Terkait Peningkatan Skor Capaian Kualitas Pembelajaran dari Tahun sebelumnya, Satuan Pendidikan Kesetaraan mengalami peningkatan skor Kualitas Pembelajaran

sebesar 0,83 poin dari tahun sebelumnya. Sedangkan skor capaian kualitas pembelajaran Satuan pendidikan Kesetaraan Swasta mengalami penurunan skor sebanyak 2,72 Poin dari tahun sebelumnya.

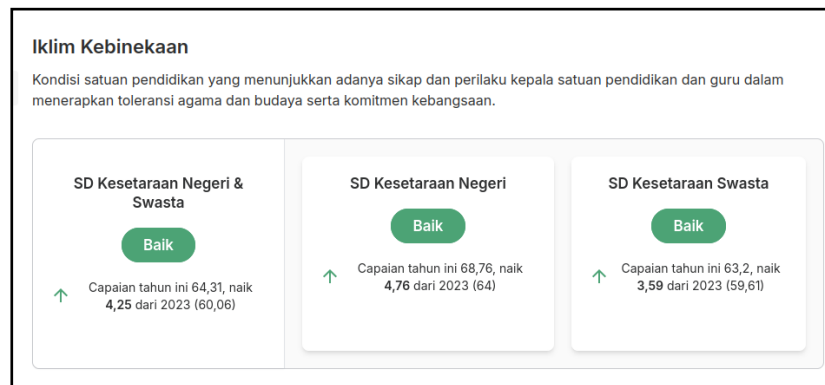
➤ Iklim Keamanan Sekolah



Untuk Label Capaian Indikator Iklim Keamanan Sekolah, Label Capaian satuan Pendidikan Kesetaraan Negeri dan Swasta sudah Baik dan secara rata-rata terjadi peningkatan Skor sebesar 8,09 poin dari tahun sebelumnya.

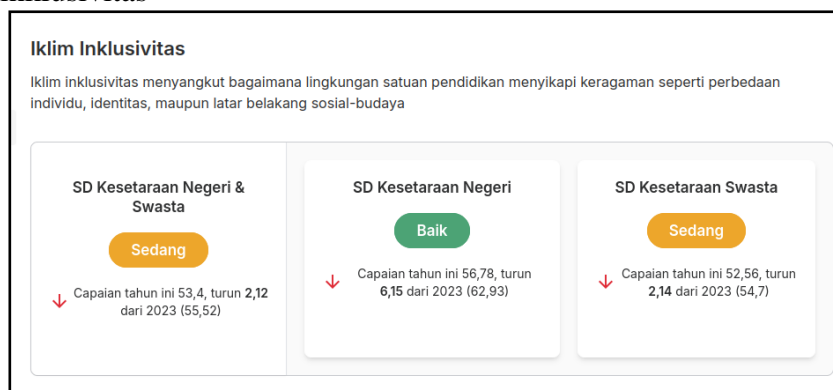
Satuan Pendidikan Kesetaraan Negeri mengalami kenaikan skor dari tahun sebelumnya sebesar 5,63 poin. Dan Satuan Pendidikan Kesetaraan Swasta juga mengalami kenaikan skor dari tahun sebelumnya sebesar 7,72 poin.

➤ Iklim Kebinekaan



Label Capaian Pada Indikator Iklim Kebinekaan baik Satuan Pendidikan Kesetaraan Negeri maupaun swasta sudah Baik. Pada Satuan Pendidikan Kesetaraan Negeri mengalami kenaikan skor sebesar 4,76 poin dari tahun sebelumnya. Begitu juga pada Satuan Pendidikan Kesetaraan Swasta juga mengalami kenaikan skor sebesar 3,59 poin dari tahun sebelumnya.

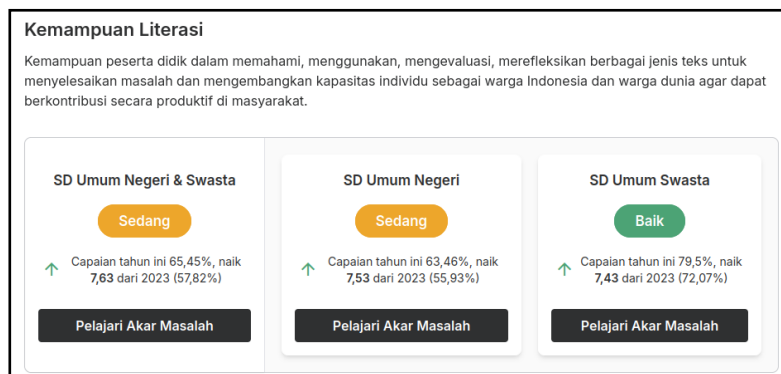
➤ Iklim inklusivitas



Label Capaian Indikator Iklim Inklusivitas pada Satuan Pendidikan Kesetaraan Negeri sudah Baik, namun pada Satuan Pendidikan Kesetaraan Swasta masih Sedang (Belum Baik). Berkaitan dengan Delta skor Iklim Inklusivitas baik Satuan Pendidikan Kesetaraan Baik Negeri maupun Swasta mengalami Penurunan. Satuan Pendidikan Kesetaraan Negeri turun sebanyak 61.5 poin dari tahun sebelumnya. Sedangkan Satuan Pendidikan Kesetaraan swasta turun sebanyak 2,14 poin dari tahun sebelumnya.

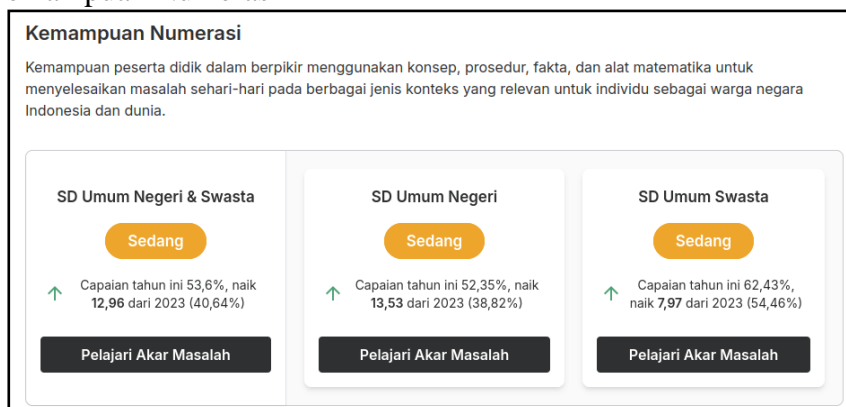
❖ Jenjang SD

➤ Kemampuan Literasi



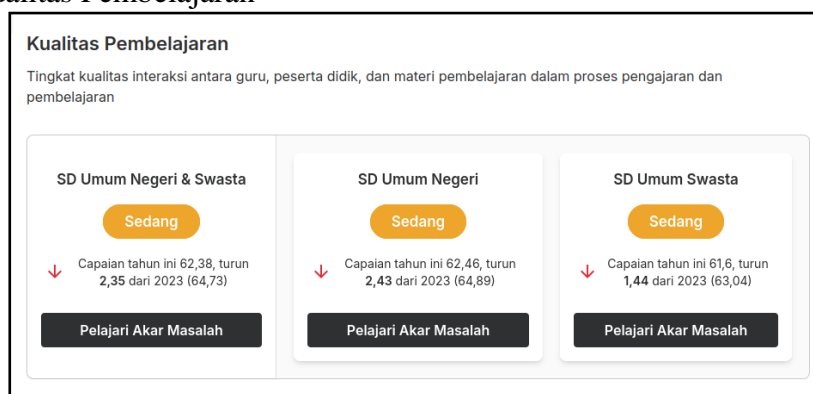
Label Capaian Kemampuan Numerasi Jenjang SD di Sekolah Negeri tergolong Sedang (Belum Baik). Tetapi Label Capaian Kemampuan Numerasi di Sekolah Swasta sudah Baik. Terdapat Delta Positif pada Indikator Kemampuan Literasi, Pada SD Negeri mengalami Kenaikan Skor sebesar 7,53 poin dari tahun sebelumnya. Begitu juga dengan SD Swasta juga mengalami kenaikan sebesar 7,43 dari tahun sebelumnya.

➤ Kemampuan Numerasi



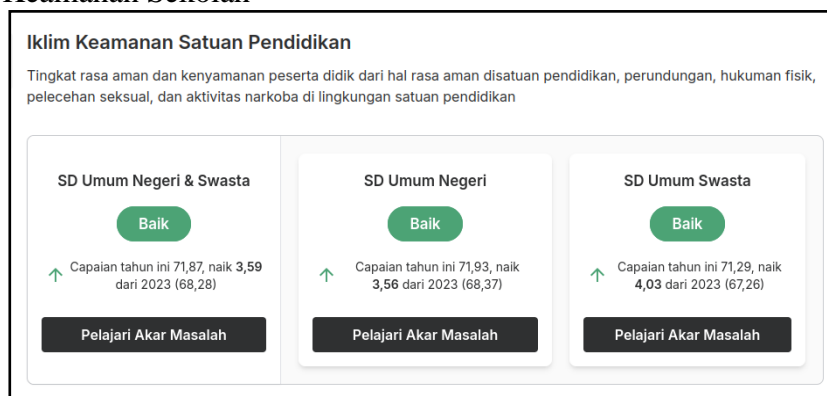
Walapaun Label Capaian Kemampuan Numerasi Jenjang SD Negeri dan Swasta tergolong Sedang (Belum Baik). Tetapi terjadi peningkatan skor Kemampuan Numerasi di SD Negeri sebesar 13,53 poin dan SD Swasta sebesar 7,97 poin dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

➤ Kualitas Pembelajaran



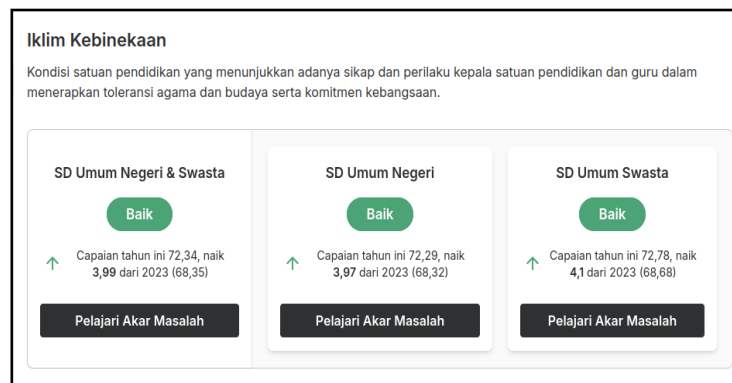
Label Capaian Indikator Kualitas Pembelajaran Jenjang SD Se-Kalimantan Utara masih Sedang (Belum Baik). Dibandingkan dengan Tahun 2023, terjadi penurunan skor sebesar 2,43 untuk SD Negeri dan penurunan skor sebesar 1,44 untuk SD Swasta.

➤ Iklim Keamanan Sekolah



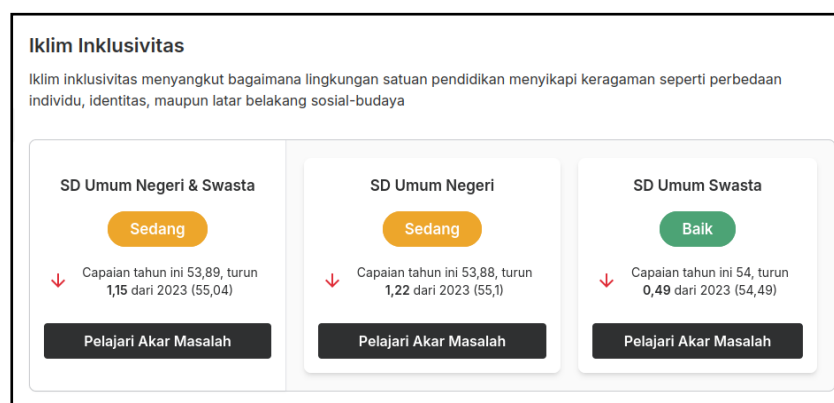
Pada Indikator Iklim Keamanan Sekolah pada Jenjang SD se-Kalimantan Utara, berdasarkan data di atas, Label Capaian untuk SD Negeri dan SD Swasta tercatat Baik. Dan juga terjadi peningkatan skor Iklim Keamanan sebesar 3,56 untuk Sekolah Negeri serta peningkatan skor Iklim Keamanan sebesar 4,03 untuk Sekolah Swasta. Dalam hal ini Delta Iklim Keamanan Sekolah Swasta lebih tinggi daripada Delta Iklim Keamanan di Sekolah Negeri.

➤ Iklim Kebinekaan



Label Capaian Iklim Kebinekaan Jenjang SD se-Kalimantan Utara untuk SD Negeri dan Swasta mendapat Predikat Baik. Dan terjadi juga Peningkatan Skor Iklim Kebinekaan. Untuk SD Negeri Capaian Naik sebesar 3,97 poin dibandingkan dengan Tahun 2023, sedangkan SD Swasta juga terjadi peningkatan skor sebesar 4,10 poin.

➤ Iklim Inklusivitas

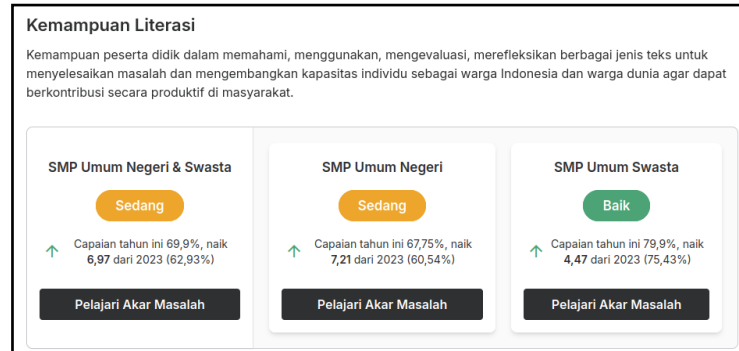


Label Capaian Indikator Iklim Inklusivitas di Sekolah Negeri tercatat Sedang (Belum Baik), sedangkan Capaian Indikator untuk SD Swasta tercatat Baik. Dibandingkan dengan Tahun 2023, terjadi penurunan skor Iklim Inklusivitas pada SD Negeri sebesar 1,22 poin dan pada SD Swasta sebesar 0,40 poin.

❖ Jenjang SMP

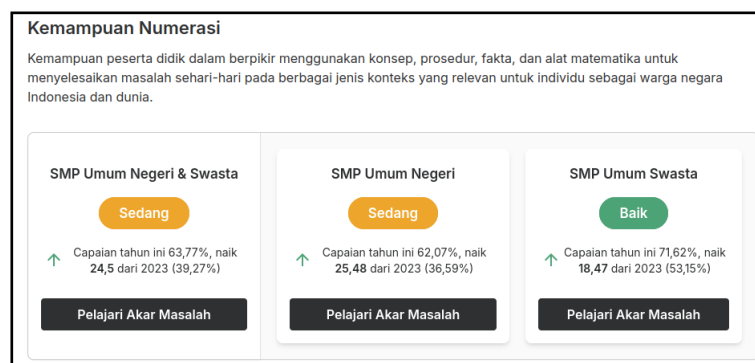
➤ Kemampuan Literasi

Label Capaian Kemampuan Literasi Jenjang SMP se-Kalimantan Utara di SMP Negeri adalah Sedang (Belum Baik) dan Label Capaian di SMP Swasta sudah Baik. Selanjutnya jika dibandingkan dengan Tahun 2023, terjadi peningkatan skor Kemampuan Literasi di SMP Negeri sebesar 7,21 poin dan di SMP Swastas sebesar 4,47 poin.

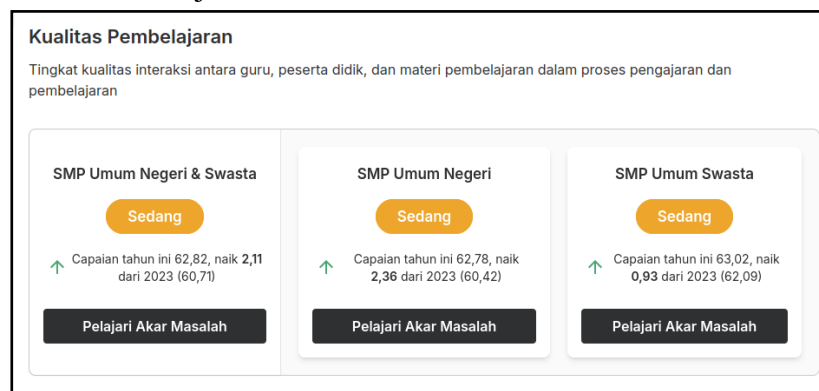


➤ Kemampuan Numerasi

Label Capaian Indikator Kemampuan Numerasi di SMP Negeri masih tergolong Sedang (Belum Baik). Dan label capaian di SMP Swasta tercatat Baik. Dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, terjadi peningkatan skor Kemampuan Literasi di SMP Negeri sebesar 25,28 poin dan di SMP Swasta sebesar 18,47 poin

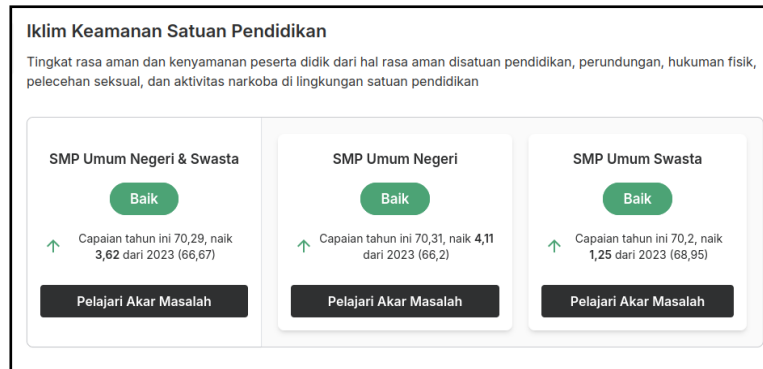


➤ Kualitas Pembelajaran



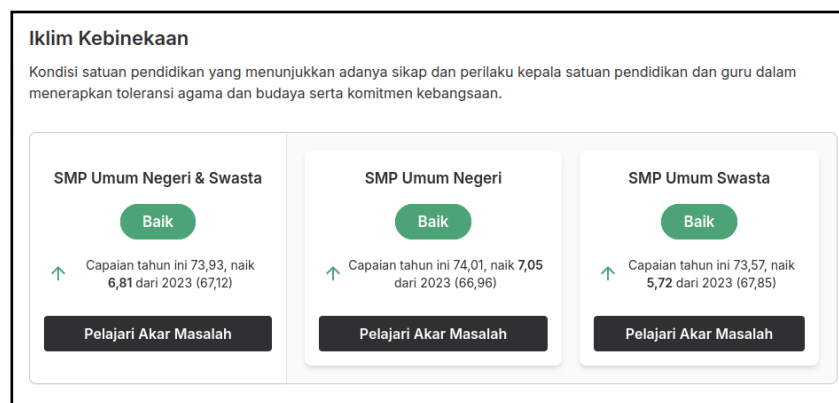
Label Capaian Kualitas Pembelajaran di SMP Negeri dan Swasta se-Kalimantan Utara masih tergolong Sedang (Belum Baik), dan bila dibandingkan dengan Tahun 2023, terjadi peningkatan skor Kualitas Pembelajaran di SMP Negeri sebesar 2,36 poin dan di SMP Swasta sebesar 0,93 poin.

➤ Iklim Keamanan Sekolah



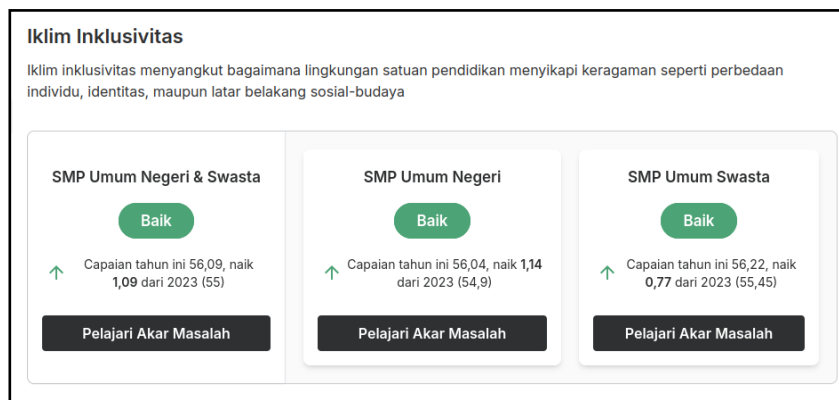
Label Capaian Iklim Keamanan SMP se-Kalimantan Utara masuk kategori Baik. Dibandingkan dengan Tahun 2023, terjadi peningkatan skor Iklim Keamanan di SMP Negeri sebesar 4,11 poin dan di SMP Swasta sebesar 1,25 poin.

➤ Iklim Kebinekaan



Label capaian Indikator Iklim Kebinekaan Jenjang SMP se-Kalimantan Utara baik negeri dan swasta tergolong Baik. Juga terjadi peningkatan skor Iklim Kebinekaan di SMP Negeri sebesar 7,05 poin dan di SMP Swasta sebesar 5,72 poin.

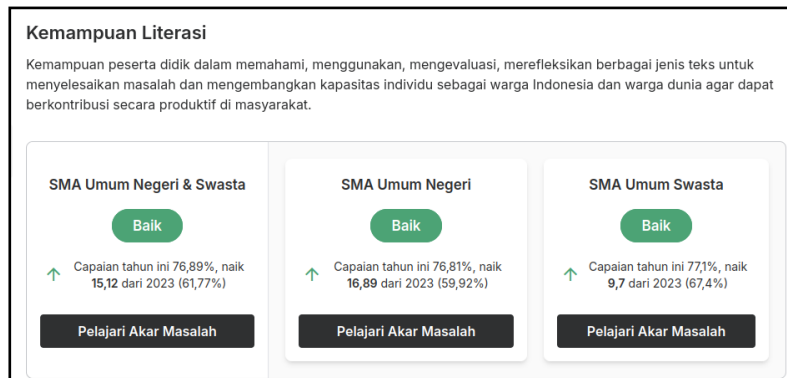
➤ Iklim Inklusivitas



Dari data di atas, Label Capaian Indikator Iklim Inklusivitas pada Jenjang SMP baik Negeri maupun Swasta tercatat Baik. Selain itu, jika dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya, terjadi peningkatan skor Iklim Inklusivitas di SMP Negeri sebesar 1,14 poin dan di SMP Swasta sebesar 0,77 poin.

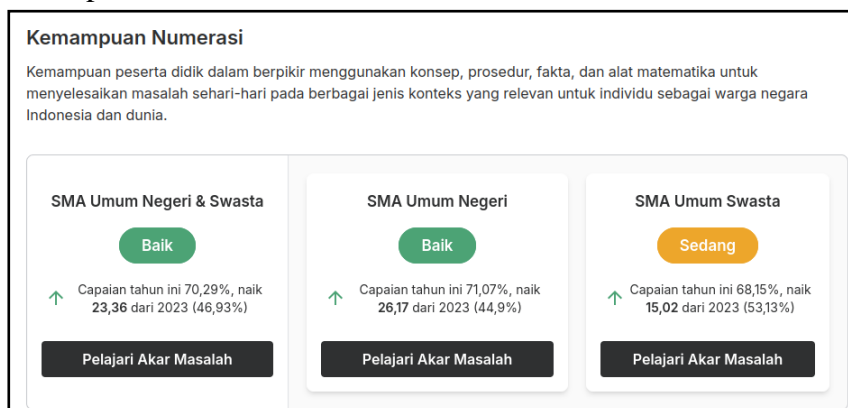
❖ Jenjang SMA

➤ Kemampuan Literasi



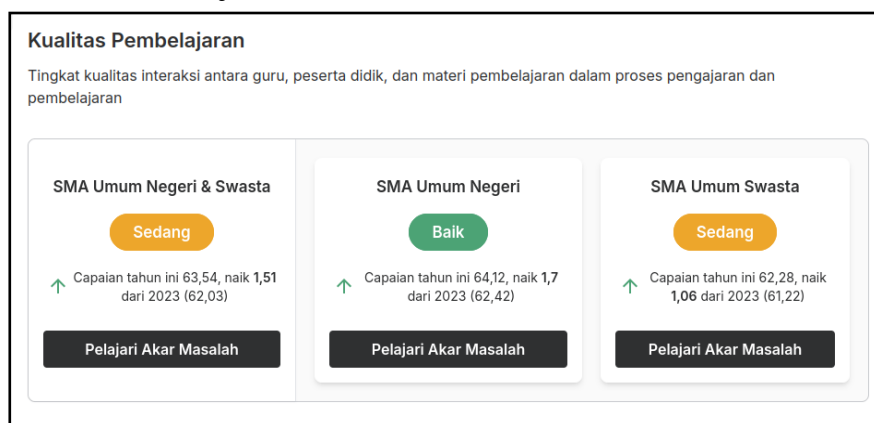
Label Capaian Indikator Kemampuan Literasi pada Jenjang SMA se-Kalimantan Utara baik Negeri maupun Swasta tergolong Baik. Selain itu dibandingkan dengan Tahun 2023, terjadi peningkatan skor Kemampuan Literasi sebesar 16,89 poin untuk SMA Negeri dan kenaikan sebesar 9,7 poin untuk SMA Swasta.

➤ Kemampuan Numerasi



Melihat Label Capaian Indikator Kemampuan Numerasi pada Jenjang SMA se-Kalimantan Utara bervariasi, untuk SMA Negeri tercatat Baik sedangkan SMA Swasta Label Capaian Indikator Kemampuan Numerasinya tercatat Sedang (Belum Baik). Namun demikian terjadi Peningkatan Skor Kemampuan Numerasi baik Negeri maupun Swasta. Untuk SMA Negeri terjadi peningkatan skor sebesar 26,17 poin dan untuk SMA Swasta terjadi peningkatan skor sebesar 15,02 poin.

➤ Kualitas Pembelajaran



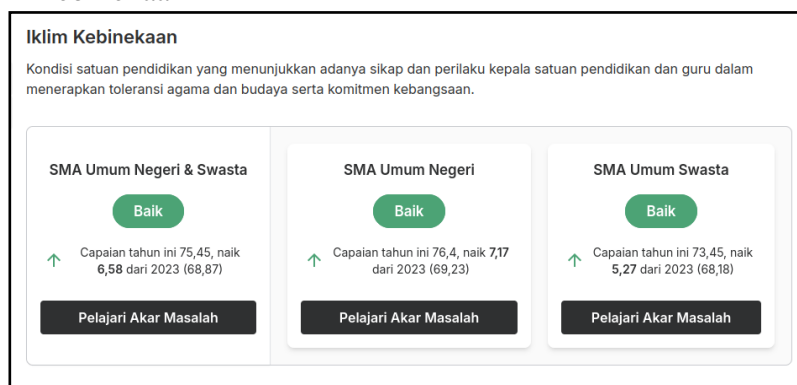
Label Capaian Kualitas Pembelajaran di SMA Negeri tergolong Baik sedangkan di SMA Swasta masih tercatat Sedang. Selanjutnya jika kita perhatikan data di atas, ternyata terjadi Peningkatan skor Kualitas Pembelajaran di SMA Negeri sebesar 1,7 poin dan di SMA Swasta sebesar 1,06 poin.

➤ Iklim Keamanan Sekolah



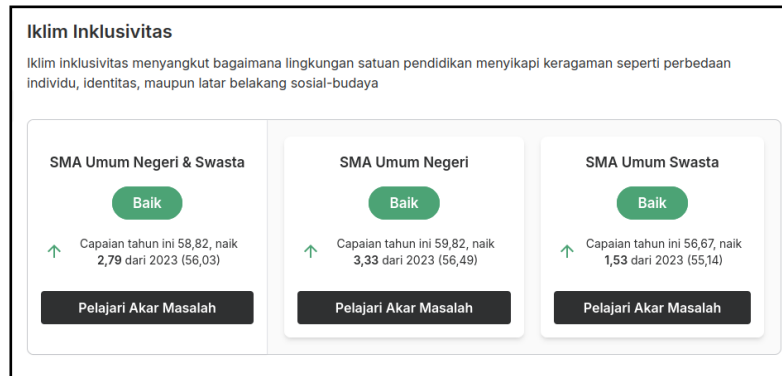
Label Capaian Indikator Iklim Keamanan Sekolah pada jenjang SMA baik Negeri maupun Swasta tercatat Baik. Dibandingkan dengan Tahun sebelumnya Juga terjadi peningkatan skor Iklim Keamanan di SMA Negeri sebesar 3,62 poin dan di SMA Swasta sebesar 0,88 poin.

➤ Iklim Kebinekaan



Label Capaian Indikator Iklim Kebinekaan Jenjang SMA se-Kalimantan Utara tergolong Baik. Selain itu jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan skor Iklim Kebinekaan di SMA Negeri sebesar 7,17 poin dan di SMA Swasta sebesar 5,27 poin.

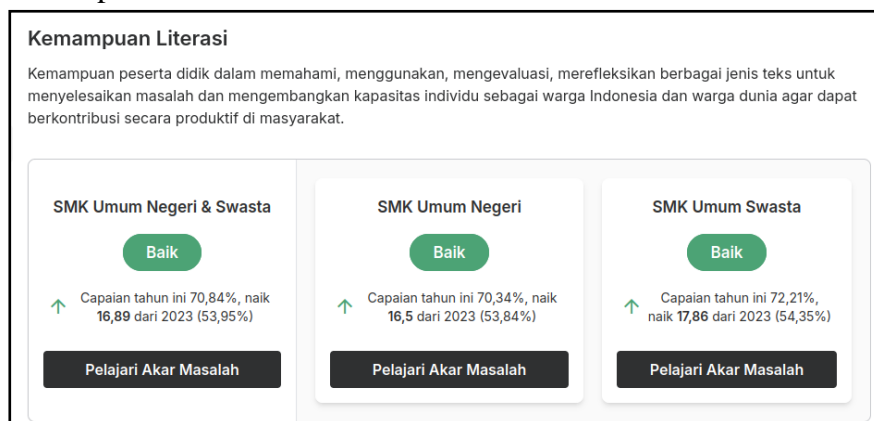
➤ Iklim Inklusivitas



Label capaian Indikator Iklim Inklusivitas Jenjang SMA baik Negeri maupun Swasta se-Kalimantan Utara tergolong Baik. Di samping itu, jika dibandingkan dengan Tahun 2023, terjadi peningkatan skor Iklim Inklusivitas di SMA Negeri sebesar 3,33 poin dan di SMA Swasta sebesar 1,53 poin.

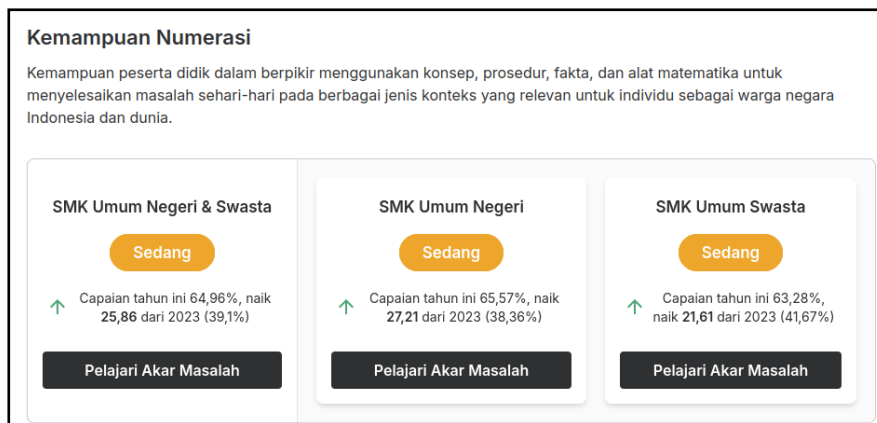
❖ Jenjang SMK

➤ Kemampuan Literasi



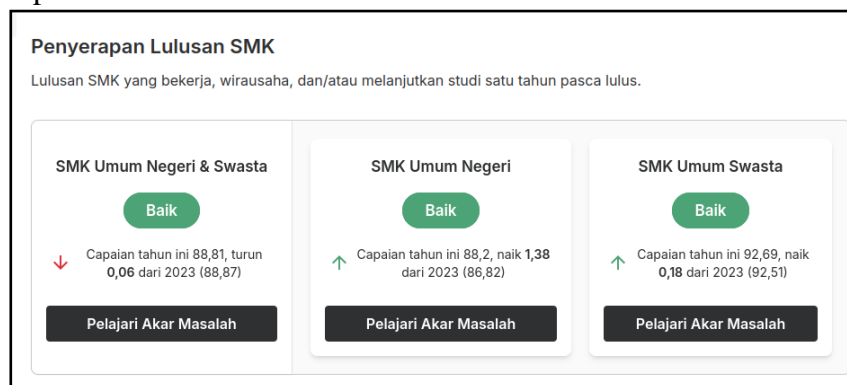
Label Capaian Indikator Kemampuan Literasi Jenjang SMK baik Negeri maupun Swasta Se-Kalimantan Utara tergolong Baik. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023, terjadi peningkatan Skor Kemampuan Literasi di SMK Negeri sebesar 16,5 poin dan di SMK Swasta naik sebesar 17,86 poin.

➤ Kemampuan Numerasi



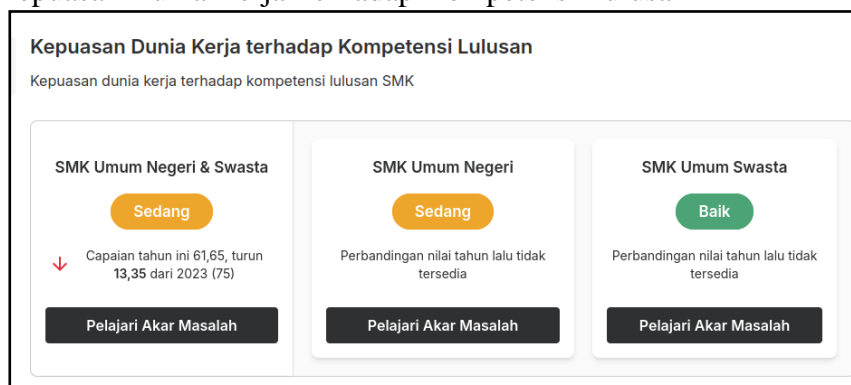
Label Capaian Indikator Kemampuan Numerasi Jenjang SMK se-Kalimantan Utara tergolong Sedang (Belum Baik). Walaupun belum baik, jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya ternyata terjadi peningkatan skor Kemampuan Numerasi di SMK Negeri sebesar 27,21 poin dan di SMK Swasta sebesar 21,61 poin.

➤ Penyerapan Lulusan SMK



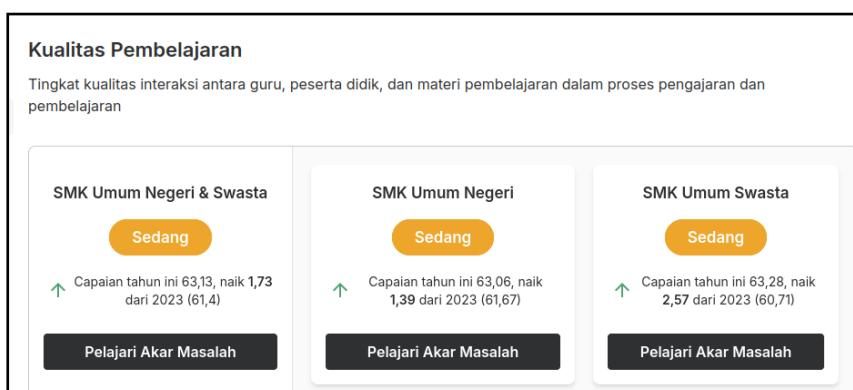
Berbeda dengan Jenjang lain pada umumnya, Label Capain Indikator khusus SMK adalah Penyerapan Lulusan SMK tergolong Baik. Di samping itu terjadi peningkatan skor Penyerapan Lulusan SMK, di SMK Negeri naik sebesar 1,38 poin dan di SMK Swasta naik sebesar 0,18 poin jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya.

➤ Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Kompetensi Lulusan



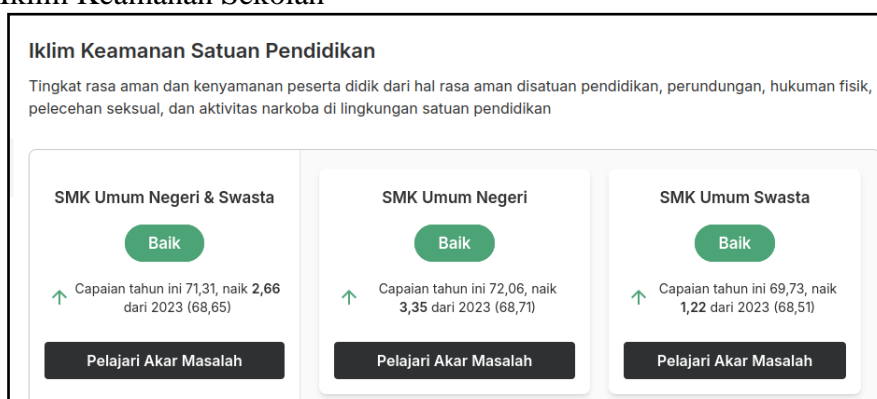
Selain Penyerapan Lulusan SMK, Indikator Khusus yang menjadi Prioritas SMK adalah Indikator Kepuasan Dunia kerja terhadap Kompetensi Lulusan SMK. Berdasarkan data di atas, label capaian Indikator Kepuasan Dunia Kerja di SMK Negeri masih tercatat Sedang (Belum Baik) dan di SMK Swasta sudah tergolong Baik. Indikator ini adalah Indikator yang baru di tambahkan pada Rapor Pendidikan Tahun 2024, sehingga tahun lalu belum ada data yang dapat dibandingkan.

➤ Kualitas Pembelajaran



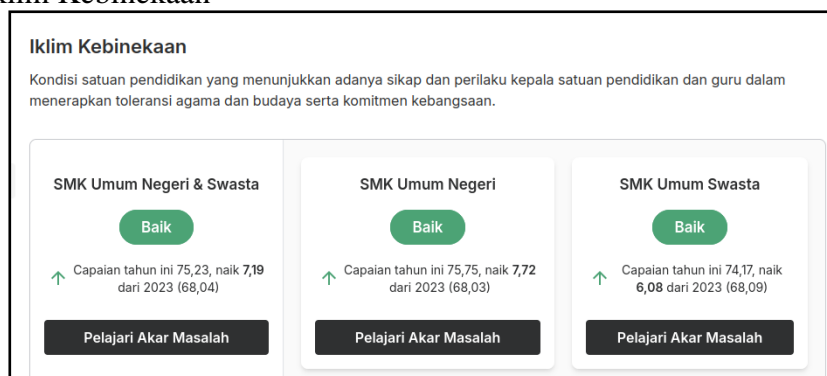
Label Capaian Kualitas SMK Se-Kalimantan Utara tergolong Sedang (Belum Baik). Jika dibandingkan dengan Tahun 2023, terjadi peningkatan skor Kualitas Pembelajaran pada SMK Negeri sebesar 1,39 poin, pada SMK Swasta terjadi kenaikan sebesar 2,57 poin.

➤ Iklim Keamanan Sekolah



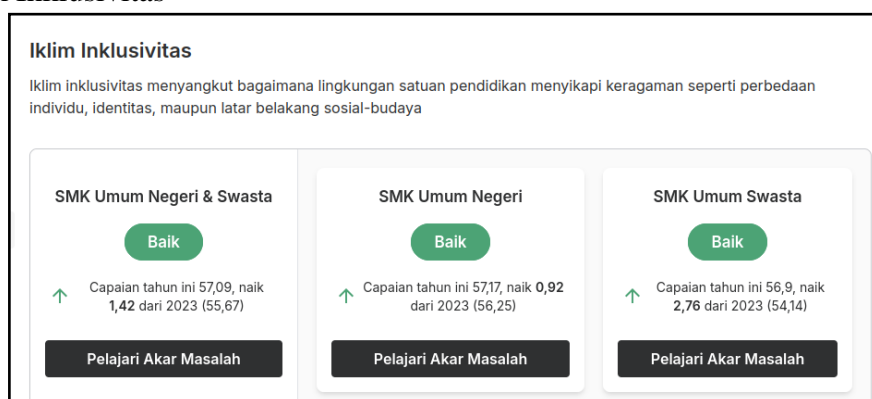
Label Capaian indikator Iklim Keamanan pada Jenjang SMK se-Kalimantan Utara adalah Baik. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, terjadi peningkatan skor Iklim Keamanan di SMK Negeri sebesar 3,35 poin dan di SMK Swasta naik sebesar 1,22 poin.

➤ Iklim Kebinekaan



Label Capaian pada Indikator Iklim Kebinekaan SMK se-Kalimantan Utara adalah Baik. Di Samping itu, jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, terjadi peningkatan skor Iklim Kebinekaan di SMK Negeri sebesar 7,72 poin dan di SMK Swasta naik sebesar 6,08 poin.

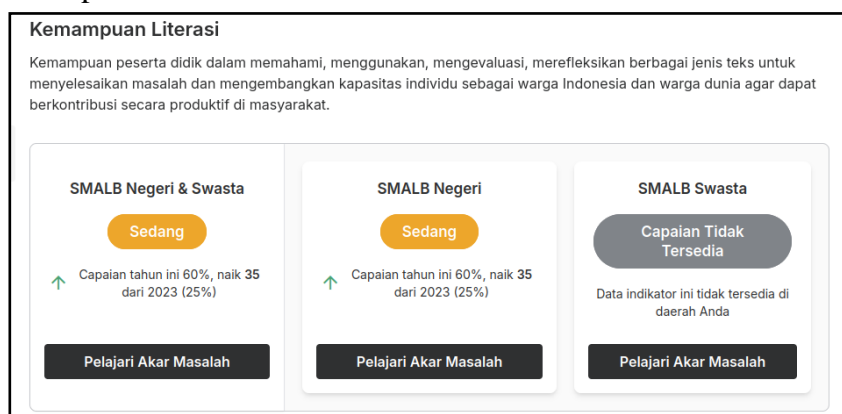
➤ Iklim Inklusivitas



Label capaian Indikator Iklim Inklusivitas pada Jenjang SMK Se-Kalimantan Utara mendapat predikat Baik. Berkaitan dengan Delta Capaian, jika kita bandingkan dengan Tahun 2023, telah terjadi peningkatan skor Iklim Inklusivitas sebesar 0,92 Poin di SMK Negeri dan naik sebesar 2,76 poin di SMK Swasta.

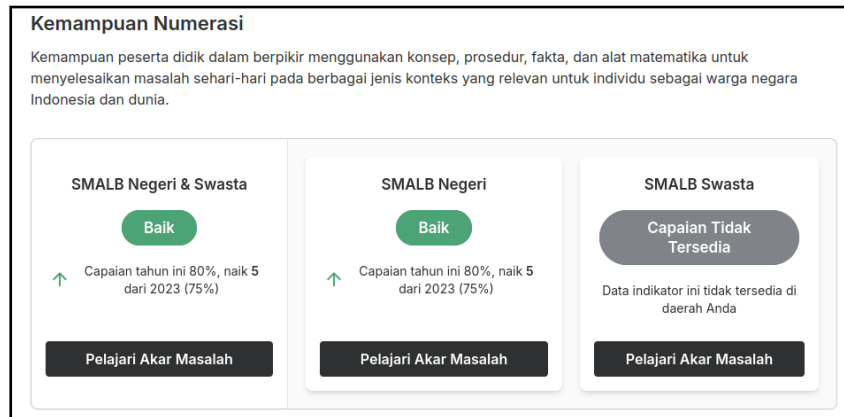
❖ Jenjang SLB

➤ Kemampuan Literasi



Label Capaian Indikator Kemampuan Literasi pada Jenjang SLB se-Kalimantan Utara masih tercatat Sedang (Belum Baik). Bila dibandingkan dengan Tahun 2023, telah terjadi peningkatan skor Kemampuan Numerasi sebesar 35 poin.

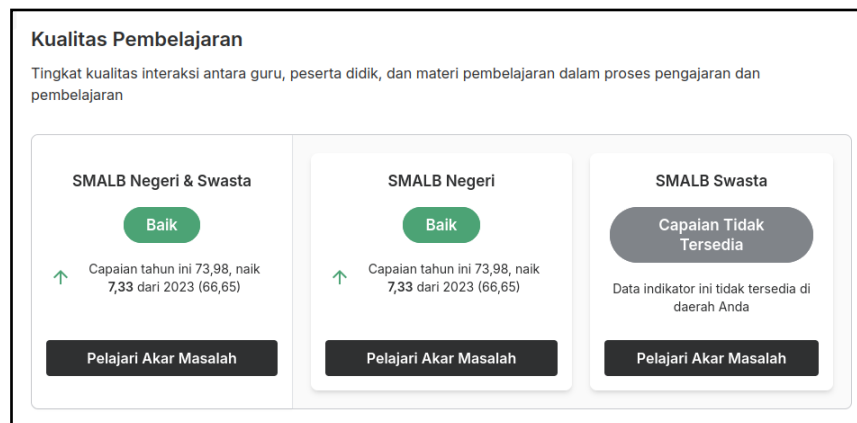
➤ Kemampuan Numerasi



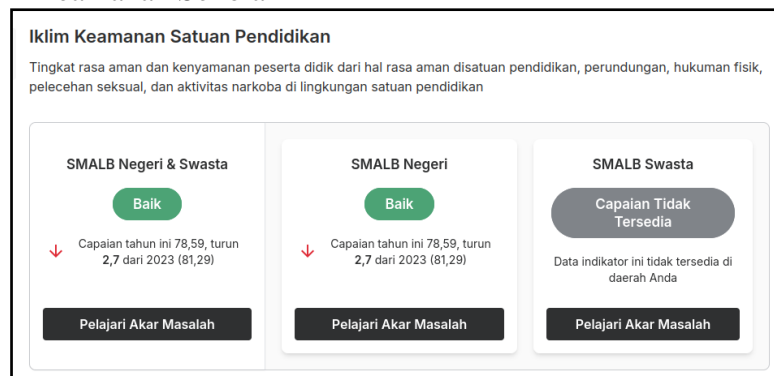
Label Capaian Indikator Kemampuan Numerasi pada Jenjang SLB se-Kalimantan Utara tergolong Baik. Jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya telah terjadi peningkatan skor Kemampuan Numerasi sebesar 5 poin.


➤ Kualitas Pembelajaran

Label Capaian Indikator Kualitas Pembelajaran Jenjang SLB masuk kategori Baik. Selanjutnya, jika kita bandingkan dengan Tahun 2023, terjadi peningkatan skor Kualitas Pembelajaran sebesar 7,33 poin.



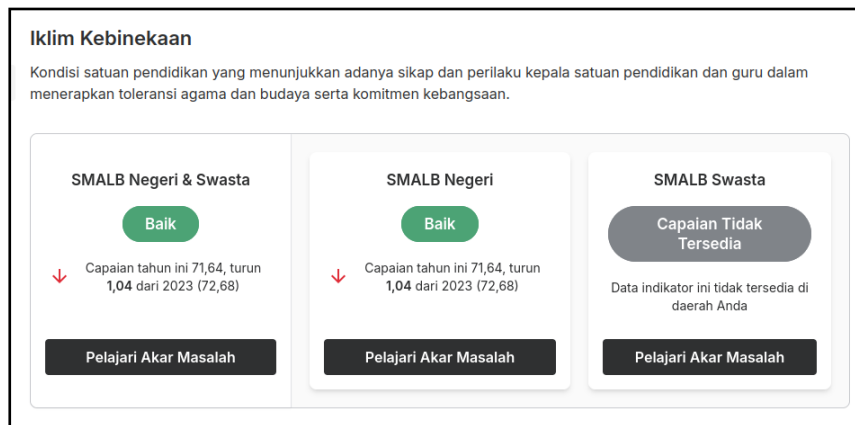
➤ Iklim Keamanan Sekolah





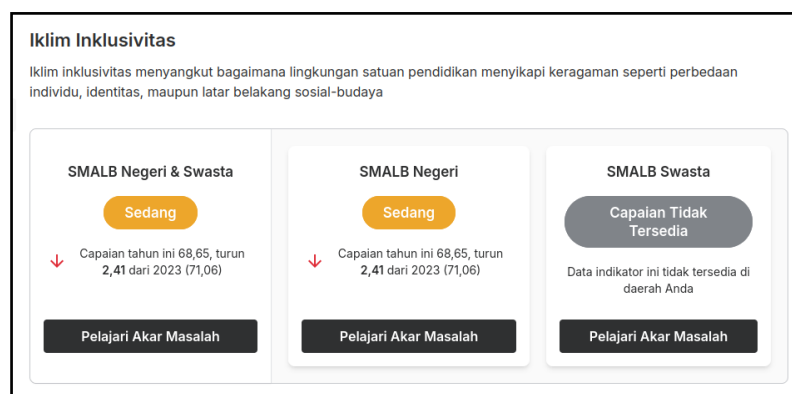
Label Capaian Indikator Iklim Keamanan Jenjang SLB tercatat Baik, Meski demikian terjadi penurunan skor Iklim Keamanan sebesar 2,7 poin jika dibandingkan dengan data tahun lalu.

➤ **Iklim Kebinekaan**



Label Capaian Indikator Iklim Kebinekaan Jenjang SLB adalah Baik. Namun, jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, telah terjadi penurunan skor Iklim Kebinekaan SLB sebesar 1,04 poin.

➤ **Iklim Inklusivitas**



Label Capaian Indikator Iklim Inklusivitas Jenjang SLB Kalimantan Utara tergolong Sedang. Selanjutnya jika kita bandingkan dengan Tahun 2023, telah terjadi penurunan skor Iklim Inklusivitas sebesar 2,41 poin.

c) Kegiatan yang telah dilakukan

Sepanjang Tahun 2024, PDM-04A banyak melaksanakan Program dan Kegiatan. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan PDM-04A BPMP Provinsi Kalimantan Utara untuk mencapai Objektif : Berjalannya Transformasi Satuan Pendidikan dengan Capaian dan memiliki Delta Positif, antara lain :

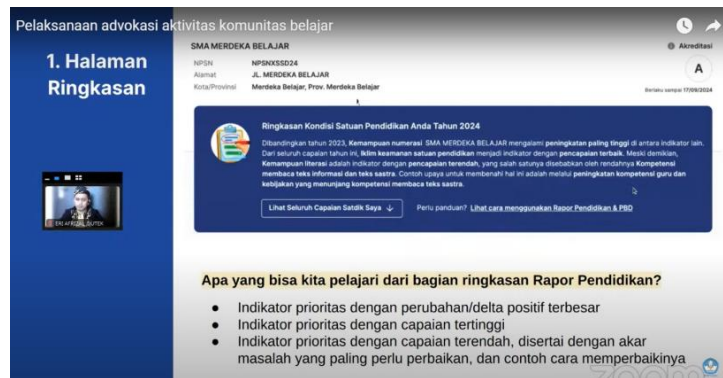
- **Gap Analysis terkait Pemanfaatan Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan.**



Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Gap Analysis Raport Pendidikan dan PDB

•Pelaksanaan Kegiatan Advokasi Aktivitas Komunitas Belajar dalam rangka Transformasi Satuan Pendidikan oleh UPT.

Kegiatan ini dilaksanakan secara Daring, mengundang seluruh Komunitas Belajar yang telah terdaftar di Platform Merdeka Mengajar (PMM). Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Juni Tahun 2024.



Dokumentasi Materi yang dipaparkan dalam kegiatan Advokasi Aktivitas Komunitas Belajar



Dokumentasi Sesi Interaktif Narasumber dengan Peserta saat Kegiatan Advokasi Aktivitas Komunitas Belajar secara Daring

•Penyusunan Cerita Praktik Baik Satuan Pendidikan mengimplementasikan Perencanaan Berbasis Data dalam rangka Transformasi Satuan Pendidikan.

Kegiatan ini dilaksanakan secara Daring pada awal Bulan Desember 2024 secara Daring. Diikuti oleh Perwakilan Sekolah yang Raport Pendidikannya

mengalami Peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya serta Perwakilan Sekolah Penggerak di Prpvinsi Kalimantan Utara



Dokumentasi Penjelasan terkait Penyusunan Cerita Praktik Baik Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data

- **Pelaksanaan Advokasi Pemanfaatan Rapor Pendidikan dalam rangka Transformasi Satuan Pendidikan kepada Pemerintah Daerah.**

Advokasi Pemanfaatan Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung dilaksanakan secara Tatap Muka mulai tanggal 09 s.d. 13 September 2024 di Hotel Galaxy Tarakan, kegiatan dihadiri oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Tidung.



Dokumentasi Foto bersama PIC PDM-04A BPMP Provinsi Kalimantan Utara bersama Pejabat dan Jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung.

- **Pelaksanaan Pendampingan Satuan Pendidikan yang belum mengakses Rapor Pendidikan oleh UPT.**

PDM-04A BPMP Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan Pendampingan Satuan Pendidikan yang belum mengakse Rapor Pendidikan sepanjang Tahun 2024. Baik secara daring maupun secara luring.



Dokumentasi Pendampingan Satuan Pendidikan terkait Rapor Pendidikan di Wilayah Kabupaten Malinau



Dokumentasi Pendampingan Satuan Pendidikan terkait Rapor Pendidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal.

- **Pemantauan hasil pelaksanaan Advokasi Pemanfaatan Rapor Pendidikan dalam rangka Transformasi Pendidikan kepada Pemerintah Daerah terhadap objective PDM-04A.**

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10 s.d. 12 Mei 2024. Bentuk kegiatan ini adalah Petugas BPMP Provinsi Kalimantan Utara turun lapangan ke Satuan Pendidikan dan Ke dinas Pendidikan.





Dokumentasi PIC PDM-04A melakukan Pemantauan Hasil Advokasi Pemanfaatan Rapor Pendidikan di salah satu Sekolah

- **Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Transformasi Satuan Pendidikan oleh UPT di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota**

Monitoring dan Evaluasi Implementasi Transformasi Satuan Pendidikan dilaksanakan pada tanggal 08 s.d. 10 Agustus 2024, Tim PDM-04A turun ke satuan pendidikan untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi secara langsung.



Dokumentasi Tim BPMP Provinsi Kalimantan Utara melakukan Monitoring dan Evaluasi Hasil Implementasi Transformasi Satuan Pendidikan

- **Pelaksanaan Refleksi dan Analisis Data Implementasi Transformasi Satuan Pendidikan oleh UPT (Prov/Kab/Kota)**

Kegiatan Refleksi Implementasi Transformasi Satuan Pendidikan oleh UPT dilaksanakan secara Tatap Muka Langsung dalam bentuk kegiatan Forum Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan di Hotel Diamond Tarakan pada tanggal 18 s.d. 20 November 2024. Mengundang Seluruh Pejabat dan Staf Dinas Pendidikan, Pengawas Sekolah serta Perwakilan Sekolah.



Dokumentasi kegiatan Refleksi dan Analisis Data Implementasi Transformasi Satuan Pendidikan.

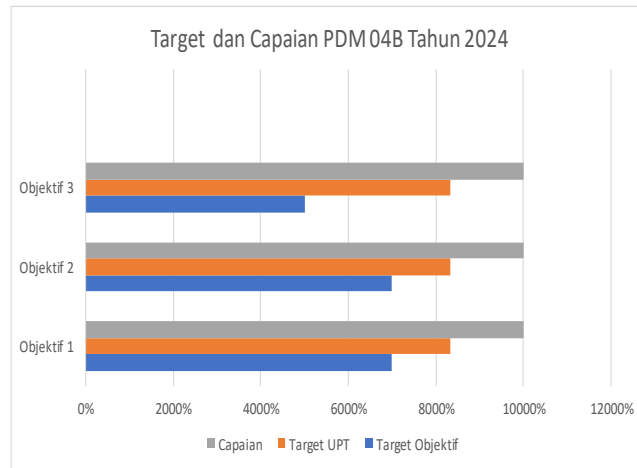
6) PDM-04B Perencanaan Berbasis Data dan Rapor Pendidikan Pemda

a) Objektif dan Target PDM

- 70% Pemda melaksanakan Perencanaan Berbasis Data melalui Indikator Prioritas SPM Pendidikan. Target UPT 83,33% Pemda melaksanakan Perencanaan Berbasis Data melalui Indikator Prioritas SPM Pendidikan.
- 70% Pemda melaksanakan Perencanaan Berbasis Data melalui sub kegiatan minimal prioritas SPM Pendidikan. Target UPT 83,33% Pemda melaksanakan Perencanaan Berbasis Data melalui sub kegiatan minimal prioritas SPM Pendidikan.
- 50% Pemda merealisasikan SPM Pendidikan sesuai dengan perencanaannya. Target UPT 83,33% Pemda merealisasikan SPM Pendidikan sesuai dengan perencanaannya

b) Capaian

- 100% Pemda melaksanakan Perencanaan Berbasis Data melalui Indikator Prioritas SPM Pendidikan..
- 100% Pemda melaksanakan Perencanaan Berbasis Data melalui sub kegiatan minimal prioritas SPM Pendidikan.
- 100% Pemda merealisasikan SPM Pendidikan sesuai dengan perencanaannya.



c) Kegiatan yang telah dilakukan



Pendampingan Rakortek Kabupaten / Kota BAPPEDA Provinsi Oleh UPT



Pendampingan Perencanaan Pemda Terkait SPM Pendidikan Oleh UPT



Pendampingan Realisasi SPM Pendidikan Semester I oleh UPT



Pendampingan Penganggaran SPM Pendidikan oleh UP

7) PDM-05 Kemitraan Daerah

Kebijakan Merdeka Belajar merupakan kebijakan yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI kabinet Indonesia Maju, Nadiem Anwar Makarim. Sampai dengan bulan Desember 2023 sudah ada 26 episode kebijakan Merdeka belajar yang telah diluncurkan. BPMP Provinsi Kalimantan Utara sebagai salah satu UPT Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi merupakan kepanjangan tangan pusat dalam meneruskan kebijakan kepada Pemerintah Daerah. Dalam menjalankan tugas tersebut, BPMP Provinsi Kalimantan Utara menjalin kemitraan dengan beberapa stakeholder di daerah diantaranya yang paling utama yakni dengan Dinas Pendidikan baik Provinsi, Kabupaten maupun Kota. Di wilayah Provinsi Kalimantan Utara terdapat satu Dinas Pendidikan Provinsi, 4 Dinas Pendidikan Kabupaten dan satu Dinas Pendidikan Kota. Untuk mengawal tersampainya kebijakan pusat terkait Pendidikan, maka BPMP provinsi Kalimantan Utara perlu melakukan advokasi ke Daerah. Advokasi ini menjadi salah satu peran dari PDM 05 – Kemitraan Daerah untuk mengawal tersampainya dan terlaksananya program pemerintah di daerah.

a) Objektif dan Target UPT

No.	Objektif UPT	Target UPT
1.	<p>Jangka Pendek : Pada akhir Februari 2024, 100% Kebutuhan KS dan PS di daerah GP Oversupply dan Equal diisi oleh GPMS.</p> <p>Jangka Menengah : Pada akhir Mei 2024, 50%; Pada akhir Agustus, 75%; dan pada akhir November, 100%; Kebutuhan KS dan PS di daerah Undersupply GP diisi oleh GPMS.</p>	<p>Jangka Pendek : Pada akhir Februari 2024, 100% Kebutuhan KS dan PS di daerah GP Oversupply dan Equal diisi oleh GPMS.</p> <p>Jangka Menengah : Pada akhir Mei 2024, 50%; Pada akhir Agustus, 75%; dan pada akhir November, 100%; Kebutuhan KS dan PS di daerah Undersupply GP diisi oleh GPMS.</p>
2.	90% Pemda melaksanakan PPDB sesuai dengan prinsip objective, transparan dan akuntabel ditahun 2024.	90% Pemda melaksanakan PPDB sesuai dengan prinsip objective, transparan dan akuntabel ditahun 2024.
3.	<p>100% Pemda dan 100% Satpen mempunyai satgas PPKSP.</p> <p>c. Untuk PAUD pada bulan Agustus 2024.</p> <p>d. Untuk SD, SMP, SMA pada bulan Februari 2024.</p>	<p>100% Pemda dan 100% Satpen mempunyai satgas PPKSP.</p> <p>c. Untuk PAUD pada bulan Agustus 2024.</p> <p>d. Untuk SD, SMP, SMA pada bulan Februari 2024.</p>

b) Capaian

- **Jangka Pendek** : Pada akhir Februari 2024, 100% Kebutuhan KS dan PS di daerah GP Oversupply dan Equal diisi oleh GPMS, **Jangka Menengah** : Pada akhir Mei 2024, 50%; Pada akhir Agustus, 75%; dan pada akhir November, 100%; Kebutuhan KS dan PS di daerah Undersupply GP diisi oleh GPMS. Guru Penggerak adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru yang bersifat transformasi, diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mulai tahun 2020 yang kemudian diampu oleh Balai Guru Penggerak mulai tahun 2022. Setelah guru lolos Pendidikan Guru Penggerak (PGP), maka selanjutnya tugas BPMP untuk mendorong pemerintah daerah agar segera mengangkat Guru Penggerak yang memenuhi syarat untuk menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah. Pengangkatan kepala sekolah dan pengawas

sekolah ini dilakukan melalui Sistem Pengangkatan Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah.

Berdasarkan target di atas, berikut capaian pengangkatan guru penggerak menjadi kepala sekolah/pengawas sekolah di daerah oversupply.

No	Wilayah	Ketersediaan KSPS	Kebutuhan KS	Kebutuhan PS	GP jadi KS	GP jadi PS	% GP jadi KS	%GP jadi PS
1	Provinsi	119	2	0	12	0	85,71%	0%
2	Tarakan	58	4	0	9	0	69,23%	0%
3	Bulungan	49	16	23	9	0	36%	0%
4	Tana Tidung	22	3	0	3	0	50%	0%
5	Nunukan	15	6	23	3	0	33,33%	0%
6	Malinau	7	2	19	1	0	33,33%	0%
Total							51,27%	0%

Sumber : Dashboard Pengangkatan GP KS dan Sistem Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah.

Informasi Data:


- Kolom Ketersediaan KS adalah Total GP MSKS
- Kolom Kebutuhan KS adalah Total Plt KS + Total Sekolah Tanpa KS
- Kolom Kebutuhan PS adalah Total Kebutuhan PS yang direkomendasikan
- Kolom %GP Jadi KS adalah Kolom (GP Jadi KS) dibagi Kolom Kebutuhan KS+GP Jadi KS

Tabel di atas adalah capaian pengangkatan kepala sekolah/pengawas sekolah di daerah oversupply. Untuk wilayah provinsi Kalimantan Utara sudah tidak ada daerah undersupply sehingga capaian pengangkatan GP di daerah undersupply adalah 100%.

•90% Pemda melaksanakan PPDB sesuai dengan prinsip objective, transparan dan akuntabel ditahun 2024.

Berdasarkan target di atas, berikut capaian Pemda dalam melaksanakan PPDB sesuai dengan prinsip objective, transparan dan akuntabel ditahun 2024.

PRINSIP	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SUMBER DATA
Objektif	Dokumen kebijakan PPDB tersedia dan mengacu pada regulasi nasional	100% Pemda	Juknis PPDB
	Proses seleksi PPDB berbasis zonasi, prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua	100% Pemda (kecuali daerah 3T)	Juknis PPDB



PRINSIP	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SUMBER DATA
	Tingkat keberhasilan mengurangi kecurangan dalam penerimaan siswa	100% bebas kecurangan	Laporan PPDB
	Persentase sekolah yang melaksanakan sistem zonasi	100% sekolah	Juknis PPDB
Transparan	Ketersediaan informasi PPDB secara daring dan luring	100% Pemda	Juknis PPDB
	Sosialisasi PPDB di seluruh wilayah kabupaten/kota	100% wilayah	Dasbor Pemantauan PPDB
	Penggunaan sistem daring untuk pendaftaran dan pengumuman hasil PPDB	90% Pemda	Juknis PPDB
	Jumlah laporan keluhan masyarakat terkait transparansi PPDB	< 5% dari total	Laporan PPDB
Akuntabel	Jumlah laporan pelaksanaan PPDB yang diterbitkan Pemda.	100% Pemda	Laporan PPDB
	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dalam waktu tertentu	100% pengaduan	Laporan PPDB
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan PPDB	80% wilayah	Laporan PPDB

• **100% Pemda dan 100% Satpen mempunyai satgas PPKSP**

- ❖ Untuk PAUD pada bulan Agustus 2024
- ❖ Untuk SD, SMP, SMA pada bulan Februari 2024

PPKSP adalah kepanjangan dari Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) merespons kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbudristek PPKSP). Regulasi tersebut merupakan komitmen Kemendikbudristek untuk memberikan jaminan langkah pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan yang diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada peserta didik, guru, tenaga kependidikan, dan warga sekolah lainnya yang beraktivitas di dalam satuan pendidikan. Mengawali komitmen bersama untuk pencegahan kekerasan, maka pemda dan satuan pendidikan seluruh jenjang diharapkan telah membentuk satuan tugas dan tim PPKSP.

Berdasarkan target di atas, pembentukan satgas PPKSP untuk Pemda sudah mencapai 100% dan sudah diunggah ke Dasbor PPKSP. Rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Show 10 entries		Search:		
No	Nama Kota/Kabupaten	Satgas Kota/Kab	Satgas Kota/Kab Valid	Jumlah Anggota Satgas Kota/Kab
1	Kab. Malinau	✓	●	15
2	Kab. Bulungan	✓	●	5
3	Kab. Tana Tidung	✓	●	7
4	Kab. Nunukan	✓	●	9
5	Kota Tarakan	✓	●	7
TOTAL SEMUA		5	3	43
Showing 1 to 5 of 5 entries		Previous 1 Next		

Sumber: Dasbor PPKSP:

(<https://referensi.data.kemdikbud.go.id/tppk/tppk/wilayah/340000/1>).

Pembentukan TPPK jenjang PAUD dan Dikmas di bulan Agustus 2024, dan TPPK jenjang SD, SMP, SMA, SMK, SLB pada bulan Februari 2024 seharusnya sudah terbentuk 100%, namun karena beberapa kendala dan hambatan seperti munculnya satuan pendidikan baru pasca PPDB, banyaknya satuan pendidikan di wilayah remote area, dan lain sebagainya sehingga pembentukan TPPK tidak 100% di semua jenjang. Berikut capaiannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Wilayah	TPPKSP 31 Desember 2024						
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	Dikmas
		%	%	%	%	%	%	%
1	Malinau	28,33	100	100	100	100	100	62,50
2	Bulungan	91,23	100	100	100	100	100	88,89
3	Tana Tidung	97,83	100	100	80	100	100	100
4	Nunukan	79,19	100	100	94,12	100	100	56,25
5	Tarakan	96,40	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dasbor PPKSP

(<https://referensi.data.kemdikbud.go.id/tppk/tppk/wilayah/340000/1>).

c) Kegiatan yang telah dilakukan

Untuk mencapai target yang telah ditentukan di atas, BPMP Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya:

- **Rapat Koordinasi UPT terkait Pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah.**

Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 13 Februari 2024 dengan mengundang BGP Provinsi Kalimantan Utara, bertujuan untuk melakukan komunikasi dan koordinasi yang intensif sesama UPT Kemendikbudristek di daerah, harapannya dapat terwujud

kekompakan serta kolaborasi yang baik antar UPT Kemendikbudristek dalam mengawal program pengangkatan GP menjadi KS/PS.

Selanjutnya PDM 05 melaksanakan lagi kegiatan yang sama dengan mengundang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan, dan BGP Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 19 Maret Tahun 2024. Tujuan kegiatan ini yaitu :

- ❖ Melakukan koordinasi terkait pengangkatan GP menjadi KS/PS;
- ❖ Menyamakan persepsi data kebutuhan KS/PS;
- ❖ Melakukan koordinasi dalam mencari solusi dan perbaikan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh daerah dalam pengangkatan Guru Penggerak menjadi KS/PS di daerah; dan
- ❖ Koordinasi Optimalisasi penggunaan Sistem Pengangkatan KS/PS oleh Dinas Pendidikan.



• FGD Tindak Lanjut Kebijakan Program Guru Penggerak

Program Guru Penggerak merupakan salah satu program penting di dalam Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Peran Guru Penggerak untuk mentransformasi budaya sekolah kepada pembelajaran yang berfokus kepada siswa tidak akan tergantikan. Berkaitan dengan Program Guru Penggerak, BPMP memiliki tugas untuk mendorong pemerintah daerah agar segera mengangkat Guru Penggerak yang memenuhi syarat untuk menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, dan mendukung transformasi pembelajaran, maka BPMP Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan FGD Tindak Lanjut Kebijakan Program Guru Penggerak yang dilaksanakan pada 21 s.d 23 Mei

2024. Sasaran kegiatan tersebut antara lain : Kabid GTK, Kasi GTK, Operator Sistem KS/PS di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan, Dinas Pendidikan Kota Tarakan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Tidung, Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, serta BGP Provinsi Kalimantan Utara.



• Evaluasi Kinerja Project PDM Triwulan 1 -3

BPMP Provinsi Kalimantan Utara mempunyai fungsi melaksanakan penjaminan mutu pendidikan anak usia dini, dasar dan pendidikan menengah. Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu. Untuk mewujudkan hal tersebut, BPMP Provinsi Kalimantan Utara mempunyai rencana strategis atau project yang disusun untuk meningkatkan mutu pendidikan. Untuk melihat kendala dan hasil dari program-program yang telah dijalankan, maka BPMP Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan kegiatan Evaluasi Kinerja Project PDM Triwulan 1 - 3 agar seluruh pegawai dapat memahami tindak lanjut yang akan dilakukan setelah evaluasi tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2024, 09 Juli 2024 dan 30 November 2024.





• Pendampingan PPDB Daerah

PPDB adalah salah satu tahapan krusial dalam sistem pendidikan yang membutuhkan pengelolaan yang objektif, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara, PPDB menjadi fokus utama untuk memastikan akses pendidikan yang merata serta memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon peserta didik. Sejalan dengan semangat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah, diperlukan upaya konkret dalam memastikan pelaksanaan PPDB berjalan lancar, adil dan sesuai dengan pedoman PPDB yakni Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dan SK Sesjen Nomor 47/M/2023, maka BPMP Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan Pendampingan PPDB Daerah ke Dinas Pendidikan.

Pendampingan PPDB ke Dinas Pendidikan ini dilaksanakan pada tanggal 02 s.d. 04 Juni 2024 untuk Kabupaten Malinau dan tanggal 03 s.d 05 Juni 2024 untuk Provinsi, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan.



• Pemantauan Pelaksanaan PPDB

Untuk mencapai prinsip PPDB yang objektif, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan PPDB perlu dilakukan pemantauan. Pemantauan PPDB dilakukan untuk memastikan bahwa proses PPDB berjalan dengan baik, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan mencapai tujuan yang diharapkan. Pemantauan PPDB dilaksanakan di rentang tanggal 19 Juni s.d. 05 Juli 2024.



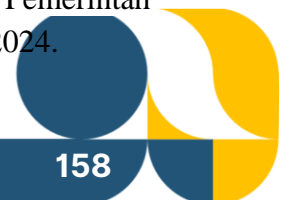
- **Pengolahan Hasil Pemantauan**

Pemantauan PPDB yang dilaksanakan rentang tanggal 19 Juni s.d. 05 Juli 2024 selanjutnya dilakukan pengolahan hasil pemantauan oleh tim PDM 05. Pengolahan hasil pemantauan nantinya akan dijadikan bahan rekomendasi ke Dinas Pendidikan. Pengolahan hasil pemantauan dilaksanakan pada tanggal 20 September 2024.



- **Refleksi dan Penyusunan Rekomendasi Pelaksanaan PPDB & Refleksi dan Evaluasi Kebijakan PPDB**

Setelah PPDB terlaksana dan dipantau kemudian diolah hasil pemantauan pelaksanaan PPDBnya, selanjutnya dilakukan refleksi dan penyusunan rekomendasi pelaksanaan PPDB & refleksi dan evaluasi kebijakan PPDB. Untuk kegiatan ini, karena tidak dianggarkan oleh tim perencana sedangkan desain dari pusat adalah kegiatan luring dengan Dinas Pendidikan, maka kegiatan digabung dengan PDM 01 yang berjudul Refleksi Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak Oleh Pemerintah Daerah. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober s.d 2 November 2024.





• Advokasi dan Koordinasi Kebijakan Merdeka Belajar Ke Pemda

Kebijakan Merdeka Belajar dilaksanakan untuk percepatan pencapaian tujuan nasional pendidikan, yaitu meningkatnya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang mempunyai keunggulan dan daya saing dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Oleh karena itu Merdeka Belajar memberikan otoritas dan fleksibilitas pengelolaan pendidikan di level sekolah, otoritas dan fleksibilitas tidak akan berkontribusi positif untuk mencapai tujuan pendidikan jika tidak ada kreativitas dan inovasi. Agar menjadi kreatif dan inovatif, maka harus melakukan perubahan/hijrah/change demi peningkatan kualitas hasil belajar siswa (karakter, literasi dan numerasi). Dengan demikian, dipandang perlu melakukan Advokasi dan Koordinasi Kebijakan Merdeka Belajar ke Pemda agar kebijakan merdeka belajar dapat menyentuh seluruh daerah dan diteruskan ke satuan pendidikan. Advokasi dan Koordinasi Kebijakan Merdeka Belajar Ke Pemda ini dilakukan secara luring hotel pada tanggal 29 s.d 31 Januari 2024 dan luring perjadin ke Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau tanggal 19 s.d 21 Februari 2024, Dinas Pendidikan Kota Tarakan tanggal 14 s.d 16 Maret 2024, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Tidung tanggal 18 s.d 20 April 2024.



Advokasi dan Koordinasi Kebijakan Merdeka Belajar Luring Hotel.



Advokasi dan Koordinasi Kebijakan Merdeka Belajar Luring Perjadin (Malinau).



Advokasi dan Koordinasi Kebijakan Merdeka Belajar Luring Perjadin (Tarakan)



Advokasi dan Koordinasi Kebijakan Merdeka Belajar Luring Perjadin (Tana Tidung).

• **Tim Agen Penggerak**

Untuk membantu advokasi dan sosialisasi ke Satuan Pendidikan agar lebih melekat dan menjangkau seluruh lapisan, khususnya untuk daerah di wilayah 3T. Maka BPMP Provinsi Kalimantan Utara membentuk Tim Agen Penggerak Transformasi Pendidikan (AFTP). Tim ini terdiri dari unsur PIC PDM BPMP Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Pendidikan, Duta Teknologi, Kepala Sekolah dan Guru yang aktif dalam kontribusi pendidikan di Kalimantan Utara. AFTP ini memiliki tugas yaitu : Melakukan koordinasi terhadap sasaran Kebijakan Merdeka Belajar; Membantu BPMP Provinsi Kalimantan Utara dalam menyebarluaskan informasi terkait Kebijakan Merdeka Belajar; dan Sebagai perpanjangan tangan BPMP Provinsi Kalimantan Utara ke pemerintah daerah. Tim ini dibentuk dan dibuatkan SK penetapan pada bulan Januari 2024 dengan masa berlaku mulai bulan Februari s.d November 2024, selanjutnya dibuatkan grup Whatsapp sebagai sarana koordinasi.



Gambar . SK APTP dan Grup Whatsapp APTP untuk Koordinasi dan Diskusi.

Selain grup whatsapp, anggota Tim APTP juga harus membuat rencana dan laporan pengimbasan setiap bulan yang diunggah pada link <https://bit.ly/RTLagenPenggerak> sebagai bentuk pertanggungjawaban atas honor yang diterima.



• Bimtek PPKSP

Kekerasan di satuan pendidikan merupakan isu yang memprihatinkan dan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, serta keseluruhan proses belajar mengajar. Kekerasan dapat memicu trauma, mengganggu kesehatan mental, menghambat prestasi belajar, dan bahkan berakibat fatal. Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) merespons kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbudristek PPKSP). Regulasi tersebut merupakan komitmen Kemendikbudristek untuk memberikan jaminan langkah pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan yang diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada peserta didik, guru, tenaga kependidikan, dan warga sekolah lainnya yang beraktivitas di dalam satuan pendidikan.

Peran BPMP Provinsi Kalimantan Utara dalam mengadvokasi Pemda salah satunya adalah dengan melakukan peningkatan kapasitas Satgas yang telah terbentuk di daerah agar pencegahan dan penanganan kekerasan dilakukan dengan tepat melalui Bimtek PPKSP. Bimtek PPKSP ini dilaksanakan pada tanggal 25 s.d 27 Juli 2024 dengan mengundang perwakilan Satgas PPKSP dari unsur Dinas Pendidikan, Dinas Sosial,

Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Organisasi Profesi lain yang berkaitan dengan anak di seluruh Wilayah Kab/Kota dan Provinsi Kalimantan Utara.



8) PDM-06 Asesmen Nasional

a) Objektif dan Target PDM

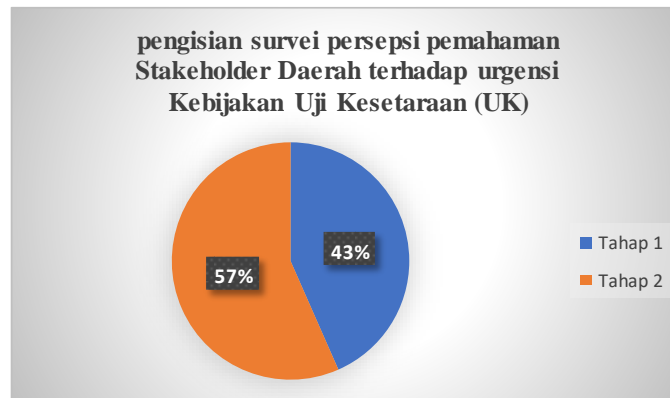
No	Objektif UPT	Target UPT
1.	Rata-rata Capaian Objektif semua PDM yang Mengintervensi Satuan Pendidikan Jenjang PAUD dan Dikmas sebesar 80%	Meningkatkan Pemahaman Stakeholder Daerah terhadap urgensi Kebijakan Uji Kesetaraan (UK) sebesar 30%
2.	Rata-rata Capaian Objektif semua PDM yang Mengintervensi Satuan Pendidikan Jenjang Dikdas dan Dikmen sebesar 80%	Meningkatkan pemahaman Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terhadap kebijakan AN dan Sulingjar sebesar 50% dari 23,79%
3.	Rata-rata Capaian Objektif semua PDM yang Mengintervensi Satuan Pendidikan Jenjang Dikdas dan Dikmen sebesar 80%	Menurunkan Partisipasi Satuan Pendidikan yang belum memadai dan belum mengikuti AN dan Sulingjar Tahun 2023 sebesar 50%

b) Capaian PDM 06 – Asesmen Nasional

• Jenjang PAUD dan Dikmas

Target: Meningkatkan Pemahaman Stakeholder Daerah terhadap urgensi Kebijakan Uji Kesetaraan (UK) sebesar 30%

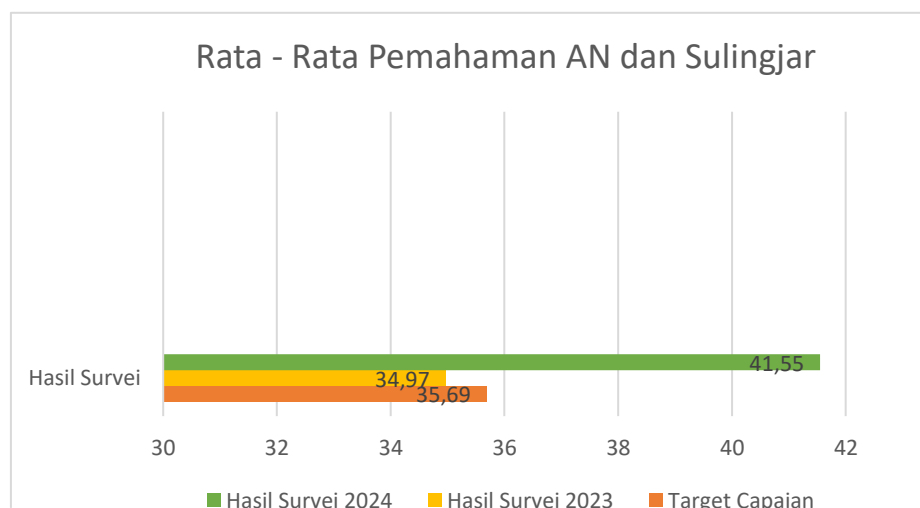
Capaian: Berdasarkan hasil pengisian survei persepsi pemahaman Stakeholder Daerah terhadap urgensi Kebijakan Uji Kesetaraan (UK) terjadi peningkatan dari tahap 1 ke tahap 2. Pada tahap 1 tingkat pemahaman kebijakan UK sebesar 34,85 dan pada tahap 2 sebesar 45,45. Jadi untuk peningkatan pemahaman stakeholder daerah terjadi peningkatan sebesar 10,6 atau lebih dari 30%.



- Jenjang Dikdas dan Dikmen

Target: Meningkatkan pemahaman Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terhadap kebijakan AN dan Sulingjar sebesar 50% dari 23,79%

Capaian: Berdasarkan hasil pengisian survei pemahaman kebijakan AN rata – rata pemahaman AN untuk Provinsi Kalimantan Utara mengalami peningkatan. Pada Tahun 2023 rata – rata pemahaman AN sebesar 34,97 dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 6,58 menjadi 41,55. Jika dilihat berdasarkan target UPT untuk peningkatan pemahaman Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terhadap kebijakan AN dan Sulingjar sebesar 50% dari 23,79% atau capaian pemahaman meningkat sebesar 35,69%, maka untuk peningkatan pemahaman AN di Provinsi Kalimantan Utara sudah mengalami peningkatan sesuai target dari tahun sebelumnya dari 34,97 ke 41,55.



- Jenjang Dikdas dan Dikmen

Target: Menurunkan Partisipasi Satuan Pendidikan yang belum memadai dan belum mengikuti AN dan Sulingjar Tahun 2023 sebesar 50%.



Capaian: Berdasarkan data rekapitulasi AN pada tahun 2023, terdapat 15 satuan pendidikan yang mengikuti AN namun hasilnya belum memadai dan 25 satuan pendidikan yang belum mengikuti AN dari total keseluruhan 838 satuan pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara. Serta data rekapitulasi AN pada tahun 2024 terdapat 7 satuan pendidikan yang mengikuti AN namun hasilnya belum memadai dan 24 satuan pendidikan yang tidak mengikuti AN dari total 849 satuan pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara. Jika dilihat berdasarkan jumlah partisipasi AN, terjadi peningkatan jumlah satuan pendidikan yang mengikuti AN dan hasilnya memadai dari tahun 2023 ke tahun 2024. Namun, untuk target menurunkan partisipasi satuan pendidikan yang belum memadai dan belum mengikuti AN sebesar 50% belum dapat tercapai karena terdapat satuan pendidikan yang partisipasinya masih dibawah 85%. Tidak memadainya hasil AN disebabkan oleh beberapa faktor seperti, peserta didik tidak hadir dan atau peserta didik tidak menyelesaikan AN dan satuan pendidikan yang tingkat partisipasinya dibawah 85% tidak melakukan penjadwalan ulang untuk meningkatkan partisipasi di satuan pendidikannya. Sedangkan untuk satuan pendidikan yang tidak mengikuti AN disebabkan karena, terdapat satuan pendidikan baru yang belum memiliki kelas tengah (kelas 5, 8, dan 11), dan satuan pendidikan yang tidak memiliki kelas tengah (kelas 5, 8, dan 11).

Untuk hasil pengisian Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar), pada tahun 2023 sebanyak 76 satuan pendidikan yang mengisi Sulingjar namun hasilnya belum memadai dan sebanyak 103 satuan pendidikan yang tidak mengisi Sulingjar dari total 1466 satuan pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian pada tahun 2024, sebanyak 94 satuan pendidikan yang mengisi Sulingjar namun hasilnya belum memadai dan sebanyak 43 satuan pendidikan belum mengisi Sulingjar dari total 1480 satuan pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara. Jika dilihat berdasarkan jumlah partisipasi satuan pendidikan yang mengisi Sulingjar, terdapat penurunan jumlah satuan pendidikan yang belum mengikuti sulingjar dari tahun 2023 ke tahun 2024 sebanyak 60 satuan pendidikan atau lebih dari 50%. Sedangkan untuk jumlah satuan pendidikan yang mengikuti Sulingjar namun hasilnya belum memadai, terjadi peningkatan sebanyak 18 satuan pendidikan dari 2023 ke 2024. Jika dilihat capaiannya, untuk target menurunkan partisipasi satuan pendidikan belum mengikuti Sulingjar sebesar 50% sudah tercapai, namun untuk menurunkan partisipasi satuan pendidikan yang belum memadai sebesar 50% belum dapat tercapai. Beberapa faktor belum tercapainya target ini adalah, adanya satuan pendidikan baru pada tahun ajaran 2024/2025, terdapat beberapa sekolah yang masih aktif secara dapodik namun tidak ada aktivitas di satuan pendidikan, dan terdapat beberapa satuan pendidikan yang berada di wilayah blank spot sehingga tidak bisa mengakses Sulingjar.



Asesmen Nasional	2023				2024			
	Jumlah Satuan	Jumlah yang memadai dan mengikuti AN	Jumlah yang belum memadai	Jumlah yang belum mengikuti AN	Jumlah Satuan	Jumlah yang memadai dan mengikuti AN	Jumlah yang belum memadai	Jumlah yang belum mengikuti AN
Provinsi	111	102	2	7	114	107	1	6
Bulungan	213	207	0	6	215	209	2	4
Tarakan	106	105	1	0	106	103	1	2
Nunukan	209	199	5	5	215	205	2	8
Malinau	157	144	6	7	157	152	1	4
Tana Tidung	42	41	1	0	42	42	0	0
Jumlah	838	799	15	25	849	818	7	24

Sulingjar	2023				2024			
	Jumlah Satuan	Jumlah yang memadai dan mengikuti Sulingjar	Jumlah yang belum memadai	Jumlah yang belum mengikuti Sulingjar	Jumlah Satuan	Jumlah yang memadai dan mengikuti Sulingjar	Jumlah yang belum memadai	Jumlah yang belum mengikuti Sulingjar
Provinsi	111	107	2	2	114	108	1	5
Bulungan	383	338	19	26	387	352	23	12
Tarakan	215	211	2	2	217	206	10	1
Nunukan	387	371	13	3	390	362	22	6
Malinau	281	174	38	69	284	227	38	19
Tana Tidung	89	86	2	1	88	88	0	0
Jumlah	1466	1287	76	103	1480	1343	94	43

c) Kegiatan yang telah Dilakukan

• Workshop Kebijakan Uji Kesetaraan (UK)

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 29 April s.d. 1 Mei 2024 dengan melibatkan peserta dari Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Satuan Pendidikan pelaksana Uji Kesetaraan. Kegiatan ini bertujuan untuk

- ❖ Meningkatkan pemahaman Dinas Pendidikan dan Pelaksana Uji Kesetaraan terhadap Kebijakan Uji Kesetaraan (UK);
- ❖ Melakukan koordinasi terkait persiapan dan pelaksanaan Uji Kesetaraan (UK) tahun 2024;
- ❖ Menyosialisasikan Pedoman Penyelenggaraan Uji Kesetaraan Tahun 2024 kepada Dinas Pendidikan dan Pelaksana Uji Kesetaraan;
- ❖ Mengidentifikasi jenis permasalahan dan kendala dalam persiapan dan pelaksanaan Uji Kesetaraan (UK).

Kegiatan Workshop Kebijakan Uji Kesetaraan



• Monitoring Pelaksanaan Uji Kesetaraan

Kegiatan monitoring pelaksanaan Uji Kesetaraan bertujuan untuk :

- ❖ Mengumpulkan informasi tentang tahapan pelaksanaan UK, dan kesesuaiannya dengan POS Penyelenggaraan UK;
- ❖ Memastikan pelaksanaan UK di satuan pendidikan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan POS Penyelenggaraan UK yang telah ditentukan;
- ❖ Mengumpulkan data riil peserta dan sekolah penyelenggara yang mengikuti UK; dan
- ❖ Memetakan isu – isu terkini terkait pelaksanaan UK di daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan secara 2 tahap. Tahap 1 pada tanggal 17 s.d 21 Mei 2024, (Uji Kesetaraan Paket C) dan tahap 2 pada 24 s.d 27 Mei 2024 (Uji Kesetaraan Paket B dan A). Pada kegiatan ini, sasarannya adalah satuan pendidikan yang melaksanakan Uji Kesetaraan (SKB dan PKBM) di Provinsi Kalimantan Utara.

Kegiatan Monitong Uji Kesetaraan



- Kegiatan Workshop Kebijakan AN dan Sulingjar

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 s.d. 9 Juli 2024 dengan mengundang Narasumber dari Pusdatin dan melibatkan peserta dari Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, MKKS, dan KKKS. Kegiatan ini bertujuan :

- ❖ Meningkatkan pemahaman Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan terhadap kebijakan Asesmen Nasional dan Sulingjar;
- ❖ Memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan kebijakan Asesmen Nasional dan Sulingjar;
- ❖ Memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap tugas dan tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan Asesmen Nasional yang dituangkan dalam bentuk rencana tindak lanjut;
- ❖ Mengidentifikasi jenis permasalahan dan kendala dalam persiapan dan pelaksanaan Asesmen Nasional dan Sulingjar.

Kegiatan Workshop AN & Sulingjar



- Penguatan dan Advokasi bagi Tim Posko/Helpdesk AN dan Sulingjar 2024

Kegiatan Penguatan dan Advokasi bagi Tim Posko/Helpdesk AN dan Sulingjar 2024 dilaksanakan pada 29 s.d. 31 Juli 2024 dengan mengundang narasumber dari Pusdatin secara daring dengan membawakan materi terkait mekanisme Pendataan Asesmen Nasional. Kegiatan ini melibatkan peserta dari Tim Teknis Dinas Pendidikan dan Operator Satuan Pendidikan di setiap Jenjang. Tujuan kegiatan ini adalah :

- ❖ Meningkatkan pemahaman Tim Posko/Helpdesk AN terhadap kebijakan Asesmen Nasional dan Sulingjar;
- ❖ Meningkatkan kapasitas terhadap dan kompetensi Tim Posko/Helpdesk AN terhadap pelaksanaan AN dan Sulingjar;
- ❖ Meningkatkan kolaborasi dan sinergi sehingga terciptanya kerja sama yang baik dan harmonis diantara semua pihak yang terlibat dan responsif terhadap masalah yang muncul; dan
- ❖ Mendorong komitmen terhadap pelaksanaan AN dan Sulingjar dalam upaya meningkatkan partisipasi satuan pendidikan pelaksanaan AN dan Sulingjar.



- Kegiatan Monitoring dan Advokasi Persiapan Pelaksanaan Asesmen Nasional Tahun 2024

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keikutsertaan semua satuan pendidikan dalam pelaksanaan Asesmen Nasional dan Sulingjar tahun 2024 serta memastikan kesiapan sarana dan prasarana satuan pendidikan dalam melaksanakan Asesmen Nasional dan Sulingjar. Kegiatan Monitoring dan Advokasi Persiapan Pelaksanaan Asesmen Nasional Tahun 2024 dilaksanakan secara 3 tahap, sesuai dengan jadwal pelaksanaan simulasi AN. Tahap 1 dilaksanakan untuk jenjang SMA, SMK Sederajat pada tanggal 6 s.d. 8 Agustus 2024, tahap 2 dilaksanakan untuk jenjang SMP Sederajat pada tanggal 12 s.d. 14 Agustus 2024 dan tahap 3 dilaksanakan untuk jenjang SD Sederajat pada tanggal 23 s.d. 25 September 2024. Sasaran kegiatan ini adalah Dinas Pendidikan serta satuan pendidikan yang pada tahun sebelumnya tidak melaksanakan AN dan/atau hasil AN-nya tidak memadai.

Kegiatan Monitoring dan Advokasi Persiapan Pelaksanaan Asesmen Nasional Tahun 2024



- Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan/Monitoring Pelaksanaan AN/Sulingjar Tahun 2024

Kegiatan ini dilaksanakan secara 3 Tahap. Tahap 1 pada tanggal 18 s.d. 21 Agustus 2024 untuk jenjang SMA, SMK Sederajat, tahap 2 pada tanggal 8 s.d. 11 September 2024 untuk jenjang SMP Sederajat, Tahap 3 untuk jenjang SD Sederajat dilaksanakan 2 gelombang, gelombang 1 pada tanggal 27 s.d. 30 Oktober 2024 dan gelombang 2 pada tanggal 3 s.d. 6 November 2024. Sasaran dari kegiatan ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan dengan kriteria baru

pertama kali melaksanakan AN dan/atau hasil AN tahun sebelumnya tidak memadai. Kegiatan ini bertujuan untuk :

- ❖ Memastikan kesesuaian pelaksanaan Asemen Nasional dan Sulingjar sesuai dengan pedoman pelaksanaan;
- ❖ Memastikan keikutsertaan semua satuan pendidikan dalam pelaksanaan Asesmen Nasional dan Sulingjar tahun 2024;
- ❖ Memastikan satuan pendidikan melaksanakan Asesmen Nasional dan Sulingjar dengan jujur.

Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan/Monitoring Pelaksanaan AN/Sulingjar Tahun 2024



9) PDM-08 Regulasi dan Tata Kelola

a) Objektif dan Target UPT

No	Objektif UPT	Target UPT
1.	65% Kab/Kota dengan AKS PAUD >75%	AKS PAUD>75% 65%
2.	80% Kab/Kota dengan APS 7-12 tahun>99%	APS 7-12 tahun >99% 80%
3.	70% Kab/Kota dengan APS 13-15 tahun>95%	APS 13-15 tahun>95% 70%
4.	30% Prov dengan APK SMA/SMK/SMLB/MA/Sederajat >95%	APK SM/Sederajat>95% 30%

b)Capaian

Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

Tampilkan 10 Cari:

No	Kabupaten / Kota	Jumlah BPB	Jumlah DO*															
			Kel.A	Kel.B	KB	TPA	SPS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Kab. Malinau	1.085	0	0	0	0	0	9	10	26	30	36	21	47	68	21	75	
2	Kab. Bulungan	1.295	0	0	0	0	0	31	30	48	47	53	32	65	128	73	165	
3	Kab. Tana Tidung	198	0	0	0	0	0	5	4	6	7	16	5	3	12	2	13	
4	Kab. Nunukan	3.582	0	0	0	0	0	34	50	58	75	109	45	111	235	107	152	
5	Kota Tarakan	2.020	0	0	0	0	0	32	73	76	96	153	45	104	142	43	187	
-	Residu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jumlah		8.180	0	0	0	0	0	111	167	214	255	367	148	330	585	246	592	

Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

Tampilkan 10 Cari:

No	Kabupaten / Kota	Jenjang Pendidikan				Total
		PAUD	Dasar (SD)	Menengah (SMP)	Atas (SMA/ SMK)	
1	Kab. Malinau	0	132	136	174	442
2	Kab. Bulungan	0	241	266	333	840
3	Kab. Tana Tidung	0	43	17	47	107
4	Kab. Nunukan	0	371	453	437	1.261
5	Kota Tarakan	0	475	289	375	1.139
-	Residu	0	0	0	0	0
Jumlah		0	1.262	1.161	1.366	3.789

Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

Tampilkan 10 Cari:

No	Kabupaten / Kota	Jenjang Pendidikan		Total
		Dasar (SD)	Menengah (SMP)	
1	Kab. Malinau	132	146	278
2	Kab. Bulungan	356	333	689
3	Kab. Tana Tidung	34	49	83
4	Kab. Nunukan	651	556	1.207
5	Kota Tarakan	312	383	695
-	Residu	0	0	0
Jumlah		1.485	1.467	2.952

Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

Tampilkan 10 Cari:

No	Kabupaten / Kota	Usia				Total
		< 7	7 - 12	13 - 15	> 15	
1	Kab. Malinau	0	397	290	398	1.085
2	Kab. Bulungan	0	394	319	582	1.295
3	Kab. Tana Tidung	0	54	66	78	198
4	Kab. Nunukan	0	1.021	1.051	1.510	3.582
5	Kota Tarakan	0	529	548	943	2.020
-	Residu	0	0	0	0	0
Jumlah		0	2.395	2.274	3.511	8.180



c) Kegiatan yang telah dilakukan

- ToT Fasilitator Bimtek pada Pemda dalam Rangka Ketercapaian Program PAUD dan Wajar 12 Tahun Region Provinsi.



- Pelaksanaan survey dalam rangka kesiapan pemda terhadap kebijakan Wajar 13 tahun.




10) PDM-09 Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan

a) Objektif dan Target UPT

No	Objektif UPT	Target UPT
1.	50% guru SD Kelas 1 dan 2 memahami strategi pembelajaran yang tidak mensyaratkan kemampuan calistung peserta didik	94 sampel Guru SD yang ditentukan memahami strategi pembelajaran yang tidak mensyaratkan kemampuan calistung
2.	50% satuan PAUD dan 50% SD Kelas 1 dan 2 melakukan penguatan pembelajaran untuk pencapaian kemampuan fondasi	55 jumlah sampel satdik PAUD dan SD melakukan penguatan pembelajaran untuk pencapaian kemampuan fondasi
3.	100% SD Negeri dan 25% SD Swasta tidak melakukan tes calistung saat PPDB	437 SD Negeri dan 89 sampel SD Negeri tidak melakukan tes calistung





		48 SD Swasta dan 7 sampel SD Swasta tidak melakukan tes calistung
4.	50% satuan PAUD dan 70% SD Kelas 1 dan 2 melakukan penguatan pembelajaran pada masa MPLS	Monev kualitatif dilakukan langsung oleh Pusat

b) Capaian

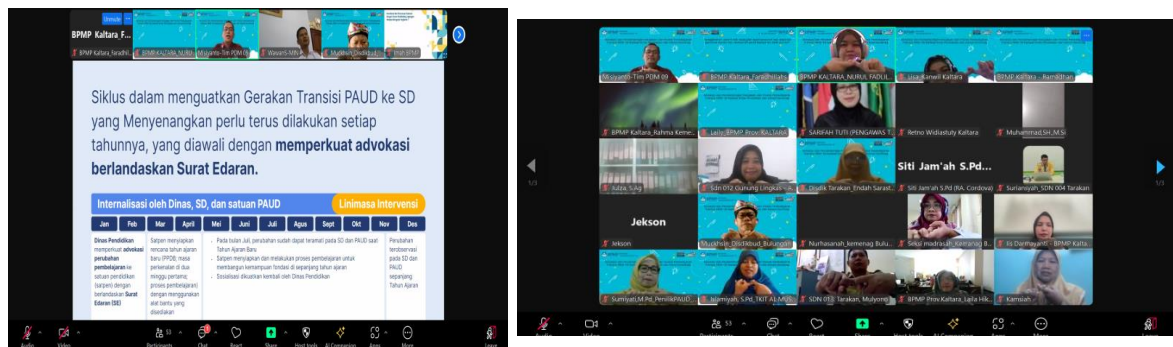
No	Target Capaian	Keterangan Capaian	Target UPT
1.	50% guru SD Kelas 1 dan 2 memahami strategi pembelajaran yang tidak mensyaratkan kemampuan calistung peserta didik	Sebanyak 94 dari 94 sampel guru SD memahami strategi pembelajaran yang tidak mensyaratkan kemampuan calistung	59,57%
2.	50% satuan PAUD dan 50% SD Kelas 1 dan 2 melakukan penguatan pembelajaran untuk pencapaian kemampuan fondasi	Sebanyak 55 dari 55 sampel satuan Pendidikan PAUD dan SD melakukan penguatan pembelajaran untuk pencapaian kemampuan fondasi	54,50%
3.	100% SD Negeri dan 25% SD Swasta tidak melakukan tes calistung saat PPDB	1. Sebanyak 89 dari 89 sampel SD Negeri tidak melakukan tes calistung 2. Sebanyak 6 dari 7 sampel SD Swasta tidak melakukan tes calistung	100% 85,7%
4.	50% satuan PAUD dan 70% SD Kelas 1 dan 2 melakukan penguatan pembelajaran pada masa MPLS	Monev kualitatif dilakukan langsung oleh pusat dan mendapatkan hasil : 1. PAUD melaksanakan pengenalan lingkungan sekolah dan asesmen awal Melaksanakan pengenalan lingkungan sekolah dan asesmen awal	60,7% 1,1%

c) Kegiatan yang Telah Dilakukan

• Advokasi dan Pendampingan Kebijakan dan Produk Pembelajaran Transisi PAUD-SD Kepada Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag.

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring pada hari Selasa s.d. Rabu tanggal 28 s.d. 29 Mei 2024 yang bertujuan untuk memperkuat peran Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag dalam mensosialisasikan kebijakan dan produk pembelajaran

Transisi PAUD ke SD serta memperkuat peras Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag terkait peningkatan kapasitas satuan Pendidikan dalam penerapan perubahan pembelajaran.



- **Sosialisasi dan Advokasi ke Dinas Pendidikan dan Mitra tentang Kebijakan MPLS, Perubahan Pembelajaran, dan Aktivitas Forkom PAUD-SD**

Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 14 s.d. 16 agustus 2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka di masing-masing Dinas Pendidikan yang tersebar di 4 (empat) kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung dengan sasaran peserta yaitu Penilik PAUD, Pengawas SD, Guru SD Kelas 1, Guru SD Kelas 2, serta Pokja Bunda PAUD. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap perubahan pembelajaran dari PAUD ke SD kelas awal untuk penguatan pengembangan kemampuan fondasi.



- **Supervisi Pelaksanaan MP LS ke Satuan Pendidikan**

Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 15 s.d. 17 Juli 2024 bertempat di 5 (lima) kabupaten/kota dengan sasaran yang berasal dari satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar. Dalam pelaksanaan kegiatan akan dilakukan pemantauan dan diskusi berdasarkan instrument untuk pelaksanaan MPLS di satuan Pendidikan apakah telah sesuai dengan rambu yang ada pada Gerakan Transisi PAUD-SD Yang Menyenangkan.



- **Tindak Lanjut RTL Bimtek UPT BPMP/BBPMP Untuk Penguatan Perubahan Pembelajaran**

Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 11 s.d. 13 November 2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka di Kota Tarakan, dengan sasaran peserta yaitu Penilik PAUD, Pengawas SD, Guru SD Kelas 1, Guru SD Kelas 2, serta Pokja Bunda PAUD. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi penguatan kepada pendidik kelas awal terkait pembelajaran yang efektif dalam mengembangkan kemampuan fondasi dan mendapat umpan balik dari satuan pendidikan yang telah melaksanakan pembelajaran yang memfasilitasi pembinaan kemampuan fondasi dengan efektif



11) PDM-10 Pemulihan Pembelajaran

PDM 10 merupakan program Pemulihan dan Transformasi Pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan sebagai Upaya meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya pada kompetensi dasar literasi numerasi di tingkat satuan pendidikan dan daerah. Program ini dikoordinasikan oleh PDM-10 Pemulihan Pembelajaran, Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Dalam rangka menjalankan program Pemulihan Pembelajaran BPMP Provinsi Kalimantan Utara sebagai UPT Kemendikbudristek berupaya mendorong Peningkatan literasi di Wilayah Kalimantan

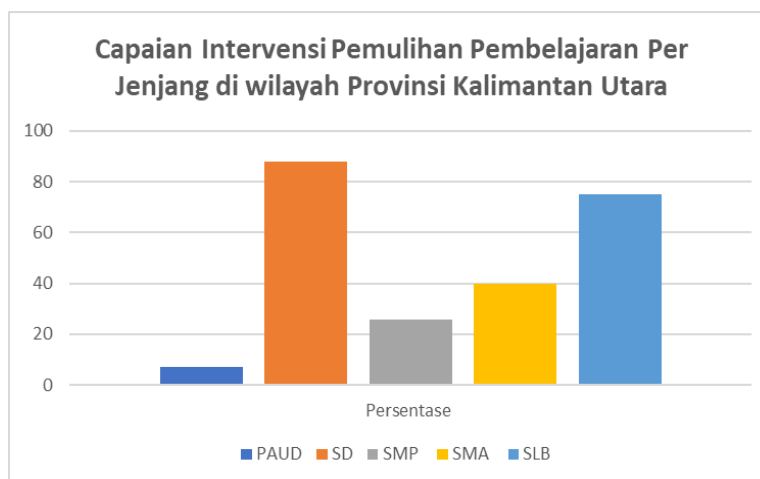
Utara dengan berbagai intervensi diantaranya Program Kampus Mengajar, Buku Bacaan Bermutu, Pendampingan penguatan literasi dan numerasi, Pengimbasan literasi dan numerasi dan Dukungan Mitra Pembangunan untuk pemulihan pembelajaran.

a) Objektif dan Target UPT

No	Objektif UPT	Target UPT
1.	100% PAUD, SD, SMP, SMA, dan SKB/PKBM dalam ruang lingkup sasaran intervensi mendapatkan dukungan program pemulihan pembelajaran	100% PAUD, SD, SMP, SMA, dan SKB/PKBM dalam ruang lingkup sasaran intervensi mendapatkan dukungan program pemulihan pembelajaran
2.	50% dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota melakukan aksi nyata program benahi literasi dan/atau numerasi	50% dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota melakukan aksi nyata program benahi literasi dan/atau numerasi
3.	Penambahan minimal 5 mitra pembangunan Kemendikbudristek untuk peningkatan literasi dan/atau numerasi.	Penambahan minimal 5 mitra pembangunan Kemendikbudristek untuk peningkatan literasi dan/atau numerasi.

b) Capaian

Upaya dalam mencapai target capaian, PDM 10 telah melakukan intervensi kepada satuan Pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB dengan presentase capaian sebagai berikut:



Berdasarkan tabel diatas persentase Capaian PDM 10 tertinggi adalah jenjang SD dan yang terendah adalah jenjang PAUD, Intervensi yang dilakukan untuk capaian baik melalui Program Kampus Mengajar, bantuan buku bacaan bermutu, mitra pembangunan, pendampingan dan pengimbasan literasi dan numerasi

Aksi Nyata Program Benahi Literasi Dan/Atau Numerasi Di Kabupaten/Kota Kalimantan Utara				
Bulungan	Nunukan	Tarakan	Malinau	Tana Tidung
Pengadaan Buku Nonteks bagi satuan Pendidikan jenjang SD melalui BOSDA	Pengimbasan literasi dan numerasi	Workshop Penulisan Buku bagi Guru – Guru kelas awal	Bantuan Buku Bacaan Bermutu	Bantuan Buku Nonteks

Berdasarkan tabel diatas 100% Pemerintah daerah di Wilayah Kalimantan Utara telah melakukan aksi nyata benahi literasi dan numerasi melalui pengadaan buku, Workshop Penulisan, dan pengimbasan.

Daftar Mitra Pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara
INOVASI
LITARA Foundation
Tanoto Foundation

c) Kegiatan yang telah Dilakukan

• Pendampingan Penguatan intervensi pemulihan pembelajaran oleh UPT Tahap 1 dan Tahap 2

Kegiatan ini merupakan Pelepasan Mahasiswa Kampus Mengajar Angkatan 7 yang dihadiri oleh Mahasiswa, DPL, Perwakilan Dinas Pendidikan, dan Satuan Pendidikan yang menjadi sasaran Program Kampus mengajar angkatan 7. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah penyamaan persepsi terkait tujuan utama program Kampus Mengajar, Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara tim Kampus Mengajar, Ditjen PAUDDikdasmen, UPT, dan dinas pendidikan, menyampaikan terkait dukungan yang dibutuhkan program Kampus Mengajar dari UPT dan dinas pendidikan dan menginformasikan Program Kampus Mengajar dan melepaskan mahasiswa peserta program kampus mengajar ke sekolah penugasan





- **Koordinasi, Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Fasilitator daerah dan Intervensi pemulihan pembelajaran**

Kegiatan ini merupakan Pendampingan dan penguatan terhadap Fasilitator daerah yang dihadiri dari berbagai unsur seperti Dinas Pendidikan, Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru jenjang SD, SMP, dan SMA. Kegiatan ini bertujuan melakukan pendampingan dalam peningkatan literasi dan numerasi yang dapat menunjang pemulihan pembelajaran, dengan adanya pelatihan ini diharapkan Peserta kegiatan dapat menjadi Fasilitator pada satuan pendidikan dalam mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan



- **Supervisi program pemulihan pembelajaran tahap I dan 2 oleh UPT**

Kegiatan ini merupakan supervisi ke satuan pendidikan yang menjadi sasaran Program Kampus Mengajar angkatan 7 yang tersebar di Kabupaten/Kota yang ada di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara, kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan Program Kampus Mengajar diantaranya mengetahui pencapaian keterampilan Mahasiswa dalam kepemimpinan, empati sosial, berfikir analitis saat merancang Program bersama Kelompok dan pihak sekolah, mengetahui kemampuan kerjasama dan manajemen Mahasiswa, dan menyampaikan Program Pemulihan Pembelajaran di UPT dalam mendukung kebijakan merdeka belajar di daerah.



- **Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pengimbasan peningkatan literasi dan numerasi oleh UPT**

Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam pemulihan pembelajaran melalui penguatan literasi dan numerasi dan meningkatkan kapasitas peserta dalam pemahaman mendasar mengenai literasi dan numerasi. Dalam kegiatan ini peserta diberi penguatan terkait numerasi yang dihadiri oleh peserta kegiatan dari berbagai unsur Dinas Pendidikan, Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru jenjang SD, SMP, dan SMA.



- **Penguatan Komunitas Belajar Antar Sekolah sebagai strategi penguatan program peningkatan literasi dan numerasi oleh UPT**

Kegiatan ini merupakan penguatan komunitas belajar dan yang menjadi sasaran adalah penanggungjawab Komunitas belajar antar sekolah, satuan pendidikan yang literasi dan numerasinya berada dikategori 1 dan 2 jenjang PAUD,SD,SMP,SMA dan SLB perwakilan dari kab/kota yang berada di Kalimantan Utara. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemodelan satu siklus komunitas belajar antar sekolah untuk penguatan literasi, mampu memberikan penguatan kornel dalam penguatan literasi dan numerasi, dan mampu merancang tindaklanjutan untuk siklus kegiatan kornel.



- **Sosialisasi Program Mitra Pembangunan Daerah**

Dalam rangka pelaksanaan membangun kerjasama dengan calon mitra pembangunan untuk mendukung program pemulihan pembelajaran, kegiatan ini dilaksanakan secara daring dengan mengundang mitra pembangunan potensial baik dari NGO, Perusahaan

Swasta, Komunitas Pendidikan, Dinas Perpustakaan Kab/kota, dan satuan pendidikan. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kerjasama dengan calon mitra pembangunan potensial untuk mendukung program pemulihan pembelajaran terkait penyediaan buku bacaan bermutu dan pelatihan bacaan bermutu untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pada kompetensi dasar literasi dan numerasi.



12) PDM 11 Gerakan Sekolah Sehat

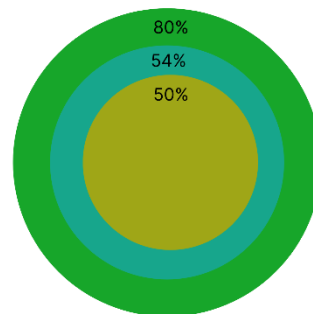
a) Objektif dan Target PDM

No	Objektif UPT	Target UPT
1.	80% satuan pendidikan di Indonesia mengetahui Gerakan Sekolah Sehat	80%
2.	90% satuan pendidikan mengimplementasikan secara berkelanjutan Gerakan Sekolah Sehat (Sehat Gizi, Sehat Fisik, Sehat Imunisasi, Sehat Jiwa, dan Sehat Lingkungan)	90%
3.	95% satuan pendidikan binaan mengimplementasikan sehat bergizi, sehat fisik, sehat imunisasi, sehat jiwa, dan sehat lingkungan	95%
4.	100% satuan pendidikan binaan jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB terpetakan status kebugarannya	100%

b) Capaian

- 80% satuan pendidikan di Indonesia mengetahui Gerakan Sekolah Sehat, capaian akhir untuk Provinsi Kalimantan Utara sebesar 50%. Capaian ini turun sebesar 4% dibandingkan dengan pengukuran (asesmen) awal yang mencapai 54%.

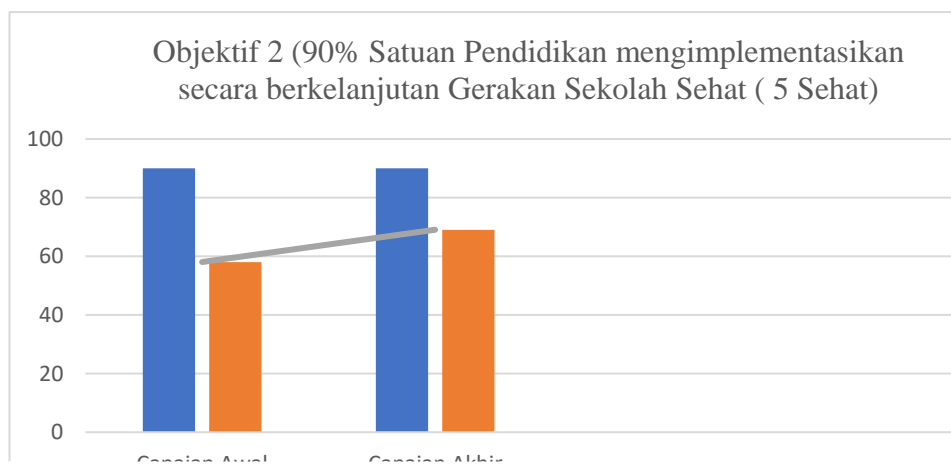
Objektif 1 (80% Satuan Pendidikan Mengetahui Gerakan Sekolah Sehat)



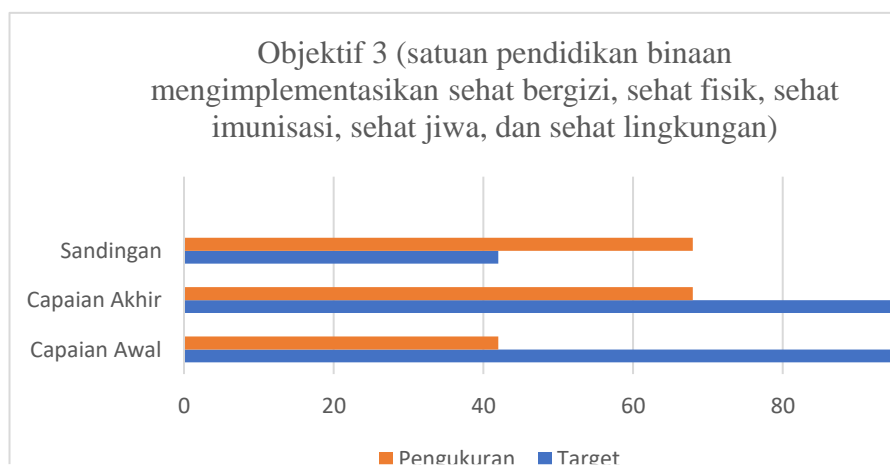
Keterangan:

- Target
- Capaian Awal
- Capaian Akhir

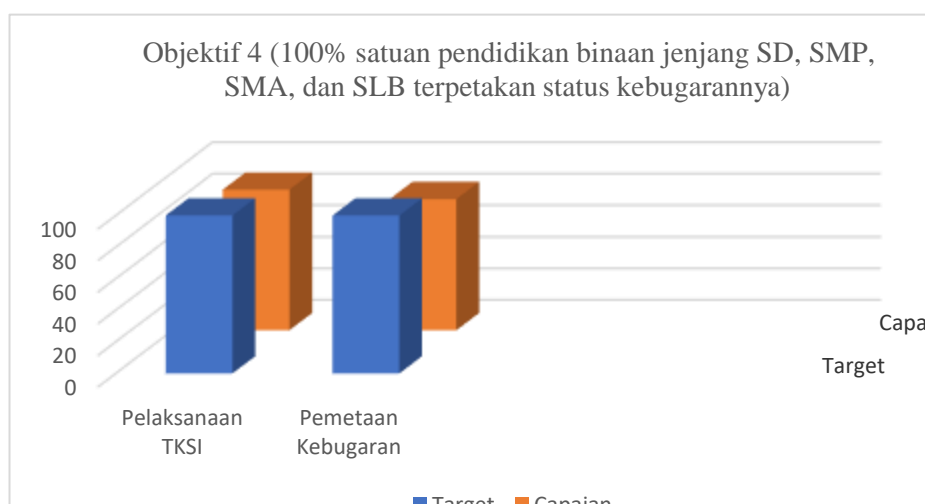
- 90% satuan pendidikan mengimplementasikan secara berkelanjutan Gerakan Sekolah Sehat (Sehat Gizi, Sehat Fisik, Sehat Imunisasi, Sehat Jiwa, dan Sehat Lingkungan). Capaian akhir (*endline*) untuk Provinsi Kalimantan Utara sebesar 69%. Terdapat kenaikan untuk capaian ini yakni sebesar 11% dari hasil pengukuran (asesmen) awal sebesar 58%.



- 95% satuan pendidikan binaan mengimplementasikan sehat bergizi, sehat fisik, sehat imunisasi, sehat jiwa, dan sehat lingkungan. Capaian akhir (*endline*) untuk Provinsi Kalimantan Utara sebesar 68%, capaian ini meningkat cukup tinggi yakni 26% dibandingkan capaian awal sebesar 42%.



- 100% satuan pendidikan binaan jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB terpetakan status kebugarannya. Capaian untuk Provinsi Kalimantan Utara terkait pelaksanaan Tes Kebugaran sebesar 88,9% dikarenakan 2 satuan pendidikan binaan tidak melaksanakan tes kebugaran dari 18 satuan pendidikan yang seharusnya melaksanakan tes. Sedangkan untuk ketercapaian pemetaan pemetaan kebugaran hasilnya sebesar 83,3% dikarenakan 2 satuan pendidikan binaan tidak melaksanakan tes, dan 1 satuan pendidikan binaan sudah melaksanakan tes tetapi tidak menginput hasil di aplikasi kebugaran Pusmendik sehingga hasiln kebugarannya tidak dapat diketahui.



c) Kegiatan yang telah Dilakukan

- Sosialisasi dan advokasi penguatan Gerakan Sekolah Sehat dari UPT ke Dinas Pendidikan, Pengawas, dan TP UKS. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 29 s.d. 31 Januari 2024 di Tarakan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada Dinas Pendidikan, Pengawas Sekolah, TP UKS sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan terselenggaranya program di kemudian hari.
- Semarak Gerakan Sekolah Sehat dan Gelar Wicara Sekolah Sehat. Kedua kegiatan ini dilaksanakan disatu waktu yakni di kegiatan Festival Kurikulum dan Semarak Gerakan Sekolah Sehat yang dilaksanakan pada 6 s.d 7 Mei 2024 bertempat di

Kantor BPMP Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan Semarak Sekolah Sehat merupakan salah satu kegiatan promosi Gerakan Sekolah Sehat untuk masyarakat pada umumnya dan satuan pendidikan pada khususnya. Semarak Gerakan Sekolah Sehat diisi dengan berbagai kegiatan diantaranya senam Gerakan Sekolah Sehat, gosok gigi bersama, Praktek cuci tangan yang benar, dan gelar wicara Sekolah sehat dengan menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan dan Perwakilan Sekolah Binaan Tahun 2023 (SD Negeri 2 Malinau Barat)



- Sosialisasi dan Advokasi Pelaksanaan TKSI ke Satuan Pendidikan Binaan jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB

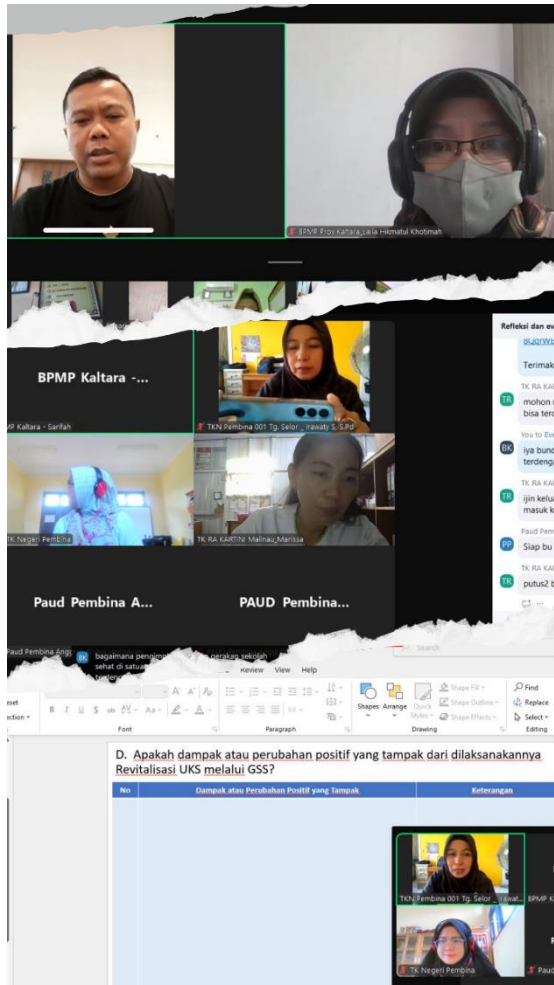
Sosialisasi dilaksanakan secara daring pada satuan pendidikan binaan jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB. Sosialisasi diadakan sebelum kegiatan Tes Kebugaran Siswa Indonesia (TKSI) dilaksanakan. Kegiatan ini memberikan informasi dan pengetahuan terkait pelaksanaan TKSI.

- Pendampingan Pelaksanaan TKSI ke Satuan Pendidikan Binaan jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB

Kegiatan dilaksanakan secara luring di satuan pendidikan binaan jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB. Kegiatan dilaksanakan pada 11 s.d. 13 Agustus 2024. Adapun tujuan kegiatan Pendampingan Pelaksanaan TKSI yaitu memberikan pendampingan dan pemantauan pelaksanaan TKSI di satuan pendidikan.

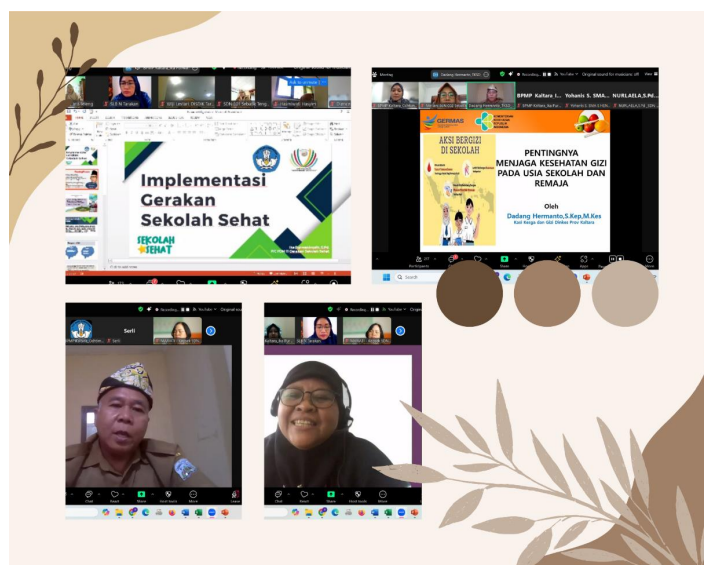
- Refleksi dan Evaluasi Implementasi Gerakan Sekolah Sehat di Satuan Pendidikan Binaan

Kegiatan ini dilaksanakan secara daring pada 13 November 2024 dengan peserta satuan pendidikan binaan tahun 2024. Refleksi dan evaluasi ditujukan untuk mengetahui sejauh mana Gerakan Sekolah Sehat diimplementasikan di satuan pendidikan binaan.



- Webinar Sekolah Sehat

Webinar dilaksanakan secara daring pada 18 November 2024 dengan mengundang seluruh satuan pendidikan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Webinar diisi dengan pemaparan materi terkait Sekolah sehat Oleh PDM 11 BPMP Provinsi Kalimantan Utara, dilanjutkan materi dari Dinas Kesehatan terkait Sehat Gizi, dan materi terakhir disampaikan oleh Ketua HIMPSI (Himpunan Psikologi Indonesia) Kalimantan Utara terkait Sehat Jiwa.



- Pendampingan/Supervisi/Visitasi ke Satuan Pendidikan Binaan Tahun 2024 dan 2024

Kegiatan dilaksanakan secara luring di 27 satuan pendidikan binaan tahun 2024 dan 2023 pada tanggal 24 s.d.26 November 2024. Adapun tujuan kegiatan Pendampingan/Supervisi/Visitasi ke Satuan Pendidikan Binaan Gerakan Sekolah Sehat adalah menggali informasi sejauh mana Gerakan Sekolah Sehat diimplementasikan dan mengidentifikasi kendala apa yang dialami sekolah binaan dalam mengimplementasikan Gerakan Sekolah Sehat, serta pemberian penguatan terkait implementasi Gerakan Sekolah Sehat

13) PDM-12 Pendidikan Inklusif

a) Objektif dan Target UPT

No	Objektif UPT	Target UPT
1.	100% Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang mengalami peningkatan kapasitas dalam menjalankan pendidikan inklusif.	100% dari 168 Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang mengalami peningkatan kapasitas dalam menjalankan pendidikan inklusif.
2.	a. 100.000 pendidik mengikuti pendidikan berjenjang bidang pendidikan inklusi (tingkat dasar) b. 10.000 pendidik mengikuti pendidikan berjenjang bidang pendidikan inklusi (tingkat lanjutan) c. 5000 pendidik mengikuti pendidikan berjenjang bidang pendidikan inklusi (tingkat mahir)	a. 504 pendidik mengikuti pendidikan berjenjang bidang pendidikan inklusi (tingkat dasar) b. 50 pendidik mengikuti pendidikan berjenjang bidang pendidikan inklusi (tingkat lanjutan) c. 27 pendidik mengikuti pendidikan berjenjang bidang pendidikan inklusi (tingkat mahir)
3.	Pemerintah Daerah memiliki ULD yang aktif 38 Provinsi dan 257 Kab/Kota	Pemerintah Daerah memiliki ULD yang aktif 1 Provinsi dan 5 Kab/Kota

b) Capaian

No	Target Capaian	Keterangan Capaian	Hasil Capaian
1.	100% Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang mengalami peningkatan kapasitas dalam menjalankan pendidikan inklusif.	Sebanyak 144 dari 168 Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang mengalami peningkatan kapasitas dalam menjalankan pendidikan inklusif.	85%
2.	a. 504 pendidik mengikuti pendidikan berjenjang bidang pendidikan inklusi (tingkat dasar) b. 50 pendidik mengikuti pendidikan berjenjang bidang pendidikan inklusi	b. Sebanyak 805 guru memulai materi, 411 memulai post test, 239 lulus post test, 112 unggah aksi nyata, 31 ketuntasan topik (data 21 Desember 2024) c. Sejumlah 9 guru mengikuti pelatihan berjenjang bidang	d. 100% e. 18% f. 0%

	(tingkat lanjutan) c. 27 pendidik mengikuti pendidikan berjenjang bidang pendidikan inklusi (tingkat mahir)	pendidikan inklusif tingkat lanjutan c. Belum terlaksana pendidikan berjenjang bidang pendidikan inklusif tingkat mahir	
3.	Pemerintah Daerah memiliki ULD yang aktif 1 Provinsi dan 5 Kab/Kota	Pemerintah Daerah memiliki ULD yang aktif 1 Provinsi dan 3 Kabupaten/Kota	g. 66,67 %

c) Kegiatan yang telah dilakukan

- Pendampingan implementasi kebijakan pendidikan khusus dan pendidikan inklusif kepada pemda oleh UPT : Advokasi kebijakan layanan Pendidikan inklusif kepada pemerintah daerah
- Pendampingan pelaksanaan pendidikan berjenjang bidang pendidikan inklusif di satuan Pendidikan : Pelaksanaan Advokasi pemanfaatan Pendidikan berjenjang Pendidikan inklusif di satuan pendidikan
- Sosialisasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas di daerah: : Sosialisasi Kebijakan Pembentukan Unit Layanan Disabilitas di Daerah

Keseluruhan kegiatan tersebut dilaksanakan menjadi 1 (satu) kegiatan dengan judul Advokasi Kebijakan Pendidikan Inklusif kepada Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2024 secara dalam jaringan (daring). Narasumber pada kegiatan tersebut diantaranya PDM-12 Pendidikan Inklusif Ditjen PAUD, PDM-12 Pendidikan Inklusif Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Ketua Rumah Pendampingan Anak (RPA) Tanjung Selor dan Guru Pendamping Khusus dari SDN 041 Tarakan. Materi yang disampaikan pada kegiatan tersebut antara lain Sosialisasi Peraturan Mendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023, Percepatan Pembentukan Unit Layanan Disabilitas, Data Kondisi Pendidikan Inklusi di Kalimantan Utara dan Pelatihan Berjenjang Pendidikan Inklusif, Berbagi Praktik Baik pengembangan dan pelaksanaan Unit Layanan Disabilitas, dan Pelatihan Berjenjang Pendidikan Inklusif melalui PMM.

Kegiatan Advokasi Kebijakan Pendidikan Inklusif kepada Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan



14) PDM-14 Analisa Data Pendidikan

PDM 14 adalah PDM yang menganalisa Data Pendidikan yang berdasarkan Indeks Kualitas Dapodik perjenjang baik mulai dari Satuan Pendidikan, Tingkat Kabupaten / Kota hingga Tingkat Provinsi sehingga peningkatan Indeks Kualitas Dapodik dapat terukur setiap saat (Real Time).

a) Objektif dan Target PDM

No	Objektif UPT	Target UPT
1.	Rata-rata Capaian Objektif semua PDM yang Mengintervensi Satuan Pendidikan Jenjang Dikdas dan Dikmen sebesar 80%	100% Pemda memiliki peningkatan indeks kualitas Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

b) Capaian PDM 14 Jenjang Dikdas dan Dikmen

1. IKD Kabupaten Bulungan Meningkat 0.14 dari 85.90 menjadi 86.04
2. IKD Kota Tarakan Meningkat 0.32 dari 85.63 menjadi 85.95
3. IKD Kabupaten Tana Tidung Menurun 0.71 dari 87.88 menjadi 87.17
4. IKD Kabupaten Malinau Menurun 0.41 dari 85.21 menjadi 84.80
5. IKD Kabupaten Nunukan Menurun 0.88 dari 85.62 menjadi 84.74

c) Kegiatan yang telah Dilakukan

- Uji Petik Anomali Data yang dilaksanakan tanggal 25 – 28 Agustus 2024 dengan Sasaran 28 Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan Provinsi Kaltara, Dinas Pendidikan Bulungan, Dinas Pendidikan Tana Tidung, Dinas Pendidikan Malinau dan Dinas Pendidikan Kota Tarakan.
- Uji Petik Anomali Data Tahap 2 yang dilaksanakan tanggal 13 – 23 Oktober 2024 dengan sasaran 161 Satuan Pendidikan di provinsi Kalimantan Utara untuk semua Jenjang.
- Rapat Koordinasi Indeks Data Pokok Pendidikan yang dilaksanakan pada tanggal 7 – 9 November 2024 yang melibatkan perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kaltara, Dinas Pendidikan Bulungan, Dinas Pendidikan Tana Tidung, Dinas Pendidikan Malinau, Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan dan Dinas Pendidikan Kota Tarakan serta perwakilan Kepala Sekolah dan Operator yang berprestasi untuk berbagi praktik baik




Dokumentasi saat pelaksanaan Uji Petik Peningkatan Kualitas Dapodik Tahun 2024



Koordinasi Indeks Data Pokok Pendidikan Tahun 2024

d. Kendala/Permasalahan

- 1) Keberlanjutan Program Sekolah Penggerak oleh pemerintah daerah
- 2) Satuan Pendidikan Belum melakukan Refleksi Pelaksanaan IKM Tahun Ajaran 2023/2024
- 3) Sasaran peserta Operator penerima BOP yang masih baru
- 4) Kegiatan tidak terlaksana karena perubahan kebijakan anggaran
- 5) Satuan Pendidikan belum memahami 8 Aksi Transformasi Satuan Pendidikan
- 6) Pemda belum melakukan Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan sesuai dengan Indikator Prioritas pada Rapor Pendidikan Daerah
- 7) Masih Banyaknya wilayah yang remote area
- 8) Menentukan sasaran untuk kegiatan pelaksanaan monitoring pelaksanaan AN jenjang SD karena untuk jenjang SD akan dilaksanakan secara 2 gelombang sehingga perlu menyesuaikan dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan Lembaga
- 9) Tidak semua memberikan informasi terkait bahan publikasi/materi konten dari masing-masing PDMnya kepada tim Publikasi
- 10) Masih terdapat banyak miskonsepsi yang terjadi di “lapangan” sehingga banyak terjadi kesalahpahaman terhadap Gerakan Transisi PAUD-SD


- 
- 11) Masih banyak Kepsek dan Guru yang belum mengetahui tentang Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif melalui PMM sehingga Capaian Aksesnya masih sangat kurang

e. Langkah Antisipatif

- 9) Menggerakkan komunitas belajar dalam sekolah yang sudah terbentuk dalam meningkatkan pemahaman terkait pemanfaatan PMM;
- 10) Koordinasi ke pemerintah daerah terkait Pemanfaatan PMM oleh sekolah pelaksana IKM melalui PMO level pemerintah daerah;
- 11) Mengomunitas belajar dalam sekolah sangat penting karena komunitas belajar menjadi wadah untuk merealisasikan terjadinya kolaborasi antar pendidik;
- 12) Menghimbau pemerintah daerah untuk mendorong UMKM menjadi mitra pada aplikasi SIPLah;
- 13) Melakukan koordinasi dengan Tim PDM 06 Pusat tentang hasil capaian survei persepsi positif Stakeholder Daerah dan Satuan Pendidikan terhadap urgensi Kebijakan Pelaksanaan AN dan Sulingjar;
- 14) Melakukan koordinasi lebih lanjut bersama Dinas dan mitra pendidikan (IGTKI Provinsi dan Pokja Bunda PAUD) dalam proses mengawal Gerakan Transisi PAUD SD;
- 15) Komunikasi secara intens dengan sekolah binaan melalui WAG dan komunikasi secara pribadi dengan sekolah binaan; dan
- 16) Berkonsultasi dan berkoordinasi dengan PDM 11 Pusat untuk langkah-langkah dan kegiatan yang akan dilaksanakan

f. Strategi/Tindak Lanjut

- 1) Advokasi secara kontinu kepada pemda untuk melanjutkan Program Sekolah Penggerak Advokasi ke sekolah untuk berbagi ke sekolah lain
- 2) Melakukan kegiatan bimtek kepada operator BOSP yang bersedia mengimbaskan dan membuat group operator untuk berkoordinasi lebih lanjut
- 3) Membuat grup pemantik bersama daerah berkoordinasi dengan PPK Perubahan bentuk kegiatan
- 4) Memberikan Pemahaman kepada Satuan Pendidikan terkait 8 Aksi Transformasi Satuan Pendidikan
- 5) Melakukan Pendampingan secara lebih Intensif kepada OPD Daerah Bidang Pendidikan yaitu BAPPEDA dan Dinas Pendidikan
- 6) Perlunya intens koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Pendidikan terkait Program PDM-05 (GP Menjadi KSPS, PPDB, dan PPKSP)
- 7) Berkordinasi dengan petugas pelaksana MonAd dan Monev untuk dapat menyelesaikan pengiputan instrumen secara online
- 8) Mencari materi konten / bahan publikasi melalui WA Grup PIC PDM 07 dan Sosial media Setdijen Paud Dasmen
- 9) Secara intens dengan Dinas Terkait Memberikan pertanyaan pemantik pada saat pelaksanaan kegiatan guna mendapatkan feedback kegiatan

- 
- 10) Memetakan sekolah yang diintervensi bisa dijangkau Bekerjasama dengan Agen Penggerak Transformasi Pendidikan
 - 11) Berkoordinasi ke pemda untuk mendorong guru-guru mengikuti dan menyelesaikan topik pendidikan berjenjang pendidikan inklusif tingkat dasar di PMM
 - 12) Membuat Target lebih Spesifik dan disesuaikan dengan karakteristik daerah dan bukan disamakan untuk seluruh kabupaten kota

2. Sasaran Kegiatan (SK) 2: Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara

Peningkatan tata kelola juga merupakan salah satu prioritas BPMP Provinsi Kalimantan Utara pada Renstra tahun 2020-2024 untuk mentransformasi pelayanan publik, yang antara lain tercermin dari membaiknya tingkat implementasi reformasi birokrasi, perampingan struktur organisasi, serta peningkatan kualitas layanan publik. BPMP Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan berbagai strategi dan inovasi untuk perbaikan pelayanan publik, antara lain dengan terus melakukan upaya peningkatan pelayanan publik, pemenuhan kebutuhan pendukung terhadap implementasi ZI WBK, dan pembenahan sistem akuntabilitas instansi mulai dari pembenahan kinerja pegawai maupun kinerja instansi khususnya BPMP Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, kebijakan Merdeka Belajar yang diusung oleh Kemendikbudristek pada tahun 2020-2024 juga ditujukan untuk memperbaiki tata kelola pendidikan khususnya di wilayah provinsi Kalimantan Utara yang sebelumnya sangat kompleks menjadi lebih sederhana, misalnya pemanfaatan asesmen nasional pendidikan untuk memperbaiki kualitas satuan pendidikan dan penyederhanaan kurikulum berbasis kebutuhan peserta didik.

Peningkatan tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja kegiatan (IKK). Berikut ini disajikan capaian kedua IKK dari sasaran kegiatan 1 dari BPMP Provinsi Kalimantan Utara :

a. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2.1: Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP): SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ditetapkan pembobotan nilai dari 4 komponen SAKIP sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	30%
2	Pengukuran Kinerja	30%
3	Pelaporan Kinerja	15%
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%

Berikut ini juga kami tampilkan Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan Indikator Kinerja, perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, dan perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target akhir renstra.

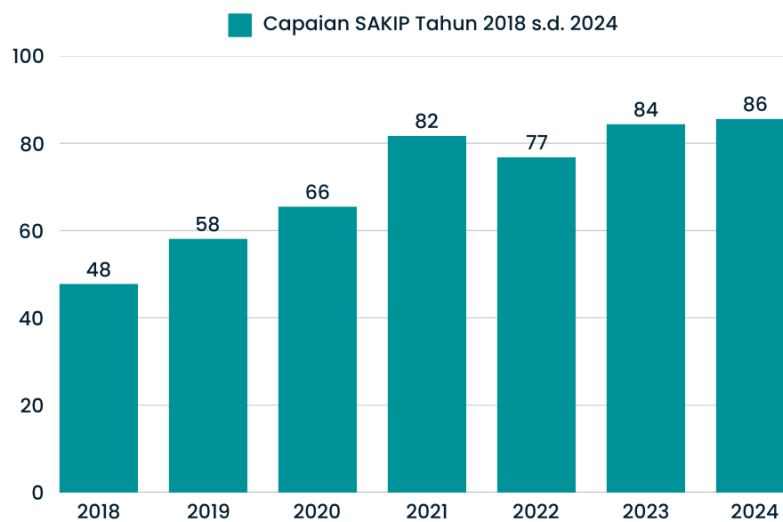


Data diatas menggambarkan perbandingan capaian sakip pada tahun 2024 dengan capaian sakip tahun 2024 dimana pada tahun 2023 capaian sakip adalah A dengan akumulasi bobot sebesar 84,40 sedangkan capaian tahun 2024 adalah A dengan bobot sebesar 85,60 sehingga dapat diketahui bahwa sakip BPMP Kaltara telah meningkat di tahun 2024. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target tahun berjalan, maka dapat diketahui bahwa BPMP Kaltara juga telah mencapai bahkan melampaui target yang telah diperjanjikan. Sedangkan jika capaian tahun berjalan dibandingkan dengan target akhir renstra, maka diketahui bahwa target akhir renstra untuk IKK 2.1 telah tercapai di tahun 2024. Adapun rincian capaian tiap indikator penilaian Sakip berdasarkan LHE Sakip yang dinilai oleh inspektorat Kemdikbudristek dapat dirincikan sebagai berikut:

Capaian Sakip BPMP Provinsi

No	Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30%	25.5
2	Pengukuran Kinerja	30%	26.1
3	Pelaporan Kinerja	15%	12.75
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	21.25
Predikat		A	85.6

Kalimantan Utara dari tahun ke tahun mengalami progres peningkatan yang sangat baik, namun pada tahun 2022 ini mengalami penurunan dikarenakan beberapa permasalahan tersebut diatas. Siklus capaian Sakip BPMP Provinsi Kalimantan Utara dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik berikut:



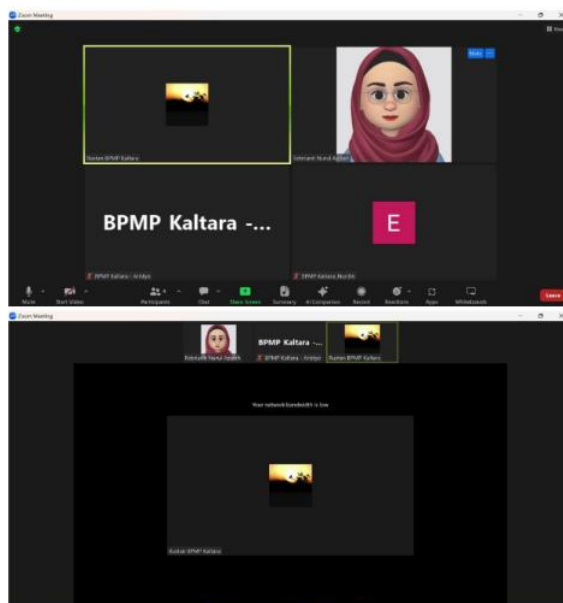
Berdasarkan data diatas, maka diketahui bahwa nilai sakip BPMP Kaltara dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan walaupun di tahun 2022 sempat mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2024 ini kembali naik lagi menjadi A bahkan melebihi bobot nilai pada tahun 2023.

b. Program dan Kegiatan Pendukung IKK 2.1

a) Rapat Reviu Renstra Tahun 2024



b) Rapat Penyusunan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja 2024 dan Tindak Lanjut LHE Sakip 2023



SPASIKITA | eKINERJA

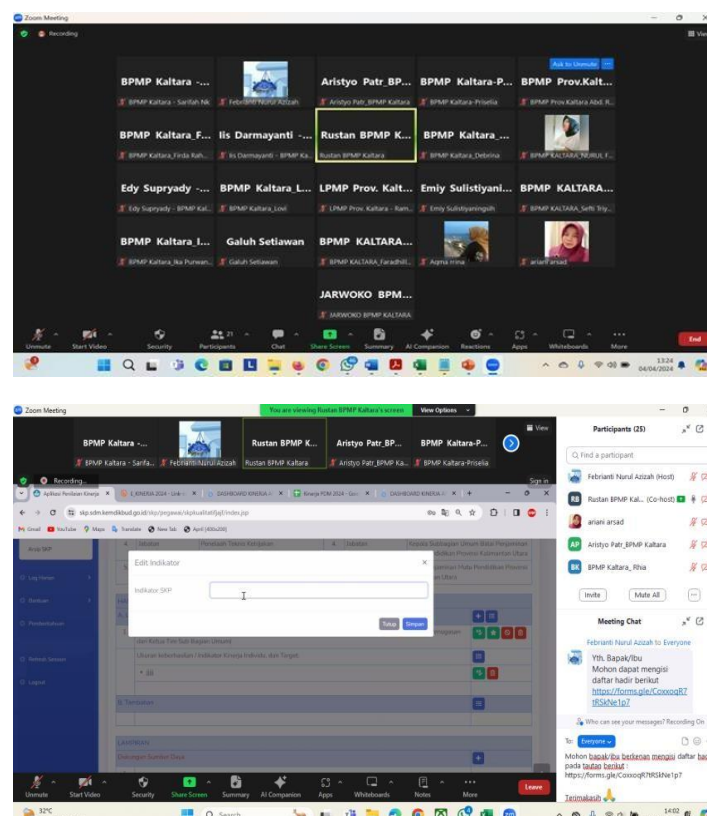
Rencana Aksi Pencapaian Indikator Perjanjian Kinerja

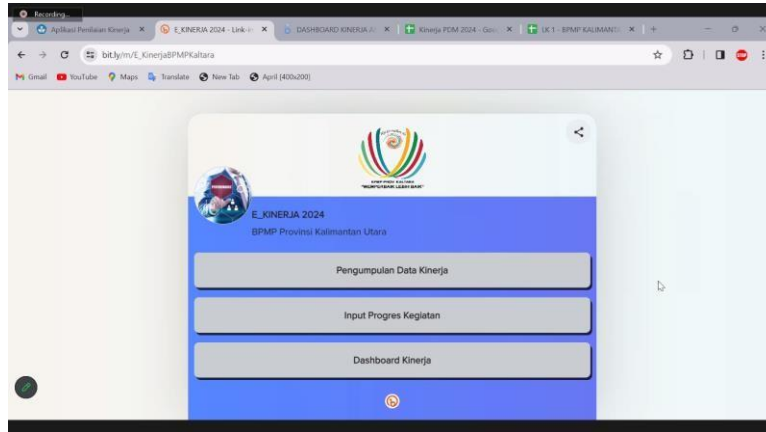
Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target Triwulan			
				I	II	III	IV
IK 1.1) Meningkatkan aksi pendidikan (program PALE), Diklat, dan Ditizen	IK 1.1.1) Peningkatan nilai pendidikan (PALE) yang meningkat indeks pendidikannya	3,02	%	0	0	0	3,02
IK 1.2) Meningkatkan mutu pendidikan (program PALE), Diklat, dan Ditizen	IK 1.2.1) Peningkatan Perilaku dan Kebiasaan (Maka yang meningkat rapor pendidikannya Diklat dan Ditizen)	100	%	0	0	0	100
IK 2.1) Meningkatkan tata kelola Sakip (Pengantar Mutu Pendidikan Proses Budivestasi Ufah)	IK 2.1.1) Peningkatan Tindakan Pengawasan Mutu Pendidikan Proses Budivestasi Ufah	A	Produkt	-	-	-	A
IK 3.1) Meningkatkan tata	IK 3.1.1) Meningkatkan Anggaran atau						

c) Pelaksanaan Reviu Lakin Tahun 2023

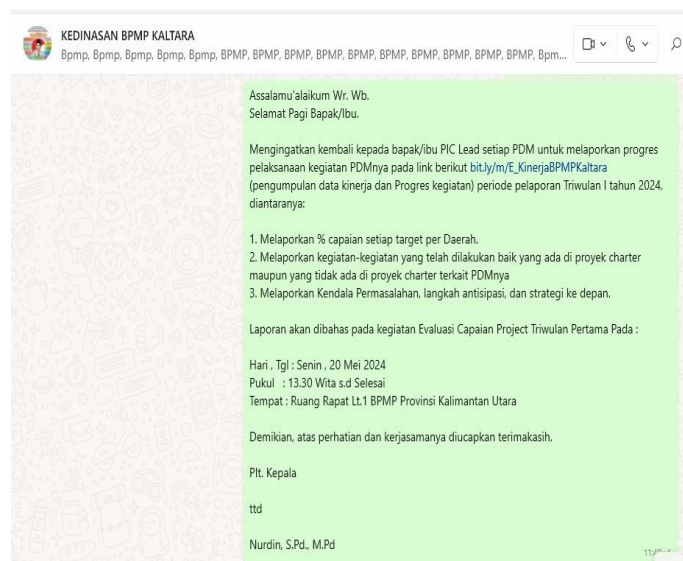


d) Sosialisasi Perjanjian Kinerja 2024, Pengisian Dasbor E-Kinerja PDM, dan Penyusunan SKP PNS





e) Evaluasi Capaian Project



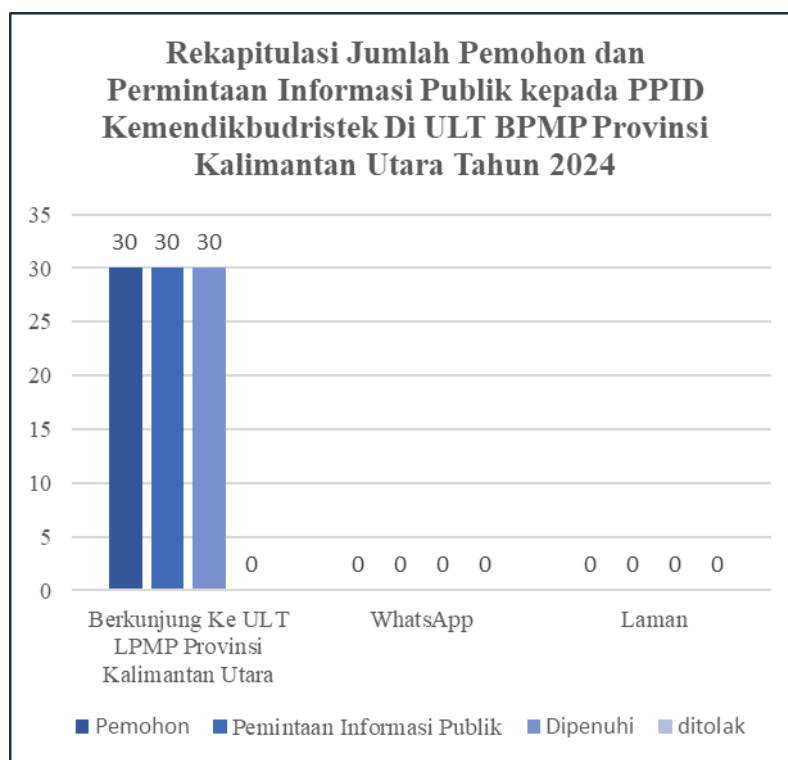
f) Pelaksanaan layanan informasi publik.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi. Oleh karena itu, manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap

penyelenggaraan negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

• Jumlah Pemohon Informasi Publik

Dari total 37 Kunjungan yang masuk melalui ULT BPMP Provinsi Kalimantan Utara, pemohon informasi publik kepada PPID Kemendikbudristek di ULT BPMP Provinsi Kalimantan Utara baik secara tertulis maupun tidak tertulis sejak 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 berjumlah 30 pemohon. Dari 30 pemohon tersebut, jumlah keseluruhan informasi yang diminta sebanyak 30 permintaan dan dipenuhi 30 informasi serta permintaan informasi yang ditolak sebanyak 0 permintaan. Berikut rekapitulasi jumlah pemohon dan permintaan informasi publik kepada PPID Kemendikbudristek di ULT BPMP Provinsi Kalimantan Utara sejak 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2024:



• Perkembangan Jumlah Pemohon Informasi Publik

Berikut adalah perkembangan jumlah pemohon informasi publik ke PPID Kemendikbud di ULT BPMP Provinsi Kalimantan Utara dari Tahun 2019 sampai dengan 2024:

Tahun	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Perkembangan Jumlah Pemohon	5	56	67	231	84	30



g) PDM-05 Kemitraan Daerah

Kebijakan Merdeka Belajar merupakan kebijakan yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI kabinet Indonesia Maju, Nadiem Anwar Makarim. Sampai dengan bulan Desember 2023 sudah ada 26 episode kebijakan Merdeka belajar yang telah diluncurkan. BPMP Provinsi Kalimantan Utara sebagai salah satu UPT Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi merupakan kepanjangan tangan pusat dalam meneruskan kebijakan kepada Pemerintah Daerah. Dalam menjalankan tugas tersebut, BPMP Provinsi Kalimantan Utara menjalin kemitraan dengan beberapa stakeholder di daerah diantaranya yang paling utama yakni dengan Dinas Pendidikan baik Provinsi, Kabupaten maupun Kota. Di wilayah Provinsi Kalimantan Utara terdapat satu Dinas Pendidikan Provinsi, 4 Dinas Pendidikan Kabupaten dan satu Dinas Pendidikan Kota. Untuk mengawal tersampainya kebijakan pusat terkait Pendidikan, maka BPMP provinsi Kalimantan Utara perlu melakukan pengembangan kompetensi SDM UPT. Hal itu bertujuan agar SDM BPMP Provinsi Kalimantan Utara memiliki kemampuan dalam advokasi dan fasilitasi, serta memiliki pemahaman yang baik terkait program-program Kemendikbudristek. Dengan demikian, informasi terkait program prioritas dapat tersampaikan dengan baik dan tepat sasaran.

• Objektif dan Target PDM

No	Objektif UPT	Target UPT
1.	100% Kepala BBPMP/BPMP dan Kabag/Kasubbag Umum melaksanakan coaching dan mentoring ditahun 2024	2 kali Kepala BPMP dan Kabag/Kasubbag Umum melaksanakan coaching dan mentoring ditahun 2024
2.	100% BBPMP/BPMP melaksanakan Komunitas Belajar rutin untuk internal dan antar BBPMP/BPMP ditahun 2024	1 kali BPMP melaksanakan Komunitas Belajar rutin untuk internal dan antar BBPMP/BPMP ditahun 2024

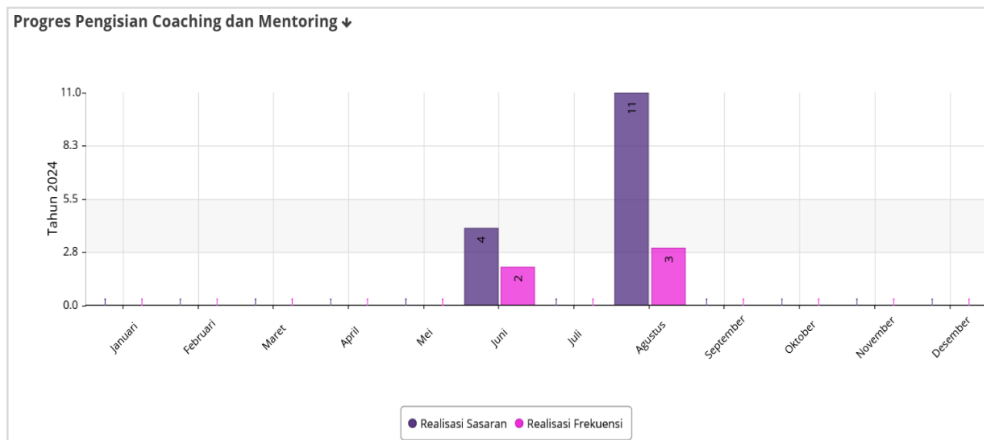
• Capaian PDM 05 – Kemitraan Daerah

- ❖ 100% Kepala BBPMP/BPMP dan Kabag/Kasubbag Umum melaksanakan coaching dan mentoring ditahun 2024. Mengacu pada objektif UPT di atas, dimana target Kepala BPMP dan Kabag/Kasubbag Umum melaksanakan



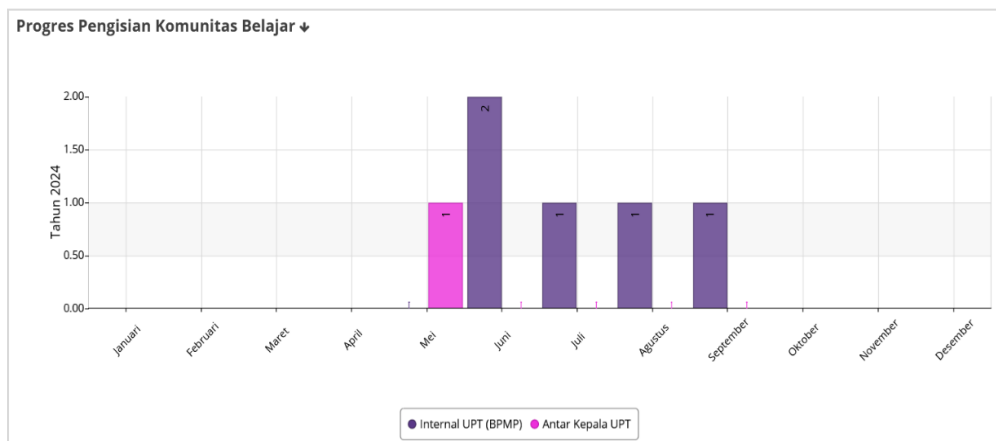


coaching dan mentoring sebanyak dua kali di tahun 2024 telah tercapai bahkan melebihi target, sebagaimana dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik di atas menunjukkan bahwa sudah dilaksanakan coaching mentoring pada bulan Juni sebanyak dua kali dengan sasaran 4 orang pegawai, dan bulan agustus sebanyak tiga kali dengan sasaran 11 orang pegawai.

- ❖ 100% BBPMP/BPMP melaksanakan Komunitas Belajar rutin untuk internal dan antar BBPMP/BPMP ditahun 2024. Mengacu pada objektif UPT di atas, dimana BPMP melaksanakan Komunitas Belajar rutin untuk internal dan antar BBPMP/BPMP ditahun 2024 sebanyak satu kali sudah tercapai, bahkan melebihi target, dengan grafik sebagai berikut.



Grafik Pelaksanaan Komunitas Belajar UPT tahun 2024.

Grafik di atas menunjukkan bahwa komunitas belajar antar kepala UPT sudah dilaksanakan pada bulan mei sebanyak satu kali, sedang komunitas belajar internal UPT sudah dilaksanakan sebanyak lima kali dengan rincian : bulan juni sebanyak dua kali, bulan juli sebanyak satu kali, bulan agustus sebanyak satu kali, dan bulan september sebanyak satu kali.

- **Kegiatan yang telah Dilakukan**

- ❖ **Menyelenggarakan Pelatihan Mentoring untuk Kepala BBPMP/BPMP.**

Kegiatan ini seyogyanya dilaksanakan oleh pusat dengan mengundang kepala BBPMP/BPMP.

- ❖ **Menyelenggarakan Pelatihan Mentoring untuk Kasubbag Umum/Kabag Umum BBPMP/BPMP.**

Kegiatan ini juga dilaksanakan oleh pusat dengan mengundang Kasubbag Umum/Kabag Umum BBPMP/BPMP.

- ❖ **Menyelenggarakan Coaching Mentoring SDM UPT.**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode tatap muka (luring) pada tanggal 22 s.d. 24 Juli 2024. Pertemuan tatap muka difasilitasi oleh BPMP Provinsi Kalimantan Utara dengan rangkaian kegiatan dimulai dengan pembukaan oleh Plt. Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber dari pusat (A33) dan diakhiri dengan diskusi, pemberian saran, dan tanya jawab. Tujuan kegiatan ini adalah:

- Meningkatkan kompetensi dan mengembangkan potensi SDM BPMP Provinsi Kalimantan Utara;
- Meningkatkan motivasi dan kinerja SDM BPMP Provinsi Kalimantan Utara serta Menyiapkan SDM untuk menghadapi tantangan;
- Mengoreksi perilaku yang tidak sesuai, memperbaiki kinerja, dan memberikan keterampilan yang diperlukan pegawai untuk mencapai tujuan;



- Membangun budaya belajar yang berkelanjutan.

Berikut dokumentasi kegiatan Coaching Mentoring SDM UPT.





Coaching/mentoring pegawai yang dilakukan oleh kepala/kasubbag umum. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang rapat pimpinan dan di ruang pimpinan. Kepala/kasubbag umum melakukan coaching kepada pegawai baik secara individu maupun kelompok dengan topik kinerja personal atau kinerja kelompok. Berikut dokumentasinya.



❖ Penjaringan informasi komunitas belajar.

Penjaringan informasi komunitas belajar ini dilaksanakan dengan mengundang kepala BPMP di seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaannya, kepala-kepala BPMP berbagi praktik baik terkait kegiatan yang telah dilaksanakan di UPT nya. Hal tersebut agar dapat menginspirasi rekan sejawat sebagai bentuk solusi terhadap masalah serupa yang dihadapi pada tim kerja dan tim PDM masing-masing. Dengan berbagi praktik baik tersebut akhirnya dapat terjaring informasi yang diperlukan sebagai bahan perencanaan untuk melaksanakan komunitas belajar di BPMP Provinsi Kalimantan Utara terkait tema atau materi apa yang akan ditentukan dalam komunitas belajar internal. Berikut dokumentasi kegiatan Penjaringan informasi komunitas belajar.




- ❖ Pelaksanaan komunitas belajar intern UPT. Komunitas belajar di internal UPT sudah dilaksanakan lima kali selama tahun 2024. Komunitas belajar di BPMP Provinsi Kalimantan Utara memiliki nama yakni SKOM (Sharing Komunikasi). Materi yang dibahas dalam kombel ini bervariasi antara lain : Transisi PAUD yang menyenangkan, IKM, Pemulihan Pembelajaran, Kepegawaian dan Persuratan.



h) PDM-07 Publikasi dan Komunikasi

Di samping Kebijakan Merdeka Belajar dan program-program prioritas untuk mewujudkan visi dan misi dari Kemendikbudristek, kebijakan ini harus diinformasikan dan dipublikasikan kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut BPMP Provinsi Kalimantan Utara sebagai perpanjangan



Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah berperan penting turut menginformasikan dan mempublikasikan terkait Program Kebijakan Merdeka Belajar dan Program Prioritas. BPMP Provinsi Kalimantan Utara menggunakan berbagai media untuk mempublikasikan program – program tersebut diantaranya melalui laman website, youtube, Instagram, Facebook, twitter, dan tiktok. Adapun konten yang telah disuguhkan terkait Program Prioritas seperti Kurikulum Merdeka, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Program Sekolah Penggerak, Kampanye Sekolah Sehat, Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan, Rapor Pendidikan, Perencanaan Berbasis Data, Pemulihan Pembelajaran, Pendidikan Inklusif, dan Transformasi Digital. PDM 07 sebagai Tim Publikasi dan Dokumentasi juga berupaya memberikan informasi kepada Masyarakat terkait program – program yang telah dilaksanakan oleh BPMP Provinsi Kalimantan Utara.

a) Objektif dan Target PDM

No	Objektif UPT	Target UPT
1.	Dalam 1 tahun minimal terdapat 48 konten program prioritas yang diunggah	48 Konten
2.	Dalam 1 tahun minimal ada 2 komunitas yang dilibatkan dalam komunikasi program prioritas	2 Komunitas
3.	Dalam 1 tahun minimal ada 2 output konten program prioritas yang dimedia placementkan	2 Konten
4.	Dalam 1 tahun minimal ada 5 kali webinar yang diadakan UPT	5 Webinar
5.	Dalam 1 tahun minimal ada 2 kali podcast yang dilaksanakan UPT	2 Podcast

b) Capaian

- Dalam 1 tahun minimal terdapat 48 konten program prioritas yang diunggah

No	Media Publikasi	Link Akses
1.	Facebook	https://www.facebook.com/bpmpkaltara/
2.	Instagram	https://www.instagram.com/bpmp.kaltara/

No	Media Publikasi	Link Akses
3.	Youtube	https://www.youtube.com/@BPMPProvinsiKalimantanUtara/
4.	Tiktok	https://www.tiktok.com/@bpmpkaltara
5.	Laman	http://bpmpkaltara.kemdikbud.go.id/

• **Dalam 1 tahun minimal ada 2 komunitas yang dilibatkan dalam komunikasi program prioritas**

Hingga Desember 2024, capaian target ini telah mencapai 100% karena lembaga telah melibatkan 2 komunitas dalam mengkomunikasikan program prioritas yaitu Enggang Benuanta dan APTP (Agen Penggerak Transformasi Pendidikan).

- ❖ Enggang Benuanta merupakan komunitas pertama yang bekerjasama dengan BMPM Provinsi Kalimantan Utara yang terdiri dari Duta Teknologi dan Guru Inspiratif yang ada di Kalimantan Utara yang melaksanakan agenda rutin berbagi ilmu dan pengetahuan serta mengkomunikasikan program prioritas ke seluruh stakeholder melalui *live* Zoom yang dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam sebulan. Berikut beberapa contoh program prioritas yang telah dikomunikasikan oleh Enggang Benuanta dan dipublikasikan melalui youtube lembaga:

- Enggang Edisi 100 - Peningkatan Pemanfaatan PMM di Kaltara Kiat Mudahnya Menyusun Aksi Nyata di PMM

<https://www.youtube.com/watch?v=3us3cTRZtqI>



- Enggang Edisi 101 - Penguatan Kombel dengan berbagai Inovasi

<https://www.youtube.com/live/Etg7cEHJTM0?si=cgw-sTTrX1LrJM3>



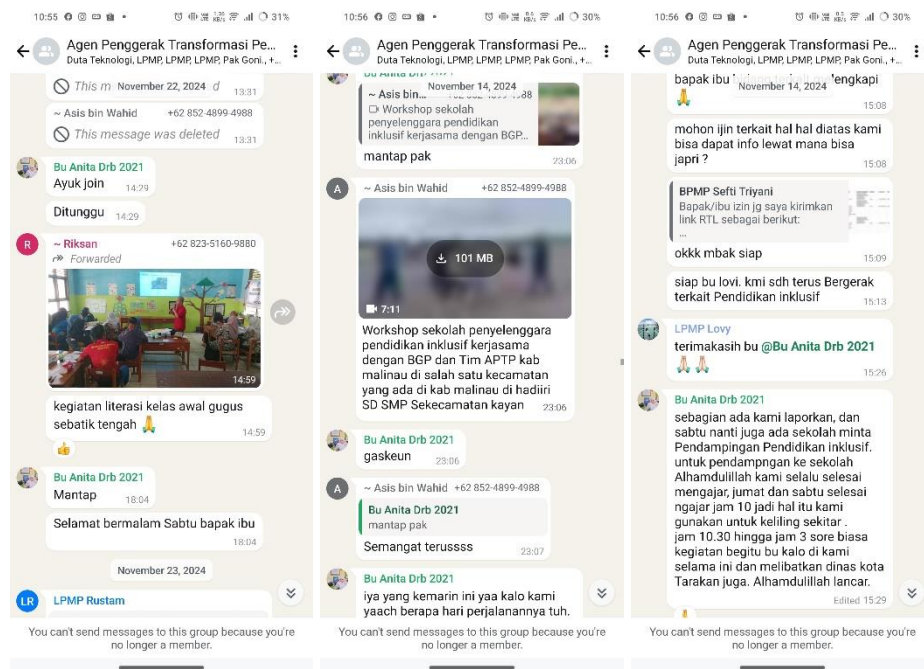
- Enggang Benuanta Edisi 102 - Bergema (bergerak Bersama) Penguatan Kombel, PMM dan AI
<https://www.youtube.com/live/F3AHCW-MVdw?si=bXdu9QxcpWPcYKWP>.



❖ APTP (Agen Penggerak Transformasi Pendidikan)

Agen Penggerak Transformasi Pendidikan atau yang lebih dikenal APTP merupakan komunitas selanjutnya yang bekerjasama dengan BPMP Provinsi Kalimantan Utara dalam mengkomunikasikan program prioritas Kemendikbudristek kepada stakeholder secara langsung hingga ke daerah 3T. Komunitas ini terdiri atas PIC PDM yang ada di BPMP Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Pendidikan Kab/Kota/Provinsi, Kepala Sekolah dan Guru Satuan Pendidikan. Hasil mengkomunikasikan program prioritas di wilayah sasaran kemudian dilaporkan oleh Tim APTP melalui grup Whatsapp. Berikut beberapa bukti *screenshoot* pelaporan Tim APTP kepada BPMP Provinsi Kalimantan Utara:





- Dalam 1 tahun minimal ada 2 output konten program prioritas yang dimedia placementkan

Hingga Desember 2024, PDM 07 telah mencapai target 100% dengan 2 output konten program prioritas yang telah di media placementkan. Kedua konten tersebut meliputi:

- ❖ Konten 1



Konten pertama yang dipublikasikan ke media adalah konten terkait pelaksanaan Bimtek Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP) yang digelar oleh BPMP selama 3 hari sejak tanggal 25 hingga 27 Juli 2024. Konten tersebut dipublikasikan melalui media online dengan link sebagai berikut <https://katanalar.com/cegah-kekerasan-di-satuan-pendidikan-bpmp-kaltara-gelar-bimtek-ppksp/> dan <https://kaltaraone.com/2024/07/26/peksos-dan-dinsos-pm-kota-tarakan-ikuti-bimtek-ppksp/>.

❖ Konten 2



Konten kedua yang dipublikasikan ke media adalah konten terkait pelaksanaan Forum Pemangku Kepentingan yang digelar oleh BPMP selama 3 hari sejak tanggal 5 s.d. 7 Agustus 2024. Konten tersebut dipublikasikan melalui media cetak dan media online oleh radar tarakan. Konten tersebut dipublikasikan melalui media online dengan link sebagai berikut <https://radartarakan.jawapos.com/tarakan/2414948152/bpmp-kaltara-gelar-forum-pemangku-kepentingan-untuk-mendorong-transformasi-pendidikan>.

• Dalam 1 tahun minimal ada 5 kali webinar yang diadakan UPT

Hingga Desember 2024, PDM 07 telah mencapai target 100% pada capaian webinar yang diadakan UPT. Capaian 100% didapat setelah melaksanakan webinar sebanyak 5 kali. Adapun webinar yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

❖ Webinar 1

Webinar pertama dilaksanakan pada hari Sabtu, 30 Maret 2024 dengan tema **”Seri Webinar Best Practice Penerapan Pendidikan Inklusif”**. Webinar tersebut dapat diakses melalui link https://www.youtube.com/live/I9-K_0k9IXc?feature=shared.



❖ Webinar 2

Webinar selanjutnya dilaksanakan pada hari Selasa, 25 Juni 2024 dengan tema **"Best Practice Perwujudan P5 dalam Kumer bersama Guru berprestasi Nasional dan Inovasi"**. Webinar tersebut dapat diakses melalui link

<https://www.youtube.com/watch?v=sH7ec6NUREk>.



❖ Webinar 3

Webinar selanjutnya dilaksanakan pada hari Rabu, 26 Juni 2024 dengan tema **"Pemanfaatan konten PMM dalam peningkatan Literasi dan Numerasi"**. Webinar tersebut dapat diakses melalui link <https://www.youtube.com/live/yTb1AQhAbdQ>.



❖ Webinar 4

Webinar selanjutnya dilaksanakan pada hari Kamis, 28 November 2024 dengan tema **"Menciptakan Lingkungan Satuan Pendidikan yang Aman Tanpa Kekerasan"**. Webinar tersebut dapat diakses melalui link: <https://www.youtube.com/live/Q7PLEwJN2Pg>.





❖ Webinar 5

Webinar terakhir dilaksanakan pada hari Selasa, 10 Desember 2024 dengan tema **"Emotional Intelligence for Parenting: Pola Asuh yang Tepat untuk Membangun Emotional Intelligence pada Generasi Alpha"**. Webinar tersebut dapat diakses melalui link: https://www.youtube.com/live/vcirckZ_F0U.



- **Dalam 1 tahun minimal ada 2 kali podcast yang dilaksanakan UPT**

Hingga Desember 2024, PDM 07 telah mencapai 100% capaian Podcast. Hingga saat ini, PDM 07 telah melaksanakan podcast sebanyak 5 kali, hal ini bahkan melebihi target capaian lembaga. Adapun pelaksanaan podcast yang telah dipublikasikan melalui youtube lembaga sebagai berikut:

No	Tema	Narasumber	Host	Waktu Pelaksanaan
1.	Mengapa Perlu Adanya TPPK di Satuan Pendidikan	Dr. Arif Jauhar Tontowi, S.T., MM. DPPA Provinsi Kalimantan Utara	Sefti Triyani, A.Md.	Januari 2024
	Dipublikasikan pada kanal YouTube resmi BPMP Provinsi Kalimantan Utara dengan tautan: https://youtu.be/XBATPuNQYMk?si=oaMIzJryCstFJ49m			
2.	Lentera Literasi : Menapaki Jalan Menuju Masa Depan	Pranika Dian Dini, S.Pd. Guru SDN 008 Tanjung Palas Timur	Sefti Triyani, A.Md.	Juni 2024
	Dipublikasikan pada kanal YouTube resmi BPMP Provinsi Kalimantan Utara dengan tautan: https://youtu.be/HVDBSCpjTUc?si=W5khaUnZvBJ_H8la			
3.	Seberapa Penting Sih Pengelolaan Kinerja di PMM	Herlambang Pamungkas, S.Pd. BPMP Provinsi Kalimantan Utara	Tirani Ulumuzzahra Alkausar Polanagau, S.IP.	Juli 2024
	Dipublikasikan pada kanal YouTube resmi BPMP Provinsi Kalimantan Utara dengan tautan: https://youtu.be/NJeXGTEVNXE?si=3ZPanZE5CdLrUD5R			
4.	Menggapai Pendidikan Setara – Mengenal Lebih Dekat Pendidikan	Dr. H. Yaswardi, M.Si Widyapraja Ahli Utama Sesditjen PAUD, Dikdas,	Tirani Ulumuzzahra Alkausar	September 2024

No	Tema	Narasumber	Host	Waktu Pelaksanaan
	Inklusif	dan Dikmen	Polanagau, S.IP.	
	<p>Dipublikasikan pada kanal YouTube resmi BPMP Provinsi Kalimantan Utara dengan tautan:</p> <p>https://youtu.be/2CsRBjyBpsk?si=9zxZLA8sJhMYQ19y</p>			
5.	Kolaborasi Pendidikan Untuk Bumi Benuanta	Agus Prayitno INOVASI Kaltara	Sefti Triyani, A.Md.	Oktober 2024
	<p>Dipublikasikan pada kanal YouTube resmi BPMP Provinsi Kalimantan Utara dengan tautan:</p> <p>https://youtu.be/6M4IIn1x14I?si=CCaKeFvpo0fSRebz</p>			

c) Kegiatan yang telah Dilakukan

Berikut kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PDM 07 UPT:

- Mengikuti Sosialisasi dan Koordinasi strategi dan komunikasi protas dengan PDM 7 UPT, Terciptanya koordinasi strategi komunikasi Protas dengan PDM 7 dan UPT, serta Penyusunan strategi komunikasi kegiatan/event yang diadakan oleh PDM 07 Pusat dengan mengundang seluruh PDM 07 UPT.



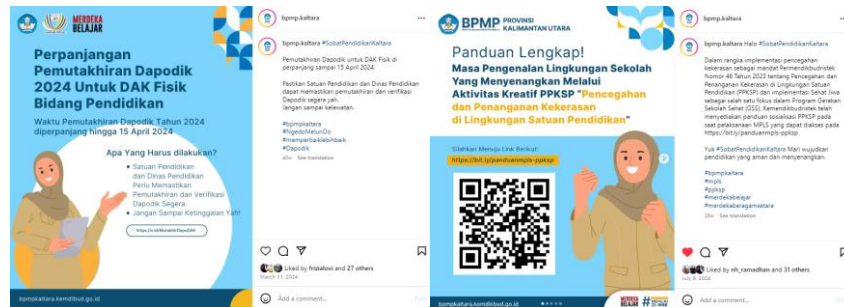
- Telah dilakukan penyesuaian visual guideline media sosial UPT berdasarkan visual guideline yang disepakati unit utama dan terlaksananya penyesuaian atau penyesuaian visual guidelines medsos UPT dengan Pusat yang kemudian diimplementasikan pada spanduk kegiatan internal lembaga dan juga berbagai postingan lembaga.



- Terlaksananya kegiatan Penyusunan alur cerita/substansi konten program prioritas yang diadakan oleh BPMP Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 07 s.d. 09 Oktober 2024 bertempat di Hotel Diamond Tarakan dihadiri oleh PIC dan perwakilan anggota PDM BPMP Provinsi Kalimantan Utara dengan tujuan memastikan keselarasan konten yang diproduksi selaras dengan tujuan dan sasaran program kebijakan Merdeka Belajar serta mengevaluasi secara menyeluruh terhadap kualitas konten dari segi isi, bahasa, visual, dan penyampaian.



- Melaksanakan Produksi konten program prioritas dan melakukan Review konten program prioritas.



- Melaksanakan Webinar dalam rangka Edukasi dan Advokasi Program Prioritas sebanyak 5 kali di tahun 2024 dengan mengangkat berbagai tema Program Prioritas dan mengundang berbagai narasumber yang kompeten di bidangnya.



- Melaksanakan Podcast dalam rangka Edukasi dan Advokasi Program Prioritas sebanyak 5 kali di tahun 2024 dengan mengangkat berbagai tema Program Prioritas dan mengundang berbagai narasumber yang kompeten di bidangnya



- Bekerjasama dengan berbagai Media Placement lokal dalam rangka kampanye Program Prioritas.



- Mengikuti Koordinasi transformasi tim komunikasi satker dan UPT yang dilaksanakan oleh PDM 07 Pusat dengan mengundang PDM 07 UPT.



- Mengikuti Pelatihan teknis videografi, desain grafis, dan teknik jurnalisme yang dilaksanakan oleh PDM 07 Pusat dengan mengundang PDM 07 UPT.



- Mengikuti kegiatan koordinasi dan peningkatan kompetensi SDM petugas helpdesk serta Refleksi Petugas Helpdesk yang dilaksanakan oleh PDM 07 Pusat mengundang Tim PDM 07 UPT dan Tim Helpdesk UPT.



c. Kendala/Permasalahan

- 1) Kendala yang dihadapi sampai saat ini adalah masih kurangnya SDM yang memahami dengan baik proses bisnis dari sakip sehingga penanganan terkait sakip tidak terlalu optimal; dan
- 2) Kemudian jumlah pegawai yang sedikit dibandingkan kompleksitas pekerjaan pada satker membuat kurang fokusnya pegawai yang ditugaskan untuk menangani sakip.

d. Langkah Antisipasi


- 1) Mengikutkan beberapa pegawai pada kegiatan pelatihan Sakip;
- 2) Memaksimalkan kemampuan pegawai yang ada untuk menjalankan pekerjaan yang kompleks tersebut

e. Strategi yang akan Dilakukan

- 1) Upaya yang bisa dilakukan kedepannya terkait kendala tersebut adalah memberikan treatment khusus kepada beberapa pegawai untuk peningkatan kapasitas terkait sakip dengan menugaskan melakukan benchmarking ke satker dengan nilai sakip terbaik;
- 2) Menugaskan untuk mengikuti pelatihan sakip; dan Terkait jumlah pegawai agar mengupayakan pengajuan rekrutmen untuk jabatan-jabatan yang masih kosong ke unit utama

f. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2.2: Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA/KL

Kinerja Anggaran dalam PMK No. 214 /PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L dievaluasi dalam rangka pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan



Kinerja Anggaran. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek konteks, aspek implementasi dan aspek manfaat. Penilaian Kinerja dilakukan atas 2 indikator yaitu:

- 1) Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
- 2) Indikator Kinerja atas hasil pelaksanaan anggaran (EKA)

IKPA Berkontribusi 50% dalam perhitungan nilai Kinerja dan EKA 6%. Namun pada tahun 2023 IKPA dan EKA berkontribusi terhadap NKA masing-masing sebesar 50%. Bobot masing-masing variabel pada Aspek Implementasi sebagaimana dimaksud terdiri atas: capaian keluaran, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan penyerapan anggaran. Sesuai dengan PMK tersebut, Nilai Kinerja Anggaran dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

Nilai Kinerja Anggaran	Kategori
>90%	Sangat Baik
>80%-90%	Baik
>60%-80%	Cukup
>50%-60%	Kurang
<%50	Sangat Kurang

Berdasarkan data dari SMART Kemenkeu dan OM SPAN diketahui bahwa:

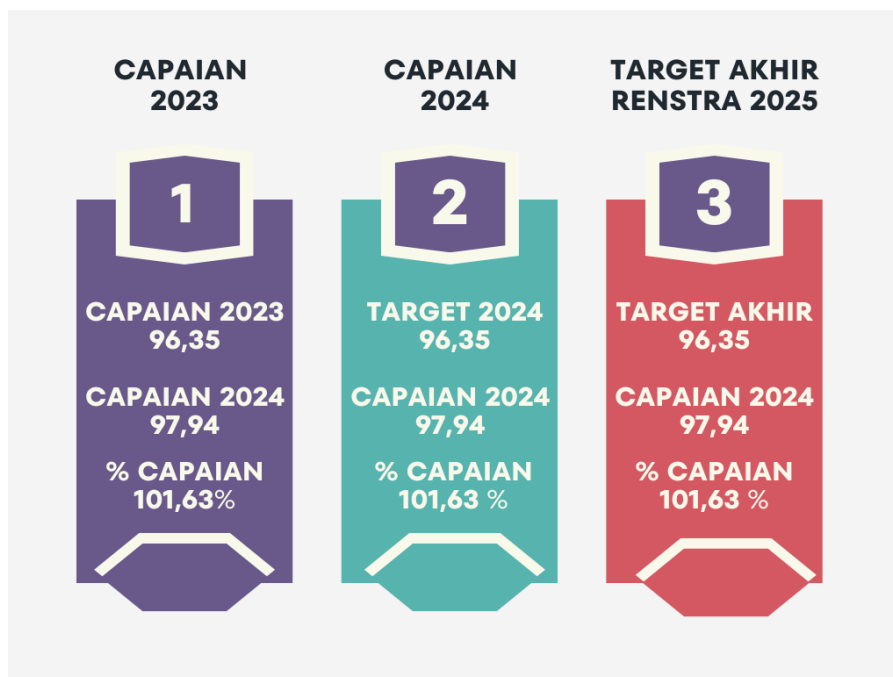
Nilai EKA BPMP Kaltara = 100
Nilai IKPA BPMP Kaltara = 95,87

Maka dapat diketahui nilai kinerja anggaran (NKA) BPMP Kaltara tahun 2023 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{NKA} &= (50\% \times \text{EKA}) + (50\% \times \text{IKPA}) \\ &= 50,00 + 47,93 \\ &= 97,94 \end{aligned}$$

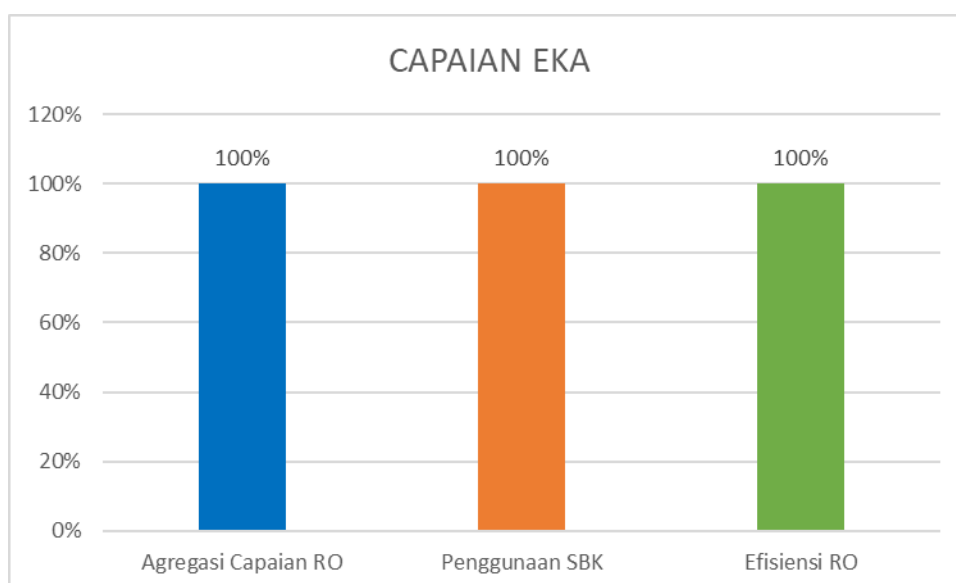
Setelah melalui proses perhitungan menggunakan formula diatas, maka ditemukan bahwa capaian IKK 2.2 terkait NKA tahun 2023 berdasarkan yakni sebesar 97,94.

Berikut ini diuraikan data perbandingan capaian Indikator Kinerja 2.2 yaitu “Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara” berdasarkan data capaian EKA dari SMART Kemenkeu dan data IKPA dari OMSPAN. Perbandingan yang kami tampilkan diantaranya perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan Indikator Kinerja, perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, dan perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target akhir renstra:



Data diatas menggambarkan perbandingan capaian NKA pada tahun 2023 dengan capaian sapk tahun 2024 dimana pada tahun 2023 capaian NKA adalah sebesar 96,35 sedangkan capaian tahun 2024 adalah sebesar 97,94, sehingga dapat diketahui bahwa NKA BPMP Kaltara telah meningkat di tahun 2024. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target tahun berjalan, maka dapat diketahui bahwa NKA BPMP Kaltara juga telah mencapai bahkan melampaui target yang telah diperjanjikan. Sedangkan jika capaian tahun berjalan dibandingkan dengan target akhir renstra, maka diketahui bahwa target akhir renstra untuk IKK 2.1 telah tercapai di tahun 2024 bahkan juga telah jauh melampaui target akhir renstra tersebut.

Jika diuraikan lagi masing-masing indikator penilaian dari EKA dan IKPA, maka gambarannya adalah sebagai berikut:





Grafik diatas menunjukkan capaian dari masing-masing indikator EKA dimana nilai untuk indikator Agregasi Capaian RO 100, Penggunaan SBK sebesar 100, dan Efisiensi sebesar 100. Oleh karena nilai EKA diperoleh dengan pembobotan berikut:

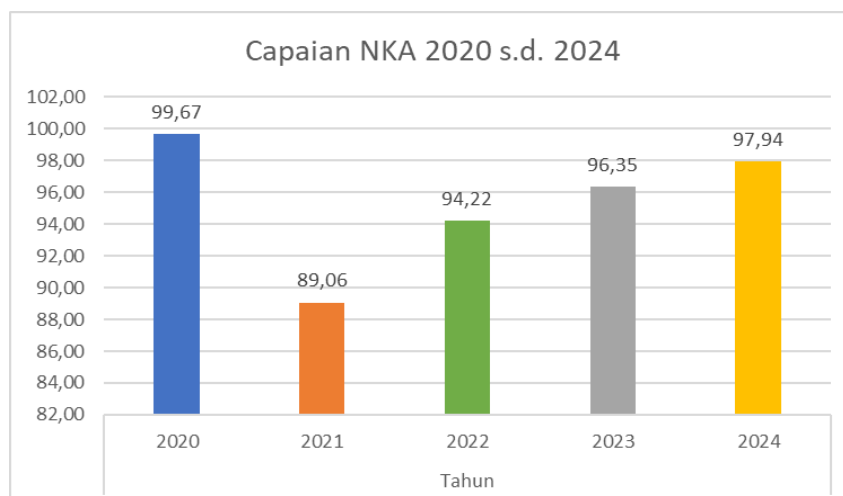
Bobot Agregasi Capaian RO : $75\% \times 100 = 75$
Bobot Penggunaan SBK : $10\% \times 100 = 10$
Bobot Efisiensi : $15\% \times 100 = 15 +$
Maka diperoleh nilai EKA sebesar : $= 100$

Capaian IKPA

Kode Satker	Nama Satker	Nilai Indikator							Nilai IKPA	Kategori
		Revisi DIPA (10%)	Deviasi Halaman III DIPA (15%)	Penyerapan Anggaran (20%)	Belanja Kontraktual (10%)	Penyelesaian Tagihan (10%)	Pengelolaan UP dan TUP (10%)	Capaian Output (25%)		
417653	BPMP Provinsi Kalimantan Utara	100	91,23	89,92	92,00	1001	100	100	95,87	Sangat Baik

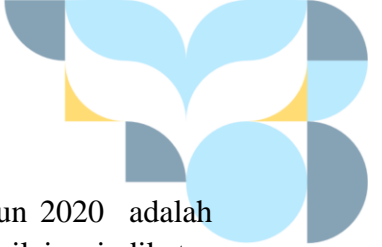
Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa IKPA 2024 memiliki 7 indikator yang dinilai dengan nilai capaian sampai dengan Desember 2024 berturut-turut Revisi DIPA 100%, Deviasi Halaman III DIPA 91,23%, Penyerapan Anggaran 89,92%, Belanja Kontraktual 92,00%, Penyelesaian Tagihan 100%, Pengelolaan UP dan TUP 100%, dan Capaian Output 100%. Dengan melakukan pembobotan sesuai tabel diatas maka ditemukanlah hasil nilai IKPA sebesar **95,87%**.

Adapun siklus capaian NKA BPMP Provinsi Kalimantan Utara dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik berikut:



Berdasarkan grafik diatas bisa dilihat bahwa pada tahun 2020 BPMP Kaltara pernah mengalami nilai kinerja anggaran yang paling maksimal bahkan memperoleh





penghargaan NKA terbaik dari Kemdikbud. Namun waktu itu di tahun 2020 adalah masa puncak dari pandemi covid 19 sehingga banyak dispensasi penilaian indikator IKPA sehingga BPMP Kaltara bisa memperoleh nilai maksimal. Namun setelah pandemi penilaian IKPA tidak lagi didispensasi mengharuskan BPMP Kaltara harus berusaha lagi memperbaiki kinerja anggaran sehingga pada tahun 2021 sampai dengan 2024 ini kinerja anggaran BPMP Kaltara kembali menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

g. Program dan Kegiatan Pendukung


- 1) Evaluasi Kinerja Tahun 2023 dan Penyusunan Peta Risiko Tahun 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja tahun sebelumnya serta melakukan pemetaan resiko yang mungkin akan terjadi selama tahun 2023;
- 2) Melakukan revisi penyesuaian kegiatan-kegiatan PDM yang telah direncanakan;
- 3) Melakukan upaya revisi buka blokir anggaran belanja modal agar dapat melakukan percepatan realisasi;
- 4) Melakukan rapat evaluasi anggaran rutin;
- 5) Membuat dashboard data kinerja anggaran untuk memudahkan pemantauan kinerja;
- 6) Secara berkala memantau setiap capaian baik capaian EKA maupun capaian IKPA melalui dashboard tersebut;
- 7) Melakukan penyesuaian RPD halaman III dipa; dan
- 8) Mengupayakan penyesuaian antara RPD dan serapan.

h. Hambatan dan Permasalahan

- 1) Adapun kendala yang dihadapi adalah sulitnya melaksanakan kegiatan dan melakukan serapan anggaran di triwulan 1 ini dikarenakan unit utama masih melakukan revisi yang melibatkan satker sehingga satker tidak dapat melakukan revisi POK;
- 2) Kendala selanjutnya adalah tidak dapat melakukan penyesuaian halaman III dipa untuk TW 1 akibat dari revisi unit utama;
- 3) Seringnya terjadi perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan yang mengakibatkan RPD tidak sesuai realisasi RPD;
- 4) Belanja pegawai yang belum memperhitungkan pegawai yang resign sehingga mempengaruhi RPD; dan
- 5) Penyesuaian RKAKL dengan project charter mengakibatkan banyaknya revisi kegiatan

i. Langkah Antisipasi

- 1) Intens melakukan koordinasi dengan unit utama terkait dengan percepatan revisi unit utama;
- 2) Berkoordinasi dengan kanwil DJPB Kaltara tentang dengan kendala yang dihadapi terkait penyesuaian halaman III dipa TW 1;

- 
- 3) Menyesuaikan waktu pelaporan SP2D agar bisa meminimalisir deviasi hal III dipa;
 - 4) Memperbaiki RPD pada periode selanjutnya; dan
 - 5) Mengupayakan revisi tidak mengakibatkan perubahan DS agar nilai untuk indikator IKPA terkait revisi anggaran tidak menurun.

j. Strategi kedepan

- 1) Kedepannya berkoordinasi ke unit utama untuk memberikan kesempatan kepada satker melakukan penyesuaian POK dan RPD;
- 2) Terkait seringnya perubahan jadwal, maka kedepannya dibutuhkan komitmen bersama pelaksana kegiatan;
- 3) Menyesuaikan semua kebutuhan jenis belanja dengan RPD; dan
- 4) Mengupayakan penyusunan project charter lebih awal.

B. REALISASI ANGGARAN



BPMP Provinsi Kalimantan Utara hingga akhir tahun 2024 menerima pagu anggaran sebesar **Rp. 19.195.778.000,-**. Dari pagu tersebut berhasil direalisasikan sebesar **Rp. 18.698.699.639,-** dengan persentase daya serap anggaran sebesar **97,41%**. Berikut rincian pagu dan realisasi anggaran untuk pencapaian sasaran/indikator kinerja dan anggaran untuk dukungan manajemen.



Sasaran Kegiatan (SK)/ Sasaran Indikator	Anggaran 2024	Realisasi 2023	%
Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen			
[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	125.260.000	125.137.000	99,90%
[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	7.826.895.000	7.435.313.793	95,00%
Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen BPMP Provinsi Kalimantan Utara			
[IKK 2.1] Predikat SAKIP BPMP Provinsi Kalimantan Utara	11.243.623.000	11.138.248.846	99,06%
[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA/KL			

Jika dilihat dari perjenis belanja, maka serapan BPMP Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

Realisasi Per Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Pagu	Blokir	Realisasi SPM		Realisasi SP2D	
1	BELANJA PEGAWAI	2.546.996.000	0	2.544.644.105	99,91	2.544.644.105	99,91
2	BELANJA BARANG	11.829.805.000	467.894.000	11.335.767.235	95,82	11.335.767.235	95,82
3	BELANJA MODAL	4.818.977.000	0	4.818.288.299	99,99	4.818.288.299	99,99
	TOTAL	19.195.778.000	467.894.000	18.698.699.639	97,41	18.698.699.639	97,41

Sumber : <https://mol.kemdikbud.go.id/2024>

C. ANALISIS EFISIENSI

Sasaran Kegiatan /Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian IKK	Realisasi Anggaran
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen				
[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	3,92	8,44	215,30%	99,90%
[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	100	100	100%	94,99%
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara				
[IKK 2.1] Predikat SAKIP Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	A (84,80)	A (85,60)	101,42%	99,06%
[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	96,36	97,94	101,63%	
RATA-RATA CAPAIAN			129,59%	97,98%

Tabel diatas menyajikan informasi capaian IKK dan realisasi anggaran masing-masing IKK di BPMP Provinsi Kalimantan Utara. Terlihat bahwa rata-rata capaian IKK melebihi target yang telah ditetapkan. Rata-rata capaian IKK adalah sebesar 129,59% sedangkan realisasi anggaran rata-rata masing-masing IKK adalah sebesar 97,98%, oleh karena itu dapat diketahui efisiensi anggaran dengan metode perhitungan berikut:

Efisiensi = (Persentase capaian IKK x Pagu Anggaran 2024) – realisasi anggaran 2024

Efisiensi = (129,59% x 19.195.778.000) - 18.698.699.639

Efisiensi = 24.875.808.710 - 18.698.699.639

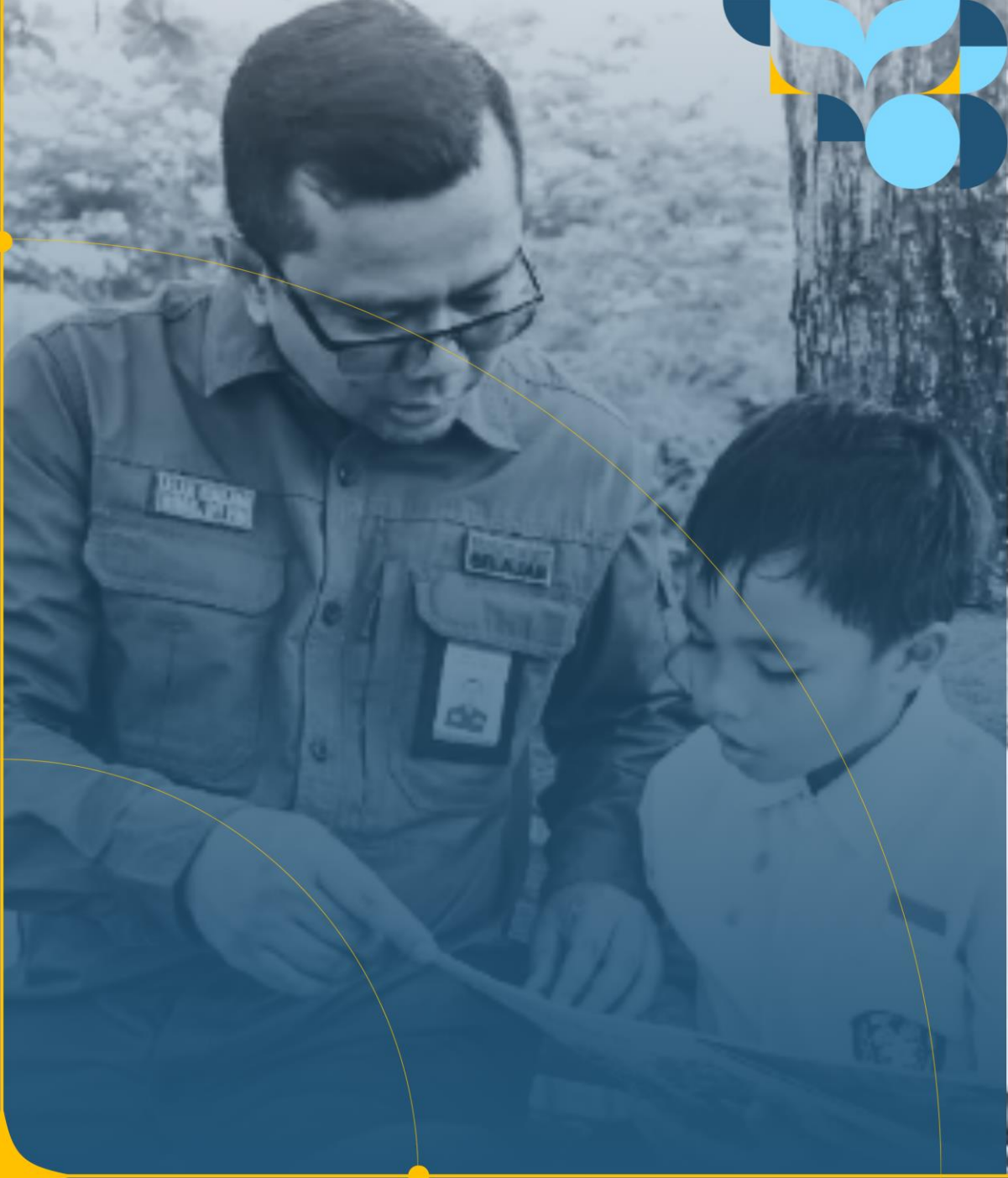
Efisiensi = 6.177.109.071

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka dapat diketahui bahwa BPMP Provinsi Kalimantan Utara berhasil mengefisiensi anggaran sebesar Rp. 6.177.109.071,- (enam miliar seratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan ribu tujuh puluh satu rupiah).



Hasil dari efisiensi tersebut dimanfaatkan untuk mengoptimalkan beberapa program diantaranya:

1. Program Pemulihan Pembelajaran,
2. Kemitraan Daerah
3. Peningkatan Kualitas Data Pendidikan



BAB IV

Penutup

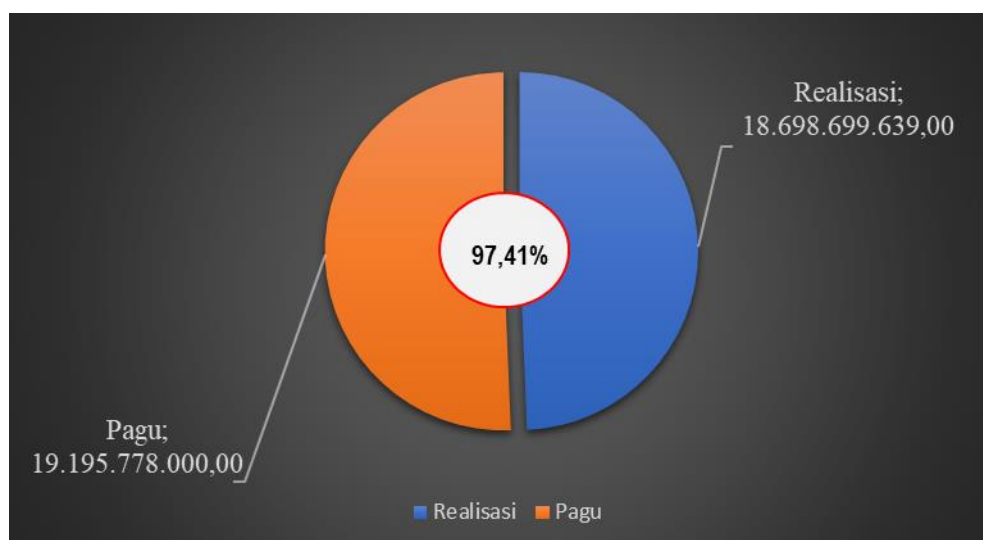
BPMP Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 menetapkan dua sasaran kegiatan, yaitu :

- A. Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen; dan
- B. Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen BPMP Provinsi Kalimantan Utara.




Dari empat indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian dua sasaran kegiatan tersebut, tiga indikator kinerja kegiatan realisasi capaiannya telah melebihi target (>100%) dan satu indikator kinerja kegiatan realisasi capaiannya sudah sesuai target (100%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran kegiatan BPMP Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 sudah sangat baik.

Dari segi penyerapan anggaran, BPMP Provinsi Kalimantan Utara berhasil menyerap anggaran sebesar **Rp 18.698.699.639,-** dari total **Rp 19.195.778.000,-** dengan persentase **97,41%**, sebagaimana ditunjukkan pada grafik dibawah:



Dari hasil evaluasi kinerja yang dilakukan, beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian ke depan antara lain:

1. Sekolah Penggerak belum membudayakan diri untuk melakukan pengimbasan.

- 
2. Keterlambatan pelaporan penggunaan dana BOSP.
 3. Penerima chromebook tidak memiliki akses internet dan listrik. Sebagian penerima chromebook berada di remote area sehingga pemanfaatan chromebook untuk pembelajaran masih rendah.
 4. Belum memahami 8 Aksi Transformasi Satuan Pendidikan Sekolah Yang Kita Cita-Citakan (SYKCC)
 5. Pemda belum melakukan Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan sesuai dengan Indikator Prioritas pada Rapor Pendidikan Daerah.
 6. Satuan pendidikan jenjang PAUD belum 100% membentuk TPPK.
 7. Masih terdapat banyak miskonsepsi yang terjadi di “lapangan” sehingga banyak terjadi kesalahpahaman terhadap Gerakan Transisi PAUD-SD.
 8. Masih sedikit guru yang menyelesaikan aksi nyata di pendidikan berjenjang pendidikan inklusif tingkat dasar di PMM dan masih banyak Kepsek dan Guru yang belum mengetahui tentang Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif melalui PMM sehingga Capaian Aksesnya masih sangat kurang

Untuk meningkatkan kinerja BPMP Provinsi Kalimantan Utara ke depan, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan antara lain:

1. Selalu melakukan advokasi ke sekolah pengimbas untuk berbagi ke sekolah lain
2. Mengadakan kegiatan Pemantauan Pemerintah Daerah Dan Satuan Pendidikan Terkait Pelaporan BOSP Melalui ARKAS Tahap 1 TA 2024 untuk memastikan Satuan Pendidikan melakukan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana BOSP disusun berdasarkan hasil pelaksanaan penatausahaan Dana BOSP dan melaporkan penggunaan dananya melalui ARKAS tepat waktu.
3. Berkoordinasi ke PEMDA untuk dapat memfasilitasi sekolah terkait ketersediaan internet dan listrik. Serta melakukan advokasi kepada pemda melalui konsultan untuk bisa memberikan afirmasi kepada penerima chromebook di remote area.
4. Sosialisasi 8 Aksi Transformasi Satuan Pendidikan melalui Sekolah Yang Kita Cita-Citakan (SYKCC).
5. Melakukan Pendampingan secara lebih Intensif kepada OPD Daerah Bidang Pendidikan yaitu BPKAD/BKAD, BAPPEDA dan Dinas Pendidikan untuk menyusun SPM Bidang Pendidikan sesuai Indikator Prioritas pada Rapor Pendidikan Daerah sesuai dengan Rekomendasi pada Dasbor Evaluasi SPM Pendidikan RAPBD 2025.
6. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mendorong satuan PAUD yang belum membentuk TPPK, serta menghubungi dan mendampingi Satuan Pendidikan yang belum membentuk TPPK secara personal melalui telepon/wa
7. Mengedukasi satuan pendidikan terkait dengan Gerakan Transisi PAUD-SD, alur penguatan perubahan pembelajaran.
8. Berkoordinasi ke pemda untuk mendorong guru-guru mengikuti dan menyelesaikan topik pendidikan berjenjang pendidikan inklusif tingkat dasar di PMM



LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA

PENGKURAN KINERJA

PERNYATAAN TELAH DI REVIU



BPMP
PROVINSI
KALIMANTAN UTARA

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara

Jalan Poros Tanjung Selor – Tanah Kuning KM.9, Tanjung Selor, Bulungan 77212
Telepon (0552) 2034391, Posel: bpmp.kaltara@kemdikbud.go.id
Laman <https://bpmpkaltara.kemdikbud.go.id>

Hubungi Kami:



bpmpkaltara.kemdikbud.go.id



[@bpmp.kaltara](https://www.instagram.com/bpmp.kaltara)



[@bpmpkaltara](https://www.facebook.com/bpmpkaltara)



[@bpmpkaltara](https://twitter.com/bpmpkaltara)



BPMP Provinsi Kalimantan Utara



+62 851-7213-4343



Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara
Dengan
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jarwoko

Jabatan : Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Iwan Syahril

Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Tanjung Selor, 16 Februari 2024

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan
Dasar dan Pendidikan Menengah,

Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara,



Ditandatangani secara elektronik
oleh :
Iwan Syahril
NIP 197610262023211002



Ditandatangani secara elektronik
oleh :
Jarwoko
NIP 197003191997031001



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Sasaran (S/SK)	Indikator (IKU/IKK)	Target Perjanjian Kinerja 2024
[1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	3.92
[1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	100
[2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	[2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	A
[2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	[2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	96.36

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1.	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 10.666.961.000,-
2.	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp. 7.648.635.000,-
Total Anggaran			Rp. 18.315.596.000,-

Tanjung Selor, 16 Februari 2024

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah,

Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara,



Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR





Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara
Dengan
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Andrianus Hendro Triatmoko
Jabatan : Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**


Nama : Iwan Syahril
Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Tanjung Selor, 15 November 2024

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan
Dasar dan Pendidikan Menengah
Iwan Syahril

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala BPMP Provinsi Kalimantan
Utara
Andrianus Hendro Triatmoko




Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR




**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	%	3.92
	[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	%	100
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	Predikat	A
	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	Nilai	96.36

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp 11.243.623.000
2	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp 7.952.155.000
Total Anggaran			Rp 19.195.778.000


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan
 Dasar dan Pendidikan Menengah
 Iwan Syahril

Tanjung Selor, 15 November 2024


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Kepala BPMP Provinsi Kalimantan
 Utara
 Andrianus Hendro Triatmoko



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



Laporan Kinerja Triwulan 1 BPMP Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada BPMP Provinsi Kalimantan Utara selama Triwulan 1 Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

A. Progress Capaian Kinerja Triwulan 1

No	Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
1.	[SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	3.92	%	0	0
2.	[SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	100	%	0	0
3.	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	A	Predikat	-	-
4.	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	96.36	Nilai	0	0



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



B. Hasil Analisis Capaian Kinerja Triwulan 1

1. [SK 1.0 Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen] IKK 1.1 Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya

Progress / Kegiatan :

IKK 1.1 akan dapat diketahui capaiannya di akhir tahun 2024 sehingga proses capaian masih belum dapat diketahui. Dalam mendukung ketercapaian IKK 1.1 maka BPMP Kaltara telah melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya:

1. PDM-01 (Koordinasi Percepatan Transformasi Satuan Pendidikan Sekolah Pelaksana PSP dengan PMO Daerah)
2. PDM-01 (Rapat Koordinasi dengan UPT terkait Optimalisasi Pengawas sekolah sebagai Pendamping satuan Pendidikan & Pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah)
3. PDM-03A (Bimtek Arkas/Markas dan Siplah pada Pemerintah Daerah dan Satpen)
4. PDM-03B (Pelaksanaan pelatihan/bimtek Optimalisasi Chrombook dan belajar.id pada Pemerintah Daerah dan Satpen)
5. PDM-04B (Pendampingan Perencanaan Pemda terkait SPM Pendidikan oleh UPT)
6. PDM-05 Advokasi dan Koordinasi Kebijakan Merdeka Belajar Ke Pemda
7. PDM-05 Advokasi dan Koordinasi Kebijakan Merdeka Belajar Ke Pemda
8. PDM-10 (Penguatan Digitalisasi dalam Pemulihan Pembelajaran)
9. PDM-10 Koordinasi, Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Fasilitator daerah dan Intervensi pemulihan pembelajaran)
10. PDM-10 Pendampingan penguatan intervensi pemulihan pembelajaran oleh UPT tahap I dan II
11. PDM-04B (Pendampingan Rakortek Kabupaten/Kota Bappeda Provinsi oleh UPT)
12. PDM-07 (Podcast dalam rangka Edukasi dan Advokasi Program Prioritas)
13. PDM-07 (Webinar dalam rangka Edukasi dan Advokasi Program Prioritas)

Kendala / Permasalahan :

1. PDM 01 PSP

- Objektif 3 masih akan dipastikan kembali oleh pusat Angkatan berapa yang akan dilihat
- Objektif 3 hasilnya menunggu dari hasil pengisian dasbor UPT yang saat ini sedang proses pengisian sampai tanggal 20 Mei 2024
- Objektif 1 dan 2 masih akan direvisi di level pusat

Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



2. PDM 03B OCB
Belum terdapat dashboard khusus dari pusat untuk mengukur capaian masing2 objektif (khusus GWE dan CB)
3. PDM 04A PBD Satpen
Terjadi Pergantian Kepala Seksi PAUD di Kabupaten Bulungan
4. PDM 04B PBD Daerah
 - Pemda masih dalam penyusunan RENJA, jadi belum diketahui persentasi progres
 - Pemda belum terlalu paham tentang SPM Prioritas Bidang Pendidikan
5. PDM 05 Kemitraan Daerah
 - Muncul sekolah baru sehingga menurunkan capaian 100% wilayah nunukan, untuk di Malinau kendala karena jaringan dan sekolah susah dihubungi
 - Masih banyak satuan paud dikmas yang belum membentuk tppk dan unggah SK
 - Kombel belum terlaksana secara terstruktur
 - Juknis PPDB dinas belum ditandatangani
 - Daerah belum melakukan pengangkatan KS/PS karena belum ada kebutuhan KS/PS yang kosong Daerah masih enggan menggunakan SPKS untuk mengangkat GP menjadi KSPS
 - Coaching/mentoring belum dilaksanakan sesuai prosedur pusat yang terdokumentasikan
6. PDM 06 AN
 - Tim PDM 06 pusat sudah melakukan survei untuk pemahaman stakeholder daerah terhadap urgensi Kebijakan UK namun ada beberapa Dinas Pendidikan belum melakukan pengisian survei
 - Objektif 1 dan 3 belum berjalan karena pelaksanaan AN dan Sulingjar di triwulan ke tiga
 - Masih terjadi miskonsepsi terkait Uji Kesetaraan, masih ada Satuan Pendidikan non formal yang mewajibkan warga belajar untuk mengikuti Uji Kesetaraan
 - Masih ada satuan pendidikan yang tidak menjalankan POS Penyelenggaraan Uji Kesetaraan (tidak memasang pengumuman pelaksanaan UK, tidak memiliki pengawas silang, tidak membacakan tata tertib)
7. PDM 09 Transisi PAUD SD
Belum adanya Dashboar pemantauan oleh Tim Pusat PDM 09
8. PDM 10 Pemulihan Pembelajaran
Pengimbasan Fasilitator daerah ke ssekolah sasaran PDM 10 yang telah dibimtek masih kurang
9. PDM 11 GSS
 - Perubahan Project Charter PDM 11 DI akhir April
 - Keterlambatan PDM 11 Pusat memberikan Bimtek bagi sekolah Binaan sehingga intervensi terhadap sekolah binaan mengalami keterlambatan juga
10. PDM 12 Pendidikan Inklusi
 - Masih kurangnya GPK di Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif2. Masih adanya Pemda yg Pesimis bahwa Pendidikan Inklusif bisa diterapkan di Satuan Pendidikan;
 - Sarana dan Prasarana belum bisa menunjang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
 - Belum semua Pemda memiliki Perda terkait Pendidikan Inklusif;
 - Masih bingung Cara mengukur Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif seperti apa



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Strategi / Tindak Lanjut :

1. PDM 01 PSP
 - Menjalin hubungan baik dengan dinas pendidikan untuk memudahkan pengisian dasbor UPT
 - Menjalin hubungan baik dengan dinas pendidikan untuk memudahkan pengisian dasbor UPT
 - Mengumpulkan data mentah sehingga ketika sudah jelas cara perhitungannya langsung bisa dianalisis
2. PDM 03B OCB

Mencoba mengumpulkan data mandiri
3. PDM 04A PDB Satpen

Berbagi sumber daya untuk advokasi Satuan Pendidikan yang belum mengakses Rapor Pendidikan
4. PDM 04B PBD Daerah
 - Pendampingan Pra Rakortek kepada Dinas Pendidikan, Bappeda dan BPKAD
 - Pendampingan perencanaan terkait SPM
5. PDM 05 Kemitraan Daerah
 - Menghubungi Dinas dan agen penggerak untuk membantu menghubungi sekolah serta mendampingi penginputan tim dan SK
 - Menghubungi satuan langsung dan juga dinas serta agen penggerak untuk membantu mendorong pembentukan tppk, serta melakukan pendampingan secara langsung melalui wa atau daring
 - Menjadwalkan kombel setiap bulan
 - Melakukan advokasi ke daerah ketika ada kekosongan untuk segera melakukan pengangkatan menggunakan SPKS
 - Melakukan analisis SDM
6. PDM 06 AN
 - Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk melakukan pengisian survei
 - Menunggu informasi dari PDM 06 Pusat
 - Melakukan sosialisasi kebijakan Uji Kesetaraan lebih awal (sebelum waktu pendaftaran berakhir) kepada Satuan Pendidikan non formal
 - Pada saat melakukan sosialisasi kebijakan Uji Kesetaraan, menekankan hal - hal sering diabaikan pada saat pelaksanaan UK
7. PDM 09 Transisi PAUD SD

Konsultasi dengan Tim PDM 09
8. PDM 10 Pemulihan Pembelajaran

Memberikan data terkait sasaran PDM 10 yang dapat dijangkau oleh Fasilitator daerah
9. PDM 11 GSS
 - Mengubah strategi kegiatan untuk pemenuhan Project Charter PDM 11
 - Aktiv melakukan Komunikasi dengan PDM 11 Pusat dan Sekolah Binaan
10. PDM 12 Pendidikan Inklusi;
 - Segera Menyusun SK ULD2. Rutin Berkoordinasi dg Pemda Setempat melalui PIC Pendidikan Inklusif di Dinas Pendidikan;
 - Berkoordinasi dengan PDM-12 Pusat terkait Pengukuran Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Inklusif itu seperti apa.



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



2. [SK 1.0 Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen] IKK 1.2 Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)

Progress / Kegiatan :

Sama dengan IKK IKK 1.1, untuk IKK 1.2 juga akan dapat diketahui capaiannya di akhir tahun 2024 sehingga proses capaian masih belum dapat diketahui. Dalam mendukung ketercapaian IKK 1.2 maka BPMP Kaltara telah melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya:

1. PDM-01 (Koordinasi Percepatan Transformasi Satuan Pendidikan Sekolah Pelaksana PSP dengan PMO Daerah)
2. PDM-01 (Rapat Koordinasi dengan UPT terkait Optimalisasi Pengawas sekolah sebagai Pendamping satuan Pendidikan & Pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah)
3. PDM-03A (Bimtek Arkas/Markas dan Siplah pada Pemerintah Daerah dan Satpen
4. PDM-03B (Pelaksanaan pelatihan/bimtek Optimalisasi Chrombook dan belajar.id pada Pemerintah Daerah dan Satpen)
5. PDM-04B (Pendampingan Perencanaan Pemda terkait SPM Pendidikan oleh UPT)
6. PDM-05 Advokasi dan Koordinasi Kebijakan Merdeka Belajar Ke Pemda
7. PDM-05 Advokasi dan Koordinasi Kebijakan Merdeka Belajar Ke Pemda
8. PDM-10 (Penguatan Digitalisasi dalam Pemulihan Pembelajaran)
9. PDM-10 Koordinasi, Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Fasilitator daerah dan Intervensi pemulihan pembelajaran)
10. PDM-10 Pendampingan penguatan intervensi pemulihan pembelajaran oleh UPT tahap I dan II
11. PDM-O4B (Pendampingan Rakortek Kabupaten/Kota Bappeda Provinsi oleh UPT)
12. PDM-07 (Podcast dalam rangka Edukasi dan Advokasi Program Prioritas)
13. PDM-07 (Webinar dalam rangka Edukasi dan Advokasi Program Prioritas)

Kendala / Permasalahan :

1. PDM 01 PSP
 - Objektif 3 masih akan dipastikan kembali oleh pusat Angkatan berapa yang akan dilihat
 - Objektif 3 hasilnya menunggu dari hasil pengisian dasbor UPT yang saat ini sedang proses pengisian sampai tanggal 20 Mei 2024
 - Objektif 1 dan 2 masih akan direvisi di level pusat
2. PDM 03B OCB
 - Belum terdapat dashboard khusus dari pusat untuk mengukur capaian masing2 objektif (khusus GWE dan CB)
3. PDM 04A PBD Satpen
 - Terjadi Pergantian Kepala Seksi PAUD di Kabupaten Bulungan



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



4. PDM 04B PBD Daerah
 - Pemda masih dalam penyusunan RENJA, jadi belum diketahui persentasi progres
 - Pemda belum terlalu paham tentang SPM Prioritas Bidang Pendidikan
5. PDM 05 Kemitraan Daerah
 - Muncul sekolah baru sehingga menurunkan capaian 100% wilayah nunukan, untuk di Malinau kendala karena jaringan dan sekolah susah dihubungi
 - Masih banyak satuan paud dikmas yang belum membentuk tppk dan unggah SK
 - Kombel belum terlaksana secara terstruktur
 - Juknis PPDB dinas belum ditandatangani
 - Daerah belum melakukan pengangkatan KS/PS karena belum ada kebutuhan KS/PS yang kosong Daerah masih enggan menggunakan SPKS untuk mengangkat GP menjadi KSPS
 - Coaching/mentoring belum dilaksanakan sesuai prosedur pusat yang terdokumentasikan
6. PDM 06 AN
 - Tim PDM 06 pusat sudah melakukan survei untuk pemahaman stakeholder daerah terhadap urgensi Kebijakan UK namun ada beberapa Dinas Pendidikan belum melakukan pengisian survei
 - Objektif 1 dan 3 belum berjalan karena pelaksanaan AN dan Sulingjar di triwulan ke tiga
 - Masih terjadi miskonsepsi terkait Uji Kesetaraan, masih ada Satuan Pendidikan non formal yang mewajibkan warga belajar untuk mengikuti Uji Kesetaraan
 - Masih ada satuan pendidikan yang tidak menjalankan POS Penyelenggaraan Uji Kesetaraan (tidak memasang pengumuman pelaksanaan UK, tidak memiliki pengawas silang, tidak membacakan tata tertib)
7. PDM 09 Transisi PAUD SD
 - Belum adanya Dashboar pemantauan oleh Tim Pusat PDM 09
8. PDM 10 Pemulihan Pembelajaran
 - Pengimbasan Fasilitator daerah ke ssekolah sasaran PDM 10 yang telah dibimtek masih kurang
9. PDM 11 GSS
 - Perubahan Project Charter PDM 11 DI akhir April
 - Keterlambatan PDM 11 Pusat memberikan Bimtek bagi sekolah Binaan sehingga intervensi terhadap sekolah binaan mengalami keterlambatan juga
10. PDM 12 Pendidikan Inklusi
 - Masih kurangnya GPK di Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif². Masih adanya Pemda yg Pesimis bahwa Pendidikan Inklusif bisa diterapkan di Satuan Pendidikan;
 - Sarana dan Prasarana belum bisa menunjang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
 - Belum semua Pemda memiliki Perda terkait Pendidikan Inklusif;
 - Masih bingung Cara mengukur Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif seperti apa



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Strategi / Tindak Lanjut :

1. PDM 01 PSP
 - Menjalin hubungan baik dengan dinas pendidikan untuk memudahkan pengisian dasbor UPT
 - Menjalin hubungan baik dengan dinas pendidikan untuk memudahkan pengisian dasbor UPT
 - Mengumpulkan data mentah sehingga ketika sudah jelas cara perhitungannya langsung bisa dianalisis
2. PDM 03B OCB

Mencoba mengumpulkan data mandiri
3. PDM 04A PDB Satpen

Berbagi sumber daya untuk advokasi Satuan Pendidikan yang belum mengakses Rapor Pendidikan
4. PDM 04B PBD Daerah
 - Pendampingan Pra Rakortek kepada Dinas Pendidikan, Bappeda dan BPKAD
 - Pendampingan perencanaan terkait SPM
5. PDM 05 Kemitraan Daerah
 - Menghubungi Dinas dan agen penggerak untuk membantu menghubungi sekolah serta mendampingi penginputan tim dan SK
 - Menghubungi satuan langsung dan juga dinas serta agen penggerak untuk membantu mendorong pembentukan tppk, serta melakukan pendampingan secara langsung melalui wa atau daring
 - Menjadwalkan kombel setiap bulan
 - Melakukan advokasi ke daerah ketika ada kekosongan untuk segera melakukan pengangkatan menggunakan SPKS
 - Melakukan analisis SDM
6. PDM 06 AN
 - Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk melakukan pengisian survei
 - Menunggu informasi dari PDM 06 Pusat
 - Melakukan sosialisasi kebijakan Uji Kesetaraan lebih awal (sebelum waktu pendaftaran berakhir) kepada Satuan Pendidikan non formal
 - Pada saat melakukan sosialisasi kebijakan Uji Kesetaraan, menekankan hal - hal sering diabaikan pada saat pelaksanaan UK
7. PDM 09 Transisi PAUD SD

Konsultasi dengan Tim PDM 09
8. PDM 10 Pemulihan Pembelajaran

Memberikan data terkait sasaran PDM 10 yang dapat dijangkau oleh Fasilitator daerah
9. PDM 11 GSS
 - Mengubah strategi kegiatan untuk pemenuhan Project Charter PDM 11
 - Aktiv melakukan Komunikasi dengan PDM 11 Pusat dan Sekolah Binaan
10. PDM 12 Pendidikan Inklusi;
 - Segera Menyusun SK ULD2. Rutin Berkoordinasi dg Pemda Setempat melalui PIC Pendidikan Inklusif di Dinas Pendidikan;
 - Berkoordinasi dengan PDM-12 Pusat terkait Pengukuran Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Inklusif itu seperti apa.



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



3. [SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara] IKK 2.1 Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara

Progress / Kegiatan :

capaian untuk sakip 2024 baru dapat diketahui setelah dilakukan evaluasi oleh unit utama dan inspektorat yakni pada akhir tahun 2024. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendukung ketercapaian target sakip diantaranya:

1. Menyusun laporan kinerja 2023 diawal tahun 2024
2. Menyusun perjanjian kinerja 2024
3. Menyusun rencana aksi atas perjanjian kinerja 2024
4. Melakukan rapat evaluasi TW 1 terkait kinerja lembaga
5. Melakukan tindak lanjut terkait LHE sakip 2023

Kendala / Permasalahan :

Kendala saat ini yang dihadapi oleh BPMP Kaltara masih sama dengan yang dialami tahun lalu yakni terkait dengan kurangnya SDM. SDM yang ada saat ini tidak seimbang dengan kompleksitas pekerjaan yang ada sehingga, 1 pegawai dibebankan tanggung jawab yang banyak sehingga dalam pelaksanaan SAKIP sering mengalami keterlambatan.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Mengusulkan tambahan pegawai formasi PNS dan PPPK
2. Memaksimalkan SDM yang ada saat ini

4. [SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara] IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara

Progress / Kegiatan :



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



sama dengan IKK yang lain, kinerja anggaran juga ditergetkan akan tercapai pada akhir periode anggaran sehingga akan dilaporkan nilai capaiannya pada akhir tahun 2024. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan untuk ketercapaian target kinerja anggaran diantaranya:

1. Melakukan revisi penyesuaian kegiatan-kegiatan PDM yang telah direncanakan
2. Melakukan rapat evaluasi awal tahun atas kinerja anggaran tahun sebelumnya
3. Melakukan upaya revisi buka blokir anggaran belanja modal agar dapat melakukan percepatan realisasi
4. Melakukan rapat evaluasi anggaran rutin.
5. melakukan pemantauan kinerja IKPA secara berkala

Kendala / Permasalahan :

Terdapat blokir anggaran pada semua pagu belanja Modal dan juga terdapat blokir AA pada belanja barang. Hal ini akan menyebabkan kemungkinan menurunnya kinerja serapan anggaran pada IKPA setelah blokirnya terbuka, karena nilai serapan dihitung berdasarkan pagu anggaran.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Melengkapi data dukung yang dibutuhkan untuk melakukan pengajuan buka blokir anggaran
2. melakukan koordinasi dengan bagian perencanaan sekretaris Ditjen PAUD dikdasmen terkait usulan buka blokir belanja modal

C. Capaian Fisik dan Anggaran Per-Rincian Output Triwulan 1

Uraian Rincian Output	Satuan	Volume	Capaian	Sisa Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
[417653.DI.6397.QDB.750] Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	751	66	685	7.523.375.000	1.406.179.820	6.117.195.180
[417653.DI.6397.QDB.850] Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	631	47	584	125.260.000	0	125.260.000



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



[417653.WA.2005.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	0	1	475.000.000	129.033.128	345.966.872
[417653.WA.2005.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	0	1	5.812.961.000	1.546.021.696	4.266.939.304
[417653.WA.2005.EBB.971] Layanan Prasarana Internal	Unit	1	0	1	4.379.000.000	0	4.379.000.000
Total					18.315.596.000	3.081.234.644	15.234.361.356

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Tolong untuk PDM yang belum memiliki kontribusi agar bisa segera berprogres
2. Kegiatan-kegiatan yang sudah dijadwalkan jangan sampai tidak dapat dilaksanakan
3. Terlaksananya kegiatan akan berkontribusi langsung dengan serapan anggaran yang merupakan indikator penting dalam penilaian kinerja anggaran
4. mohon selalu dipantau semua indikator IKPA, jika ada yang kurang maksimal tolong diidentifikasi permasalahannya

Tanjung Selor, 30 Mei 2024
Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Jarwoko
NIP 197003191997031001



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E





**Laporan Kinerja Triwulan 2
BPMP Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2024**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada BPMP Provinsi Kalimantan Utara selama Triwulan 2 Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

A. Progress Capaian Kinerja Triwulan 2

No	Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
1.	[SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	3.92	%	0	0.00
2.	[SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	100	%	0	0.00
3.	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	A	Predikat	-	-
4.	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	96.36	Nilai	0	0.00

B. Hasil Analisis Capaian Kinerja Triwulan 2

1. [SK 1.0 Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen] IKK 1.1 Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya

Progress / Kegiatan :

IKK 1.1 baru akan terlihat capaiannya di akhir tahun 2024 nanti, sehingga pada triwulan 2 ini masih belum dapat diketahui capaian IKK 1.1. Untuk mendukung ketercapaian IKK 1.1 maka BPMP Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya:

1. PDM 02 (Festival Kurikulum Merdeka)
2. PDM 02 (Refleksi IKM Tahap I)
3. PDM 05 (Penjaringan Informasi Komunitas Belajar)
4. PDM 05 (FGD Tindak Lanjut Program Guru Penggerak)
5. PDM 06 (Workshop Kebijakan Uji Kesetaraan (UK))
6. PDM 06 (Pemantauan/Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Uji Kesetaraan (UK) Tahun 2024)
7. PDM 07 (Produksi Konten Program Prioritas)
8. PDM 09 (Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Produk Pembelajaran Transisi PAUD-SD Kepada Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag)
9. PDM 10 (Supervisi Program Pemulihan Pembelajaran (Kampus Mengajar angkatan 7))
10. PDM 10 (Koordinasi dengan DPL, Dinas Pendidikan, dan Sekolah sasaran dalam kegiatan FKK)
11. PDM 11 (Semarak Gerakan Sekolah Sehat)
12. PDM 12 (Sosialisasi Kebijakan Pembentukan Unit Layanan Disabilitas di Daerah)
13. PDM 01 (Pemetaan Sekolah Pelaksana PSP dan Sekolah Imbas)
14. PDM 01 (Workshop Pengimbasan oleh PSP Angkatan 1)
15. PDM 03B (Webinar OCB series 1)
16. PDM 05 (Pendampingan PPDB Daerah)
17. PDM 05 (Coaching/Mentoring SDM UPT oleh Plt. Kepala)
18. PDM 05 (Pelaksanaan Komunitas Belajar (SKOM))
19. PDM 06 (Pengolahan dan Analisis data hasil pemantauan/monitoring pelaksanaan Uji Kesetaraan (UK) Tahun 2024)
20. PDM 06 (Finalisasi laporan hasil analisis data pemantauan/monitoring pelaksanaan Uji Kesetaraan (UK) Tahun 2024)
21. PDM 07 (Podcast dalam rangka edukasi dan advokasi program prioritas)
22. PDM 10 (Melakukan verifikasi sasaran sekolah penerima Buku bacaan bermutu Tahap 2)
23. PDM 10 (Fasilitasi Penyelenggaraan kegiatan pengimbasan Peningkatan literasi dan numerasi)
24. PDM 03B (Advokasi OCB kab Malinau dan Nunukan)

25. PDM 04A (Advokasi Aktivitas Komunitas Belajar terkait Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data)
26. PDM 05 (Pemantauan PPDB)
27. PDM 07 (Webinar dalam rangka edukasi dan advokasi program prioritas)
28. PDM 10 (Penguatan Komunitas Belajar antar sekolah sebagai strategi penguatan program literasi dan numerasi oleh UPT)

Kendala / Permasalahan :

1. PDM 01 – Program Sekolah Penggerak

- Pemetaan sekolah imbas hanya diberikan waktu singkat sebelum dikumpulkan
- Long list calon sekolah imbas kebanyakan berada di lokasi yang jauh dan membutuhkan banyak biaya

2. PDM 02 – Implementasi Kurikulum Merdeka

- Kegiatan digabung dengan kegiatan Bulan Merdeka untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2024 dan kegiatan PDM 011 Semarak Gerakan Sekolah Sehat
- Jumlah partisipan yang mengirimkan karya sedikit
- Kepala Daerah yang diundang untuk membuka kegiatan tidak hadir
- Pengunjung yang hadir sedikit karena tempat kegiatan di halaman kantor BPMP yang jauh dari keramaian

3. PDM 03B – Transformasi Digital untuk Pembelajaran

- Penerima chromebook tidak memiliki akses internet dan listrik

4. PDM 04A – Rapor Pendidikan dan PBD untuk Satpen

- Tidak semua Komunitas Belajar mengikut kegiatan Advokasi Aktivitas Komunitas Belajar terkait Pemanfaatan Rapor Pendidikan
- Kegiatan dilaksanakan secara daring

5. PDM 05 – Kemitraan Daerah

- Coaching/Mentoring masih belum terjadwal dengan baik karena banyaknya SDM UPT yang dinas luar karena kegiatan yang padat
- Komunitas Belajar belum terjadwal rutin karena SDM UPT banyak dinas luar
- Masih banyaknya dinas yang belum paham tentang penggunaan Sistem Pengangkatan KSPS saat seleksi KSPS
- Belum terbitnya Juknis PPDB dan SK Tim PPDB Daerah
- Belum 100% terbentuknya TPPK Jenjang SD wilayah Malinau

- Belum 100% terbentuknya TPPK jenjang PAUD wilayah Tarakan, Malinau, Nunukan, Bulungan
- Dasbor PPKSP terkena imbas dari virus ransomware sehingga tidak bisa unggah SK TPPK,
- Dapodik sedang menunggu rilis terbaru sehingga tidak bisa input kepanitiaan TPPK

6. PDM 06 – Asesmen Nasional

- Masih terdapat miskonsepsi terkait tujuan pelaksanaan UK
- Terdapat beberapa data instrumen dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau yang belum diperoleh
- Beberapa petugas monitoring yang lambat dalam menginput hasil instrumen ke link
- Terdapat Dinas Pendidikan yang tidak memberi data terkait jadwal pelaksanaan UK di wilayahnya
- Terdapat satuan PKBM yang sudah mendaftar UK namun tidak jadi melaksanakan karena UK dianggap tidak wajib

7. PDM 07 – Publikasi dan Komunikasi

- Tidak semua memberikan informasi terkait bahan publikasi/materi konten dari masing-masing PDMnya kepada tim Publikasi
- Menyesuaikan waktu pelaksanaan podcast dengan narasumber
- Menentukan tema dan narasumber yang kompeten untuk webinar

8. PDM 09 – Transisi PAUD-SD

- Dalam gerakan Transisi PAUD-SD melibatkan Satuan Pendidikan yang berada dalam naungan Kemenag, sehingga dibutuhkan koordinasi lebih

9. PDM 10 – Pemulihan Pembelajaran

- Tidak semua sekolah menjadi sasaran supervisi program pemulihan pembelajaran
- Belum semua sekolah sasaran PDM 10 dapat tercover dalam kegiatan

10. PDM 11 – Gerakan Sekolah Sehat

- Kegiatan digabungkan dengan kegiatan Festival Kurikulum Merdeka dan Bulan Merdeka Belajar untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional Tahun 2024
- Jumlah partisipan yang mengikuti lomba sedikit

11. PDM 12 – Pendidikan Inklusi

- Disdik belum memiliki PIC yang mengampu Pendidikan Inklusif sehingga menyulitkan berkoordinasi dengan Disdik
- Kurangnya Jumlah GPK (Guru Pendamping Khusus)

- Terbatasnya Anggaran
- Lambannya progress penyusunan SK ULD di daerah
- Kegiatan dilaksanakan secara daring sehingga banyak peserta tidak hadir
- Miskonsepsi pemda terkait pembentukan ULD merupakan pembentukan UPT baru
- Masih banyak guru yang belum mendapatkan informasi mengenai pelatihan mandiri pendidikan berjenjang pendidikan inklusif

Strategi / Tindak Lanjut :

1. PDM 01 – Program Sekolah Penggerak

- Berkoordinasi dengan intensif dengan Dinas Pendidikan untuk pemetaan sekolah imbas
- Memilihkan sekolah imbas yang terdekat dari yang terjauh pada long list yang ada
- Mengkombinasikan sekolah imbas yang jauh dan yang dekata, tidak semua diberikan sekolah yang

2. PDM 02 – Implementasi Kurikulum Merdeka

- Mempelajari juknis pelaksanaan Bulan Merdeka untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dan koordinasi dengan PDM 011 terkait kegiatan yang akan dilaksanakan
- Periode pengiriman karya selama sebulan dan dipromosikan melalui sosialisasi, media sosial, WAG dan brosur serta memantau jumlah yang mengirimkan karya
- Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan
- Mempromosikan kegiatan melalui media sosial, WAG dan brosur serta melaksanakan lomba yang menarik minat pengunjung untuk hadir

3. PDM 03B – Transformasi Digital untuk Pembelajaran

- Berkoordinasi kepada daerah untuk dapat memfasilitasi sekolah terkait ketersediaan internet dan listrik

4. PDM 04A – Rapor Pendidikan dan PBD untuk Satpen

- Mengirimkan link youtube kepada Dinas Pendidikan untuk disebarluaskan di Satuan pendidikan untuk dipelajari secara mandiri
- Mengemas kegiatan dengan membuat aktivitas interaksi dengan peserta santai dan menarik dikemas dalam bentuk diskusi

5. PDM 05 – Kemitraan Daerah

- Coaching/Mentoring dijadwalkan rutin dalam satu bulan minimal 1 kali, dan selalu mengingatkan Pimpinan untuk melaksanakan coaching/ mentoring pegawai

- Komunitas Belajar dijadwalkan rutin satu bulan 2 kali meskipun banyak pegawai yang dinas luar tetap dilaksanakan dengan peserta yang ada di kantor
- Melakukan Advokasi ke Dinas pendidikan terkait Sistem Pengangkatan KSPS
- Mendampingi Dinas Pendidikan saat akan mulai seleksi KSPS
- Membuat grup WA sebagai wadah diskusi Bersama
- Koordinasi rutin dengan Tim PPDB Daerah terkait Juknis PPDB dan SK Tim agar segera terbit
- Pendampingan intens melalui daring ke Tim PPDB Daerah, di awal Juni akan dilakukan pendampingan secara luring tatap muka
- Koordinasi intens dengan Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan

6. PDM 06 – Asesmen Nasional

- Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan tersebut untuk dapat memberikan data instrumen yang belum kita peroleh
- Berkoordinasi dengan petugas tersebut untuk dapat menyelesaikan penginputan instrumen online
- Memberikan pemahaman kembali terkait tujuan dari pelaksanaan UK sesuai dengan peraturan/pedoman
- Berkoordinasi dengan tim teknis provinsi terkait jadwal pelaksanaan UK di seluruh kab/kota dan berkoordinasi dengan satuan PKBM
- Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mendorong satuan PKBM untuk melaksanakan UK

7. PDM 07 – Publikasi dan Komunikasi

- Mencari materi konten / bahan publikasi melalui WA Grup PIC PDM 07 dan Sosial media Setdijen Paud Dasmen
- Menginformasikan kepada seluruh PDM baik secara langsung maupun melalui WA Grup untuk dapat menginformasikan kepada PDM 07 jika memiliki bahan publikasi/materi konten yang perlu dipublikasikan
- Selalu berkoordinasi dengan narasumber
- berdiskusi dengan seluruh anggota PDM dalam menentukan tema dan narasumber webinar
- mencari inspirasi tema dan narasumber dari PDM yang lain

8. PDM 09 – Transisi PAUD SD

- Berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Utara, dengan menyertakan SE Transisi PAUD-MI yang telah disahkan oleh Kementerian Agama dan Kemendikbudristek
- Berupaya untuk membangun komunikasi dan kerjasama dengan melibatkan Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Utara dalam pelaksanaan Gerakan Transisi PAUD-SD
- Menyelaraskan persepsi terkait Gerakan Transisi PAUD-SD dengan pihak Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Utara

9. PDM 10 – Pemulihan Pembelajaran

- Koordinasi dengan Tim Kampus mengajar pusat, Dinas Pendidikan, DPL, dan Mahasiswa
- Bekerjasama dengan Agen Penggerak untuk melakukan pengimbasan kesekolah - sekolah sasaran PDM 10 yang beradan di remote area

10. PDM 11 – Gerakan Sekolah Sehat

- Mempelajari Juknis penyelenggaraan Semarak Gerakan Sekolah Sehat dan Berkoordinasi dan bekerja sama dengan PDM 02 Implementasi Kurikulum Merdeka
- Pengiriman karya dibuka selama satu bulan dan dipromosikan melalui sosialisasi dan sosial media

11. PDM 12 – Pendidikan Inklusi

- Rutin berkoordinasi dengan Disdik secara langsung (Telepon/Whatsapp)
- Mendorong agar Kepala Sekolah dan Guru untuk mengakses Pelatihan Berjenjang bidang Pendidikan Inklusif tingkat Dasar melalui PMM (Platform Merdeka Mengajar)
- Sosialisasi Pembentukan ULD dilakukan via Telepon dan Whatsapp kepada Disdik setiap Daerah dengan bantuan Perwalian Daerah UPT
- Kegiatan ditayangkan di youtube BPMP Kaltara sehingga dapat diakses kapanpun bagi yang tidak dapat hadir saat kegiatan
- Mengenalkan dan Menyebarkan dashboard Penggunaan Topik Pelatihan Mandiri di PMM saat kegiatan.

2. [SK 1.0 Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen] IKK 1.2 Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)

Progress / Kegiatan :

Sama dengan IKK 1.1, untuk IKK 1.2 capaiannya baru dapat diketahui di akhir tahun 2024 sehingga untuk triwulan 2 masih dalam proses dan belum dapat diketahui capaiannya. Untuk mendukung ketercapaian IKK 1.2 maka BPMP Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

1. PDM 02 (Festival Kurikulum Merdeka)
2. PDM 02 (Refleksi IKM Tahap I)
3. PDM 05 (Penjaringan Informasi Komunitas Belajar)
4. PDM 05 (FGD Tindak Lanjut Program Guru Penggerak)
5. PDM 06 (Workshop Kebijakan Uji Kesetaraan (UK))
6. PDM 06 (Pemantauan/Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Uji Kesetaraan (UK) Tahun 2024)
7. PDM 07 (Produksi Konten Program Prioritas)
8. PDM 09 (Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Produk Pembelajaran Transisi PAUD-SD Kepada Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag)
9. PDM 10 (Supervisi Program Pemulihan Pembelajaran (Kampus Mengajar angkatan 7))

10. PDM 10 (Koordinasi dengan DPL, Dinas Pendidikan, dan Sekolah sasaran dalam kegiatan FKK)
11. PDM 11 (Semarak Gerakan Sekolah Sehat)
12. PDM 12 (Sosialisasi Kebijakan Pembentukan Unit Layanan Disabilitas di Daerah)
13. PDM 01 (Pemetaan Sekolah Pelaksana PSP dan Sekolah Imbas)
14. PDM 01 (Workshop Pengimbasan oleh PSP Angkatan 1)
15. PDM 03B (Webinar OCB series 1)
16. PDM 05 (Pendampingan PPDB Daerah)
17. PDM 05 (Coaching/Mentoring SDM UPT oleh Plt. Kepala)
18. PDM 05 (Pelaksanaan Komunitas Belajar (SKOM))
19. PDM 06 (Pengolahan dan Analisis data hasil pemantauan/monitoring pelaksanaan Uji Kesetaraan (UK) Tahun 2024)
20. PDM 06 (Finalisasi laporan hasil analisis data pemantauan/monitoring pelaksanaan Uji Kesetaraan (UK) Tahun 2024)
21. PDM 07 (Podcast dalam rangka edukasi dan advokasi program prioritas)
22. PDM 10 (Melakukan verifikasi sasaran sekolah penerima Buku bacaan bermutu Tahap 2)
23. PDM 10 (Fasilitasi Penyelenggaraan kegiatan pengimbasan Peningkatan literasi dan numerasi)
24. PDM 03B (Advokasi OCB kab Malinau dan Nunukan)
25. PDM 04A (Advokasi Aktivitas Komunitas Belajar terkait Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data)
26. PDM 05 (Pemantauan PPDB)
27. PDM 07 (Webinar dalam rangka edukasi dan advokasi program prioritas)
28. PDM 10 (Penguatan Komunitas Belajar antar sekolah sebagai strategi penguatan program literasi dan numerasi oleh UPT)

Kendala / Permasalahan :

1. PDM 01 – Program Sekolah Penggerak

- Pemetaan sekolah imbas hanya diberikan waktu singkat sebelum dikumpulkan
- Long list calon sekolah imbas kebanyakan berada di lokasi yang jauh dan membutuhkan banyak biaya

2. PDM 02 – Implementasi Kurikulum Merdeka

- Kegiatan digabung dengan kegiatan Bulan Merdeka untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2024 dan kegiatan PDM 011 Semarak Gerakan Sekolah Sehat
- Jumlah partisipan yang mengirimkan karya sedikit
- Kepala Daerah yang diundang untuk membuka kegiatan tidak hadir
- Pengunjung yang hadir sedikit karena tempat kegiatan di halaman kantor BPMP yang jauh dari keramaian

3. PDM 03B – Transformasi Digital untuk Pembelajaran

- Penerima chromebook tidak memiliki akses internet dan listrik

4. PDM 04A – Rapor Pendidikan dan PBD untuk Satpen

- Tidak semua Komunitas Belajar mengikut kegiatan Advokasi Aktivitas Komunitas Belajar terkait Pemanfaatan Rapor Pendidikan
- Kegiatan dilaksanakan secara daring

5. PDM 05 – Kemitraan Daerah

- Coaching/Mentoring masih belum terjadwal dengan baik karena banyaknya SDM UPT yang dinas luar karena kegiatan yang padat
- Komunitas Belajar belum terjadwal rutin karena SDM UPT banyak dinas luar
- Masih banyaknya dinas yang belum paham tentang penggunaan Sistem Pengangkatan KSPS saat seleksi KSPS
- Belum terbitnya Juknis PPDB dan SK Tim PPDB Daerah
- Belum 100% terbentuknya TPPK Jenjang SD wilayah Malinau
- Belum 100% terbentuknya TPPK jenjang PAUD wilayah Tarakan, Malinau, Nunukan, Bulungan
- Dasbor PPKSP terkena imbas dari virus ransomware sehingga tidak bisa unggah SK TPPK
- Dapodik sedang menunggu rilis terbaru sehingga tidak bisa input kepanitiaan TPPK

6. PDM 06 – Asesmen Nasional

- Masih terdapat miskonsepsi terkait tujuan pelaksanaan UK
- Terdapat beberapa data instrumen dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau yang belum diperoleh
- Beberapa petugas monitoring yang lambat dalam menginput hasil instrumen ke link
- Terdapat Dinas Pendidikan yang tidak memberi data terkait jadwal pelaksanaan UK di wilayahnya
- Terdapat satuan PKBM yang sudah mendaftar UK namun tidak jadi melaksanakan karena UK dianggap tidak wajib

7. PDM 07 – Publikasi dan Komunikasi

- Tidak semua memberikan informasi terkait bahan publikasi/materi konten dari masing-masing PDMnya kepada tim Publikasi
- Menyesuaikan waktu pelaksanaan podcast dengan narasumber
- Menentukan tema dan narasumber yang kompeten untuk webinar

8. PDM 09 – Transisi PAUD-SD

- Dalam gerakan Transisi PAUD-SD melibatkan Satuan Pendidikan yang berada dalam naungan Kemenag, sehingga dibutuhkan koordinasi lebih

9. PDM 10 – Pemulihan Pembelajaran

- Tidak semua sekolah menjadi sasaran supervisi program pemulihan pembelajaran;
- Belum semua sekolah sasaran PDM 10 dapat tercover dalam kegiatan

10. PDM 11 – Gerakan Sekolah Sehat

- Kegiatan digabungkan dengan kegiatan Festival Kurikulum Merdeka dan Bulan Merdeka Belajar untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional Tahun 2024
- Jumlah partisipan yang mengikuti lomba sedikit

11. PDM 12 – Pendidikan Inklusi

- Disdik belum memiliki PIC yang mengampu Pendidikan Inklusif sehingga menyulitkan berkoordinasi dengan Disdik
- Kurangnya Jumlah GPK (Guru Pendamping Khusus)
- Terbatasnya Anggaran
- Lambannya progress penyusunan SK ULD di daerah
- Kegiatan dilaksanakan secara daring sehingga banyak peserta tidak hadir
- Miskonsepsi pemda terkait pembentukan ULD merupakan pembentukan UPT baru
- Masih banyak guru yang belum mendapatkan informasi mengenai pelatihan mandiri pendidikan berjenjang pendidikan inklusif

Strategi / Tindak Lanjut :

1. PDM 01 – Program Sekolah Penggerak

- Berkoordinasi dengan intensif dengan Dinas Pendidikan untuk pemetaan sekolah imbas
- Memilihkan sekolah imbas yang terdekat dari yang terjauh pada long list yang ada
- Mengkombinasikan sekolah imbas yang jauh dan yang dekata, tidak semua diberikan sekolah yang

2. PDM 02 – Implementasi Kurikulum Merdeka

- Mempelajari juknis pelaksanaan Bulan Merdeka untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dan koordinasi dengan PDM 011 terkait kegiatan yang akan dilaksanakan
- Periode pengiriman karya selama sebulan dan dipromosikan melalui sosialisasi, media sosial, WAG dan brosur serta memantau jumlah yang mengirimkan karya
- Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan
- Mempromosikan kegiatan melalui media sosial, WAG dan brosur serta melaksanakan lomba yang menarik minat pengunjung untuk hadir

3. PDM 03B – Transformasi Digital untuk Pembelajaran

- Berkoordinasi kepada daerah untuk dapat memfasilitasi sekolah terkait ketersediaan internet dan listrik

4. PDM 04A – Rapor Pendidikan dan PBD untuk Satpen

- Mengirimkan link youtube kepada Dinas Pendidikan untuk disebarluaskan di Satuan pendidikan untuk dipelajari secara mandiri
- Mengemas kegiatan dengan membuat aktivitas interaksi dengan peserta santai dan menarik dikemas dalam bentuk diskusi

5. PDM 05 – Kemitraan Daerah

- Coaching/Mentoring dijadwalkan rutin dalam satu bulan minimal 1 kali, dan selalu mengingatkan Pimpinan untuk melaksanakan coaching/mentoring pegawai
- Komunitas Belajar dijadwalkan rutin satu bulan 2 kali meskipun banyak pegawai yang dinas luar tetap dilaksanakan dengan peserta yang ada di kantor
- Melakukan Advokasi ke Dinas pendidikan terkait Sistem Pengangkatan KSPS
- Mendampingi Dinas Pendidikan saat akan mulai seleksi KSPS
- Membuat grup WA sebagai wadah diskusi Bersama
- Koordinasi rutin dengan Tim PPDB Daerah terkait Juknis PPDB dan SK Tim agar segera terbit
- Pendampingan intens melalui daring ke Tim PPDB Daerah, di awal Juni akan dilakukan pendampingan secara luring tatap muka
- Koordinasi intens dengan Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan

6. PDM 06 – Asesmen Nasional

- Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan tersebut untuk dapat memberikan data instrumen yang belum kita peroleh
- Berkoordinasi dengan petugas tersebut untuk dapat menyelesaikan penginputan instrumen online
- Memberikan pemahaman kembali terkait tujuan dari pelaksanaan UK sesuai dengan peraturan/pedoman
- Berkoordinasi dengan tim teknis provinsi terkait jadwal pelaksanaan UK di seluruh kab/kota dan berkoordinasi dengan satuan PKBM

- Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mendorong satuan PKBM untuk melaksanakan UK

7. PDM 07 – Publikasi dan Komunikasi

- Mencari materi konten / bahan publikasi melalui WA Grub PIC PDM 07 dan Sosial media Setdijen Paud Dasmen
- Menginformasikan kepada seluruh PDM baik secara langsung maupun melalui WA Grub untuk dapat menginformasikan kepada PDM 07 jika memiliki bahan publikasi/materi konten yang perlu dipublikasikan
- Selalu berkoordinasi dengan narasumber
- berdiskusi dengan seluruh anggota PDM dalam menentukan tema dan narasumber webinar
- mencari inspirasi tema dan narasumber dari PDM yang lain

8. PDM 09 – Transisi PAUD SD

- Berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Utara, dengan menyertakan SE Transisi PAUD-MI yang telah disahkan oleh Kementerian Agama dan Kemendikbudristek
- Berupaya untuk membangun komunikasi dan kerjasama dengan melibatkan Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Utara dalam pelaksanaan Gerakan Transisi PAUD-SD
- Menyelaraskan persepsi terkait Gerakan Transisi PAUD-SD dengan pihak Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Utara

9. PDM 10 – Pemulihan Pembelajaran

- Koordinasi dengan Tim Kampus mengajar pusat, Dinas Pendidikan, DPL, dan Mahasiswa
- Bekerjasama dengan Agen Penggerak untuk melakukan pengimbasan kesekolah - sekolah sasaran PDM 10 yang beradan di remote area

10. PDM 11 – Gerakan Sekolah Sehat

- Mempelajari Juknis penyelenggaraan Semarak Gerakan Sekolah Sehat dan Berkoordinasi dan bekerja sama dengan PDM 02 Imlementasi Kurikulum Merdeka
- Pengiriman karya dibuka selama satu bulan dan dipromosikan melalui sosialisasi dan sosial media

11. PDM 12 – Pendidikan Inklusi

- Rutin berkoordinasi dengan Disdik secara langsung (Telepon/Whatsapp)
- Mendorong agar Kepala Sekolah dan Guru untuk mengakses Pelatihan Berjenjang bidang Pendidikan Inklusif tingkat Dasar melalui PMM (Platform Merdeka Mengajar)
- Sosialisasi Pembentukan ULD dilakukan via Telepon dan Whatsapp kepada Disdik setiap Daerah dengan bantuan Perwalian Daerah UPT
- Kegiatan ditayangkan di youtube BPMP Kaltara sehingga dapat diakses kapanpun bagi yang tidak dapat hadir saat kegiatan
- Mengenalkan dan Menyebarkan dashboard Penggunaan Topik Pelatihan Mandiri di PMM saat kegiatan.

3. [SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara] IKK 2.1 Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara

Progress / Kegiatan :

Capaian untuk sakip 2024 baru dapat diketahui setelah dilakukan evaluasi oleh unit utama dan inspektorat yakni pada akhir tahun 2024. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendukung ketercapaian target sakip diantaranya:

1. Menyusun laporan kinerja 2023 diawal tahun 2024
2. Menyusun perjanjian kinerja 2024
3. Menyusun rencana aksi atas perjanjian kinerja 2024
4. Melakukan rapat evaluasi TW 1 terkait kinerja lembaga
5. Melakukan tindak lanjut terkait LHE sakip 2023
6. Melakukan reuiu renstra
7. Persiapan evaluasi sakip 2024

Kendala / Permasalahan :

1. Program dan kegiatan yang begitu banyak di tahun 2024 membuat tim Sakip juga harus tersibukkan dengan kegiatan-kegiatan tersebut, sehingga kurang fokus pada pemenuhan dokumen sakip.
2. Terjadinya maintenece terhadap beberapa aplikasi termasuk aplikasi Spasikita yang merupakan aplikasi penunjang Sakip.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Memaksimalkan tim yang ada;
2. Melakukan pemetaan dokumen sakip secara manual.

4. [SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara] IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara

Progress / Kegiatan :

Sama dengan IKK yang lain, kinerja anggaran juga ditargetkan akan tercapai pada akhir periode anggaran sehingga akan dilaporkan nilai capaiannya pada akhir tahun 2024. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan untuk ketercapaian target kinerja anggaran diantaranya:

1. Melakukan pemantauan nilai IKPA secara berkala
2. Menyusun laporan capaian output bulanan
3. Mengikuti evaluasi IKPA dan NKA bersama biro perencanaan Kemdikbudristek
4. Mengikuti evaluasi IKPA bersama Kanwil DJPB Kaltara
5. Menyusun RPD Halaman III Dipa Triwulan Ke 2

Kendala / Permasalahan :

1. Terjadinya keterlambatan proses lelang pengadaan konstruksi Aula akibat aplikasi LPSE down dampak dari Pusat Data Nasional yang *dihacker*;
2. Akibat dari down nya LPSE yang lama perbaikannya tidak menentu akhirnya RPD belanja modal di bulan agustus dan september dibuat sebesar Rp. 0. Hal ini dapat mengakibatkan tingginya deviasi jika ternyata LPSE membaik lebih awal;
3. Masih terdapat blokir anggaran AA di belanja barang. Hal ini juga dapat menurunkan nilai serapan anggaran jika blokir sudah terbuka.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Melakukan koordinasi secara intensif dengan biro umum UKPBJ Kemdikbudristek;
2. Mengupayakan tidak ada deviasi di belanja lainnya;
3. Memaksimalkan serapan anggaran belanja barang untuk menutupi tambahan anggaran setelah buka blokir.

C. Capaian Fisik dan Anggaran Per-Rincian Output Triwulan 2

Uraian Rincian Output	Satuan	Volume	Capaian	Sisa Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
[417653.DI.6397.QDB.750] Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	751	0	751	7.523.375.000	2.475.546.553	5.047.828.447
[417653.DI.6397.QDB.850] Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	631	0	631	125.260.000	0	125.260.000
[417653.WA.2005.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	0	1	475.000.000	134.280.628	340.719.372
[417653.WA.2005.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	0	1	5.812.961.000	2.963.989.835	2.848.971.165
[417653.WA.2005.EBB.971] Layanan Prasarana Internal	Unit	1	0	1	4.379.000.000	306.639.000	4.072.361.000
Total					18.315.596.000	5.880.456.016	12.435.139.984

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Upayakan terus mengawal objektif masing-masing PDM, jangan sampai kegiatan yang dilaksanakan tidak memiliki dampak terhadap objektif masing-masing
2. Maksimalkan penggunaan media yang ada untuk mengurangi dampak masalah kekurangan anggaran
3. Lakukan koordinasi yang baik dengan semua tim yang terlibat dalam Sakip dan lakukan pembagian tugas agar tidak memberatkan
4. Lakukan tindak lanjut terhadap nilai IKPA berdasarkan hasil pertemuan dengan tim Biro Perencanaan maupun dengan Kanwil DJPB Kaltara.



Tanjung Selor, 07 Agustus 2024
Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara,

Jarywoko
NIP. 197003191997031001



**Laporan Kinerja Triwulan 3
BPMP Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2024**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada BPMP Provinsi Kalimantan Utara selama triwulan 3 tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen				
[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	3.92	%	0	0.00
[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	100	%	0	0.00
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara				
[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	A	Predikat	-	-
[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	96.36	Nilai	0	0.00

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen

[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya

Progress/Kegiatan

IKK 1.1 baru akan terlihat capaiannya di akhir tahun 2024 nanti, sehingga pada triwulan 3 ini masih belum dapat diketahui capaian IKK 1.1. Untuk mendukung ketercapaian IKK 1.1 maka BPMP Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya:

1. PDM 01 (Pemantauan dan Percepatan Tingkat Transformasi Satpen)
2. PDM 01 (Pelaksanaan Forum Pemangku Kepentingan)
3. PDM 01 (Visitasi tindak lanjut pelaksanaan PSP oleh pemda)
4. PDM 01 (Pendampingan dan Monitoring Pengimbasan dan Kontributor Praktik Baik di PMM)
5. PDM 02 (Mensosialisasikan berbagai media komunikasi untuk membangun persepsi positif orangtua terhadap kurikulum merdeka)
6. PDM 02 (Visitasi IKM)
7. PDM 02 (Advokasi IKM bagi mitra pembangunan IKM)
8. PDM 02 (Pemantauan Dan Evaluasi Peran Mitra Pembangunan Tahun 2024)
9. PDM 03A (Kegiatan pemantauan daerah dan satuan pendidikan terkait penggunaan ARKAS 4.0 BOP)

10. PDM 03A (Bimbingan Teknis Satuan Pendidikan Terkait fitur Rencana Belanja Integrasi ARKAS-SIPLah)
11. PDM 03A (Pemantauan Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan Terkait Pelaporan BOSP melalui ARKAS Tahap 1 TA 2024)
12. Sosialisasi kepada Pemda dan Satuan Pendidikan terkait program SIAR
13. PDM 03B (Kegiatan advokasi optimalisasi chromebook dan Belajar.id Kab. Malinau dan Kab. Nunukan)
14. PDM 03B (Bimtek dan peningkatan kapasitas kombel belajar.id)
15. PDM 03B (Webinar optimatiasi chromebook dan belajar id)
16. PDM 03B (Rapat koordinasi pemantik daerah)
17. PDM 04A (Pemantauan hasil pelaksanaan Advokasi pemanfaatan rapor pendidikan tahun 2024)
18. PDM 04A (Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Hasil Implementasi Transformasi Satuan Pendidikan)
19. PDM 04B (Melakukan pendampingan perencanaan Pemda terkait SPM pendidikan oleh UPT)
20. PDM 04B (Melaksanakan Rakortek kabupaten/kota BAPPEDA provinsi oleh UPT tahun 2024)
21. PDM 04B (Melaksanakan pendampingan realisasi SPM pendidikan semester 1 oleh UPT)
22. PDM 04B (Melakukan pengumpulan bahan laporan kegiatan pendampingan realisasi SPM pendidikan semester I oleh UPT)
23. PDM 05 (Melaksanakan rapat evaluasi capaian project PDM triwulan 2)
24. PDM 05 (Melaksanakan komunitas belajar (kombel)
25. PDM 05 (Melaksanakan FGD persiapan Bimtek penguatan PPKSP)
26. PDM 05 (Coaching mentoring SDM UPT, Bimtek PPKSP)
27. PDM 05 (Coaching/Mentoring kelompok oleh Kepala)
28. PDM 06 (Kegiatan Pembekalan dan penyamaan persepsi calon narasumber kegiatan Workshop Kebijakan AN dan Sulingjar Tahun 2024, menyelesaikan kegiatan Workshop Kebijakan AN dan Sulingjar Tahun 2024)
29. PDM 06 (Pembekalan dan penyamaan persepsi calon narasumber Penguatan dan Advokasi bagi Tim Posko/Helpdesk AN dan Sulingjar 2024, Penguatan dan Advokasi bagi Tim Posko/Helpdesk AN dan Sulingjar 2024)
30. PDM 06 (Monitoring dan Advokasi Persiapan Pelaksanaan AN Tahun 2024)
31. PDM 06 (Monitoring dan Advokasi Persiapan Pelaksanaan AN Tahun 2024 jenjang SMA dan SMP)
32. PDM 06 (Pemantauan/Monitoring Pelaksanaan AN/Sulingjar Tahun 2024)
33. PDM 06 (Pelaksanaan Pemantauan/Monitoring Pelaksanaan AN/Sulingjar Tahun 2024 jenjang SMA sederajat)
34. PDM 06 (Pelaksanaan Pemantauan/Monitoring Pelaksanaan AN/Sulingjar Tahun 2024 jenjang SMP sederajat)
35. PDM 06 (Monitoring dan Advokasi Persiapan Pelaksanaan Asesmen Nasional Tahun 2024 jenjang SD Sederajat)
36. PDM 07 (Produksi Konten Program Prioritas, Media Placement lokal dalam rangka kampanye program prioritas)
37. PDM 07 (Mengikuti sosialisasi Penyeragaman Laman UPT)
38. PDM 07 (Memproduksi konten Podcast dalam rangka edukasi dan advokasi program prioritas)
39. PDM 08 (Merencanakan Pelaksanaan Coaching untuk ketercapaian 13 tahun diseluruh kabupaten/Kota secara daring)
40. PDM 08 (Melaksanakan kegiatan hotel/Bimtek untuk memberikan gambaran terhadap ATS, APK dan APS ditingkat Kabupaten/Kota tahun 2024)
41. PDM 09 (Advokasi dan Pendampingan Kebijakan dan Produk Pembelajaran Transisi PAUD-SD Kepada Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag)
42. PDM 09 (Supervisi Pelaksanaan MPLS ke Satuan Pendidikan)
43. PDM 09 (Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi ke Dinas Pendidikan dan Mitra tentang Kebijakan MPLS, Perubahan Pembelajaran, dan aktivasi Forkom PAUD-SD)
44. PDM 09 (Mengadakan seri webinar guna memfasilitasi Guru yang menjadi pelaksana kegiatan magang terkait dengan Gerakan Transisi PAUD-SD (sebagai hasil pengimbasan pelaksanaan kegiatan)
45. PDM 10 (Internalisasi Pemulihan Pembelajaran, Diskusi Progres Data sasaran optimalisasi BBB dan uji keterbacaan Panduaan Gelar Aksi Nyata Pemulihan Pembelajaran)
46. PDM 10 (Koordinasi Pelepasan Mahasiswa Kampus Mengajar Angkatan 8)
47. PDM 10 (Bimbingan Teknis laman Pemetaan Program Kampus Mengajar)
48. PDM 10 (Sosialisasi Mitra Pembangunan Daerah)
49. PDM 10 (Bimbingan Teknis Laman Pemetaan Mahasiswa Kampus Mengajar, Rapat Internal PDM 10, Pemetaan Peserta Program Kampus Mengajar Angkatan 8)

50. PDM 10 (Penguatan digitalisasi melalui Pemulihan Pembelajaran)
51. PDM 10 (Pelepasan Mahasiswa Kampus Mengajar Angkatan 8)
52. PDM 10 (Pendampingan Penguatan Intervensi Pemulihan Pembelajaran Oleh UPT Tahap II secara luring di UBT)
53. PDM 10 (Pembekalan Mahasiswa Kampus Mengajar secara daring)
54. PDM 10 (Forum Komunikasi dan koordinasi dengan DPL jenjang pusat)
55. PDM 11 (Advokasi persiapan pelaksanaan pemetaan kebugaran peserta didik pada sekolah binaan GSS Tahun 2024)
56. PDM 11 (Asesmen implementasi GSS (midline) kepada satuan pendidikan sampel (non binaan))
57. PDM 11 (Sosialisasi pelaksanaan GSS)
58. PDM 11 (Sosialisasi dan Advokasi pelaksanaan TKSI ke satuan pendidikan)
59. PDM 11 (Pendampingan pelaksanaan TKSI)
60. PDM 12 (Advokasi Kebijakan Layanan Pendidikan Inklusif ke Pemda dan Satpen, Dashboard Penggunaan Topik Pelatihan Mandiri di PMM)
61. PDM 12 (Pendampingan Pelatihan Berjenjang Pendidikan Inklusif bersama Tim PDM 12 Kemdikbudristek)
62. PDM 12 (Melaksanakan podcast SETARA (Seputar Pendidikan Kalimantan Utara) Pendidikan Inklusi bersama Dr. H. Yaswardi, M.Si WP Ahli Utama Direktorat PMPK, Ditjen PDM Kemdikbudristek)
63. PDM 14 (Merencanakan pelaksanaan Coaching dalam rangka Percepatan Sinkronisasi Dapodik Tahun 2024 secara daring)
64. PDM 14 (Melakukan Uji Petik Satuan Pendidikan untuk mendapatkan gambaran yang representatif terhadap kondisi kualitas data Dapodik satuan Pendidikan)
65. PDM 14 (Melakukan Kegiatan Uji Petik Anomali Data)
66. PDM 14 (Coaching dalam rangka Percepatan Sinkronisasi Dapodik Tahun 2024 secara daring)

PDM 14 (Melakukan Uji Petik Dapodik untuk tingkat kesesuaian data dengan standar atau aturan yang telah ditetapkan)

Kendala/Permasalahan

1. PDM 01 – PSP
 - Tidak semua sekolah bisa dikunjungi karena terkait anggaran
 - Petunjuk pelaksanaan kegiatan tidak jelas dari PDM-01 Pusat
1. PDM 02 – IKM
 - Pembagian wilayah sasaran karena kegiatan digabung dengan kegiatan PDM 01 tentang Visitasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak
 - Penentuan sekolah sasaran
 - Penyusunan instrumen
 - Terbatasnya Anggaran Sehingga tidak bisa mengundang Narasumber dari Pusat
1. PDM 03A – Transformasi Digital untuk Sumber Daya Sekolah
 - Operator penerima BOP yang masih baru
 - Perangkat penerima BOP masih standar
 - Keterlambatan pelaporan
 - Sasaran peserta
1. PDM 03B – Transformasi Digital untuk Satuan Pendidik
 - Penerima chromebook tidak memiliki akses internet dan Listrik
 - Sebagian penerima chromebook berada di remote area sehingga pemanfaatan chromebook untuk pembelajaran masih rendah
 - Masih banyak satuan pendidikan yang belum memahami cara aktivasi akun belajar berakibat rendahnya aktivasi akun belajar dan rendahnya pemanfaatan GWFE untuk pembelajaran
1. PDM 04A – Rapor Pendidikan dan PBD untuk Satpen

- Belum memahami 8 Aksi Transformasi Satuan Pendidikan Sekolah Yang Kita Cita-Citakan (SYKCC)
- Belum mengetahui Perbaikan Layanan Berkelanjutan

1. PDM 04B - Rapor Pendidikan dan PBD untuk Pemda dan Publik

- Pemda belum melakukan Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan sesuai dengan Indikator Prioritas pada Rapor Pendidikan Daerah

1. PDM 05 – Kemitraan Daerah

- Masih belum ada Dinas Pendidikan yang melakukan pengangkatan KS/PS melalui Sistem Pengangkatan KSPS
- Satuan pendidikan jenjang PAUD belum 100% membentuk TPPK
- Terdapat beberapa sekolah dapodiknya terkunci pasca PPDB karena kelebihan daya tampung
- Melakukan Pengelolaan Hasil Pemantauan PPDB

1. PDM 06 – AN

- Untuk jenjang SMA sederajat tidak bisa melakukan pemantauan pada jenjang kesetaraan dikarenakan jadwal yang berbeda antara SMA dan kesetaraan paket C
- Pelaksanaan AN jenjang SMP berjalan lancar walaupun masih terdapat beberapa SMP yang belum terpenuhi fasilitas (perangkat komputer, jaringan, dan listrik)
- Beberapa satuan pendidikan melaksanakan AN terlambat dikarenakan SDM pelaksana AN yang tidak hadir tepat waktu

1. PDM 07 – Publikasi dan Komunikasi

- Tidak semua memberikan informasi terkait bahan publikasi/materi konten dari masing-masing PDMnya kepada tim Publikasi
- Menyesuaikan waktu pelaksanaan podcast dengan narasumber

1. PDM 08 – Transformasi Tata Kelola dan Regulasi

- Pemerintah daerah dalam hal ini selaku Dinas Pendidikan belum mensinkronkan antara Permendikbud dan Kebijakan Daerah tentang ATS, APK dan APS tahun 2024

1. PDM 09 – Transisi PAUD-SD

- Masih terdapat banyak miskonsepsi yang terjadi di “lapangan” sehingga banyak terjadi kesalahpahaman terhadap Gerakan Transisi PAUD-SD

1. PDM 10 – Pemulihan Pembelajaran

- Sasaran Peserta yang berubah - ubah karena menyesuaikan dengan sekolah yang harusnya mendapatkan intervensi PDM 10
- Materi literasi dan numerasi kurang tersampaikan karena digabung dengan materi lainnya
- Tidak dapat mengundang seluruh Mahasiswa KM 8 yang dinyatakan lolos
- Kurangnya koordinasi antara PDM 10 dengan PDM yang akan menyampaikan materi terkait digitalisasi sehingga materi disampaikan secara daring

1. PDM 11 – GSS

- Sekolah tidak melaksanakan TKS

1. PDM 12 – Pendidikan Inklusi

- Dari data masih banyak guru yang belum sampai pada kategori ketuntasan topik pada pelatihan berjenjang pendidikan inklusif tingkat dasar di PMM
- Masih ada beberapa daerah yang belum mengeluarkan SK Pembentukan ULD bidang pendidikan (masih proses), antara lain Kab. Bulungan, Kab Tana Tidung, Kab. Nunukan dan Kab. Malinau
- Masih sedikit guru yang menyelesaikan aksi nyata di pendidikan berjenjang pendidikan inklusif tingkat dasar di PMM

1. PDM 14 – Analisis Data Pendidikan

- Belum ada kesesuaian data dengan standar atau aturan yang telah ditetapkan.
- Data pada metabase Uji Petik berubah setiap harinya

Strategi/Tindak Lanjut

1. PDM 01 – PSP

- mengambil sample dari masing-masing jenjang untuk mendapatkan gambaran setiap jenjang
- Lebih rutin berkoordinasi dengan tim pdm-01 pusat untuk mendapatkan pencerahan/solusi

1. PDM 02 – IKM

- Koordinasi dengan PDM 01 terkait pembagian wilayah sasaran
- Memetakan sekolah yang sudah IKM tahun ajaran 2022/2023 dan tahun ajaran 2023/2024
- Mempelajari semua hasil identifikasi pada saat kegiatan refleksi IKM tahap I
- Untuk Narasumber dari pusat, kita menggunakan metode daring untuk menyampaikan materi

1. PDM 03A – Transformasi Digital untuk Satuan Pendidikan

- Melakukan kegiatan bimtek kepada operator BOSP yang bersedia mengimbaskan dan membuat group operator untuk berkoordinasi lebih lanjut
- Memaksimalkan/upgrade perangkat yang ada (jangka pendek), menghimbau satuan pendidikan mengganti perangkat yang sesuai spesifikasi dari aplikasi (jangka panjang)
- Mengadakan kegiatan Pemantauan Pemerintah Daerah Dan Satuan Pendidikan Terkait Pelaporan BOSP Melalui ARKAS Tahap 1 TA 2024 untuk memastikan Satuan Pendidikan melakukan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana BOSP disusun berdasarkan hasil pelaksanaan penatausahaan Dana BOSP dan melaporkan penggunaan dananya melalui ARKAS tepat waktu
- Peserta harus melakukan pengimbasan

1. PDM 03B – Transformasi Digital untuk Satuan Pendidik

- Berkoordinasi kepada daerah untuk dapat memfasilitasi sekolah terkait ketersediaan internet dan listrik
- Melakukan advokasi kepada pemda melalui konsultan untuk bisa memberikan afirmasi kepada penerima chromebook di remote area
- Melakukan kunjungan langsung ke satuan pendidikan sesuai dengan kesanggupan anggaran
- Melakukan kegiatan webinar pemanfaatan akun belajar agar bisa menyasar banyak satuan pendidikan
- Melakukan koordinasi ke PIC terkait akun belajar di dinas pendidikan untuk akselerasi aktivasi akun belajar

1. PDM 04A – Rapor Pendidikan dan PBD untuk Satpen

- Sosialisasi Sekolah Yang Kita Cita-Citakan
- Sosialisasi Alat Bantu Perbaikan Layanan Berkelanjutan bagi Kepala Sekolah
- Sosialisasi Alat Bantu Perbaikan Layanan Berkelanjutan bagi Pengawas Sekolah

1. PDM 04B - Rapor Pendidikan dan PBD untuk Pemda dan Publik

- Melakukan Koordinasi dan Pendampingan secara lebih Intensif kepada OPD Daerah Bidang Pendidikan yaitu BAPPEDA dan Dinas Pendidikan untuk menyusun SPM Bidang Pendidikan sesuai Indikator Prioritas pada Rapor Pendidikan Daerah

1. PDM 05 – Kemitraan Daerah

- Advokasi ke pemda
- Koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mendorong satuan PAUD dan SD yang belum membentuk TPPK
- Menghubungi dan mendampingi Satuan Pendidikan yang belum membentuk TPPK secara personal melalui telepon/wa
- Koordinasi dengan dinas pendidikan untuk melakukan pengajuan permohonan penambahan daya tampung

1. PDM 06 – AN

- Berkordinasi dengan Dinas Pendidikan bidang PNF untuk kordinasi terkait pelaksanaan AN pada kesetaraan paket
- Untuk tahap selanjutnya sasaran sekolah direncanakan akan ada kesetaraan paket B
- Terdapat Dinas Pendidikan memberikan bantuan berupa chromebook ke beberapa satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan melakukan koordinasi dengan pihak penyedia listrik dan penyedia internet terkait informasi pelaksanaan AN supaya pada pelaksanaan AN tidak terjadi pemeliharaan
- Satuan Pendidikan telah melakukan berbagai cara upaya untuk memenuhi fasilitas pelaksanaan AN seperti menggunakan perangkat komputer/laptop yang dimiliki sekolah (operasional) dan meminjam perangkat komputer/laptop yang dimiliki guru.
- Berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait pelaksanaan AN untuk dapat dilaksanakan tepat waktu dan mengingatkan SDM pelaksana AN untuk bisa hadir tepat waktu sesuai ketentuan

1. PDM 07 – Publikasi dan Komunikasi

- Mencari materi konten / bahan publikasi melalui WA Grub PIC PDM 07 dan Sosial media Setdijen Paud Dasmen
- Menginformasikan kepada seluruh PDM baik secara langsung maupun melalui WA Grub untuk dapat menginformasikan kepada PDM 07 jika memiliki bahan publikasi/materi konten yang perlu dipublikasikan
- Selalu berkoordinasi dengan narasumber untuk podcast

1. PDM 08 –

- Menyampaikan Kepada Dinas Pendidikan tentang Permendikbud tentang wajar 13 tahun 2024 melalui perwalian ke Dinas Pendidikan

1. PDM 09 – Transisi PAUD SD

- Mengedukasi satuan pendidikan terkait dengan Gerakan Transisi PAUD-SD
- Mengedukasi satuan pendidikan terkait dengan alur penguatan perubahan pembelajaran
- Kembali berulang mengadvokasi Dinas Pendidikan, Pokja Bunda PAUD, Mitra, Forum Komunikasi PAUD-SD terkait dengan Gerakan Transisi PAUD-SD serta terkait dengan alur penguatan perubahan pembelajaran

1. PDM 10 – Pemulihan Pembelajaran

- K oordinasi dengan Pimpinan agar menyesuaikan peserta dengan sasaran PDM 10 yang belum di intervensi (memperlihatkan Data)
- Memberikan materi berupa link , menyampaikan materi yang esensial untuk diketahui peserta
- Melakukan kegiatan pembekalan tambahan secara daring dengan melibatkan PDM lain terkait digitalisasi
- Pembekalan secara daring

1. PDM 11 – Gerakan Sekolah Sehat

- Mengadvokasi sekolah pentingnya dan manfaat pelaksanaan TKS

1. PDM 12 – Pendidikan Inklusi

- Membuat Surat edaran ke Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan terkait pelatihan berjenjang pendidikan inklusif tingkat dasar melalui PMM
- Membuat surat edaran ke dinas pendidikan terkait pembentukan ULD bidang pendidikan
- Terkait SK ULD yang belum terbit maka akan terus dilakukan komunikasi intensif ke pemda melalui perwalian daerah pdm 12 upt
- Berkoordinasi ke pemda untuk mendorong guru-guru mengikuti dan menyelesaikan topik pendidikan berjenjang pendidikan inlusif tingkat dasar di PMM

1. PDM 14 – Analisis Data Pendidikan

- UPT dan Dinas Pendidikan membantu Satuan Pendidikan yang belum Sinkronisasi
- Saat akan turun lapangan menggunakan data terupdate

[SK 1] Meningkatkan mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen

[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)

Progress/Kegiatan

Sama dengan IKK 1.1, untuk IKK 1.2 capaiannya baru dapat diketahui di akhir tahun 2024 sehingga untuk triwulan 3 masih dalam proses dan belum dapat diketahui capaiannya. Untuk mendukung ketercapaian IKK 1.2 maka BPMP Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

1. PDM 01 (Pemantauan dan Percepatan Tingkat Transformasi Satpen)
2. PDM 01 (Pelaksanaan Forum Pemangku Kepentingan)
3. PDM 01 (Visitasi tindak lanjut pelaksanaan PSP oleh pemda)
4. PDM 01 (Pendampingan dan Monitoring Pengimbasan dan Kontributor Praktik Baik di PMM)
5. PDM 02 (Mensosialisasikan berbagai media komunikasi untuk membangun persepsi positif orangtua terhadap kurikulum merdeka)
6. PDM 02 (Visitasi IKM)
7. PDM 02 (Advokasi IKM bagi mitra pembangunan IKM)
8. PDM 02 (Pemantauan Dan Evaluasi Peran Mitra Pembangunan Tahun 2024)
9. PDM 03A (Kegiatan pemantauan daerah dan satuan pendidikan terkait penggunaan ARKAS 4.0 BOP)
10. PDM 03A (Bimbingan Teknis Satuan Pendidikan Terkait fitur Rencana Belanja Integrasi ARKAS-SIPLah)
11. PDM 03A (Pemantauan Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan Terkait Pelaporan BOSP melalui ARKAS Tahap 1 TA 2024)
12. Sosialisasi kepada Pemda dan Satuan Pendidikan terkait program SIAR
13. PDM 03B (Kegiatan advokasi optimalisasi chromebook dan Belajar.id Kab. Malinau dan Kab. Nunukan)
14. PDM 03B (Bimtek dan peningkatan kapasitas kombel belajar.id)
15. PDM 03B (Webinar optimatilisasi chromebook dan belajar id)
16. PDM 03B (Rapat koordinasi pemantik daerah)
17. PDM 04A (Pemantauan hasil pelaksanaan Advokasi pemanfaatan rapor pendidikan tahun 2024)
18. PDM 04A (Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Hasil Implementasi Transformasi Satuan Pendidikan)
19. PDM 04B (Melakukan pendampingan perencanaan Pemda terkait SPM pendidikan oleh UPT)
20. PDM 04B (Melaksanakan Rakortek kabupaten/kota BAPPEDA provinsi oleh UPT tahun 2024)
21. PDM 04B (Melaksanakan pendampingan realisasi SPM pendidikan semester 1 oleh UPT)
22. PDM 04B (Melakukan pengumpulan bahan laporan kegiatan pendampingan realisasi SPM pendidikan semester I oleh UPT)
23. PDM 05 (Melaksanakan rapat evaluasi capaian project PDM triwulan 2)
24. PDM 05 (Melaksanakan komunitas belajar (kombel)
25. PDM 05 (Melaksanakan FGD persiapan Bimtek penguatan PPKSP)
26. PDM 05 (Coaching mentoring SDM UPT, Bimtek PPKSP)
27. PDM 05 (Coaching/Mentoring kelompok oleh Kepala)
28. PDM 06 (Kegiatan Pembekalan dan penyamaan persepsi calon narasumber kegiatan Workshop Kebijakan AN dan Sulingjar Tahun 2024, menyelesaikan kegiatan Workshop Kebijakan AN dan Sulingjar Tahun 2024)
29. PDM 06 (Pembekalan dan penyamaan persepsi calon narasumber Penguatan dan Advokasi bagi Tim Posko/Helpdesk AN dan Sulingjar 2024, Penguatan dan Advokasi bagi Tim Posko/Helpdesk AN dan Sulingjar 2024)
30. PDM 06 (Monitoring dan Advokasi Persiapan Pelaksanaan AN Tahun 2024)
31. PDM 06 (Monitoring dan Advokasi Persiapan Pelaksanaan AN Tahun 2024 jenjang SMA dan SMP)
32. PDM 06 (Pemantauan/Monitoring Pelaksanaan AN/Sulingjar Tahun 2024)
33. PDM 06 (Pelaksanaan Pemantauan/Monitoring Pelaksanaan AN/Sulingjar Tahun 2024 jenjang SMA sederajat)
34. PDM 06 (Pelaksanaan Pemantauan/Monitoring Pelaksanaan AN/Sulingjar Tahun 2024 jenjang SMP sederajat)
35. PDM 06 (Monitoring dan Advokasi Persiapan Pelaksanaan Asesmen Nasional Tahun 2024 jenjang SD Sederajat)
36. PDM 07 (Produksi Konten Program Prioritas, Media Placement lokal dalam rangka kampanye program prioritas)
37. PDM 07 (Mengikuti sosialisasi Penyeragaman Laman UPT)

38. PDM 07 (Memproduksi konten Podcast dalam rangka edukasi dan advokasi program prioritas)
39. PDM 08 (Merencanakan Pelaksanaan Coaching untuk ketercapaian 13 tahun diseluruh kabupaten/Kota secara daring)
40. PDM 08 (Melaksanakan kegiatan hotel/Bimtek untuk memberikan gambaran terhadap ATS, APK dan APS ditingkat Kabupaten/Kota tahun 2024)
41. PDM 09 (Advokasi dan Pendampingan Kebijakan dan Produk Pembelajaran Transisi PAUD-SD Kepada Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag)
42. PDM 09 (Supervisi Pelaksanaan MPLS ke Satuan Pendidikan)
43. PDM 09 (Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi ke Dinas Pendidikan dan Mitra tentang Kebijakan MPLS, Perubahan Pembelajaran, dan aktivasi Forkom PAUD-SD)
44. PDM 09 (Mengadakan seri webinar guna memfasilitasi Guru yang menjadi pelaksana kegiatan magang terkait dengan Gerakan Transisi PAUD-SD (sebagai hasil pengimbasan pelaksanaan kegiatan)
45. PDM 10 (Internalisasi Pemulihan Pembelajaran, Diskusi Progres Data sasaran optimalisasi BBB dan uji keterbacaan Panduaan Gelar Aksi Nyata Pemulihan Pembelajaran)
46. PDM 10 (Koordinasi Pelepasan Mahasiswa Kampus Mengajar Angkatan 8)
47. PDM 10 (Bimbingan Teknis laman Pemetaan Program Kampus Mengajar)
48. PDM 10 (Sosialisasi Mitra Pembangunan Daerah)
49. PDM 10 (Bimbingan Teknis Laman Pemetaan Mahasiswa Kampus Mengajar, Rapat Internal PDM 10, Pemetaan Peserta Program Kampus Mengajar Angkatan 8)
50. PDM 10 (Penguatan digitalisasi melalui Pemulihan Pembelajaran)
51. PDM 10 (Pelepasan Mahasiswa Kampus Mengajar Angkatan 8)
52. PDM 10 (Pendampingan Penguatan Intervensi Pemulihan Pembelajaran Oleh UPT Tahap II secara luring di UBT)
53. PDM 10 (Pembekalan Mahasiswa Kampus Mengajar secara daring)
54. PDM 10 (Forum Komunikasi dan koordinasi dengan DPL jenjang pusat)
55. PDM 11 (Advokasi persiapan pelaksanaan pemetaan kebugaran peserta didik pada sekolah binaan GSS Tahun 2024)
56. PDM 11 (Asesmen implementasi GSS (midline) kepada satuan pendidikan sampel (non binaan)
57. PDM 11 (Sosialisasi pelaksanaan GSS)
58. PDM 11 (Sosialisasi dan Advokasi pelaksanaan TKSI ke satuan pendidikan)
59. PDM 11 (Pendampingan pelaksanaan TKSI)
60. PDM 12 (Advokasi Kebijakan Layanan Pendidikan Inklusif ke Pemda dan Satpen, Dashboard Penggunaan Topik Pelatihan Mandiri di PMM)
61. PDM 12 (Pendampingan Pelatihan Berjenjang Pendidikan Inklusif bersama Tim PDM 12 Kemdikbudristek)
62. PDM 12 (Melaksanakan podcast SETARA (Seputar Pendidikan Kalimantan Utara) Pendidikan Inklusi bersama Dr. H. Yaswardi, M.Si WP Ahli Utama Direktorat PMPK, Ditjen PDM Kemdikbudristek)
63. PDM 14 (Merencanakan pelaksanaan Coaching dalam rangka Percepatan Sinkronisasi Dapodik Tahun 2024 secara daring)
64. PDM 14 (Melakukan Uji Petik Satuan Pendidikan untuk mendapatkan gambaran yang representatif terhadap kondisi kualitas data Dapodik satuan Pendidikan)
65. PDM 14 (Melakukan Kegiatan Uji Petik Anomali Data)
66. PDM 14 (Coaching dalam rangka Percepatan Sinkronisasi Dapodik Tahun 2024 secara daring)
67. PDM 14 (Melakukan Uji Petik Dapodik untuk tingkat kesesuaian data dengan standar atau aturan yang telah ditetapkan)

Kendala/Permasalahan

1. PDM 01 – PSP

- Tidak semua sekolah bisa dikunjungi karena terkait anggaran
- Petunjuk pelaksanaan kegiatan tidak jelas dari PDM-01 Pusat

1. PDM 02 – IKM

- Pembagian wilayah sasaran karena kegiatan digabung dengan kegiatan PDM 01 tentang Visitasi

Tindak Lanjut Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak

- Penentuan sekolah sasaran
- Penyusunan instrumen
- Terbatasnya Anggaran Sehingga tidak bisa mengundang Narasumber dari Pusat

1. PDM 03A – Transformasi Digital untuk Sumber Daya Sekolah

- Operator penerima BOP yang masih baru
- Perangkat penerima BOP masih standar
- Keterlambatan pelaporan
- Sasaran peserta

1. PDM 03B - Transformasi Digital untuk Satuan Pendidik

- Penerima chromebook tidak memiliki akses internet dan Listrik
- Sebagian penerima chromebook berada di remote area sehingga pemanfaatan chromebook untuk pembelajaran masih rendah
- Masih banyak satuan pendidikan yang belum memahami cara aktivasi akun belajar berakibat rendahnya aktivasi akun belajar dan rendahnya pemanfaatan GWFE untuk pembelajaran

1. PDM 04A – Rapor Pendidikan dan PBD untuk Satpen

- Belum memahami 8 Aksi Transformasi Satuan Pendidikan Sekolah Yang Kita Cita-Citakan (SYKCC)
- Belum mengetahui Perbaikan Layanan Berkelanjutan

1. PDM 04B - Rapor Pendidikan dan PBD untuk Pemda dan Publik

- Pemda belum melakukan Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan sesuai dengan Indikator Prioritas pada Rapor Pendidikan Daerah

1. PDM 05 – Kemitraan Daerah

- Masih belum ada Dinas Pendidikan yang melakukan pengangkatan KS/PS melalui Sistem Pengangkatan KSPS
- Satuan pendidikan jenjang PAUD belum 100% membentuk TPPK
- Terdapat beberapa sekolah dapodiknya terkunci pasca PPDB karena kelebihan daya tampung
- Melakukan Pengelolaan Hasil Pemantauan PPDB

1. PDM 06 – AN

- Untuk jenjang SMA sederajat tidak bisa melakukan pemantauan pada jenjang kesetaraan dikarenakan jadwal yang berbeda antara SMA dan kesetaraan paket C
- Pelaksanaan AN jenjang SMP berjalan lancar walaupun masih terdapat beberapa SMP yang belum terpenuhi fasilitas (perangkat komputer, jaringan, dan listrik)
- Beberapa satuan pendidikan melaksanakan AN terlambat dikarenakan SDM pelaksana AN yang tidak hadir tepat waktu

1. PDM 07 – Publikasi dan Komunikasi

- Tidak semua memberikan informasi terkait bahan publikasi/materi konten dari masing-masing PDMnya kepada tim Publikasi
- Menyesuaikan waktu pelaksanaan podcast dengan narasumber

1. PDM 08 – Transformasi Tata Kelola dan Regulasi

- Pemerintah daerah dalam hal ini selaku Dinas Pendidikan belum mensinkronkan antara Permendikbud dan Kebijakan Daerah tentang ATS, APK dan APS tahun 2024

1. PDM 09 – Transisi PAUD-SD

- Masih terdapat banyak miskonsepsi yang terjadi di “lapangan” sehingga banyak terjadi kesalahpahaman terhadap Gerakan Transisi PAUD-SD

1. PDM 10 – Pemulihan Pembelajaran

- Sasaran Peserta yang berubah - ubah karena menyesuaikan dengan sekolah yang harusnya mendapatkan intervensi PDM 10
- Materi literasi dan numerasi kurang tersampaikan karena digabung dengan materi lainnya
- Tidak dapat mengundang seluruh Mahasiswa KM 8 yang dinyatakan lolos
- Kurangnya koordinasi antara PDM 10 dengan PDM yang akan menyampaikan materi terkait digitalisasi sehingga materi disampaikan secara daring

1. PDM 11 - GSS

- Sekolah tidak melaksanakan TKSI

1. PDM 12 - Pendidikan Inklusi

- Dari data masih banyak guru yang belum sampai pada kategori ketuntasan topik pada pelatihan berjenjang pendidikan inklusif tingkat dasar di PMM
- Masih ada beberapa daerah yang belum mengeluarkan SK Pembentukan ULD bidang pendidikan (masih proses), antara lain Kab. Bulungan, Kab Tana Tidung, Kab. Nunukan dan Kab. Malinau
- Masih sedikit guru yang menyelesaikan aksi nyata di pendidikan berjenjang pendidikan inklusif tingkat dasar di PMM

1. PDM 14 - Analisis Data Pendidikan

- Belum ada kesesuaian data dengan standar atau aturan yang telah ditetapkan.

Data pada metabase Uji Petik berubah setiap harinya

Strategi/Tindak Lanjut

1. PDM 01 - PSP

- mengambil sample dari masing-masing jenjang untuk mendapatkan gambaran setiap jenjang
- Lebih rutin berkoordinasi dengan tim pdm-01 pusat untuk mendapatkan pencerahan/solusi

1. PDM 02 - IKM

- Koordinasi dengan PDM 01 terkait pembagian wilayah sasaran
- Memetakan sekolah yang sudah IKM tahun ajaran 2022/2023 dan tahun ajaran 2023/2024
- Mempelajari semua hasil identifikasi pada saat kegiatan refleksi IKM tahap I
- Untuk Narasumber dari pusat, kita menggunakan metode daring untuk menyampaikan materi

1. PDM 03A - Transformasi Digital untuk Satuan Pendidikan

- Melakukan kegiatan bimtek kepada operator BOSP yang bersedia mengimbaskan dan membuat group operator untuk berkoordinasi lebih lanjut
- Memaksimalkan/upgrade perangkat yang ada (jangka pendek), menghimbau satuan pendidikan mengganti perangkat yang sesuai spesifikasi dari aplikasi (jangka panjang)
- Mengadakan kegiatan Pemantauan Pemerintah Daerah Dan Satuan Pendidikan Terkait Pelaporan BOSP Melalui ARKAS Tahap 1 TA 2024 untuk memastikan Satuan Pendidikan melakukan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana BOSP disusun berdasarkan hasil pelaksanaan penatausahaan Dana BOSP dan melaporkan penggunaan dananya melalui ARKAS tepat waktu
- Peserta harus melakukan pengimbasan

1. PDM 03B - Transformasi Digital untuk Satuan Pendidik

- Berkoordinasi kepada daerah untuk dapat memfasilitasi sekolah terkait ketersediaan internet dan listrik
- Melakukan advokasi kepada pemda melalui konsultan untuk bisa memberikan afirmasi kepada penerima chromebook di remote area
- Melakukan kunjungan langsung ke satuan pendidikan sesuai dengan kesanggupan anggaran
- Melakukan kegiatan webinar pemanfaatan akun belajar agar bisa menyasar banyak satuan pendidikan
- Melakukan koordinasi ke PIC terkait akun belajar di dinas pendidikan untuk akselerasi aktivasi akun

belajar

1. PDM 04A – Rapor Pendidikan dan PBD untuk Satpen

- Sosialisasi Sekolah Yang Kita Cita-Citakan
- Sosialisasi Alat Bantu Perbaikan Layanan Berkelanjutan bagi Kepala Sekolah
- Sosialisasi Alat Bantu Perbaikan Layanan Berkelanjutan bagi Pengawas Sekolah

1. PDM 04B - Rapor Pendidikan dan PBD untuk Pemda dan Publik

- Melakukan Koordinasi dan Pendampingan secara lebih Intensif kepada OPD Daerah Bidang Pendidikan yaitu BAPPEDA dan Dinas Pendidikan untuk menyusun SPM Bidang Pendidikan sesuai Indikator Prioritas pada Rapor Pendidikan Daerah

1. PDM 05 – Kemitraan Daerah

- Advokasi ke pemda
- Koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mendorong satuan PAUD dan SD yang belum membentuk TPPK
- Menghubungi dan mendampingi Satuan Pendidikan yang belum membentuk TPPK secara personal melalui telepon/wa
- Koordinasi dengan dinas pendidikan untuk melakukan pengajuan permohonan penambahan daya tampung

1. PDM 06 – AN

- Berkordinasi dengan Dinas Pendidikan bidang PNF untuk kordinasi terkait pelaksanaan AN pada kesetaraan paket
- Untuk tahap selanjutnya sasaran sekolah direncanakan akan ada kesetaraan paket B
- Terdapat Dinas Pendidikan memberikan bantuan berupa chromebook ke beberapa satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan melakukan koordinasi dengan pihak penyedia listrik dan penyedia internet terkait informasi pelaksanaan AN supaya pada pelaksanaan AN tidak terjadi pemeliharaan
- Satuan Pendidikan telah melakukan berbagai cara upaya untuk memenuhi fasilitas pelaksanaan AN seperti menggunakan perangkat komputer/laptop yang dimiliki sekolah (operasional) dan meminjam perangkat komputer/laptop yang dimiliki guru.
- Berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait pelaksanaan AN untuk dapat dilaksanakan tepat waktu dan mengingatkan SDM pelaksana AN untuk bisa hadir tepat waktu sesuai ketentuan

1. PDM 07 – Publikasi dan Komunikasi

- Mencari materi konten / bahan publikasi melalui WA Grub PIC PDM 07 dan Sosial media Setdijen Paud Dasmen
- Menginformasikan kepada seluruh PDM baik secara langsung maupun melalui WA Grub untuk dapat menginformasikan kepada PDM 07 jika memiliki bahan publikasi/materi konten yang perlu dipublikasikan
- Selalu berkoordinasi dengan narasumber untuk podcast

1. PDM 08 –

- Menyampaikan Kepada Dinas Pendidikan tentang Permendikbud tentang wajar 13 tahun 2024 melalui perwalian ke Dinas Pendidikan

1. PDM 09 – Transisi PAUD SD

- Mengedukasi satuan pendidikan terkait dengan Gerakan Transisi PAUD-SD
- Mengedukasi satuan pendidikan terkait dengan alur penguatan perubahan pembelajaran
- Kembali berulang mengadvokasi Dinas Pendidikan, Pokja Bunda PAUD, Mitra, Forum Komunikasi PAUD-SD terkait dengan Gerakan Transisi PAUD-SD serta terkait dengan alur penguatan perubahan pembelajaran

1. PDM 10 – Pemulihan Pembelajaran

- K oordinasi dengan Pimpinan agar menyesuaikan peserta dengan sasaran PDM 10 yang belum di intervensi (memperlihatkan Data)

- Memberikan materi berupa link , menyampaikan materi yang esensial untuk diketahui peserta
- Melakukan kegiatan pembekalan tambahan secara daring dengan melibatkan PDM lain terkait digitalisasi
- Pembekalan secara daring

1. PDM 11 – Gerakan Sekolah Sehat

- Mengadvokasi sekolah pentingnya dan manfaat pelaksanaan TKSI

1. PDM 12 – Pendidikan Inklusi

- Membuat Surat edaran ke Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan terkait pelatihan berjenjang pendidikan inklusif tingkat dasar melalui PMM
- Membuat surat edaran ke dinas pendidikan terkait pembentukan ULD bidang pendidikan
- Terkait SK ULD yang belum terbit maka akan terus dilakukan komunikasi intensif ke pemda melalui perwalian daerah pdm 12 upt
- Berkoordinasi ke pemda untuk mendorong guru-guru mengikuti dan menyelesaikan topik pendidikan berjenjang pendidikan inklusif tingkat dasar di PMM

1. PDM 14 – Analisis Data Pendidikan

- UPT dan Dinas Pendidikan membantu Satuan Pendidikan yang belum Sinkronisasi
- Saat akan turun lapangan menggunakan data terupdate

[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara

[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara

Progress/Kegiatan

Capaian untuk sakip 2024 baru dapat diketahui setelah dilakukan evaluasi oleh unit utama dan inspektorat yakni pada akhir tahun 2024. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendukung ketercapaian target sakip diantaranya:

1. Menyusun laporan kinerja 2023 diawal tahun 2024
2. Menyusun perjanjian kinerja 2024
3. Menyusun rencana aksi atas perjanjian kinerja 2024
4. Melakukan rapat evaluasi TW 2 terkait kinerja lembaga
5. Melakukan tindak lanjut terkait LHE sakip 2023
6. Melakukan revaluasi renstra
7. Persiapan evaluasi sakip 2024

Kendala/Permasalahan

1. Program dan kegiatan yang begitu banyak di tahun 2024 membuat tim Sakip juga harus tersibukkan dengan kegiatan-kegiatan tersebut, sehingga kurang fokus pada pemenuhan dokumen sakip.
2. Terjadinya maintenance terhadap beberapa aplikasi termasuk aplikasi Spasikita yang merupakan aplikasi penunjang Sakip.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Memaksimalkan tim yang ada
2. Melakukan pemetaan dokumen sakip secara manual

[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara

[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara

Progress/Kegiatan

Sama dengan IKK yang lain, kinerja anggaran juga ditergetkan akan tercapai pada akhir periode anggaran sehingga akan dilaporkan nilai capaiannya pada akhir tahun 2024. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan untuk ketercapaian target kinerja anggaran diantaranya:

1. Melakukan pemantauan nilai IKPA secara berkala
2. Menyusun laporan capaian output bulanan
3. Mengikuti evaluasi IKPA dan NKA bersama biro perencanaan Kemdikbudristek
4. Mengikuti evaluasi IKPA bersama Kanwil DJPB Kaltara
5. Menyusun RPD Halaman III Dipa Triwulan Ke 3

Kendala/Permasalahan

1. Terjadinya keterlambatan proses lelang pengadaan konstruksi Aula akibat aplikasi LPSE down dampak dari Pusat Data Nasional yang *dihacker*
2. Akibat dari down nya LPSE yang lama perbaikannya tidak menentu akhirnya RPD belanja modal di bulan agustus dan september dibuat sebesar Rp. 0. Hal ini dapat mengakibatkan tingginya deviasi jika ternyata LPSE membaik lebih awal.
3. Masih terdapat blokir anggaran AA di belanja barang. Hal ini juga dapat menurunkan nilai serapan anggaran jika blokir sudah terbuka.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melakukan koordinasi secara intensif dengan biro umum UKPBJ Kemdikbudristek
2. Mengupayakan tidak ada deviasi di belanja lainnya
3. Memaksimalkan serapan anggaran belanja barang untuk menutupi tambahan anggaran setelah buka blokir

C. Capaian Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
[DI.6397.QDB.750] Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	751	592	159	Rp7.826.895.000	Rp6.050.441.142	Rp1.776.453.858
[DI.6397.QDB.850] Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	631	575	56	Rp125.260.000	Rp112.755.000	Rp12.505.000
[WA.2005.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	1	1	0	Rp10.000.000	Rp0	Rp10.000.000
[WA.2005.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	1	0	Rp468.700.000	Rp222.612.070	Rp246.087.930
[WA.2005.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	0	Rp5.945.946.000	Rp4.841.775.916	Rp1.104.170.084
[WA.2005.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	0	Rp439.977.000	Rp0	Rp439.977.000

Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
[WA.2005.EBB.971] Layanan Prasarana Internal	Unit	1	1	0	Rp4.379.000.000	Rp2.275.254.247	Rp2.103.745.753
Total Anggaran					Rp19.195.778.000	Rp13.502.838.375	Rp5.692.939.625

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Upayakan agar terus mengawal objektif masing-masing PDM, jangan sampai kegiatan yang telah dilaksanakan tidak berdampak terhadap objektif masing-masing PDM.
2. Maksimalkan penggunaan media yang ada untuk mengurangi dampak masalah kekurangan anggaran.
3. Lakukan koordinasi yang baik dengan semua tim yang terlibat dalam SAKIP dan lakukan pembagian tugas yang merata agar tidak memberatkan salah satu tim.


 Tanjung Selor, 31 Oktober 2024
 Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara,

 Andrianus Hendro Triatmoko



**Laporan Kinerja Triwulan 4
BPMP Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2024**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada BPMP Provinsi Kalimantan Utara selama triwulan 4 tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen				
[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	3.92	%	3.92	1.41
[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	100	%	100	100
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara				
[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	A	Predikat	A	A
[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	96.36	Nilai	96.36	97.94

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen

[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya

Progress/Kegiatan

IKK 1.1 tahun 2024 untuk jenjang PAUD Dikmas presentasi ketercapaiannya yaitu 1,41 dari target 3,92. Untuk mendukung ketercapaian IKK 1.1 maka BPMP Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya:

1. PDM 1 (Pendampingan dan Monitoring Pengimbasan dan Kontributor Praktik Baik di PMM)
2. PDM 1 (Kunjungan Lapangan dan Wawancara Observasi terkait BOSP Kinerja, Adaptasi Kurikulum dan Pendampingan Daerah dalam Fasilitasi Kombel)
3. PDM 1 (Refleksi Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak oleh Pemerintah Daerah)
4. PDM 1 (Visitasi terkait Pengimbasan PMM dan Non PMM UPT)
5. PDM 2 (Melakukan Pendampingan bagi Sekolah Pelaksana Kurikulum Merdeka yang Materinya didasarkan pada Hasil Refleksi Pelaksanaan IKM Tahun Ajaran 2023/2024)
6. PDM 2 (Melaksanakan Kegiatan Survey Persepsi Orang Tua Mengenai Kurikulum Merdeka)



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

7. PDM 2 (Melaksanakan Kegiatan Survey Persepsi Kurikulum Merdeka)
8. PDM 2 (Refleksi IKM Tahap 2)
9. PDM 3A (Telah melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Satuan Pendidikan Terkait fitur Rencana Belanja Integrasi ARKAS-SIPLah)
10. PDM 3A (Telah melaksanakan kegiatan Pemantauan Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan Terkait Pelaporan BOSP melalui ARKAS Tahap 1 TA 2024)
11. PDM 3A (Bimtek Pemerintah Daerah terkait Integrasi Markas-SIPD Modul Pelaporan)
12. PDM 3A (Pendampingan Kepada Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan yang memiliki komunitas SIAR)
13. PDM 3A (Advokasi dan pemantauan Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terkait perencanaan penggunaan BOSP pada T-1)
14. PDM 3B (Telah melaksanakan webinar optimatilisasi chromebook dan belajar id)
15. PDM 3B (Melaksanakan rapat koordinasi pemantik daerah)
16. PDM 3B (Telah dilaksanakan webinar OCB series 3 tentang optimalisasi aktivasi akun belajar id)
17. PDM 3B (webinar OCB series 3 tentang optimalisasi aktivasi akun belajar id series 4)
18. PDM 3B (Supervisi optimalisasi digitalisasi pembelajaran)
19. PDM 4A (Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Hasil Implementasi Transformasi Satuan Pendidikan)
20. PDM 4A (Penyusunan Cerita Praktik Baik Satuan Pendidikan mengimplementasikan PBD dalam rangka Transformasi Satuan Pendidikan)
21. PDM 4B (Melakukan Pendampingan Perencanaan Pemda Terkait SPM Pendidikan Oleh UPT)
22. PDM 4B (Melaksanakan Rakortek Kabupaten / Kota BAPPEDA Provinsi Oleh UPT Tahun 2024)
23. PDM 4B (Melaksanakan Pendampingan Realisasi SPM Pendidikan Semester I oleh UPT)
24. PDM 4B (Melaksanakan Pendampingan Perencanaan Penganggaran Pemda Terkait SPM Pendidikan Oleh UPT)
25. PDM 4B (Menyusun Laporan Kegiatan Pendampingan Realisasi SPM Pendidikan Semester I oleh UPT)
26. PDM 4B (Sosialisasi Secara personal ke BAPPEDA dan Disdik terkait Dasbor Evaluasi Penerapan Anggaran SPM secara Online)
27. PDM 5 (Telah melaksanakan Pengelolaan Hasil Pemantauan PPDB)
28. PDM 5 (Refleksi dan Penyusunan Rekomendasi Pelaksanaan PPDB)
29. PDM 5 (Refleksi dan Evaluasi Pelaksanaan PPDB)
30. PDM 6 (Telah melaksanakan kegiatan Monitoring dan Advokasi Persiapan Pelaksanaan Asesmen Nasional Tahun 2024 jenjang SD Sederajat)
31. PDM 6 (Pelaksanaan Pemantauan/Monitoring Pelaksanaan AN/Sulingjar Tahun 2024 jenjang SD Sederajat)
32. PDM 6 (Pengolahan dan Analisis Data Hasil MonAd AN dan Monev Pelaksanaan AN)
33. PDM 7 (Memproduksi Konten Program Prioritas di sosmed dan laman Lembaga)
34. PDM 7 (Telah melaksanakan Kegiatan penyusunan alur cerita /substansi konten program prioritas)
35. PDM 7 (Melaksanakan survei persepsi masyarakat)
36. PDM 8 (Pelaksanaan Survey Dalam Rangka Kesiapan PEMDA Terhadap Kebijakan Wajar 13 Tahun)
37. PDM 8 (Melakukan advokasi terkait regulasi yang akan dikeluarkan Pemda dalam rangka kesiapan terhadap wajar 13 tahun)
38. PDM 9 (Mengadakan seri webinar guna memfasilitasi Guru yang menjadi pelaksana kegiatan magang terkait dengan Gerakan Transisi PAUD-SD (sebagai hasil pengimbasan pelaksanaan kegiatan)
39. PDM 9 (Tindaklanjuti RTL Bimtek UPT BPMP/BBPMP Untuk Penguatan Perubahan Pembelajaran)
40. PDM 10 (Melaksanakan kegiatan FKK Kampus Mengajar)
41. PDM 10 (Mengikuti Puncak acara Gerak Mulia)
42. PDM 10 (Monitoring dan Evaluasi Pemulihan Pembelajaran)
43. PDM 10 (FKK Kampus Mengajar Angkatan 8)
44. PDM 10 (Supervisi Pemulihan Pembelajaran Tahap 2)
45. PDM 11 (Pendampingan pelaksanaan TKS)
46. PDM 11 (Koordinasi dengan Sekolah Binaan terkait pembiasaan hidup sehat melalui 5S)
47. PDM 11 (Refleksi dan evaluasi implementasi gerakan sekolah sehat di satuan pendidikan binaan)
48. PDM 11 (Webinar Sekolah Sehat)
49. PDM 12 (Koordinasi Terkait Penguatan Instrumen Pengukuran Kapasitas Satuan Pendidikan terkait Pendidikan Inklusif secara daring bersama PDM-12 Pusat)
50. PDM 12 (Kegiatan Pengisian Instrumen Pengukuran Kapasitas Satuan Pendidikan terkait Pendidikan



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Inklusif)

51. PDM 12 (Sosialisasi untuk Akses Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif tingkat dasar melalui PMM)

Kendala/Permasalahan

Kendala/Permasalahan

1. PDM 1 - PSP

- Guru yang belum terbiasa memanfaatkan PMM
- Pengimbasan yang tidak sesuai dengan pedoman yang berlaku
- Keberlanjutan Program Sekolah Penggerak oleh pemerintah daerah
- Sekolah Penggerak belum membudayakan diri untuk melakukan pengimbasan

2. PDM 2 - IKM

- Waktu yang diberikan untuk mengisi link survey persepsi kurikulum merdeka terlalu singkat
- Satuan Pendidikan Belum melakukan Refleksi Pelaksanaan IKM Tahun Ajaran 2023/2024
- Anggaran terbatas untuk melaksanakan Refleksi IKM Tahap 2

3. PDM 03A - Transformasi Digital untuk Sumber Daya Sekolah

- Sasaran peserta
- Operator penerima BOP yang masih baru
- Keterlambatan pelaporan penggunaan dana BOSP

4. PDM 03B - Transformasi Digital untuk Satuan Pendidik

- Tidak semua satuan pendidikan dapat hadir
- Pemantik tidak melaksanakan tindak lanjut hasil rakor di pusat
- Kegiatan tidak terlaksana karena perubahan kebijakan anggaran

5. PDM 04A - Rapor Pendidikan dan PBD untuk Satpen

- Satuan Pendidikan belum memahami 8 Aksi Transformasi Satuan Pendidikan
- Belum memahami konsep Sekolah Yang Kita Cita-Citakan (SYKCC)
- Satuan Pendidikan belum memahami Alur Penyusunan Cerita Praktik Baik terkait Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data

6. PDM 04B - Rapor Pendidikan dan PBD untuk Pemda dan Publik

- Pemda belum melakukan Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan sesuai dengan Indikator Prioritas pada Rapor Pendidikan Daerah

7. PDM 05 - Kemitraan Daerah

- Kegiatan tidak terlaksana karena tidak dianggarkan
- Tim PPDB Dinas Pendidikan berhalangan hadir

8. PDM 06 - AN

- Menentukan sasaran untuk kegiatan pelaksanaan monitoring pelaksanaan AN jenjang SD karena untuk jenjang SD akan dilaksanakan secara 2 gelombang sehingga perlu menyesuaikan dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan Lembaga
- Beberapa petugas yang lama dalam menyelesaikan penginputan instrumen secara online

9. PDM 07 - Publikasi dan Komunikasi



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

- Tidak semua memberikan informasi terkait bahan publikasi/materi konten dari masing-masing PDMnya kepada tim Publikasi

10. PDM 08 – Transformasi Tata Kelola dan Regulasi

- Pemerintah daerah masih belum mempersiapkan terkait Kebijakan Wajar 13 Tahun

11. PDM 09 – Transisi PAUD-SD

- Kehadiran Peserta dalam kegiatan daring
- Ketersampaian Advokasi yang dimaksudkan
- Masih terdapat banyak miskonsepsi yang terjadi di “lapangan” sehingga banyak terjadi kesalahpahaman terhadap Gerakan Transisi PAUD-SD

12. PDM 10 – Pemulihan Pembelajaran

- Sulitnya mengatur jadwal FKK yang bersamaan dengan kegiatan PDM lain
- Rata - rata sekolah sasaran berada di remote area
- Banyak sekolah yang belum bisa diintervensi karena jarak dan anggaran

13. PDM 11 – GSS

- Pembiasaan hidup sehat melalui 5 S di sekolah belum maksimal pelaksanaannya
- Terdapat beberapa sekolah yang tidak melaksanakan program
- Program Sekolah Sehat tidak tercapai maksimal
- Data ketercapaian program-program Sekolah Sehat tidak memenuhi batas minimal sehingga menyulitkan untuk mengukur ketercapaian program

14. PDM 12 – Pendidikan Inklusi

- Belum adanya Instrumen Pengukuran Peningkatan Kapasitas Satuan Pendidikan Terkait Pendidikan Inklusif
- Masih sedikit guru yang menyelesaikan aksi nyata di pendidikan berjenjang pendidikan inklusif tingkat dasar di PMM
- Masih banyak Kepsek dan Guru yang belum mengetahui tentang Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif melalui PMM sehingga Capaian Aksesnya masih sangat kurang

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi/Tindak Lanjut

1. PDM 1 – PSP

- Mendorong guru memanfaatkan PMM secara berkala
- Berkomunikasi secara rutin dengan sekolah imbas untuk memastikan sekolah melaksanakan pengimbasan sesuai dengan pedoman yang berlaku
- Advokasi secara kontinu kepada pemda untuk melanjutkan Program Sekolah Penggerak
- Advokasi ke sekolah untuk berbagi ke sekolah lain

2. PDM 2 – IKM

- Selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk membantu berkoordinasi dengan sasaran survey tersebut.
- Melakukan advokasi kepada Kepala Sekolah untuk melakukan Refleksi Pelaksanaan IKM Tahun Ajaran 2023/2024
- Kegiatan digabung dengan Refleksi Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak oleh Pemerintah Daerah (PDM 01)



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

3. PDM 03A – Transformasi Digital untuk Sumber Daya Sekolah

- Peserta harus melakukan pengimbasan
- Melakukan kegiatan bimtek kepada operator BOSP yang bersedia mengimbasikan dan membuat group operator untuk berkoordinasi lebih lanjut
- Mengadakan kegiatan Pemantauan Pemerintah Daerah Dan Satuan Pendidikan Terkait Pelaporan BOSP Melalui ARKAS Tahap 1 TA 2024 untuk memastikan Satuan Pendidikan melakukan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana BOSP disusun berdasarkan hasil pelaksanaan penatausahaan Dana BOSP dan melaporkan penggunaan dananya melalui ARKAS tepat waktu

4. PDM 03B - Transformasi Digital untuk Satuan Pendidik

- Mengkonfirmasi ke pemantik daerah terkait tindak lanjut yang telah mereka rencanakan
- Membuat grup pemantik bersama daerah
- berkoordinasi dengan PPK
- Perubahan bentuk kegiatan

5. PDM 04A – Rapor Pendidikan dan PBD untuk Satpen

- Memberikan Pemahaman kepada Satuan Pendidikan terkait 8 Aksi Transformasi Satuan Pendidikan
- Sosialisasi Alat Bantu Peningkatan Layanan Berkelanjutan untuk Kepala Sekolah
- Sosialisasi Alat Bantu Peningkatan Layanan Berkelanjutan untuk Pengawas Sekolah
- Sosialisasi Alur Penyusunan Cerita Praktik Baik terkait Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data

6. PDM 04B - Rapor Pendidikan dan PBD untuk Pemda dan Publik

- Melakukan Pendampingan secara lebih Intensif kepada OPD Daerah Bidang Pendidikan yaitu BAPPEDA dan Dinas Pendidikan untuk menyusun SPM Bidang Pendidikan sesuai Indikator Prioritas pada Rapor Pendidikan Daerah sesuai dengan Rekomendasi pada Dasbor Evaluasi SPM Pendidikan RAPBD 2025

7. PDM 05 – Kemitraan Daerah

- Digabung dengan kegiatan PDM 01
- Digantikan dengan staf lain dari Dinas Pendidikan

8. PDM 06 – AN

- Mencari sekolah yang pelaksanaan ANnya di gelombang 1, namun tetap berkoordinasi dengan dinas untuk mengetahui pelaksanaan AN di gelombang 2 agar dapat mengetahui aktivitas atau kendala yang terjadi pada pelaksanaan gelombang 2
- Berkordinasi dengan petugas pelaksana MonAd dan Monev untuk dapat menyelesaikan pengiputan instrumen secara online

9. PDM 07 – Publikasi dan Komunikasi

- Mencari materi konten / bahan publikasi melalui WA Grub PIC PDM 07 dan Sosial media Setdijen Paud Dasmen
- Menginformasikan kepada seluruh PDM baik secara langsung maupun melalui WA Grub untuk dapat menginformasikan kepada PDM 07 jika memiliki bahan publikasi/materi konten yang perlu dipublikasikan

10. PDM 08 – Transformasi Tata Kelola dan Regulasi

- Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait kesiapan Pemda dalam Kebijakan Wajar 13 Tahun

11. PDM 09 – Transisi PAUD-SD



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Secara intens dengan Dinas Terkait
- Memberikan pertanyaan pemantik pada saat pelaksanaan kegiatan guna mendapatkan *feedback* kegiatan
- Menedukasi satuan pendidikan terkait dengan Gerakan Transisi PAUD-SD
- Menedukasi satuan pendidikan terkait dengan alur penguatan perubahan pembelajaran
- Kembali berulang mengadvokasi Dinas Pendidikan, Pokja Bunda PAUD, Mitra, Forum Komunikasi PAUD-SD terkait dengan Gerakan Transisi PAUD-SD serta terkait dengan alur penguatan perubahan pembelajaran

12. PDM 10 – Pemulihan Pembelajaran

- Berkoordinasi dan mengatur jadwal kegiatan dengan atasan agar jadwal tidak bersamaan dengan kegiatan PDM Lain
- Memetakan sekolah yang diintervensi bisa dijangkau
- Bekerjasama dengan Agen Penggerak Transformasi Pendidikan

13. PDM 11 – GSS

- Koordinasi dengan Sekolah Binaan secara intens dan koordinasi Dengan Dinas Pendidikan agar mendorong satuan pendidikan melaksanakan pembiasaan hidup sehat melalui 5 S
- Koordinasi dengan Sekolah Binaan secara intens dan koordinasi Dengan Dinas Pendidikan agar mendorong satuan pendidikan melaksanakan program-program Sekolah Sehat

14. PDM 12 – Pendidikan Inklusi

- Koordinasi Terkait Penguatan Instrumen Pengukuran Kapasitas Satuan Pendidikan terkait Pendidikan Inklusif secara daring bersama PDM-12 Pusat
- Kegiatan Pengisian Instrumen Pengukuran Kapasitas Satuan Pendidikan terkait Pendidikan Inklusif
- Berkoordinasi ke pemda untuk mendorong guru-guru mengikuti dan menyelesaikan topik pendidikan berjenjang pendidikan inklusif tingkat dasar di PMM

[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen

[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)

Progress/Kegiatan

IKK 1.2 tahun 2024 presentase ketercapaiannya yaitu 100 dari target 100. Untuk mendukung ketercapaian IKK 1.2 maka BPMP Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

1. PDM 1 (Pendampingan dan Monitoring Pengimbasan dan Kontributor Praktik Baik di PMM)
2. PDM 1 (Kunjungan Lapangan dan Wawancara Observasi terkait BOSP Kinerja, Adaptasi Kurikulum dan Pendampingan Daerah dalam Fasilitasi Kombel)
3. PDM 1 (Refleksi Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak oleh Pemerintah Daerah)
4. PDM 1 (Visitasi terkait Pengimbasan PMM dan Non PMM UPT)
5. PDM 2 (Melakukan Pendampingan bagi Sekolah Pelaksana Kurikulum Merdeka yang Materinya didasarkan pada Hasil Refleksi Pelaksanaan IKM Tahun Ajaran 2023/2024)
6. PDM 2 (Melaksanakan Kegiatan Survey Persepsi Orang Tua Mengenai Kurikulum Merdeka)
7. PDM 2 (Melaksanakan Kegiatan Survey Persepsi Kurikulum Merdeka)
8. PDM 2 (Refleksi IKM Tahap 2)
9. PDM 3A (Telah melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Satuan Pendidikan Terkait fitur Rencana Belanja Integrasi ARKAS-SIPLah)
10. PDM 3A (Telah melaksanakan kegiatan Pemantauan Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan Terkait Pelaporan BOSP melalui ARKAS Tahap 1 TA 2024)
11. PDM 3A (Bimtek Pemerintah Daerah terkait Integrasi Markas-SIPD Modul Pelaporan)
12. PDM 3A (Pendampingan Kepada Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan yang memiliki komunitas



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

SIAR)

13. PDM 3A (Advokasi dan pemantauan Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terkait perencanaan penggunaan BOSP pada T-1)
14. PDM 3B (Telah melaksanakan webinar optimalisasi chromebook dan belajar id)
15. PDM 3B (Melaksanakan rapat koordinasi pemantik daerah)
16. PDM 3B (Telah dilaksanakan webinar OCB series 3 tentang optimalisasi aktivasi akun belajar id)
17. PDM 3B (webinar OCB series 3 tentang optimalisasi aktivasi akun belajar id series 4)
18. PDM 3B (Supervisi optimalisasi digitalisasi pembelajaran)
19. PDM 4A (Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Hasil Implementasi Transformasi Satuan Pendidikan)
20. PDM 4A (Penyusunan Cerita Praktik Baik Satuan Pendidikan mengimplementasikan PBD dalam rangka Transformasi Satuan Pendidikan)
21. PDM 4B (Melakukan Pendampingan Perencanaan Pemda Terkait SPM Pendidikan Oleh UPT)
22. PDM 4B (Melaksanakan Rakortek Kabupaten / Kota BAPPEDA Provinsi Oleh UPT Tahun 2024)
23. PDM 4B (Melaksanakan Pendampingan Realisasi SPM Pendidikan Semester I oleh UPT)
24. PDM 4B (Melaksanakan Pendampingan Perencanaan Penganggaran Pemda Terkait SPM Pendidikan Oleh UPT)
25. PDM 4B (Menyusun Laporan Kegiatan Pendampingan Realisasi SPM Pendidikan Semester I oleh UPT)
26. PDM 4B (Sosialisasi Secara personal ke BAPPEDA dan Disdik terkait Dasbor Evaluasi Penerapan Anggaran SPM secara Online)
27. PDM 5 (Telah melaksanakan Pengelolaan Hasil Pemantauan PPDB)
28. PDM 5 (Refleksi dan Penyusunan Rekomendasi Pelaksanaan PPDB)
29. PDM 5 (Refleksi dan Evaluasi Pelaksanaan PPDB)
30. PDM 6 (Telah melaksanakan kegiatan Monitoring dan Advokasi Persiapan Pelaksanaan Asesmen Nasional Tahun 2024 jenjang SD Sederajat)
31. PDM 6 (Pelaksanaan Pemantauan/Monitoring Pelaksanaan AN/Sulingjar Tahun 2024 jenjang SD Sederajat)
32. PDM 6 (Pengolahan dan Analisis Data Hasil MonAd AN dan Monev Pelaksanaan AN)
33. PDM 7 (Memproduksi Konten Program Prioritas di sosmed dan laman Lembaga)
34. PDM 7 (Telah melaksanakan Kegiatan penyusunan alur cerita /substansi konten program prioritas)
35. PDM 7 (Melaksanakan survei persepsi masyarakat)
36. PDM 8 (Pelaksanaan Survey Dalam Rangka Kesiapan PEMDA Terhadap Kebijakan Wajar 13 Tahun)
37. PDM 8 (Melakukan advokasi terkait regulasi yang akan dikeluarkan Pemda dalam rangka kesiapan terhadap wajar 13 tahun)
38. PDM 9 (Mengadakan seri webinar guna memfasilitasi Guru yang menjadi pelaksana kegiatan magang terkait dengan Gerakan Transisi PAUD-SD (sebagai hasil pengimbasan pelaksanaan kegiatan)
39. PDM 9 (Tindaklanjuti RTL Bimtek UPT BPMP/BBPMP Untuk Penguatan Perubahan Pembelajaran)
40. PDM 10 (Melaksanakan kegiatan FKK Kampus Mengajar)
41. PDM 10 (Mengikuti Puncak acara Gerak Mulia)
42. PDM 10 (Monitoring dan Evaluasi Pemulihan Pembelajaran)
43. PDM 10 (FKK Kampus Mengajar Angkatan 8)
44. PDM 10 (Supervisi Pemulihan Pembelajaran Tahap 2)
45. PDM 11 (Pendampingan pelaksanaan TKSI)
46. PDM 11 (Koordinasi dengan Sekolah Binaan terkait pembiasaan hidup sehat melalui 5S)
47. PDM 11 (Refleksi dan evaluasi implementasi gerakan sekolah sehat di satuan pendidikan binaan)
48. PDM 11 (Webinar Sekolah Sehat)
49. PDM 12 (Koordinasi Terkait Penguatan Instrumen Pengukuran Kapasitas Satuan Pendidikan terkait Pendidikan Inklusif secara daring bersama PDM-12 Pusat)
50. PDM 12 (Kegiatan Pengisian Instrumen Pengukuran Kapasitas Satuan Pendidikan terkait Pendidikan Inklusif)
51. PDM 12 (Sosialisasi untuk Akses Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif tingkat dasar melalui PMM)

Kendala/Permasalahan

Kendala/Permasalahan

1. PDM 1 - PSP



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Guru yang belum terbiasa memanfaatkan PMM
- Pengimbasan yang tidak sesuai dengan pedoman yang berlaku
- Keberlanjutan Program Sekolah Penggerak oleh pemerintah daerah
- Sekolah Penggerak belum membudayakan diri untuk melakukan pengimbasan

2. PDM 2 – IKM

- Waktu yang diberikan untuk mengisi link survey persepsi kurikulum merdeka terlalu singkat
- Satuan Pendidikan Belum melakukan Refleksi Pelaksanaan IKM Tahun Ajaran 2023/2024
- Anggaran terbatas untuk melaksanakan Refleksi IKM Tahap 2

3. PDM 03A – Transformasi Digital untuk Sumber Daya Sekolah

- Sasaran peserta
- Operator penerima BOP yang masih baru
- Keterlambatan pelaporan penggunaan dana BOSP

4. PDM 03B - Transformasi Digital untuk Satuan Pendidik

- Tidak semua satuan pendidikan dapat hadir
- Pemantik tidak melaksanakan tindak lanjut hasil rakor di pusat
- Kegiatan tidak terlaksana karena perubahan kebijakan anggaran

5. PDM 04A – Rapor Pendidikan dan PBD untuk Satpen

- Satuan Pendidikan belum memahami 8 Aksi Transformasi Satuan Pendidikan
- Belum memahami konsep Sekolah Yang Kita Cita-Citakan (SYKCC)
- Satuan Pendidikan belum memahami Alur Penyusunan Cerita Praktik Baik terkait Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data

6. PDM 04B - Rapor Pendidikan dan PBD untuk Pemda dan Publik

- Pemda belum melakukan Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan sesuai dengan Indikator Prioritas pada Rapor Pendidikan Daerah

7. PDM 05 – Kemitraan Daerah

- Kegiatan tidak terlaksana karena tidak dianggarkan
- Tim PPDB Dinas Pendidikan berhalangan hadir

8. PDM 06 – AN

- Menentukan sasaran untuk kegiatan pelaksanaan monitoring pelaksanaan AN jenjang SD karena untuk jenjang SD akan dilaksanakan secara 2 gelombang sehingga perlu menyesuaikan dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan Lembaga
- Beberapa petugas yang lama dalam menyelesaikan penginputan instrumen secara online

9. PDM 07 – Publikasi dan Komunikasi

- Tidak semua memberikan informasi terkait bahan publikasi/materi konten dari masing-masing PDMnya kepada tim Publikasi

10. PDM 08 – Transformasi Tata Kelola dan Regulasi

- Pemerintah daerah masih belum mempersiapkan terkait Kebijakan Wajar 13 Tahun

11. PDM 09 – Transisi PAUD-SD

- Kehadiran Peserta dalam kegiatan daring



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

- Ketersampaian Advokasi yang dimaksudkan
- Masih terdapat banyak miskonsepsi yang terjadi di “lapangan” sehingga banyak terjadi kesalahpahaman terhadap Gerakan Transisi PAUD-SD

12. PDM 10 – Pemulihan Pembelajaran

- Sulitnya mengatur jadwal FKK yang bersamaan dengan kegiatan PDM lain
- Rata - rata sekolah sasaran berada di remote area
- Banyak sekolah yang belum bisa diintervensi karena jarak dan anggaran

13. PDM 11 – GSS

- Pembiasaan hidup sehat melalui 5 S di sekolah belum maksimal pelaksanaannya
- Terdapat beberapa sekolah yang tidak melaksanakan program
- Program Sekolah Sehat tidak tercapai maksimal
- Data ketercapaian program-program Sekolah Sehat tidak memenuhi batas minimal sehingga menyulitkan untuk mengukur ketercapaian program

14. PDM 12 – Pendidikan Inklusi

- Belum adanya Instrumen Pengukuran Peningkatan Kapasitas Satuan Pendidikan Terkait Pendidikan Inklusif
- Masih sedikit guru yang menyelesaikan aksi nyata di pendidikan berjenjang pendidikan inklusif tingkat dasar di PMM
- Masih banyak Kepsek dan Guru yang belum mengetahui tentang Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif melalui PMM sehingga Capaian Aksesnya masih sangat kurang

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi/Tindak Lanjut

1. PDM 1 – PSP

- Mendorong guru memanfaatkan PMM secara berkala
- Berkomunikasi secara rutin dengan sekolah imbas untuk memastikan sekolah melaksanakan pengimbasan sesuai dengan pedoman yang berlaku
- Advokasi secara kontinu kepada pemda untuk melanjutkan Program Sekolah Penggerak
- Advokasi ke sekolah untuk berbagi ke sekolah lain

2. PDM 2 – IKM

- Selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk membantu berkoordinasi dengan sasaran survey tersebut.
- Melakukan advokasi kepada Kepala Sekolah untuk melakukan Refleksi Pelaksanaan IKM Tahun Ajaran 2023/2024
- Kegiatan digabung dengan Refleksi Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak oleh Pemerintah Daerah (PDM 01)

3. PDM 03A – Transformasi Digital untuk Sumber Daya Sekolah

- Peserta harus melakukan pengimbasan
- Melakukan kegiatan bimtek kepada operator BOSP yang bersedia mengimbasikan dan membuat group operator untuk berkoordinasi lebih lanjut
- Mengadakan kegiatan Pemantauan Pemerintah Daerah Dan Satuan Pendidikan Terkait Pelaporan BOSP Melalui ARKAS Tahap 1 TA 2024 untuk memastikan Satuan Pendidikan melakukan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana BOSP disusun berdasarkan hasil pelaksanaan penatausahaan Dana BOSP dan melaporkan penggunaan dananya melalui ARKAS tepat waktu



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

4. PDM 03B - Transformasi Digital untuk Satuan Pendidik

- Mengkonfirmasi ke pemantik daerah terkait tindak lanjut yang telah mereka rencanakan
- Membuat grup pemantik bersama daerah
- berkoordinasi dengan PPK
- Perubahan bentuk kegiatan

5. PDM 04A – Rapor Pendidikan dan PBD untuk Satpen

- Memberikan Pemahaman kepada Satuan Pendidikan terkait 8 Aksi Transformasi Satuan Pendidikan
- Sosialisasi Alat Bantu Peningkatan Layanan Berkelanjutan untuk Kepala Sekolah
- Sosialisasi Alat Bantu Peningkatan Layanan Berkelanjutan untuk Pengawas Sekolah
- Sosialisasi Alur Penyusunan Cerita Praktik Baik terkait Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data

6. PDM 04B - Rapor Pendidikan dan PBD untuk Pemda dan Publik

- Melakukan Pendampingan secara lebih Intensif kepada OPD Daerah Bidang Pendidikan yaitu BAPPEDA dan Dinas Pendidikan untuk menyusun SPM Bidang Pendidikan sesuai Indikator Prioritas pada Rapor Pendidikan Daerah sesuai dengan Rekomendasi pada Dasbor Evaluasi SPM Pendidikan RAPBD 2025

7. PDM 05 – Kemitraan Daerah

- Digabung dengan kegiatan PDM 01
- Digantikan dengan staf lain dari Dinas Pendidikan

8. PDM 06 – AN

- Mencari sekolah yang pelaksanaan ANnya di gelombang 1, namun tetap berkoordinasi dengan dinas untuk mengetahui pelaksanaan AN di gelombang 2 agar dapat mengetahui aktivitas atau kendala yang terjadi pada pelaksanaan gelombang 2
- Berkordinasi dengan petugas pelaksana MonAd dan Monev untuk dapat menyelesaikan pengiputan instrumen secara online

9. PDM 07 – Publikasi dan Komunikasi

- Mencari materi konten / bahan publikasi melalui WA Grub PIC PDM 07 dan Sosial media Setdijen Paud Dasmen
- Menginformasikan kepada seluruh PDM baik secara langsung maupun melalui WA Grub untuk dapat menginformasikan kepada PDM 07 jika memiliki bahan publikasi/materi konten yang perlu dipublikasikan

10. PDM 08 – Transformasi Tata Kelola dan Regulasi

- Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait kesiapan Pemda dalam Kebijakan Wajar 13 Tahun

11. PDM 09 – Transisi PAUD-SD

- Secara intens dengan Dinas Terkait
- Memberikan pertanyaan pemantik pada saat pelaksanaan kegiatan guna mendapatkan *feedback* kegiatan
- Mengedukasi satuan pendidikan terkait dengan Gerakan Transisi PAUD-SD
- Mengedukasi satuan pendidikan terkait dengan alur penguatan perubahan pembelajaran
- Kembali berulang mengadvokasi Dinas Pendidikan, Pokja Bunda PAUD, Mitra, Forum Komunikasi PAUD-SD terkait dengan Gerakan Transisi PAUD-SD serta terkait dengan alur penguatan perubahan pembelajaran



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Balai
Sertifikasi
Elektronik

12. PDM 10 – Pemulihan Pembelajaran

- Berkoordinasi dan mengatur jadwal kegiatan dengan atasan agar jadwal tidak bersamaan dengan kegiatan PDM Lain
- Memetakan sekolah yang diintervensi bisa dijangkau
- Bekerjasama dengan Agen Penggerak Transformasi Pendidikan

13. PDM 11 – GSS

- Koordinasi dengan Sekolah Binaan secara intens dan koordinasi Dengan Dinas Pendidikan agar mendorong satuan pendidikan melaksanakan pembiasaan hidup sehat melalui 5 S
- Koordinasi dengan Sekolah Binaan secara intens dan koordinasi Dengan Dinas Pendidikan agar mendorong satuan pendidikan melaksanakan program-program Sekolah Sehat

14. PDM 12 – Pendidikan Inklusi

- Koordinasi Terkait Penguatan Instrumen Pengukuran Kapasitas Satuan Pendidikan terkait Pendidikan Inklusif secara daring bersama PDM-12 Pusat
- Kegiatan Pengisian Instrumen Pengukuran Kapasitas Satuan Pendidikan terkait Pendidikan Inklusif
- Berkoordinasi ke pemda untuk mendorong guru-guru mengikuti dan menyelesaikan topik pendidikan berjenjang pendidikan inklusif tingkat dasar di PMM

[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara **[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara**

Progress/Kegiatan

Capaian untuk sakip 2024 adalah sebesar 85.6 dengan predikat A. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendukung ketercapaian target sakip diantaranya:

1. Menyusun laporan kinerja 2023 diawal tahun 2024
2. Menyusun perjanjian kinerja 2024
3. Menyusun rencana aksi atas perjanjian kinerja 2024
4. Melakukan rapat evaluasi TW 2 terkait kinerja lembaga
5. Melakukan tindak lanjut terkait LHE sakip 2023
6. Melakukan revaluasi renstra
7. Persiapan evaluasi sakip 2024

Kendala/Permasalahan

Program dan kegiatan yang begitu banyak di tahun 2024 membuat tim Sakip juga harus tersibukkan dengan kegiatan-kegiatan tersebut, sehingga kurang fokus pada pemenuhan dokumen sakip.

Terjadinya maintenance terhadap beberapa aplikasi termasuk aplikasi Spasikita yang merupakan aplikasi penunjang Sakip.

Strategi/Tindak Lanjut

Memaksimalkan tim yang ada

Melakukan pemetaan dokumen sakip secara manual

[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara

Progress/Kegiatan

Capaian kinerja anggaran adalah sebesar 97,94. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan untuk ketercapaian target kinerja anggaran diantaranya:

1. Melakukan pemantauan nilai IKPA secara berkala
2. Menyusun laporan capaian output bulanan
3. Mengikuti evaluasi IKPA dan NKA bersama biro perencanaan Kemdikbudristek
4. Mengikuti evaluasi IKPA bersama Kanwil DJPB Kaltara
5. Menyusun RPD Halaman III Dipa Triwulan Ke 3 dan 4

Kendala/Permasalahan

Terjadinya keterlambatan proses lelang pengadaan konstruksi Aula akibat aplikasi LPSE down dampak dari Pusat Data Nasional yang di hacker

Akibat dari down nya LPSE yang lama perbaikannya tidak menentu akhirnya RPD belanja modal di bulan agustus dan september dibuat sebesar Rp. 0. Hal ini dapat mengakibatkan tingginya deviasi jika ternyata LPSE membaik lebih awal.

Masih terdapat blokir anggaran AA di belanja barang. Hal ini juga dapat menurunkan nilai serapan anggaran jika blokir sudah terbuka.

Strategi/Tindak Lanjut

Melakukan koordinasi secara intensif dengan biro umum UKPBJ Kemdikbudristek

Mengupayakan tidak ada deviasi di belanja lainnya

Memaksimalkan serapan anggaran belanja barang untuk menutupi tambahan anggaran setelah buka blokir

C. Capaian Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
[DI.6397.QDB.750] Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	751	751	0	Rp7.826.895.000	Rp7.435.313.793	Rp391.581.207
[DI.6397.QDB.850] Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	631	631	0	Rp125.260.000	Rp125.137.000	Rp123.000
[WA.2005.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	1	1	0	Rp9.260.000	Rp9.236.500	Rp23.500



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR




Balai
Sertifikasi
Elektronik

Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
[WA.2005.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	1	0	Rp452.858.000	Rp373.891.754	Rp78.966.246
[WA.2005.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	0	Rp5.962.528.000	Rp5.936.832.293	Rp25.695.707
[WA.2005.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	0	Rp439.977.000	Rp439.672.200	Rp304.800
[WA.2005.EBB.971] Layanan Prasarana Internal	Unit	1	1	0	Rp4.379.000.000	Rp4.378.616.099	Rp383.901
Total Anggaran					Rp19.195.778.000	Rp18.698.699.639	Rp497.078.361

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Tingkatkan kinerja di tahun 2025 untuk indikator yang belum memenuhi target PK 2024
2. Pertahankan kinerja di tahun 2025 untuk indikator yang telah memenuhi target PK 2024
3. Perkuat Kolaborasi dan kerjasama tim agar target PK 2025 terpenuhi semua
4. Lakukan koordinasi yang baik dengan semua tim yang terlibat dalam SAKIP dan lakukan pembagian tugas yang merata agar tidak memberatkan salah satu tim.

Tanjung Selor, 3 Januari 2025

	<p>Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara</p>
<p>Andrianus Hendro Triatmoko</p>	



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

**Pernyataan Telah Direviu
BPMP Provinsi Kalimantan Utara
Tahun Anggaran 2024**

Kami telah mereviu laporan kinerja BPMP Provinsi Kalimantan Utara untuk tahun anggaran 2024 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen BPMP Provinsi Kalimantan Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Tanjung Selor, 24 Januari 2025
Ketua Tim Reviu,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a final horizontal stroke.

Rizal Faizal Sobari, ST